

LAPORAN KINERJA TAHUNAN

2025

**BIRO KEUANGAN DAN BMN
SEKRETARIAT JENDERAL**

KATA PENGANTAR 2025

**Biro Keuangan dan BMN
Sekretariat Jenderal**



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Biro Keuangan dan BMN Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan ini merupakan hasil kerja keras dan dedikasi dari seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Keuangan dan BMN.

Laporan Kinerja Biro Keuangan dan BMN Tahun 2025 memuat pertanggungjawaban Biro Keuangan dan BMN sebagai salah satu Unit Eselon II di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 menjadi wujud pertanggungjawaban atas kinerja organisasi serta implementasi prinsip *good governance* kepada publik dan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, laporan disusun dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga mampu menjabarkan capaian kinerja secara terperinci.

Laporan Kinerja Keuangan dan BMN Tahun 2025 menyajikan realisasi dan capaian atas target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Laporan ini juga memuat analisis kinerja dan rencana perbaikan guna mendukung pencapaian target kinerja pada tahun 2026, serta menggambarkan keterkaitan antara kinerja dan anggaran sebagai dasar peningkatan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas organisasi.

Penyusunan Laporan Kinerja Biro Keuangan dan BMN Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam hal ini, Biro Keuangan dan BMN mengemban dua sasaran kegiatan yang dikonkretkan dalam tujuh belas indikator kinerja.

Laporan Kinerja Biro Keuangan dan BMN Tahun 2025 menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi Biro Keuangan dan BMN untuk meningkatkan perannya dalam mendukung kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perbaikan kinerja akan terus dilakukan secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi dan individu.

Penyusunan Laporan Kinerja Biro Keuangan dan BMN Tahun 2025 masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan, tanggapan, saran, dan koreksi yang konstruktif sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan kinerja pada tahun berikutnya.

Ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi secara aktif dalam proses penyusunan laporan kinerja ini.



KEPALA BIRO KEUANGAN DAN BMN
SUTRISNO SUBAGYO, S.E., M.AP

Jakarta, 19 Januari 2026
Kepala Biro Keuangan dan BMN



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Sutrisno Subagyo

RINGKASAN EKSEKUTIF

2025

**Biro Keuangan dan BMN
Sekretariat Jenderal**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan pada tanggal 10 Februari 2025, Biro Keuangan dan BMN merupakan Unit Eselon II yang bertanggung jawab kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam pelaksanaan pertanggung jawaban tersebut, Biro Keuangan dan BMN telah merinci sasaran kegiatan, dimana di setiap sasaran kegiatan disertai Indikator Kinerja sebagai alat bantu untuk mengetahui pencapaian sasaran yang dimaksud. Di Tahun 2025, Biro Keuangan dan BMN menetapkan 2 (dua) sasaran kegiatan dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja beserta targetnya.

Laporan Kinerja Biro Keuangan dan BMN Tahun 2025 berisikan capaian Indikator Kinerja yang telah dicapai Biro Keuangan dan BMN sampai dengan Triwulan IV dengan Nilai Kinerja Organisasi mencapai 106,48 dan termasuk dalam predikat “Baik” dengan 17 (tujuh belas) realisasi indikator kinerja Biro Keuangan dan BMN Tahun 2025 sebagai berikut:

- 1) Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan memperoleh Opini WTP dari target yang ditetapkan Opini WTP dengan persentase capaian 100%;
- 2) Level Maturitas SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan mencapai level 3 dari target 3 dengan persentase capaian 100%;
- 3) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan nilai 90,31 dari target 92 dengan persentase perolehan 98,16%;
- 4) Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Kelautan dan Perikanan mencapai 3,80 dari target yang ditetapkan 3,36 dengan persentase capaian 113,09%;
- 5) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Sekretariat Jenderal tercapai 91,50 dari target 81,5 dengan persentase capaian 112,27%;
- 6) Persentase Implementasi Standar Biaya Keluaran KKP tercapai 100 dari target 100 dengan persentase capaian 100%;
- 7) Batas Tertinggi Persentase Nilai temuan LHP BPK atas LK Sekretariat Jenderal tercapai 0,22 dari target di bawah 0,5 dengan persentase capaian 120%;
- 8) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Sekretariat Jenderal mencapai 100 dari target yang ditetapkan 85 dengan persentase capaian 117,65%;
- 9) Indeks Pengelolaan BLU Kementerian Kelautan dan Perikanan mencapai nilai 4 dari target 3 dengan persentase capaian 120,00%;
- 10) Persentase Pengelolaan PNPB Sektor Kelautan dan Perikanan tercapai 100 dari target 100 dengan persentase capaian 100%;
- 11) Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Biro Keuangan dan BMN tercapai 81,20 dari target 75 dengan persentase capaian 108,27%;
- 12) Nilai PM SAKIP Biro Keuangan dan BMN tercapai 87,15 dari target 87 dengan persentase capaian 100,17%;
- 13) Indeks Profesionalitas ASN Biro Keuangan dan BMN mencapai 89,46 dari target 82 dengan persentase capaian 109,10%;
- 14) Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Keuangan dan BMN tercapai 100 dari target 100 dengan persentase capaian 100%;



- 15) Nilai Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Biro Keuangan dan BMN mencapai 100 dari target yang ditetapkan 85 dengan persentase capaian 117,65%;
- 16) Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Bidang Pengelolaan Keuangan dan BMN mencapai 100 dari target 100 dengan persentase capaian 100%;
- 17) Persentase Penyerapan Anggaran Biro Keuangan dan BMN mencapai 99,97 dari target 95 dengan persentase capaian 105,23%.

Realisasi anggaran Biro Keuangan dan BMN sampai dengan Tahun 2025 mencapai Rp3.624.713.561 dari total pagu efektif Rp3.625.823.000 dengan persentase capaian 99,97%. Rincian pagu efektif untuk program Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN Rp142.870.000 dan program Layanan Umum Rp3.482.953.000 serta realisasi masing-masing program sebesar Rp142.732.537 atau 99,97% dari pagu efektif dan Rp3.481.981.024 atau 99,97% dari pagu efektif.

Dalam rangka meningkatkan Pengelolaan Keuangan yang baik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Biro Keuangan dan BMN terus berupaya untuk melaksanakan koordinasi dan pembinaan yang berkaitan dengan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban di Bidang Keuangan dan BMN secara *Smart, Akuntabel, Integritas, Loyalitas, Sinergi* (SAILS).

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Tahun 2025 ini, diharapkan dapat menjadi memberikan semangat baru kepada seluruh pegawai di Lingkungan Biro Keuangan dan BMN untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga sasaran dan tujuan yang ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dapat dicapai dengan maksimal.

DAFTAR ISI

2025

**Biro Keuangan dan BMN
Sekretariat Jenderal**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	3
B. Tugas dan Fungsi	4
C. Sumber Daya Manusia	5
Organisasi Biro Keuangan dan BMN	5
Sumber Daya Manusia Biro Keuangan dan BMN	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029	9
B. Rencana Kerja Biro Keuangan dan BMN	9
C. Perjanjian Kinerja	10
D. Pemanfaatan Informasi Kinerja sebagai Evaluasi Perencanaan	11
E. Keselarasan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2025 – 2029, Rencana Kerja 2025, dan Perjanjian Kinerja Biro Keuangan dan BMN Tahun 2025	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja	17
B. Analisis Capaian Kinerja	20
1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan	20
2. Level Maturitas SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan	24
3. Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Kelautan dan Perikanan	28
4. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan	31
5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Sekretariat Jenderal	35
6. Persentase Implementasi Standar biaya Keluaran Kementerian Kelautan dan Perikanan	39
7. Batas Tertinggi Persentase Nilai temuan LHP BPK atas LK Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal	42
8. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal	46
9. Indeks Pengelolaan BLU Kementerian Kelautan dan Perikanan	49
10. Persentase Pengelolaan PNBP Sektor Kelautan dan Perikanan	52
11. Nilai minimal yang Diperkirakan untuk mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Biro Keuangan dan BMN	56
12. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Keuangan dan BMN	60



13. Indeks Profesionalitas ASN Biro Keuangan dan BMN	64
14. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Keuangan dan BMN	68
15. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro Keuangan dan BMN	71
16. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Bidang Pengelolaan Keuangan dan BMN	74
17. Persentase Penyerapan Anggaran Biro Keuangan dan BMN	77
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya di dalam Laporan Kinerja	80
D. Kinerja dan Prestasi Lainnya	80
BAB IV PENUTUP	82
Kesimpulan Umum	83
LAMPIRAN	84

DAFTAR TABEL

2025

**Biro Keuangan dan BMN
Sekretariat Jenderal**

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sasaran Kegiatan Biro Keuangan dan BMN Tahun 2025.....	9
Tabel 2 Perubahan Perjanjian Kinerja Biro Keuangan dan BMN Tahun 2025.....	10
Tabel 3 Program dan Kegiatan Biro Keuangan dan BMN Tahun Anggaran 2025	11
Tabel 4 Perbandingan Target Kinerja Tahun 2024 sebagai Perencanaan dan Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2025.....	11
Tabel 5 Keselarasan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2025 – 2029, Rencana Kerja 2025, dan Perjanjian Kinerja Biro Keuangan dan BMN Tahun 2025.....	13
Tabel 6 Perbandingan NKO dan Jumlah IKU Triwulanan Biro Keuangan dan BMN Tahun 2025 dibandingkan NKO Periode Sebelumnya	17
Tabel 7 Nilai Capaian Kinerja Biro Keuangan dan BMN Tahun 2025.....	18
Tabel 8 Capaian Kinerja Biro Keuangan dan BMN Tahun 2025.....	18
Tabel 9 Perkembangan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan KL BUN Tahun 2019-2023	20
Tabel 10 Perbandingan Capaian Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 dengan Capaian Triwulanan Lima Tahun Terakhir dan Renstra Sekretariat Jenderal 2025 - 2029	21
Tabel 11 Interval Skor Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	24
Tabel 12 Perbandingan Capaian Level Maturitas SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 dengan Capaian Triwulanan Lima Tahun Terakhir dan Renstra Sekretariat Jenderal 2025 - 2029.....	25
Tabel 13 Perbandingan Capaian Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 dengan Capaian Triwulanan Lima Tahun Terakhir dan Renstra Sekretariat Jenderal 2025 - 2029.....	28
Tabel 14 Tiga Aspek Pengukuran Nilai IKPA	31
Tabel 15 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 dengan Capaian Triwulanan Lima Tahun Terakhir dan Renstra Sekretariat Jenderal 2025 - 2029	32
Tabel 16 Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2025 dengan Capaian Triwulanan Lima Tahun Terakhir dan Renstra Sekretariat Jenderal 2025 - 2029.....	35
Tabel 17 Perbandingan Capaian Persentase Implementasi Standar biaya Keluaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 dengan Capaian Triwulanan Lima Tahun Terakhir dan Renstra Sekretariat Jenderal 2025 - 2029.....	40
Tabel 18 Perbandingan Capaian Batas Tertinggi Persentase Nilai temuan LHP BPK atas LK Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2025 dengan Capaian Triwulanan Lima Tahun Terakhir dan Renstra Sekretariat Jenderal 2025 - 2029	42
Tabel 19 Perbandingan Capaian Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal dengan Capaian Triwulanan Lima Tahun Terakhir dan Renstra Sekretariat Jenderal 2025 - 2029	46
Tabel 20 Perbandingan Capaian Indeks Pengelolaan BLU Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 dengan Capaian Triwulanan Lima Tahun Terakhir dan Renstra Sekretariat Jenderal 2025 - 2029.....	49



Tabel 21 Perbandingan Capaian Nilai Pengelolaan PNPB Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 dengan Capaian Triwulanan Lima Tahun Terakhir dan Renstra Sekretariat Jenderal 2025 - 2029.....	53
Tabel 22 Perbandingan Capaian Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Tahun 2025 dengan Capaian Triwulanan Lima Tahun Terakhir dan Renstra Sekretariat Jenderal 2025 - 2029	57
Tabel 23 Perbandingan Capaian Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Keuangan dan BMN Tahun 2025 dengan Capaian Triwulanan Lima Tahun Terakhir dan Renstra Sekretariat Jenderal 2025 - 2029.....	61
Tabel 24 Perbandingan Capaian Indeks Profesionalitas ASN Biro Keuangan dan BMN Tahun 2025 dengan Capaian Triwulanan Lima Tahun Terakhir dan Renstra Sekretariat Jenderal 2025 - 2029	65
Tabel 25 Perbandingan Capaian Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Keuangan dan BMN Tahun 2025 dengan Capaian Triwulanan Lima Tahun Terakhir dan Renstra Sekretariat Jenderal 2025 - 2029	68
Tabel 26 Perbandingan Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro Keuangan dan BMN Tahun 2025 dengan Capaian Triwulanan Lima Tahun Terakhir dan Renstra Sekretariat Jenderal 2025 - 2029	71
Tabel 27 Perbandingan Capaian Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan perundang-undangan Bidang Keuangan dan BMN Tahun 2025 dengan Renstra Sekretariat Jenderal 2025 - 2029	74
Tabel 28 Realisasi Anggaran Biro Keuangan dan BMN Setelah Efisiensi Anggaran per 31 Desember 2025	77
Tabel 29 Perbandingan Capaian Persentase Penyerapan Anggaran Biro Keuangan dan BMN dengan Renstra Sekretariat Jenderal 2025 - 2029	78

DAFTAR GAMBAR 2025

**Biro Keuangan dan BMN
Sekretariat Jenderal**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Biro Keuangan dan BMN.....	5
Gambar 2 Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Rentang Usia.....	6
Gambar 3 Target dan Capaian Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam 5 Tahun Terakhir	21
Gambar 4 Level Maturitas SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam 5 Tahun Terakhir...	25
Gambar 5 Target dan Capaian Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam 5 Tahun Terakhir	29
Gambar 6 Grafik Target dan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam 5 Tahun Terakhir	32
Gambar 7 Hasil Indikator Kinerja NKPA Tahun 2025	36
Gambar 8 Target dan Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Sekretariat Jenderal dalam 5 Tahun Terakhir	36
Gambar 9 Target dan Capaian Batas Tertinggi Persentase Nilai temuan LHP BPK atas LK Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal dalam 5 Tahun terakhir	43
Gambar 10 Target dan Capaian Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal dalam 5 Tahun Terakhir	47
Gambar 11 Target dan Capaian Nilai Pengelolaan PNPB Sektor Kelautan dan Perikanan dalam 3 Tahun Terakhir	54
Gambar 12 Target dan Capaian Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Keuangan dan BMN selama 5 Tahun Terakhir	61
Gambar 13 Target dan Capaian Indeks Profesionalitas ASN Biro Keuangan dan BMN dalam 5 Tahun Terakhir	65
Gambar 14 Target dan Capaian Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Keuangan dan BMN dalam 5 Tahun Terakhir	69
Gambar 15 Target dan Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro Keuangan dan BMN dalam 5 Tahun Terakhir	72
Gambar 16 Target dan Capaian Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan perundang-undangan Bidang Keuangan dan BMN dalam 3 Tahun Terakhir	75
Gambar 17 Target dan Capaian Persentase Penyerapan Anggaran Biro Keuangan dan BMN dalam 5 Tahun Terakhir	78

BAB I

PENDAHULUAN

2025

Biro Keuangan dan BMN
Sekretariat Jenderal

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Biro Keuangan dan BMN Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Biro Keuangan dan BMN atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Biro Keuangan dan BMN ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan. Laporan Kinerja Biro Keuangan dan BMN Tahun 2025 menjelaskan tentang pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja selama Tahun 2025. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah sebagai laporan atas kinerja yang telah dimandatkan kepada Sekretaris Jenderal dan memberikan informasi kinerja kepada publik atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkaitan bagi Sekretariat Jenderal untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja Biro Keuangan dan BMN Tahun 2025 memiliki maksud sebagai upaya untuk mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas kinerja Biro Keuangan dan BMN selama Tahun Anggaran 2025 dalam rangka transparansi realisasi APBN. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Biro Keuangan dan BMN Tahun 2025 adalah, sebagai berikut:

- 1) Bentuk pertanggungjawaban kinerja Biro Keuangan dan BMN dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
- 2) Menjadi media publikasi capaian Kinerja Biro Keuangan dan BMN kepada masyarakat dan *stakeholder*.

B. Tugas dan Fungsi

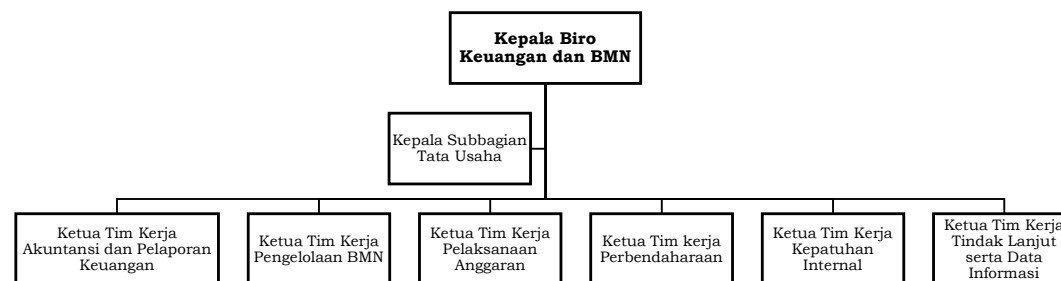
Biro Keuangan dan BMN merupakan Unit Eselon II yang bertanggung jawab kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan pada tanggal 10 Februari 2025. Biro Keuangan dan BMN dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan barang milik/kekayaan negara. Dan memiliki 11 (sebelas) fungsi yaitu:

- penyiapan koordinasi, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi bidang perbendaharaan;
- penyiapan koordinasi dan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
- penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- penyiapan koordinasi dan pembinaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengendalian intern atas pelaporan keuangan;
- penyiapan koordinasi penyusunan standar biaya keluaran dan penelaahan rencana kerja anggaran Kementerian serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran;
- penyiapan koordinasi pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;
- penyiapan koordinasi dan pembinaan badan layanan umum;
- penyiapan koordinasi tindak lanjut rekomendasi laporan hasil pengawasan aparat pengawas intern pemerintah dan tindak lanjut rekomendasi laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta penyelesaian kerugian negara;
- penyiapan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan dan barang milik/kekayaan negara;
- pelaksanaan dan koordinasi administrasi jabatan fungsional di bawah pembinaan Biro Keuangan dan BMN dan Barang Milik Negara; dan
- pelaksanaan urusan administrasi Biro Keuangan dan BMN dan Barang Milik Negara.

C. Sumber Daya Manusia

Organisasi Biro Keuangan dan BMN

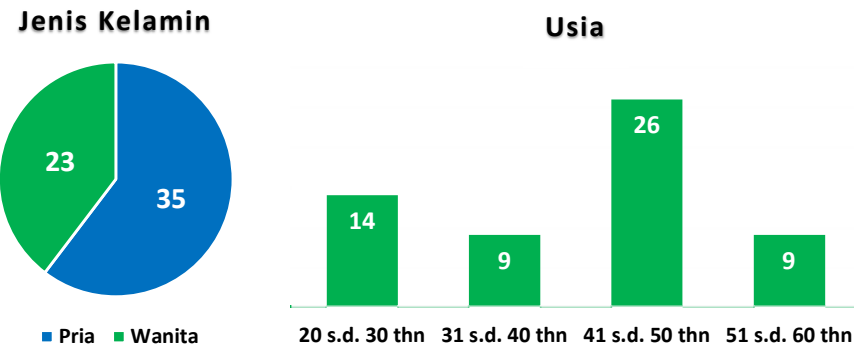
Adapun susunan organisasi Biro Keuangan dan BMN sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dengan komposisi 1 Subbagian Tata Usaha dan 6 Tim Kerja Teknis yang disusun pada struktur organisasi berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi Biro Keuangan dan BMN

Sumber Daya Manusia Biro Keuangan dan BMN

Sampai dengan 31 Desember 2025, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara memiliki potensi sumber daya manusia yang cukup signifikan dengan jumlah keseluruhan 58 Aparatur Sipil Negara, terdiri dari 51 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 1 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 6 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin menunjukkan proporsi yang relatif seimbang mencakup 35 pegawai laki-laki dan 23 pegawai perempuan. Dari sisi rentang usia, distribusi pegawai menunjukkan bahwa mayoritas berada dalam kelompok usia 41 sampai dengan 50 tahun sebanyak 26 pegawai, diikuti oleh kelompok usia 20 sampai dengan 30 tahun sebanyak 14 pegawai, kelompok usia 31 sampai dengan 40 tahun sebanyak 9 pegawai, dan kelompok usia 51 sampai dengan 60 tahun sebanyak 9 pegawai. Struktur demografi pegawai di Biro Keuangan dan BMN yang didominasi oleh kelompok usia 41–50 tahun di tengah akselerasi digitalisasi menghadirkan potensi stabilitas pengalaman yang kuat sekaligus tantangan adaptabilitas teknologi yang perlu dimitigasi secara sistematis. Kelompok usia matang ini, yang mengisi jabatan fungsional strategis seperti Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan Penata Laksana Barang, memiliki kedalaman pemahaman substansi regulasi yang sangat krusial bagi akuntabilitas organisasi. Di sisi lain, kehadiran 14 pegawai muda di rentang usia 20–30 tahun berperan sebagai *digital native* yang menjadi katalisator percepatan transformasi sistem informasi keuangan maupun aset seperti SAKTI dan SIMAN. Tantangan utama yang dihadapi adalah menjembatani kesenjangan kemahiran digital (*digital gap*) antara mayoritas pegawai senior dengan talenta muda, guna memastikan bahwa beban kerja fungsional, mulai dari Analis Anggaran, Analis Keuangan, Pengelola Barang Milik Negara, hingga Pranata Keuangan APBN, tidak terkendala oleh hambatan teknis operasional aplikasi. Oleh karena itu, strategi keberlanjutan organisasi terletak pada efektivitas transfer pengetahuan (*knowledge sharing*) lintas generasi, di mana kearifan prosedural dari pegawai senior bersinergi dengan ketangkasan digital pegawai muda untuk menciptakan tata kelola keuangan dan BMN yang modern, presisi, dan adaptif terhadap perubahan sistemik di masa depan. Adapun diagram pemetaan jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin dan rentang usia pada gambar di bawah:



Gambar 2 Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Rentang Usia

BAB II PERENCANAAN KINERJA 2025

**Biro Keuangan dan BMN
Sekretariat Jenderal**

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029

Indikator kinerja Biro Keuangan dan BMN yang ditetapkan pada Tahun 2025 mengacu pada Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029. Terdapat dua Sasaran Kegiatan dan 17 Indikator Kinerja. Sasaran Kegiatan merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran program. Proses pencapaian kinerja tetap berjalan dengan penetapan target berdasarkan capaian pada tahun 2025. Sasaran Kegiatan Biro Keuangan dan BMN untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Sasaran Kegiatan Biro Keuangan dan BMN Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Bidang Pengelolaan Keuangan dan BMN
2.	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik Lingkup Biro Keuangan dan BMN

B. Rencana Kerja Biro Keuangan dan BMN

Pelaksanaan tugas dan fungsi oleh Biro Keuangan dan BMN diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dan mengacu Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025. Rencana Kerja disusun berdasarkan Rencana Aksi yang sudah disepakati dan dibahas bersama Kepala Biro Keuangan dan BMN, Ketua Tim Kerja lingkup Biro Keuangan dan BMN, dan PIC Pengelola Kinerja lingkup Biro Keuangan dan BMN. Acuan penyusunan Rencana Aksi Biro Keuangan dan BMN tetap melihat pada Renja dan Renstra yang masih dalam tahap pembahasan bersama seluruh Eselon I dan Eselon II Kementerian Kelautan dan Perikanan.

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknik Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang tanggung jawab/kinerja. Pada Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Biro Keuangan dan BMN ditetapkan pada 24 Januari 2025 kemudian pada tanggal 29 April 2025 dilakukan perubahan karena adanya pergantian Posisi Pimpinan di Biro Keuangan dan BMN lalu perubahan Perjanjian Kinerja terakhir pada tanggal 2 Desember 2025 yakni penyesuaian pada target Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Biro Keuangan dan BMN yang semula 87 menjadi 82. Biro Keuangan dan BMN diberikan dukungan anggaran sebesar Rp3.625.823.000 dengan mempertanggungjawabkan 2 (dua) Sasaran Kegiatan dengan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja kepada Sekretaris Jenderal, sebagai berikut.

Tabel 2 Perubahan Perjanjian Kinerja Biro Keuangan dan BMN Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET JANUARI & APRIL	TARGET DESEMBER
1 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Bidang Pengelolaan Keuangan dan BMN	1 Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (opini)	WTP (5)	WTP (5)
	2 Level Maturitas SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan (level)	3	3
	3 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (nilai)	92	92
	4 Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Kelautan dan Perikanan (indeks)	3,36	3,36
	5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Sekretariat Jenderal (nilai)	81,5	81,5
	6 Persentase Implementasi Standar Biaya Keluaran KKP (%)	100	100
	7 Batas Tertinggi Persentase Nilai temuan LHP BPK atas LK Sekretariat Jenderal (%)	≤0.5	≤0.5
	8 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal (%)	85	85
	9 Indeks Pengelolaan BLU Kementerian Kelautan dan Perikanan (indeks)	3	3
	10 Persentase Pengelolaan PNPB Sektor Kelautan dan Perikanan (%)	100	100
2 Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik di Lingkungan Biro Keuangan dan BMN	11 Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Biro Keuangan dan BMN (nilai)	75	75
	12 Nilai PM SAKIP Biro Keuangan dan BMN (nilai)	87	87
	13 Indeks Profesionalitas ASN Biro Keuangan dan BMN (indeks)	87	82
	14 Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Keuangan dan BMN (%)	100	100
	15 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Biro Keuangan dan BMN (%)	85	85
	16 Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Bidang Pengelolaan Keuangan dan BMN (%)	100	100

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET JANUARI & APRIL	TARGET DESEMBER
	17 Persentase Penyerapan Anggaran Biro Keuangan dan BMN (%)	95	95

Tujuan program adalah meningkatkan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan Keuangan dan Barang Milik Negara di bidang kelautan dan perikanan dengan sasaran meningkatnya kesesuaian pelaksanaan dukungan manajerial yang mana pagu awal mengalami efisiensi anggaran yang semula Rp15.044.620.000 menjadi Rp3.625.823.000. Untuk mencapai tujuan dan sasaran program tersebut, kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3 Program dan Kegiatan Biro Keuangan dan BMN Tahun Anggaran 2025

NO.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM EFISIENSI ANGGARAN (Rp)	PAGU EFEKTIF SETELAH EFISIENSI ANGGARAN (Rp)
1.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN	1.390.000.000	142.870.000
2.	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik, dan Umum	13.654.620.000	3.482.953.000
Total Anggaran Biro Keuangan dan BMN Tahun 2025		15.044.620.000	3.625.823.000

D. Pemanfaatan Informasi Kinerja sebagai Evaluasi Perencanaan

Penentuan target Indikator Kinerja tahun 2025 didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja Biro Keuangan dan BMN pada tahun 2024. Hasil dari evaluasi ini kemudian dijadikan sebagai pemanfaatan informasi kinerja pada tabel berikut:

Tabel 4 Perbandingan Target Kinerja Tahun 2024 sebagai Perencanaan dan Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2025

Sasaran /Indikator Kinerja	Target 2024	Capaian 2024	% Capaian	Sasaran /Indikator Kinerja	Target 2025	Keterangan
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di bidang Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara			106,26	Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Akuntabel di bidang Pengelolaan Keuangan dan BMN		
Indeks Pengelolaan Aset KKP (Indeks)	3,36	3,51	104,78	Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Kelautan dan Perikanan (Indeks)	3,36	Target ditetapkan berdasarkan Capaian Kinerja tahun 2024
Opini BPK atas LK KKP (opini)	WTP (5)	WTP (5)	100,00	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Opini)	WTP (5)	Target ditetapkan berdasarkan Capaian Kinerja tahun 2024
Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Indeks)	73,25	85	116,44	-		Indikator Kinerja dihapus di tahun 2025
Tingkat Kepatuhan BMN Sekretariat Jenderal (%)	82,5	94	113,94	-		Indikator Kinerja dihapus di tahun 2025
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (Nilai)	93,75	93,84	100,09	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (Nilai)	92	Target disesuaikan dengan penghitungan capaian di Tahun 2024 dan rekomendasi dari Kementerian Keuangan.
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Sekretariat Jenderal (nilai)	81	88,72	109,53	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Sekretariat Jenderal (Nilai)	81,5	Target ditetapkan berdasarkan Capaian Kinerja tahun 2024
Batas Tertinggi Persentase Nilai temuan LHP BPK atas LK	≤0.5	0,09	120,00	Batas Tertinggi Persentase Nilai temuan LHP BPK atas LK	≤0,5	Target ditetapkan berdasarkan Capaian Kinerja tahun 2024

Sasaran /Indikator Kinerja	Target 2024	Capaian 2024	% Capaian	Sasaran /Indikator Kinerja	Target 2025	Keterangan
Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal TA 2023 (%)				Sekretariat Jenderal (%)		
Level Maturitas SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan (Level)	3	3	100	Level Maturitas SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan (Level)	3	Target ditetapkan berdasarkan Capaian Kinerja tahun 2024
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal (%)	95	100	105,26	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal (%)	85	Target disusun berdasarkan hasil validasi Indikator Kinerja tahun 2024
Nilai pengelolaan PNPB Sektor Kelautan dan Perikanan (persen)	100	100	100	Nilai Pengelolaan PNPB Sektor Kelautan dan Perikanan (%)	100	Target ditetapkan berdasarkan Capaian Kinerja tahun 2024
Indeks Pengelolaan BLU Kementerian Kelautan dan Perikanan (Nilai)	3	3,34	111,33	Indeks Pengelolaan BLU Kementerian Kelautan dan Perikanan (Nilai)	3	Merupakan Indikator Kinerja baru di tahun 2024
Nilai Kinerja Pembinaan BLU (NKP BLU) Sektor Kelautan dan Perikanan (Nilai)	75	75	100	Nilai Kinerja Pembinaan BLU (NKP BLU) Sektor Kelautan dan Perikanan (Nilai)	75	Merupakan Indikator Kinerja baru di tahun 2024
Persentase Implementasi Standar Biaya Keluaran KKP (%)	100	100	100	Persentase Implementasi Standar Biaya Keluaran KKP (%)	100	Merupakan Indikator Kinerja baru di tahun 2024
Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro Keuangan			104,88	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro Keuangan dan BMN		
Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Biro Keuangan dan BMN (Nilai)	75	88,29	117,72	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Biro Keuangan dan BMN	75	Merupakan Indikator Kinerja baru dengan adanya pembangunan Zona Integritas di Biro Keuangan dan BMN
Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang – undangan bidang Pengelolaan Keuangan dan BMN (persen)	100	100	100	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Keuangan dan BMN (%)	100	Sasaran Kinerja Indikator Kinerja ini dipindah ke SK kedua yaitu Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro Keuangan dan BMN di tahun Anggaran 2023
Indeks Profesionalitas ASN Biro Keuangan dan BMN (Indeks)	85	88,59	104,22	Indeks Profesionalitas ASN Biro Keuangan dan BMN (Indeks)	87	Target disusun berdasarkan Nota Dinas Nomor 85 Tahun 2024
Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Keuangan dan BMN (persen)	100	100	100	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Biro Keuangan dan BMN (%)	100	Target ditetapkan berdasarkan Capaian Kinerja tahun 2024
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Keuangan dan BMN (nilai)	84	84,55	100,65	Nilai PM SAKIP Biro Keuangan dan BMN (Nilai)	87	Target disusun berdasarkan Memorandum Nomor
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro Keuangan dan BMN (persen)	95	100	105,26	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro Keuangan dan BMN (persen)	85	Target disusun berdasarkan Memorandum/Nota Dinas
Persentase Unit kerja yang menerapkan sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Biro Keuangan dan BMN (%)	94	100	106,38	-		Indikator Kinerja dihapus di tahun 2025
Persentase Penyerapan Anggaran Biro Keuangan (persen)	95	99,55	104,79	Persentase Penyerapan Anggaran Biro Keuangan dan BMN (%)	95	Target ditetapkan berdasarkan Capaian Kinerja tahun 2024

E. Keselarasan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2025 – 2029, Rencana Kerja 2025, dan Perjanjian Kinerja Biro Keuangan dan BMN Tahun 2025

Upaya Biro Keuangan dan BMN mencapai Indikator Kinerja selalu menerapkan keselarasan antara Rancangan Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2025 - 2029, Renja KKP Tahun 2025, dan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati di Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Biro Keuangan dan BMN telah ditetapkan pada tanggal 2 Desember 2025.

Tabel 5 Keselarasan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2025 – 2029, Rencana Kerja 2025, dan Perjanjian Kinerja Biro Keuangan dan BMN Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENSTRA SETJEN 2025 – 2029	RENJA SETJEN 2025	PERJANJIAN KINERJA 2025
1 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Bidang Pengelolaan Keuangan dan BMN	1 Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (opini)	WTP (5)	WTP (5)	WTP (5)
	2 Level Maturitas SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan (level)	3	3	3
	3 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (nilai)	92	92	92
	4 Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Kelautan dan Perikanan (indeks)	3,36	3,36	3,36
	5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Sekretariat Jenderal (nilai)	81,5	81,5	81,5
	6 Persentase Implementasi Standar Biaya Keluaran KKP (%)	100	100	100
	7 Batas Tertinggi Persentase Nilai temuan LHP BPK atas LK Sekretariat Jenderal (%)	≤0.5	≤0.5	≤0.5
	8 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal (%)	85	85	85
	9 Indeks Pengelolaan BLU Kementerian Kelautan dan Perikanan (indeks)	3	3	3
	10 Persentase Pengelolaan PNPB Sektor Kelautan dan Perikanan (%)	100	100	100
2 Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik di Lingkungan Biro Keuangan dan BMN	11 Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Biro Keuangan dan BMN (nilai)	75	75	75
	12 Nilai PM SAKIP Biro Keuangan dan BMN (nilai)	87	87	87
	13 Indeks Profesionalitas ASN Biro Keuangan dan BMN (indeks)	82	82	82
	14 Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Keuangan dan BMN (%)	100	100	100
	15 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk	85	85	85

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	RENSTRA SETJEN 2025 – 2029	RENJA SETJEN 2025	PERJANJIAN KINERJA 2025
		Perbaikan Kinerja Lingkup Biro Keuangan dan BMN (%)			
		16 Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Bidang Pengelolaan Keuangan dan BMN (%)	100	100	100
		17 Persentase Penyerapan Anggaran Biro Keuangan dan BMN (%)	95	95	95

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

2025

Biro Keuangan dan BMN
Sekretariat Jenderal

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Kinerja Biro Keuangan dan BMN terus dilaporkan dan dinilai pada setiap triwulan, semester, dan tahunan. NKO yang diperoleh mengalami fluktuasi di setiap penilaiannya. Berikut adalah tabel perolehan NKO Biro Keuangan dan BMN pada tiap triwulan selama 5 (lima) tahun terakhir:

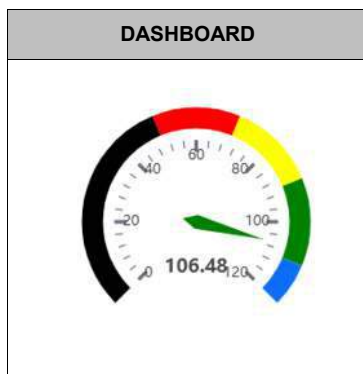
Tabel 6 Perbandingan NKO dan Jumlah IKU Triwulanan Biro Keuangan dan BMN Tahun 2025 dibandingkan NKO Periode Sebelumnya

Periode Penilaian	Jumlah Indikator Kinerja	Nilai Kinerja Organisasi
2021	10	106.46
2022	15	107.33
2023	18	109.05
2024	21	105.13
2025	17	106.48

Capaian kinerja Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) menunjukkan peningkatan dari tahun 2021 hingga mencapai puncaknya pada tahun 2023, dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) naik dari 106.46 pada tahun 2021 menjadi 107.33 pada tahun 2022, dan kemudian mencapai nilai tertinggi sebesar 109.05 pada tahun 2023. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 105.13 dan kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi 106.48. Sementara itu, jumlah indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan sebagai dasar penilaian juga mengalami peningkatan dari 10 indikator pada tahun 2021 menjadi 21 indikator pada tahun 2024, dan sedikit menurun menjadi 17 indikator pada tahun 2025. Hal ini mencerminkan bahwa peningkatan jumlah indikator tidak selalu berdampak langsung pada peningkatan kinerja, dan menunjukkan perlunya evaluasi atas efektivitas indikator serta pelaksanaan strategi kinerja secara menyeluruh.

Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja pada Sekretariat Jenderal menggunakan aplikasi *web-based* di laman www.kinerjaku.kkp.go.id. Proses penghitungan kinerja menggunakan Manual Indikator Kinerja yang telah disusun sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses penghitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran kegiatan sesuai dengan tanggung jawabnya dengan tampilan *dashboard* capaian Biro Keuangan dan BMN Tahun 2025 seperti pada tabel berikut:

Tabel 7 Nilai Capaian Kinerja Biro Keuangan dan BMN Tahun 2025



Sumber: kinerjaku.kkp.go.id

Indikator Kinerja yang tercapai di Tahun 2025 sebanyak 5 Indikator Kinerja. Realisasi telah mencapai target yang telah ditetapkan sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Rincian Indikator Kinerja yang dicapai selama Triwulan IV antara lain:

Tabel 8 Capaian Kinerja Biro Keuangan dan BMN Tahun 2025

No.	Sasaran/Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Target (Triwulanan)	Capaian (Triwulanan)
			IV	IV
Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Bidang Pengelolaan Keuangan dan BMN				
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (opini)	WTP (5)	WTP (5)	WTP (5)
2	Level Maturitas SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan (level)	3	3	3
3	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (nilai)	92	92	90,31
4	Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Kelautan dan Perikanan (indeks)	3,36	3,36	3,80
5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Sekretariat Jenderal (nilai)	81,5	81,5	91,50
6	Persentase Implementasi Standar Biaya Keluaran KKP (%)	100	100	100

No.	Sasaran/Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Target (Triwulanan)	Capaian (Triwulanan)
			IV	IV
7	Batas Tertinggi Persentase Nilai temuan LHP BPK atas LK Sekretariat Jenderal (%)	≤0.5	≤0.5	0,22
8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal (%)	85	85	100
9	Indeks Pengelolaan BLU Kementerian Kelautan dan Perikanan (indeks)	3	3	4
10	Persentase Pengelolaan PNPB Sektor Kelautan dan Perikanan (%)	100	100	100
Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik di Lingkungan Biro Keuangan dan BMN				
11	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Biro Keuangan dan BMN (nilai)	75	75	81,20
12	Nilai PM SAKIP Biro Keuangan dan BMN (nilai)	87	87	87,15
13	Indeks Profesionalitas ASN Biro Keuangan dan BMN (indeks)	82	82	89,46
14	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Keuangan dan BMN (%)	100	100	100
15	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Biro Keuangan dan BMN (%)	85	85	100
16	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Bidang Pengelolaan Keuangan dan BMN (%)	100	100	100
17	Persentase Penyerapan Anggaran Biro Keuangan dan BMN (%)	95	95	99,97

B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap pernyataan kinerja Sasaran Kegiatan dan indikator kinerja untuk setiap perspektif sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan:

Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Bidang Pengelolaan Keuangan dan BMN

Jumlah sasaran kegiatan tersebut didukung oleh **10 (sepuluh)** Indikator Kinerja dengan penjelasan capaian sebagai berikut:

1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan

a) Definisi Indikator Kinerja

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat lima jenis opini yang dapat diberikan oleh Pemeriksa (BPK) yaitu:

- 1) Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP)
- 2) Opini Wajar dengan pengecualian (biasa disingkat WDP)
- 3) Opini tidak menyatakan pendapat (TMP)
- 4) Opini tidak wajar

Jumlah Entitas Pemeriksaan pada tahun 2024 mencakup 86 K/L dan satu BUN yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 9 Perkembangan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan KL BUN Tahun 2019-2023

Opini	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	85	84	82	81	85
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	2	4	1	4	2
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	-	-	-	-	-
Tidak Wajar (TW)	-	-	-	-	-
Jumlah Entitas Pelaporan	87	88	83	85	87

b) Analisis Capaian

Indikator kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan parameter tertinggi dalam menilai tingkat kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan kementerian. Indikator ini merefleksikan efektivitas sistem pengendalian intern, kecukupan pengungkapan informasi keuangan, serta kesesuaian penyajian laporan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Keberhasilan dalam mempertahankan opini terbaik bukan sekadar pemenuhan aspek administratif, melainkan bukti nyata bahwa seluruh proses bisnis, mulai dari perencanaan anggaran hingga pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), telah dilaksanakan secara profesional untuk mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang bersih dan berintegritas. Target dan Realisasi Indikator Kinerja disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 10 Perbandingan Capaian Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 dengan Capaian Triwulanan Lima Tahun Terakhir dan Renstra Sekretariat Jenderal 2025 - 2029

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulanan (TW IV)					Target 2025	Triwulanan (TW IV)			Renstra Sekretariat Jenderal 2025 - 2029		
	2020	2021	2022	2023	2024		Target	Realisasi	% Capaian	Target 2025	Realisasi	% Capaian
Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100



Gambar 3 Target dan Capaian Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam 5 Tahun Terakhir

Capaian indikator kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan KKP menunjukkan performa yang sangat impresif dengan keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut sejak tahun 2021 hingga tahun anggaran berjalan. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-32/MK/PB/2025 yang diterbitkan pada 5 Juni 2025, prestasi ini mengukuhkan posisi KKP sebagai kementerian yang konsisten dalam menjaga kualitas laporan keuangan di tengah dinamika kebijakan fiskal nasional. Pencapaian opini WTP yang berkelanjutan ini merupakan hasil dari sinergi seluruh unit kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan serta komitmen pimpinan dalam mengawal tata kelola keuangan yang akuntabel, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan sumber daya di sektor kelautan dan perikanan tetap terjaga pada level optimal.

Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan pelaporan keuangan telah dilaksanakan secara memadai, andal, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Konsistensi perolehan opini WTP mencerminkan komitmen yang kuat dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, indikator kinerja opini BPK atas laporan keuangan dinilai tercapai secara optimal. Selain itu, capaian pada tahun 2025 merupakan perolehan opini WTP yang kelima secara berturut-turut sejak tahun 2021.

c) Program/Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja

Biro Keuangan dan BMN telah melaksanakan serangkaian kegiatan selama Tahun 2025 yang mendukung peningkatan kualitas pelaporan keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kegiatan tersebut diawali dengan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester I Tahun 2025 yang telah diserahkan kepada Kementerian Keuangan melalui Surat Dinas Nomor B.2349/SJ.2/TU.210/VII/2025 tanggal 18 Juli 2025. Selain itu, telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kualitas Laporan Keuangan Lingkup KKP untuk memastikan akurasi dan konsistensi data keuangan pada beberapa periode, yaitu periode Juni pada tanggal 22 Juli 2025 sesuai dengan Surat Undangan Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor B.2324/SJ.2/TU.330/VII/2025 tanggal 17 Juli 2025, periode Juli pada tanggal 27 s.d. 28 Agustus 2025 berdasarkan Surat Undangan Nomor B.2597/SJ.2/TU.330/VIII/2025 tanggal 22 Agustus 2025, dan periode Agustus pada tanggal 23 September 2025 sesuai Surat Undangan Nomor B.2780/SJ.2/TU.330/IX/2025 tanggal 15 September 2025. Kegiatan ini menunjukkan komitmen Biro Keuangan dan BMN dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

d) Upaya Perbaikan Kinerja yang Akan Datang

Dalam rangka mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (LK KKP) pada tahun 2026, Biro Keuangan dan BMN akan fokus pada penguatan sinergi antara fungsi akuntansi pelaporan dan penatausahaan BMN melalui mekanisme rekonsiliasi data secara berjenjang dan terjadwal. Upaya paling realistis yang akan ditempuh adalah peningkatan kualitas pengendalian intern melalui pelaksanaan *self-assessment* atas kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta percepatan penyelesaian tindak lanjut atas temuan-temuan administratif maupun material dari periode audit sebelumnya. Selain itu, optimalisasi pendampingan teknis kepada seluruh unit eselon I dalam penyajian laporan keuangan yang akurat dan didukung oleh dokumen sumber yang valid menjadi prioritas utama untuk memitigasi potensi salah saji. Dengan menjaga integritas data dan konsistensi dalam penatausahaan aset negara, kami berkomitmen memastikan bahwa LK KKP tetap memenuhi kriteria kesesuaian, kecukupan pengungkapan, dan efektivitas sistem pengendalian intern di hadapan tim pemeriksa BPK RI.

e) Penggunaan Sumber Daya

Biro Keuangan dan BMN berkomitmen untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia secara efisien dan efektif, terlebih di tengah tantangan jumlah pegawai yang terbatas serta alokasi anggaran yang mengalami efisiensi sebesar Rp11.380.157.000 dari pagu awal sebesar Rp15.044.620.000 menjadi Rp3.664.463.000. Dalam menghadapi kondisi tersebut, Biro Keuangan dan BMN secara adaptif melakukan penyesuaian perencanaan kerja dengan prinsip skala prioritas, memperkuat kolaborasi lintas bagian untuk mendorong kerja tim yang produktif, serta mengandalkan kapasitas sumber daya manusia yang kompeten guna menjaga kelancaran pelaksanaan tugas dan percepatan penyelesaian pekerjaan. Penerapan sistem kerja berbasis output dan pemanfaatan digitalisasi pelaporan serta monitoring anggaran turut menjadi kunci dalam menjaga kualitas layanan tanpa mengesampingkan akuntabilitas dan transparansi. Dengan pendekatan ini, Biro Keuangan dan BMN terus berupaya menjalankan fungsi secara optimal, meski dalam keterbatasan, untuk tetap mendukung tercapainya kinerja kementerian secara keseluruhan secara profesional dan berintegritas.

2. Level Maturitas SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan

a) Definisi Indikator Kinerja

Level maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Level maturitas SPIP KKP dinilai melalui 3 komponen, yaitu:

- 1) Penetapan Tujuan, yang terdiri atas unsur sebagai berikut :
 - a. Kualitas Sasaran Strategis
 - b. Kualitas Pencapaian Sasaran Strategis
- 2) Struktur dan Proses, yang terdiri atas unsur sebagai berikut :
 - a. Lingkungan pengendalian
 - b. Penilaian risiko
 - c. Kegiatan pengendalian
 - d. Informasi dan komunikasi
 - e. Pemantauan
- 3) Pencapaian Tujuan, yang terdiri atas unsur sebagai berikut :
 - a. Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi
 - b. Keandalan Pelaporan Keuangan
 - c. Pengamanan atas Aset
 - d. Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan

Adapun Interval Skor Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP terpolo dalam lima tingkatan sebagai berikut:

Tabel 11 Interval Skor Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP

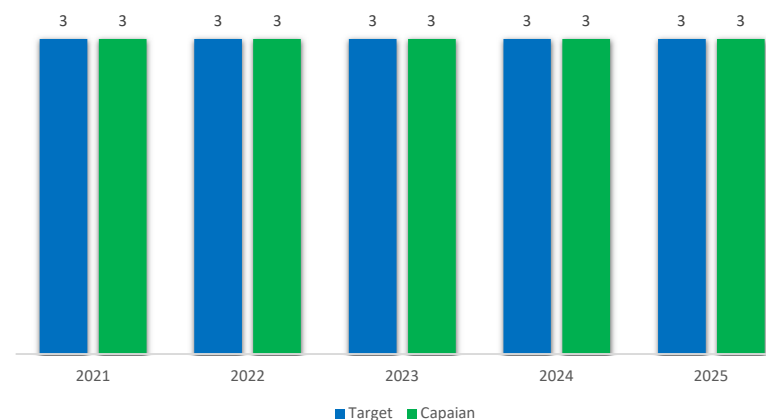
Level Maturitas	Interval Skor
1 Rintisan	1,0 s/d kurang dari 2,0 ($1,0 \leq \text{skor} < 2,0$)
2 Berkembang	2,0 s/d kurang dari 3,0 ($2,0 \leq \text{skor} < 3,0$)
3 Terdefinisi	3,0 s/d kurang dari 4,0 ($3,0 \leq \text{skor} < 4,0$)
4 Terkelola dan Terukur	4,0 s/d kurang dari 4,5 ($4,0 \leq \text{skor} < 4,5$)
5 Optimum	Lebih dari 4,5 s/d 5,0 ($4,5 \leq \text{skor} \leq 5$)

b) Analisis Capaian

Indikator kinerja Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan ukuran sistematis mengenai sejauh mana kematangan suatu instansi dalam menyelenggarakan fungsi pengendalian internal yang efektif guna mencapai tujuan organisasi. Tingkat maturitas ini mencerminkan kualitas integrasi dari lima unsur utama, yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan berkelanjutan. Melalui penilaian ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat memastikan bahwa setiap proses bisnis dilaksanakan secara akuntabel, risiko organisasi terkelola dengan baik, serta aset negara terlindungi, sehingga tercipta budaya kerja yang transparan dan berorientasi pada kinerja yang bersih. Adapun realisasi capaian dan target Level Maturitas SPIP KKP tertuang pada tabel sebagai berikut:

Tabel 12 Perbandingan Capaian Level Maturitas SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 dengan Capaian Triwulanan Lima Tahun Terakhir dan Renstra Sekretariat Jenderal 2025 - 2029

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulanan (TW IV)					Target 2025	Triwulanan (TW IV)			Renstra Sekretariat Jenderal 2025 - 2029		
	2020	2021	2022	2023	2024		Target	Realisasi	% Capaian	Target 2025	Realisasi	% Capaian
Level Maturitas SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan	3	3	3	3	3	3	3	3	100	3	3	100



Gambar 4 Level Maturitas SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam 5 Tahun Terakhir

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN nomor 3447/SJ.2/TU.210/XII/2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan secara konsisten telah berhasil mempertahankan capaian maturitas SPIP pada Level 3 sejak tahun 2020 hingga tahun 2026, sesuai dengan target yang ditetapkan. Keberhasilan menjaga predikat "Terdefinisi" selama tujuh tahun berturut-turut ini menunjukkan bahwa KKP telah memiliki standar prosedur operasional yang baku dan terdokumentasi secara baik di seluruh lini organisasi untuk memitigasi risiko yang menghambat pencapaian tujuan. Tingkat ini menggambarkan bahwa kebijakan dan prosedur pengendalian intern di kementerian atau lembaga telah dirancang dan ditetapkan secara formal oleh pimpinan, serta didokumentasikan dengan baik dalam bentuk pedoman, standar operasional prosedur (SOP), atau kebijakan tertulis lainnya. Pada level ini, proses pengendalian telah mulai dilaksanakan secara konsisten di sebagian besar unit kerja, meskipun efektivitasnya belum sepenuhnya optimal.

c) Program/Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja

Selama Tahun 2025, Biro Keuangan dan BMN telah mengonsolidasikan penyusunan Laporan SPIP serta melakukan pengolahan data pengujian Tabel C, sebuah proses verifikasi faktual untuk memastikan bahwa setiap prosedur kerja di unit eselon II benar-benar dijalankan secara patuh, bukan sekadar kelengkapan administratif. Langkah ini diperkuat dengan koordinasi penilaian mandiri serta pengisian Kertas Kerja (KK) *Lead I*, *Lead II*, dan *Lead III* di lingkup Sekretariat Jenderal, yang secara sistematis membedah kualitas kebijakan, efektivitas implementasi, hingga bukti nyata keberhasilan pengendalian risiko di lapangan. Melalui rangkaian aktivitas ini, KKP memastikan bahwa seluruh mekanisme kerja telah memiliki alat deteksi dini terhadap potensi penyimpangan dan inefisiensi, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara akuntabel dan memberikan jaminan kualitas tata kelola pemerintahan yang semakin matang dan kredibel.

d) Upaya Perbaikan Kinerja yang Akan Datang

Dalam rangka akselerasi pencapaian target Level Maturitas SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun anggaran 2026, Biro Keuangan dan BMN akan menempuh upaya perbaikan melalui transformasi budaya kendali dari sekadar pemenuhan administratif menjadi penguatan substansi tata kelola berbasis risiko. Langkah konkret yang paling realistis untuk dilaksanakan adalah intensifikasi pendampingan teknis dan supervisi berkala kepada seluruh unit kerja guna memastikan bahwa manajemen risiko telah terintegrasi secara mendalam dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan. Selain itu, kami akan memperkuat kualitas pelaporan melalui mekanisme *quality assurance* terhadap pengisian Kertas Kerja (KK) mandiri serta sinkronisasi bukti dukung (eviden) yang lebih relevan dan valid sejak awal tahun anggaran. Dengan mengoptimalkan fungsi koordinasi bersama Inspektorat Jenderal dalam melakukan pemantauan berkelanjutan (*continuous monitoring*), diharapkan sistem pengendalian intern menjadi instrumen yang efektif dalam memitigasi penyimpangan dan inefisiensi, sehingga target maturitas SPIP dapat tercapai sebagai cerminan tata kelola instansi yang semakin andal dan transparan.

e) Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka menyelenggarakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) secara efektif dan efisien, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara selaku telah melakukan penyesuaian penggunaan sumber daya melalui realokasi pagu anggaran dari semula sebesar Rp15.044.620.000 menjadi Rp3.664.463.000. Penyesuaian ini dilaksanakan tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan fungsi pengendalian intern, dengan mengedepankan prioritas kegiatan yang mendukung penguatan SPIP, efisiensi belanja operasional, serta pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung pengendalian yang lebih terintegrasi dan tepat sasaran. Seluruh langkah efisiensi tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas mandat efisiensi dari Presiden Republik Indonesia.

3. Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Kelautan dan Perikanan

a) Definisi Indikator Kinerja

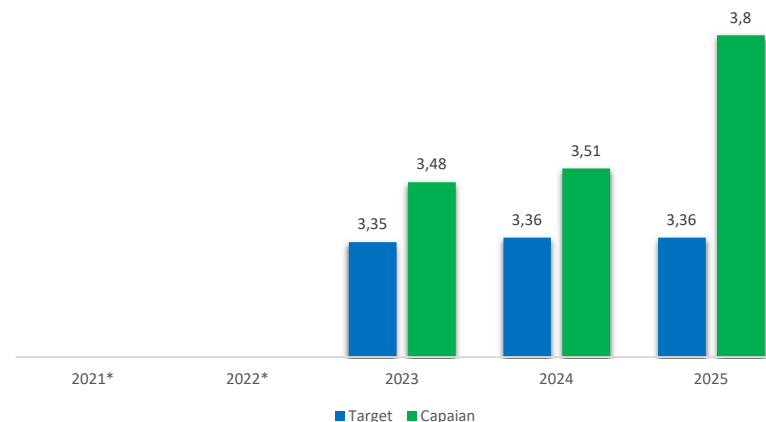
Indeks Pengelolaan Aset adalah Hasil pengukuran indikator kinerja di bidang pengelolaan BMN dengan mempertimbangkan hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN pada Kementerian/Lembaga sesuai indikator yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 288/KM.6/2023 tentang Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2023. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 288/KM.6/2023 tentang Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara, Indeks Pengelolaan Aset KKP dinilai dengan menjumlahkan nilai dari 8 parameter setelah dikalikan dengan bobot masing-masing parameter. 8 parameter tersebut adalah Tindak lanjut temuan pada LHP BPK atas LKPP terkait BMN, Realisasi PNBPN dari Pengelolaan Aset, Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN, Asuransi BMN, Tindak lanjut Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN, Tindak lanjut BMN Rusak Berat, BMN memiliki dokumen kepemilikan, dan Penggunaan BMN yang sesuai ketentuan

b) Analisis Capaian

Indikator kinerja Indeks Pengelolaan Aset (IPA) merupakan parameter strategis yang digunakan untuk mengukur kualitas, efektivitas, dan kepatuhan instansi pemerintah dalam mengelola Barang Milik Negara (BMN) yang diamanatkan kepadanya. Indeks ini mencakup berbagai dimensi penilaian, mulai dari kesesuaian penggunaan aset dengan standar barang dan standar kebutuhan (SBSK), kepatuhan dalam penatausahaan, hingga optimalisasi pemanfaatan aset untuk mendukung tugas dan fungsi organisasi maupun dalam menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Capaian IPA yang tinggi mencerminkan bahwa kementerian tidak hanya mampu menjaga keamanan fisik dan administratif aset, tetapi juga berhasil menerapkan manajemen aset yang modern, transparan, dan berorientasi pada nilai ekonomi serta efisiensi anggaran. Capaian Indikator Kinerja Indeks Pengelolaan Aset KKP Tahun 2025 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 13 Perbandingan Capaian Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 dengan Capaian Triwulanan Lima Tahun Terakhir dan Renstra Sekretariat Jenderal 2025 - 2029

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulanan (TW IV)					Target 2025	Tahunan			Renstra Sekretariat Jenderal 2025 - 2029		
	2020	2021	2022	2023	2024		Target	Realisasi	% Capaian	Target 2025	Realisasi	% Capaian
Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Kelautan dan Perikanan	-	-	-	3,48	3,51	3,36	3,36	3,80	113,10	3,36	3,80	113,10



Keterangan: *) Indikator Kinerja Belum Ditetapkan

Gambar 5 Target dan Capaian Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam 5 Tahun Terakhir

Pada tahun 2025, capaian Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Kelautan dan Perikanan meningkat secara signifikan hingga mencapai 3,80 atau 113,10%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 3,36 dan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2025-2029. Berdasarkan Kertas Kerja Perhitungan Indeks Pengelolaan Aset, nilai ini menjadi capaian tertinggi yang pernah diraih sejak tahun 2023, menunjukkan tren peningkatan yang stabil dari nilai 3,48 pada tahun 2023 dan 3,51 pada tahun 2024. Data substantif dalam kertas kerja tersebut sekaligus berfungsi sebagai dasar sanggahan yang kuat atas Surat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-9/KN/KN.2/2025, dengan memvalidasi akurasi data dukung serta pemutakhiran status aset yang telah dilakukan secara komprehensif. Keberhasilan ini menegaskan posisi KKP dalam jajaran kementerian dengan tata kelola aset terbaik, yang mampu mengintegrasikan sistem informasi manajemen aset secara presisi guna mendukung keberlanjutan operasional sektor kelautan dan perikanan.

c) Program/Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja

Capaian optimal Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan pada penghujung tahun 2025 merupakan representasi dari efektivitas tata kelola manajerial aset yang dijalankan secara konsisten dan terintegrasi oleh Biro Keuangan dan BMN. Berdasarkan analisis data kinerja, capaian ini didorong secara fundamental oleh Pelayanan Pengelolaan BMN yang telah terealisasi di atas 80% pada Triwulan IV, yang mencerminkan keberhasilan percepatan standarisasi layanan administrasi, mulai dari penetapan status penggunaan hingga penghapusan aset, secara tepat waktu. Sejalan dengan hal tersebut, penguatan aspek akuntabilitas dibuktikan melalui progres tindak lanjut atas temuan BPK pada LKPP yang telah melampaui 70%, sebuah angka yang menunjukkan efektivitas koordinasi lintas unit kerja dalam memvalidasi dokumen sumber dan menyelesaikan sengketa administratif aset yang bersifat kompleks. Sinergi antara tingginya produktivitas layanan manajerial dan komitmen penyelesaian rekomendasi pengawasan ini memastikan bahwa siklus hidup aset KKP dikelola secara profesional, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan nilai IPA sebagai cerminan pengelolaan kekayaan negara yang kredibel dan akuntabel.

d) Upaya Perbaikan Kinerja yang Akan Datang

Dalam rangka mempertahankan dan melampaui target Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun anggaran 2026, Biro Keuangan dan BMN akan mengimplementasikan strategi penguatan tata kelola aset yang berfokus pada digitalisasi pemantauan dan percepatan siklus hidup BMN. Biro Keuangan dan BMN mengimplementasikan strategi penguatan tata kelola aset melalui intensifikasi inventarisasi fisik secara berkala dan digitalisasi sistem pemantauan wasdal (pengawasan dan pengendalian) guna memastikan validitas data aset di seluruh unit kerja. Langkah ini ditempuh dengan mempercepat penyelesaian sertifikasi tanah yang belum bersertifikat, melakukan rekonsiliasi data BMN secara triwulanan yang lebih presisi, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset *idle* untuk meningkatkan nilai guna bagi organisasi. Selain itu, dilakukan penguatan pendampingan teknis kepada para pengelola barang di tingkat satuan kerja untuk mempercepat proses penghapusan aset yang sudah rusak berat, sehingga beban pencatatan dapat diminimalisir dan akurasi laporan manajerial meningkat. Dengan memastikan seluruh rekomendasi hasil audit BPK terkait aset diselesaikan secara tuntas sebelum berakhirnya semester berjalan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat menjaga stabilitas nilai Indeks Pengelolaan Aset secara berkelanjutan pada standar tertinggi.

e) Penggunaan Sumber Daya

Selama Tahun 2025, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara terus mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya guna mendukung pencapaian Indikator Kinerja Indeks Pengelolaan Aset (IPA) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara selaku telah melakukan penyesuaian penggunaan sumber daya melalui realokasi pagu anggaran dari semula sebesar Rp15.044.620.000 menjadi Rp3.664.463.000. Meskipun terdapat penyesuaian pagu anggaran sebagai bagian dari kebijakan efisiensi nasional, pelaksanaan kegiatan tetap difokuskan pada program prioritas yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pengelolaan aset, seperti validasi data Barang Milik Negara (BMN), koordinasi teknis lintas unit kerja, serta penyiapan dokumen administrasi aset. Pemanfaatan teknologi informasi juga terus dioptimalkan untuk menunjang proses kerja yang lebih cepat dan akurat. Dengan pendekatan ini, diharapkan setiap rupiah yang digunakan dapat berkontribusi secara maksimal terhadap peningkatan nilai IPA secara berkelanjutan.

4. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan

a) Definisi Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon I /K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai di bawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Tabel 14 Tiga Aspek Pengukuran Nilai IKPA

No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi RPD	15
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)
8	Capaian Output	25

Nilai IKPA terdiri dari nilai IKPA Satker, nilai IKPA Unit Eselon I, dan nilai IKPA K/L.

- Nilai IKPA Satker merupakan hasil perhitungan atas nilai setiap indikator dengan pembobotan masing-masing indikator berdasarkan data transaksi pada Satker.
- Nilai IKPA unit eselon I merupakan hasil perhitungan atas nilai setiap indikator dengan pembobotan masing-masing indikator pada seluruh Satker dalam lingkup eselon I.
- Nilai IKPA K/L merupakan hasil perhitungan atas nilai setiap indikator dengan pembobotan masing-masing indikator pada seluruh unit eselon I dalam lingkup K/L.

Nilai IKPA dikategorikan menjadi:

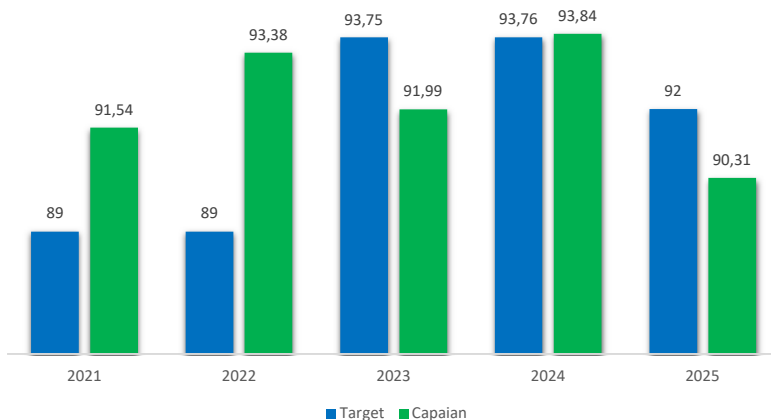
- sangat baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
- cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
- kurang, apabila nilai IKPA < 70 .

b) Analisis Capaian

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan alat ukur kualitas belanja kementerian/lembaga yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk menilai kesesuaian antara perencanaan dengan realisasi anggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, serta kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran. Indikator ini sangat krusial karena mencerminkan tata kelola keuangan yang sehat melalui penilaian atas delapan indikator utama, seperti Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, hingga Capaian Output. Melalui IKPA, unit kerja diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana publik sehingga setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara tepat waktu.

Tabel 15 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 dengan Capaian Triwulanan Lima Tahun Terakhir dan Renstra Sekretariat Jenderal 2025 - 2029

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulanan (TW IV)					Target 2025	Triwulanan (TW IV)			Renstra Sekretariat Jenderal 2025 - 2029		
	2020	2021	2022	2023	2024		Target	Realisasi	% Capaian	Target 2025	Realisasi	% Capaian
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan	92,15	91,54	93,38	91,99	93,84	92	92	90,31	98,16	92	90,31	98,16



Gambar 6 Grafik Target dan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam 5 Tahun Terakhir

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor 111/SJ.2/RC.610/I/2026 tanggal 10 Januari 2026 perihal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Pelaksanaan Anggaran KKP Semester II Tahun 2025, capaian IKPA pada tahun 2025 tercatat sebesar 90,31 dari target yang ditetapkan sebesar 92. Dengan demikian, indikator ini memperoleh tingkat capaian sebesar 98,16%, baik terhadap target tahunan maupun target dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025–2029. Jika dibandingkan dengan historis capaian tahun-tahun sebelumnya, performa ini mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, di mana pada tahun 2020 tercapai 92,15, tahun 2021 sebesar 91,54, dan mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan nilai 93,38. Meskipun pada tahun 2023 capaian kembali menurun menjadi 91,99 dan tidak memenuhi target, kementerian sempat menunjukkan pemulihan pada tahun 2024 dengan nilai 93,84. Analisis terhadap data tersebut menunjukkan perlunya penguatan kembali pada aspek akurasi perencanaan dan disiplin eksekusi anggaran agar tren penurunan pada tahun 2025 dapat segera dimitigasi, guna memastikan pengelolaan fiskal di lingkup KKP kembali pada standar optimal yang telah ditetapkan.

c) Program/Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja

Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan pada akhir tahun 2025 sebesar 90,31 merupakan hasil dari upaya pengendalian intensif yang dilakukan secara berkelanjutan melalui rangkaian koordinasi bersama PIC Eselon I sepanjang Triwulan IV. Berdasarkan analisis kegiatan, Biro Keuangan dan BMN telah melaksanakan supervisi terjadwal yang mencakup Rapat Monitoring dan Evaluasi pada 13 Oktober 2025 berdasarkan surat Nomor B.2465/SJ.2/TU.330/X/2025, 21 November 2025 berdasarkan surat Nomor B.3432/SJ.2/TU.330/XI/2025, hingga evaluasi akhir pada 8 Desember 2025 berdasarkan surat Nomor B.3648/SJ.2/TU.330/XII/2025. Meskipun angka final belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 92, frekuensi pertemuan tersebut terbukti efektif dalam memitigasi deviasi yang lebih dalam pada komponen krusial seperti rasio penyerapan anggaran dan penyelesaian tagihan di tengah dinamika penyesuaian kebijakan anggaran di akhir tahun. Terjaganya nilai di atas 90 menunjukkan bahwa komitmen seluruh unit Eselon I dalam menjaga kedisiplinan administratif tetap tinggi, di mana hambatan pencapaian target lebih dominan dipengaruhi oleh faktor eksternal terkait ketidaktercapaian target output pada beberapa proyek strategis, namun secara prosedural tata kelola pelaksanaan anggaran tetap berjalan pada koridor yang akuntabel.

Tidak tercapainya target IKPA KKP tahun 2025 yang hanya menyentuh angka 90,31 dari target 92 adalah tingginya intensitas revisi anggaran dan kebijakan *self-blocking* sebagai respons langsung terhadap instruksi efisiensi anggaran Presiden. Dinamika kebijakan ini berdampak signifikan pada rendahnya skor indikator Deviasi Halaman III DIPA, di mana rencana penarikan dana bulanan yang telah disusun di awal tahun menjadi tidak relevan akibat adanya pemotongan atau pergeseran alokasi belanja secara mendadak demi penghematan nasional. Terhadap data tersebut menunjukkan perlunya penguatan kembali pada aspek akurasi perencanaan dan disiplin eksekusi anggaran agar tren penurunan pada tahun 2025 dapat segera dimitigasi.

d) Upaya Perbaikan Kinerja yang Akan Datang

Biro Keuangan dan BMN meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2026 melalui penguatan kedisiplinan kalender kegiatan dan akurasi proyeksi penarikan dana sejak awal tahun anggaran. Strategi ini dilaksanakan dengan mewajibkan seluruh unit kerja untuk melakukan sinkronisasi antara Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA dengan realisasi belanja secara bulanan guna meminimalisir deviasi yang sering menjadi pengurang nilai IKPA. Selain itu, kami melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa melalui *early tender*, pengawasan ketat terhadap ketepatan waktu penyelesaian tagihan (SPM) dalam waktu 17 hari kerja, serta intensifikasi pemantauan capaian output secara real-time melalui aplikasi yang terintegrasi. Dengan mengoptimalkan fungsi koordinasi bersama para PIC Eselon I melalui rapat evaluasi teknis yang lebih dini dan bersifat solutif terhadap hambatan serapan, Kementerian Kelautan dan Perikanan berkomitmen untuk memastikan setiap rupiah anggaran tidak hanya terserap secara maksimal, tetapi juga memenuhi seluruh parameter kualitas belanja sesuai standar Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

e) Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif menjadi salah satu kunci utama dalam mendukung tercapainya nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan selama Tahun 2025. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia, waktu, dan anggaran melalui perencanaan yang terukur serta pelaksanaan kegiatan yang tepat sasaran. Seluruh proses pengelolaan anggaran difokuskan pada prioritas kebutuhan strategis, termasuk pemantauan berkala terhadap capaian realisasi, pengendalian outstanding kontrak, dan pelaksanaan evaluasi kinerja secara terintegrasi. Dengan meminimalkan pemborosan dan meningkatkan produktivitas, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara memastikan bahwa setiap alokasi sumber daya digunakan secara maksimal untuk menghasilkan output yang mendukung pencapaian target IKPA secara berkelanjutan.

5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Sekretariat Jenderal

a) Definisi Indikator Kinerja

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator. Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

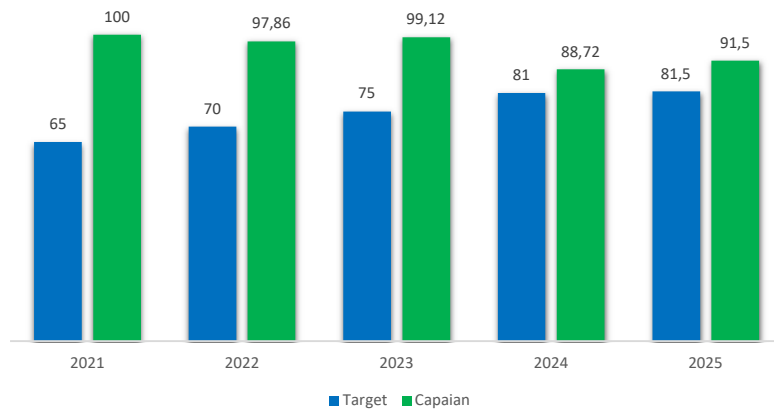
1. Sangat Baik, apabila NKPA > 90;
2. Baik, apabila NKPA > 80 – 90;
3. Cukup, apabila NKPA > 60 – 80;
4. Kurang, apabila NKPA > 50 – 60;
5. Sangat Kurang, apabila ≤ 50.

b) Analisis Capaian

Indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Sekretariat Jenderal merupakan instrumen evaluasi yang digunakan untuk mengukur kualitas dan ketepatan proses penganggaran sejak tahap perencanaan awal. Indikator ini mencakup penilaian terhadap sejauh mana usulan anggaran selaras dengan program prioritas, akurasi rencana penarikan dana bulanan, serta kepatuhan terhadap jadwal penetapan dokumen pelaksanaan anggaran. Dengan menjaga nilai NKPA yang tinggi, Sekretariat Jenderal memastikan bahwa setiap alokasi fiskal memiliki dasar perencanaan yang matang, sehingga memitigasi risiko terjadinya inefisiensi belanja dan menjamin kelancaran operasional dalam mendukung visi kementerian secara berkelanjutan. Riwayat capaian nilai NKPA dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16 Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2025 dengan Capaian Triwulanan Lima Tahun Terakhir dan Renstra Sekretariat Jenderal 2025 - 2029

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulanan (TW IV)					Target 2025	Triwulanan (TW IV)			Renstra Sekretariat Jenderal 2025 - 2029		
	2020	2021	2022	2023	2024		Target	Realisasi	% Capaian	Target 2025	Realisasi	% Capaian
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Sekretariat Jenderal	92,78	100	97,86	99,12	88,72	81,50	81,50	91,50	112,27	81,50	91,50	112,27



Gambar 8 Target dan Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Sekretariat Jenderal dalam 5 Tahun Terakhir

Capaian indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Sekretariat Jenderal dalam kurun waktu lima tahun terakhir konsisten melampaui target yang telah ditetapkan, meskipun terdapat fluktuasi nilai capaian pada setiap tahunnya. Setelah dengan capaian sebesar 89,10 dengan target 86 pada tahun 2021, nilai capaian kinerja mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 87,73 dengan target 86. Peningkatan pun kembali terjadi pada tahun 2023 dengan capaian sebesar 90,84 dari target 86, sebelum mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 88,72 dengan target 81.

KEMENTERIAN KEUANGAN DAN PERKHIDMATAN KEMENTERIAN KEUANGAN DAN PERKHIDMATAN

Role: PMN TA (2025) Logout

NK Perencanaan KL

Monitoring / NK Perencanaan KL

Download Excel

Tampilkan: 10 entri

Cari:

No.	Kode K/L	K/L	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas			Efisiensi	
				IKSS	IKP	CRO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	002	KEMENTERIAN KEUANGAN DAN PERKHIDMATAN	92,78	95,90	98,28	98,87	98,99	68,90

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya Selanjutnya

Gambar 7 Hasil Indikator Kinerja NKPA Tahun 2025

Namun demikian, capaian pada tahun 2025 menunjukkan perbaikan yang signifikan, ditandai dengan realisasi nilai kinerja perencanaan anggaran hingga mencapai 91,50, melampaui target yang ditetapkan sebesar 81,50 sehingga indikator ini memperoleh tingkat capaian sebesar 112,27%. Capaian ini juga melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2025-2029. Dengan demikian, kondisi tersebut mencerminkan komitmen dan konsistensi seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal dalam melaksanakan perencanaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta selaras dengan sasaran program dan kegiatan prioritas. Fluktuasi capaian yang terjadi tidak mengurangi kualitas perencanaan anggaran yang telah dilaksanakan secara terencana dan terukur.

c) Program/Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja

Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Sekretariat Jenderal pada tahun 2025 merupakan manifestasi dari penguatan kualitas perencanaan yang presisi dan sinkron dengan realisasi target organisasi. Hal ini didukung secara fundamental melalui pelaksanaan kegiatan Pemantauan Capaian NKPA Triwulan IV TA 2025 pada 19 Desember 2025, sebagaimana merujuk pada Surat Undangan Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor B.3779/SJ.2/TU.330/XII/2025, yang berfungsi sebagai instrumen validasi akhir atas keselarasan antara proyeksi perencanaan dengan capaian output riil. Analisis terhadap forum koordinasi tersebut menunjukkan bahwa Sekretariat Jenderal telah berhasil mengoptimalkan aspek efisiensi anggaran—yaitu pencapaian target output dengan penggunaan sumber daya yang lebih hemat—serta menjaga konsistensi antara perencanaan dan implementasi guna meminimalisir deviasi anggaran yang tidak perlu. Melalui evaluasi mendalam terhadap parameter NKPA dalam rapat tersebut, Biro Keuangan dan BMN mampu mengidentifikasi serta memetakan keberhasilan efisiensi belanja secara akurat, sehingga nilai NKPA tetap terjaga pada level optimal sebagai cerminan kredibilitas dan akuntabilitas tata kelola perencanaan fiskal di lingkup Sekretariat Jenderal.

d) Upaya Perbaikan Kinerja yang Akan Datang

Biro Keuangan dan BMN mengoptimalkan capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Sekretariat Jenderal pada tahun 2026 melalui strategi sinkronisasi berkala antara target output dan alokasi anggaran yang lebih presisi sejak awal tahun anggaran. Langkah konkret yang akan diambil meliputi penguatan asistensi teknis kepada seluruh unit Eselon II dalam menyusun proyeksi belanja yang selaras dengan kemampuan eksekusi di lapangan guna meminimalisir inefisiensi serta menjaga konsistensi pencapaian output. Selain itu, kami akan mengintensifkan validasi data pada sistem aplikasi kinerja anggaran melalui mekanisme rekonsiliasi internal secara triwulanan, yang bertujuan untuk mendeteksi secara dini gap antara realisasi fisik dan penyerapan dana. Dengan mendorong pemanfaatan sisa anggaran hasil efisiensi untuk program prioritas lainnya secara akuntabel, Sekretariat Jenderal berkomitmen untuk mempertahankan predikat kinerja perencanaan yang kredibel, sehingga setiap rupiah yang direncanakan mampu memberikan dampak nyata terhadap target kinerja kementerian.

e) Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mencapai nilai yang maksimal pada indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Sekretariat Jenderal selama Tahun 2025 dilakukan secara efektif dan efisien melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia, waktu, serta anggaran yang tersedia. Pendekatan strategis dilakukan dengan mengutamakan koordinasi lintas unit secara tepat sasaran, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pemantauan dan evaluasi perencanaan anggaran, serta penyelenggaraan kegiatan yang berorientasi pada hasil dan berdampak langsung terhadap pencapaian kinerja. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara selaku koordinator dan pembina dalam pelaksanaan indikator ini turut memastikan bahwa seluruh proses dilaksanakan sesuai prinsip akuntabilitas dan efisiensi, guna mendukung perencanaan anggaran yang lebih terintegrasi, responsif, dan mendukung tercapainya target kinerja Sekretariat Jenderal secara menyeluruh.

6. Persentase Implementasi Standar biaya Keluaran Kementerian Kelautan dan Perikanan

a) Definisi Indikator Kinerja

Standar Biaya Keluaran adalah Standar Biaya Keluaran (SBK) adalah indeks biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan 1 (satu) volume keluaran atau output. SBK terdiri dari:

- 1) Standar Biaya Keluaran Umum yang selanjutnya disingkat SBKU, yaitu SBK yang berlaku untuk beberapa atau seluruh Kementerian/Lembaga.
- 2) Standar Biaya Keluaran Khusus yang selanjutnya disingkat SBKK, yaitu SBK yang berlaku untuk 1 (satu) Kementerian/Lembaga. SBK digunakan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran yang berkualitas dan efisien sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui.

Memperhatikan Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan dalam rangka penguatan peran Standar Biaya Keluaran (SBK), hal tersebut diperlukan untuk menghasilkan sebuah keluaran terhadap kegiatan yang khusus dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga tertentu dan/atau di wilayah tertentu. Salah satu pendekatan dalam penyusunan SBK adalah penganggaran berbasis kinerja, yaitu penyusunan anggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran (output) dan hasil (outcome) yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran. Dalam rangka mendukung pelaksanaan penyusunan Standar Biaya Khusus (SBK) yang baik dan sesuai dengan Petunjuk Penyusunan Standar Biaya Khusus (SBK).

Persentase Implementasi SBK KKP terdiri dari kegiatan identifikasi Standar Biaya Keluaran pada Rencana Kerja Anggaran Unit Eselon I, penyusunan usulan Standar Biaya Keluaran KKP dan monitoring dan evaluasi penggunaan Standar Biaya Keluaran KKP yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan SBK dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran dilakukan secara efisien, efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penilaian Indikator Kinerja ini dilakukan setahun sekali dengan skor paling tinggi 100%.

Persentase Implementasi SBK KKP merupakan Indikator Kinerja baru pada Biro Keuangan dan BMN di Tahun 2025 dan merupakan IKI mandatori dari Jabatan Fungsional Analis Anggaran, yang terdiri dari 3 tahapan penilaian indikator, yaitu:

- 1) Identifikasi Standar Biaya Keluaran pada Rencana Kerja Anggaran Unit Eselon I KKP;
- 2) Penyusunan Usulan Standar Biaya Keluaran KKP;
- 3) Monitoring dan Evaluasi Implementasi Standar Biaya Keluaran KKP.

b) Analisis Capaian

Indikator kinerja Persentase Implementasi Standar Biaya Keluaran (SBK) Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan parameter untuk mengukur sejauh mana standarisasi biaya telah diterapkan dalam proses penyusunan anggaran berbasis output. SBK berfungsi sebagai acuan biaya tertinggi yang dapat dialokasikan untuk menghasilkan satu satuan keluaran tertentu, guna menjamin prinsip efisiensi, efektivitas, dan kesetaraan harga di seluruh unit kerja KKP. Dengan penerapan SBK yang konsisten, kementerian dapat memastikan bahwa alokasi anggaran dilakukan secara proporsional sesuai dengan beban kerja dan target fisik yang telah direncanakan, sekaligus memitigasi adanya risiko inefisiensi pada tahap perencanaan belanja negara. Berikut adalah tabel yang berisi target dan capaian nilai Indikator di tahun sebelumnya:

Tabel 17 Perbandingan Capaian Persentase Implementasi Standar biaya Keluaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 dengan Capaian Triwulanan Lima Tahun Terakhir dan Renstra Sekretariat Jenderal 2025 - 2029

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulanan (TW IV)					Target 2025	Triwulanan (TW IV)			Renstra Sekretariat Jenderal 2025 - 2029		
	2020	2021	2022	2023	2024		Target	Realisasi	% Capaian	Target 2025	Realisasi	% Capaian
Persentase Implementasi Standar Biaya Keluaran Kementerian Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100

Capaian indikator kinerja Persentase Implementasi Standar Biaya Keluaran Kementerian Kelautan dan Perikanan mencapai kinerja optimal dengan realisasi 100% sesuai dengan target yang ditetapkan secara tahunan maupun target dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2025-2029. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, indikator ini juga mencatat realisasi sebesar 100%, yang menunjukkan konsistensi kinerja pada dua tahun berturut-turut. Indikator kinerja Persentase Implementasi SBK KKP baru ditetapkan pada tahun anggaran 2024, seiring dengan adanya penambahan formula penghitungan pada Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) yang memasukkan aspek efektivitas dan efisiensi pemanfaatan Standar Biaya Khusus (SBK). Dengan demikian, indikator ini tidak memiliki capaian pembanding pada tahun-tahun sebelumnya. Konsistensi capaian maksimal pada tahun 2024 dan 2025 mencerminkan kesiapan dan komitmen kuat seluruh unit kerja dalam menerapkan Standar Biaya Keluaran secara menyeluruh di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Capaian tersebut juga mengindikasikan bahwa pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja telah berjalan semakin efektif dan optimal.

c) Program/Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja

Selama Tahun 2025, keberhasilan capaian indikator Persentase Implementasi Standar Biaya Keluaran (SBK) KKP merupakan manifestasi dari konsistensi unit kerja dalam menerapkan efisiensi biaya yang tervalidasi melalui kegiatan Pemantauan Capaian NKPA Triwulan IV TA 2025 pada 19 Desember 2025, sebagaimana merujuk pada Undang-undang Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor B.3779/SJ.2/TU.330/XII/2025. Melalui forum strategis tersebut, dilakukan verifikasi menyeluruh terhadap kepatuhan penggunaan pagu standar pada setiap output sebagai upaya memastikan alokasi sumber daya tepat sasaran dan memiliki daya saing biaya yang optimal. Mengingat SBK merupakan komponen fundamental kedua setelah NKPA dalam struktur pembentuk Nilai Kinerja Anggaran (NKA), keterpaduan pelaksanaan kedua aspek tersebut dalam satu mekanisme pemantauan terbukti efektif dalam meminimalisir inefisiensi belanja dan menjaga akurasi pelaporan kinerja. Sinergi ini memastikan bahwa nilai NKA yang dihasilkan di akhir tahun anggaran benar-benar merepresentasikan kualitas belanja yang berkualitas (*spending better*) serta akuntabilitas fiskal yang kredibel di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

d) Upaya Perbaikan Kinerja yang Akan Datang

Biro Keuangan dan BMN mengoptimalkan ketercapaian indikator Persentase Implementasi Standar Biaya Keluaran (SBK) pada tahun anggaran 2026 melalui penguatan asistensi teknis dan pendampingan penyusunan RKA-K/L secara intensif kepada seluruh unit Eselon I guna memastikan ketepatan penggunaan standar biaya pada setiap komponen output. Upaya ini ditempuh melalui pemetaan nomenklatur kegiatan yang memiliki karakteristik seragam untuk diusulkan menjadi SBK baru serta sinkronisasi data perencanaan dengan kebijakan standar biaya terkini dari Kementerian Keuangan sebelum dokumen anggaran disahkan. Dengan meningkatkan kualitas verifikasi administratif terhadap dokumen usulan anggaran serta mendorong sinergitas lintas unit kerja dalam pemenuhan kriteria teknis SBK, Kementerian Kelautan dan Perikanan berkomitmen mewujudkan perencanaan belanja yang lebih kredibel, efisien, dan selaras dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja.

e) Penggunaan Sumber Daya

Selama Tahun 2025, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara mengupayakan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif dalam mendukung realisasi kegiatan Persentase Implementasi Standar Biaya Keluaran (SBK) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Optimalisasi dilakukan melalui pemanfaatan data perencanaan yang telah tersedia untuk menyusun anggaran berbasis output sesuai ketentuan SBK, serta pelaksanaan asistensi dan pendampingan teknis secara terfokus kepada satuan kerja yang memerlukan bimbingan. Selain itu, kegiatan koordinasi antar unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan dilakukan secara kooperatif dan akurat guna memastikan keselarasan perencanaan dan penganggaran dengan standar biaya yang berlaku. Melalui pendekatan ini, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara memastikan bahwa penggunaan anggaran dan tenaga yang tersedia mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap peningkatan implementasi SBK secara konsisten dan terukur.

7. Batas Tertinggi Persentase Nilai temuan LHP BPK atas LK Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal

a) Definisi Indikator Kinerja

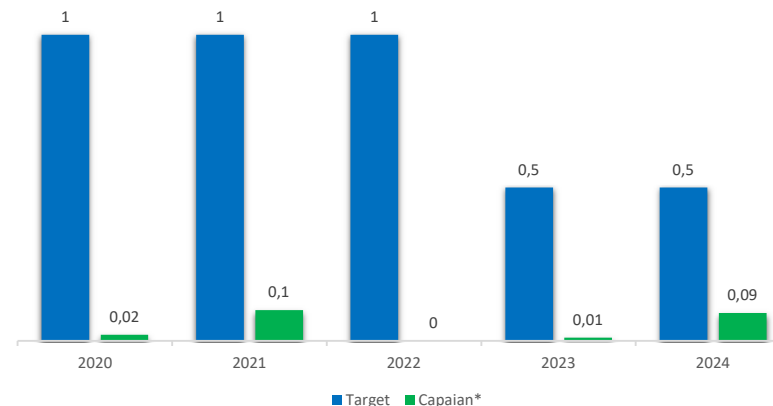
Indikator kinerja Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan (LK) Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai efektivitas pengelolaan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan dalam pelaksanaan anggaran oleh Sekretariat Jenderal. Indikator ini menunjukkan seberapa besar nilai temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LK Sekretariat Jenderal jika dibandingkan dengan total realisasi anggaran yang dikelola. Semakin kecil persentase ini, maka semakin baik kualitas tata kelola keuangan dan semakin rendah risiko atas penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan anggaran.

b) Analisis Capaian

Indikator kinerja Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran merupakan parameter untuk mengukur tingkat materialitas dan kualitas pertanggungjawaban keuangan pada lingkup Sekretariat Jenderal. Indikator ini mencerminkan sejauh mana efektivitas sistem pengendalian intern dalam memitigasi penyimpangan yang berpotensi menjadi temuan finansial oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan menjaga persentase nilai temuan pada level yang serendah mungkin, Sekretariat Jenderal menunjukkan komitmen dalam mengelola anggaran negara secara transparan dan akuntabel, sehingga integritas laporan keuangan tetap terjaga dari kesalahan penyajian yang bersifat material. Berikut adalah tabel perbandingan capaian tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya:

Tabel 18 Perbandingan Capaian Batas Tertinggi Persentase Nilai temuan LHP BPK atas LK Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2025 dengan Capaian Triwulanan Lima Tahun Terakhir dan Renstra Sekretariat Jenderal 2025 - 2029

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulanan (TW IV)					Target 2025	Triwulanan (TW IV)			Renstra Sekretariat Jenderal 2025 - 2029		
	2020	2021	2022	2023	2024		Target	Realisasi	% Capaian	Target 2025	Realisasi	% Capaian
Batas Tertinggi Persentase Nilai temuan LHP BPK atas LK Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal	0,02	0,1	0	0,01	0,09	≤0,5	≤0,5	0,22	120	≤0,5	0,22	120



Keterangan:

*) Semakin rendah hasil capaian, semakin baik

Gambar 9 Target dan Capaian Batas Tertinggi Persentase Nilai temuan LHP BPK atas LK Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal dalam 5 Tahun terakhir

Capaian Indikator Kinerja Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan (LK) Sekretariat Jenderal dibandingkan dengan realisasi anggaran menunjukkan kinerja yang baik dan konsisten dalam lima tahun terakhir dengan melebihi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021, capaian indikator tercatat sebesar 0,1 dari target di bawah 1, kemudian meningkat pada tahun 2022 dengan capaian 0 (nol) dari target yang sama. Selanjutnya, pada tahun 2023 capaian sebesar 0,01 dengan target di bawah 0,5 dan pada tahun 2024 capaian tercatat sebesar 0,09 dengan target yang sama.

Berdasarkan Nota Dinas Inspektorat Jenderal Nomor 82/ITJ/RC.610/X/2025 tanggal 7 Oktober 2025 perihal Capaian IKU Batas Tertinggi Nilai Temuan BPK RI atas Laporan Keuangan KKP, capaian pada tahun 2025 tercatat sebesar 0,22 dari target yang ditetapkan di bawah 0,5. Capaian ini menegaskan bahwa nilai temuan LHP BPK atas LK Sekretariat Jenderal tetap berada jauh di bawah ambang batas yang ditentukan, meskipun realisasi anggaran terus meningkat setiap tahunnya. Kondisi tersebut mencerminkan efektivitas pengelolaan anggaran dan pengendalian intern yang dijalankan oleh Sekretariat Jenderal, serta peran aktif Biro Keuangan dan Barang Milik Negara dalam memastikan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

c) Program/Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja

Pencapaian indikator kinerja Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal yang secara konsisten berada di bawah ambang batas yang ditetapkan tidak terlepas dari efektivitas pelaksanaan program penguatan pengendalian dan kepatuhan pengelolaan keuangan. Salah satu program strategis yang berkontribusi signifikan terhadap capaian tersebut adalah pelaksanaan Koordinasi Pembahasan Tindak Lanjut atas Temuan BPK-RI, antara lain melalui rapat yang dilakukan berdasarkan Undangan Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor B.54/SJ/TU.330/I/2026 dan B.86/SJ/TU.330/I/2026. Dimana kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian administratif rekomendasi hasil pemeriksaan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pengendalian pasca-audit (*post audit control*) untuk memastikan bahwa akar permasalahan temuan dapat diidentifikasi dan dicegah agar tidak berulang.

Efektivitas program ini tercermin dari tetap rendahnya persentase nilai temuan BPK meskipun realisasi anggaran Sekretariat Jenderal mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga diimbangi dengan penguatan sistem pengendalian intern dan kepatuhan, sehingga risiko terjadinya penyimpangan dapat dimitigasi secara memadai.

d) Upaya Perbaikan Kinerja yang Akan Datang

Meskipun capaian indikator kinerja telah menunjukkan hasil yang sangat baik dan konsisten berada di bawah batas maksimal yang ditetapkan, Sekretariat Jenderal, dalam hal ini Biro Keuangan dan BMN tetap memandang perlu adanya langkah-langkah penyempurnaan guna menjaga keberlanjutan kualitas tata kelola keuangan. Upaya perbaikan ke depan diarahkan tidak semata pada penyelesaian temuan, tetapi pada penguatan aspek pencegahan.

Ke depan, Biro Keuangan dan BMN akan mengintensifkan mekanisme koordinasi dan supervisi secara periodik dengan seluruh unit kerja Eselon II, khususnya dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Kegiatan pembahasan tindak lanjut akan dimanfaatkan sebagai sarana *early warning system* untuk mengidentifikasi potensi risiko ketidakpatuhan sejak tahap awal pelaksanaan anggaran. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat budaya kepatuhan dan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan, sehingga Sekretariat Jenderal tidak hanya mampu mempertahankan capaian indikator kinerja pada level yang optimal, tetapi juga meningkatkan ketahanan sistem pengendalian intern terhadap dinamika regulasi dan kompleksitas pengelolaan anggaran di masa mendatang.

e) Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mendukung pencapaian nilai indikator kinerja Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara secara konsisten menerapkan prinsip penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien, khususnya di tengah kondisi efisiensi anggaran. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2025 diarahkan untuk memberikan dampak maksimal terhadap pemenuhan target indikator, dengan mengoptimalkan dukungan sumber daya manusia, teknologi informasi, serta sinergi antar unit kerja tanpa menimbulkan pemborosan anggaran. Langkah strategis seperti pelaksanaan rapat pembahasan tindak lanjut temuan dilakukan secara terintegrasi dan tepat sasaran, serta pemantauan progres penyelesaian rekomendasi difokuskan pada prioritas yang berisiko tinggi terhadap akuntabilitas keuangan. Pendekatan ini tidak hanya memastikan efisiensi penggunaan anggaran, tetapi juga memperkuat budaya pengawasan dan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal.

8. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal

a) Definisi Indikator Kinerja

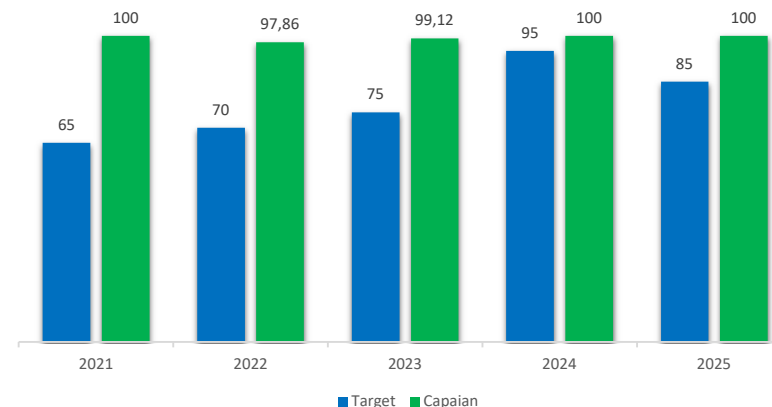
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal merupakan suatu ukuran kuantitatif yang mencerminkan Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Jenderal berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang telah ditindaklanjuti (berstatus tuntas) oleh Unit Kerja Eselon II di lingkup Sekretariat Jenderal. Obyek capaian Indikator Kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal adalah rekomendasi yang terbit pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi Inspektorat Jenderal pada periode pengukuran.

b) Analisis Capaian

Indikator kinerja Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal merupakan parameter untuk mengukur sejauh mana saran dan arahan dari hasil audit internal maupun eksternal telah diimplementasikan sebagai solusi nyata bagi organisasi. Indikator ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian administratif atas temuan pengawasan, melainkan pada transformasi rekomendasi tersebut menjadi langkah-langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola, menutup celah kelemahan sistemik, dan meningkatkan efektivitas proses bisnis. Melalui pemanfaatan rekomendasi yang optimal, Sekretariat Jenderal memastikan terjadinya proses pembelajaran organisasi yang berkelanjutan guna memperkuat sistem pengendalian intern dan menjamin akuntabilitas di seluruh lini kerja. Adapun formula penilaian disajikan pada tabel berikut:

Tabel 19 Perbandingan Capaian Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal dengan Capaian Triwulanan Lima Tahun Terakhir dan Renstra Sekretariat Jenderal 2025 - 2029

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulanan (TW IV)					Target 2025	Triwulanan (TW IV)			Rancangan Awal Renstra KKP 2025-2029		
	2020	2021	2022	2023	2024		Target	Realisasi	% Capaian	Target 2025	Realisasi	% Capaian
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal	92,78	100	97,86	99,12	100	85	85	100	117,65	85	100	117,65



Gambar 10 Target dan Capaian Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal dalam 5 Tahun Terakhir

Capaian indikator kinerja Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal menunjukkan tren yang sangat positif selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2021, capaian tercatat sebesar 100% dengan target 65%. Tren capaian tetap tinggi pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebesar 97,86% dan 99,12%, melebihi target 70% dan 75%. Pada tahun 2024, target ditetapkan sebesar 95% dan capaian kembali menyentuh angka maksimal, yaitu 100%. Jika dibandingkan dengan capaian 2025, berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal KKP Nomor 60/ITJ.0/RC.610/I/2026 tanggal 8 Januari 2026 perihal Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP" Tahun 2025, capaian indikator ini tercatat telah mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 85%. Dengan demikian, capaian ini melampaui target tahunan dan target dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2025-2029. Perolehan capaian tahun 2025 mencerminkan komitmen kuat Sekretariat Jenderal dalam menindaklanjuti hasil pengawasan sebagai bagian dari upaya perbaikan kinerja organisasi.

c) Program/Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja

Dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal, dengan proaktif menyelenggarakan rangkaian kegiatan asistensi dan rekonsiliasi yang sistematis dan terukur. Berdasarkan kegiatan Asistensi Monitoring Progres Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal pada 14 November 2025, sebagaimana merujuk pada Surat Undangan Nomor B.3433/SJ.2/TU.330/XI/2025 dan Notulensi Nomor 2958/SJ.2/TU.140/XI/2025, Biro Keuangan dan BMN, sebagai penanggungjawab di lingkup Sekretariat Jenderal, telah melakukan identifikasi kendala administratif secara dini serta pemetaan status penyelesaian rekomendasi pada tiap unit kerja. Langkah strategis tersebut kemudian diperkuat dengan Rekonsiliasi Data Penyelesaian Tindak Lanjut melalui forum *Entry Meeting* Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen Triwulan IV pada 18 Desember 2025 sesuai Surat Undangan Nomor B.3781/SJ.2/TU.330/XII/2025, yang berfungsi sebagai instrumen validasi akhir dokumen sumber dan penyelarasan data tindak lanjut guna memastikan seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti secara berkualitas sesuai standar pengawasan. Sinergitas kedua kegiatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan validitas data kinerja dan memastikan pemanfaatan hasil pengawasan sebagai basis perbaikan tata kelola di lingkup Sekretariat Jenderal, sehingga target persentase rekomendasi yang dimanfaatkan dapat terealisasi secara maksimal dan akuntabel di penghujung tahun anggaran 2025.

d) Upaya Perbaikan Kinerja yang Akan Datang

Melanjutkan keberhasilan pada triwulan ini, Sekretariat Jenderal pada triwulan berikutnya akan berfokus pada upaya proaktif untuk mempertahankan capaian maksimal Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal agar tetap melampaui target 86% pada tahun 2026, Biro Keuangan dan BMN, selaku koordinator lingkup Sekretariat Jenderal, akan mengimplementasikan mekanisme *early warning* terhadap rekomendasi yang berpotensi mengalami keterlambatan penyelesaian, serta memperkuat supervisi dan pendampingan kepada unit kerja Eselon II, dengan penyelenggaraan forum rekonsiliasi data tindak lanjut secara triwulanan untuk memastikan validitas dan kecukupan dokumen pendukung (eviden) sesuai standar Inspektorat Jenderal. Selain itu, peningkatan komitmen pimpinan unit kerja akan terus didorong melalui penyajian rapor perkembangan tindak lanjut secara periodik, sehingga hasil pengawasan benar-benar menjadi instrumen korektif yang transformatif dalam memperkuat tata kelola organisasi dan memitigasi potensi temuan berulang di masa mendatang.

e) Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mencapai target Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal selama Tahun 2025, Biro Keuangan dan BMN telah berkomitmen penuh pada penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif. Optimalisasi alokasi anggaran untuk pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM dalam analisis dan tindak lanjut rekomendasi pengawasan, memastikan setiap rupiah memberikan dampak maksimal terhadap peningkatan kualitas laporan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi seperti sistem pemantauan terpadu secara proaktif memfasilitasi pelacakan dan evaluasi implementasi rekomendasi, mengurangi kebutuhan akan intervensi manual yang memakan waktu dan sumber daya. Pendekatan ini tidak hanya menghemat biaya operasional, tetapi juga mempercepat proses perbaikan kinerja, sehingga secara langsung berkontribusi pada tercapainya target indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan.

9. Indeks Pengelolaan BLU Kementerian Kelautan dan Perikanan

a) Definisi Indikator Kinerja

Indeks Pengelolaan Badan Layanan Umum (IPB) adalah satuan ukur yang ditetapkan untuk menilai kinerja pengelolaan BLU di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan mempertimbangkan hasil realisasi Penerimaan BLU, pelaksanaan perbaikan kinerja BLU melalui penyelesaian tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi Kementerian Keuangan, dan pelaporan. Penilaian IKU ini dilakukan setahun sekali dengan sistem penilaian indeks paling tinggi 4.

- 1) Persentase realisasi PNBP BLU
- 2) Persentase penyelesaian tindak lanjut
- 3) Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan satker BLU.

b) Analisis Capaian

Indikator kinerja Indeks Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan parameter komprehensif yang dirancang untuk mengevaluasi tingkat kemandirian, kualitas layanan, serta akuntabilitas tata kelola pada unit-unit kerja yang menerapkan pola keuangan BLU. Indeks ini mencakup berbagai dimensi penilaian strategis, mulai dari kinerja keuangan yang sehat dan standar pelayanan minimum yang terpenuhi, hingga implementasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). Melalui parameter ini, kementerian memastikan bahwa setiap unit BLU mampu memberikan pelayanan publik yang optimal dan inovatif tanpa meninggalkan prinsip efisiensi fiskal, sehingga dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan melalui optimalisasi aset dan pendapatan yang dikelola secara mandiri. Berikut adalah tabel perbandingan capaian Indikator Kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya:

Tabel 20 Perbandingan Capaian Indeks Pengelolaan BLU Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 dengan Capaian Triwulanan Lima Tahun Terakhir dan Renstra Sekretariat Jenderal 2025 - 2029

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulanan (TW IV)					Target 2025	Triwulanan (TW IV)			Renstra Sekretariat Jenderal 2025 - 2029		
	2020	2021	2022	2023	2024		Target	Realisasi	% Capaian	Target 2025	Realisasi	% Capaian
Indeks Pengelolaan BLU Kementerian Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	3,34	3	3	4	133,33	3	4	133,33

Indikator kinerja Indeks Pengelolaan BLU Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan indikator baru yang mulai dirintis pada tahun 2024 sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan Kementerian. Oleh karena itu, capaian indikator ini dapat dilihat mulai dari tahun 2024 yang menyentuh 3,34 dari target sebesar 3. Berdasarkan Nota Dinas Ketua Tim Kerja Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor 112/SJ.2/RC.610/II/2026 tanggal 10 Januari 2026 perihal Capaian IKU Indeks Pengelolaan BLU Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025, capaian indikator ini sebesar 4 dari target yang ditetapkan sebesar 3. Dengan demikian, persentase capaian sebesar 133,33%. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik karena realisasi melampaui target yang telah ditetapkan, baik pada capaian tahunan maupun pada Renstra Sekretariat Jenderal 2025-2029 yang juga menetapkan target sebesar 3 dengan realisasi 4. Adapun penilaian atas indikator ini akan dilakukan secara mandiri oleh Biro Keuangan dan Barang Milik Negara melalui aplikasi BIOS (BLU Information Online System) yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan, yang memungkinkan pengukuran kinerja dilakukan secara terstandar dan terintegrasi. Diharapkan dengan adanya indikator ini, kualitas pengelolaan BLU dapat dimonitor secara lebih sistematis dan akuntabel guna mendukung pencapaian target pelayanan publik yang lebih optimal.

c) Program/Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja

Pencapaian target Indeks Pengelolaan BLU KKP pada tahun 2025 didorong oleh mekanisme pemantauan kinerja yang sistematis melalui penyusunan matriks Kontrak Kinerja per Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 yang disinkronkan dengan hasil Rapat Pembahasan Pengelolaan Badan Layanan Umum pada akhir tahun. Pelaksanaan forum koordinasi tersebut, sebagaimana merujuk pada Surat Undangan Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor B.3865/SJ.2/TU.330/XII/2025, menjadi instrumen krusial dalam melakukan validasi silang antara capaian layanan fungsional dengan kepatuhan tata kelola keuangan pada masing-masing unit BLU di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Melalui integrasi data antara target kontrak kinerja dan realisasi operasional yang dibedah dalam rapat tersebut, Biro Keuangan dan BMN berhasil merumuskan basis penghitungan indeks yang objektif, sekaligus memetakan tingkat kemandirian fiskal serta kualitas pelayanan publik yang dihasilkan. Sinergitas proses evaluasi ini memastikan bahwa nilai Indeks Pengelolaan BLU yang dihasilkan merupakan representasi akurat dari efektivitas manajemen internal BLU dalam mendukung stabilitas finansial dan penguatan layanan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

d) Upaya Perbaikan Kinerja yang Akan Datang

Biro Keuangan dan BMN akan memastikan pencapaian target Indeks Pengelolaan BLU KKP pada tahun anggaran 2026 melalui akselerasi pengawasan terhadap pemenuhan komitmen kontrak kinerja dan penajaman kualitas pelaporan keuangan secara periodik. Langkah konkret yang segera diimplementasikan meliputi penyelenggaraan bimbingan teknis intensif untuk sinkronisasi data layanan fungsional dengan realisasi finansial serta penerapan sistem monitoring digital guna menjamin penyelesaian rekomendasi audit secara tuntas dan tepat waktu. Selain itu, asistensi terpadu bersama Kementerian Keuangan akan diintensifkan untuk memvalidasi pemenuhan seluruh parameter tata kelola serta kemandirian fiskal secara konsisten sejak awal tahun anggaran. Komitmen ini akan diwujudkan melalui penguatan fungsi supervisi dan koordinasi lintas unit kerja guna menjamin transparansi serta efektivitas manajemen internal BLU, sehingga target indeks yang ditetapkan dapat tercapai sebagai bukti nyata profesionalisme pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

e) Penggunaan Sumber Daya

Selama Tahun 2025, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara telah mengelola sumber daya secara efisien dan efektif dalam mendukung pengembangan indikator kinerja Indeks Pengelolaan BLU Kementerian Kelautan dan Perikanan. Meskipun penilaian atas indikator ini bersifat tahunan, pemanfaatan sumber daya difokuskan pada kegiatan persiapan strategis, seperti koordinasi awal antar-unit terkait, pengumpulan data pendukung, serta penguatan pemahaman internal terhadap metode penilaian mandiri melalui aplikasi BIOS dari Kementerian Keuangan. Seluruh aktivitas tersebut dilaksanakan dengan prinsip efisiensi anggaran dan optimalisasi peran sumber daya manusia yang tersedia, guna memastikan kesiapan yang matang dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi BLU pada triwulan-triwulan berikutnya secara lebih terarah dan berdampak.

10. Persentase Pengelolaan PNBP Sektor Kelautan dan Perikanan

a) Definisi Indikator Kinerja

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh DPR melalui tahapan pengusulan Kementerian Negara/Lembaga dan pembahasan Kementerian Keuangan. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran. Perencanaan yang berkualitas merupakan tujuan utama dari siklus penganggaran yang berawal dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Kualitas pengelolaan anggaran negara dapat diukur melalui perhitungan perkiraan besaran APBN yang tertuang dalam tabel i-account. Dengan perencanaan APBN yang berkualitas, diharapkan pengelolaan keuangan negara akan menjadi semakin optimal dan bermanfaat seluas-luasnya untuk pembangunan bangsa dan negara Indonesia.

Penerimaan negara yang optimal merupakan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan negara yang meliputi pajak, bea cukai dan PNB. PNB merupakan pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara (UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak).

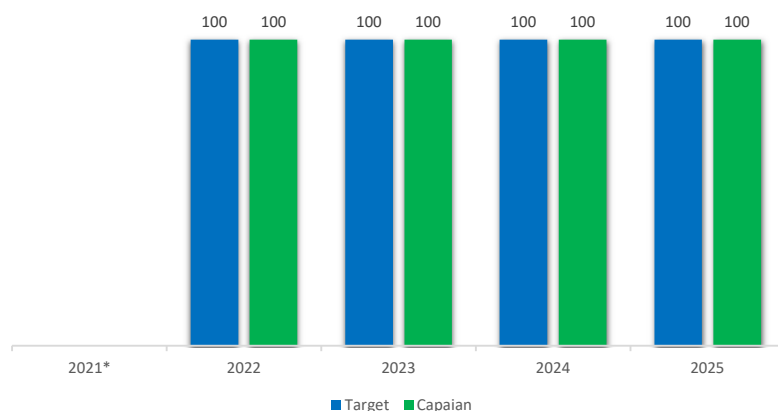
Pengelolaan PNB adalah pemanfaatan sumber daya dalam rangka tata kelola yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan untuk meningkatkan pelayanan, akuntabilitas, dan optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari PNB. Pengelolaan PNB berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. PNB sektor kelautan dan perikanan berasal dari penerimaan PNB SDA perikanan dan PNB lainnya berupa penerimaan yang diperoleh Kementerian/Lembaga dalam rangka pelaksanaan tugas pokok serta pendapatan badan layanan umum. Pengelolaan PNB sektor kelautan dan perikanan yang menjadi ruang lingkup Biro Keuangan dan BMN yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan.

b) Analisis Capaian

Indikator kinerja Nilai Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan merupakan parameter strategis untuk mengukur efektivitas, kepatuhan, dan optimalisasi penggalan sumber pendapatan negara yang berasal dari pemanfaatan sumber daya kelautan serta layanan jasa perikanan. Indikator ini mencakup seluruh siklus pengelolaan, mulai dari tahap perencanaan target yang realistis, pelaksanaan pemungutan yang sesuai tarif regulasi, hingga ketepatan waktu penyetoran ke kas negara dan pelaporan yang akuntabel. Pengelolaan PNB yang berkualitas menjadi tumpuan bagi kementerian dalam mewujudkan kemandirian fiskal dan mendukung pembiayaan program-program prioritas sektor kelautan, sekaligus sebagai instrumen kendali untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Berikut adalah tabel capaian Indikator Kinerja tahun 2025 dan perbandingan terhadap tahun sebelumnya:

Tabel 21 Perbandingan Capaian Nilai Pengelolaan PNB Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 dengan Capaian Triwulanan Lima Tahun Terakhir dan Renstra Sekretariat Jenderal 2025 - 2029

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulanan (TW IV)					Target 2025	Triwulanan (TW IV)			Renstra Sekretariat Jenderal 2025 - 2029		
	2020	2021	2022	2023	2024		Target	Realisasi	% Capaian	Target 2025	Realisasi	% Capaian
Nilai Pengelolaan PNB Sektor Kelautan dan Perikanan	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



Keterangan: *) Indikator Kinerja Belum Ditetapkan

Gambar 11 Target dan Capaian Nilai Pengelolaan PNBPNP Sektor Kelautan dan Perikanan dalam 3 Tahun Terakhir

Capaian indikator kinerja Nilai Pengelolaan PNBPNP Sektor Kelautan dan Perikanan menunjukkan konsistensi yang sangat baik sejak tahun 2022 hingga 2025. Pada tahun 2022 hingga 2024, target yang ditetapkan berada pada angka 100 dan capaian setiap tahunnya juga mencapai 100. Capaian yang maksimal selama tiga tahun berturut-turut berlanjut hingga tahun 2025 dengan capaian yang menyentuh angka 100. Konsistensi antara target dan realisasi tersebut mencerminkan pengelolaan PNBPNP yang dilaksanakan secara tertib, terukur, dan akuntabel. Capaian ini juga menunjukkan optimalisasi dan efektivitas pengelolaan PNBPNP di sektor kelautan dan perikanan serta keberhasilan dalam menjaga kinerja pengelolaan penerimaan negara bukan pajak secara berkelanjutan.

c) Program/Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja

Capaian indikator Persentase Pengelolaan PNBPNP Sektor Kelautan dan Perikanan pada tahun 2025 didukung secara fundamental melalui siklus pengelolaan anggaran yang integratif, mulai dari evaluasi kinerja berjalan hingga perencanaan jangka panjang. Pelaksanaan pembahasan Realisasi Pendapatan dan Penggunaan PNBPNP 2025 menjadi instrumen validasi krusial untuk memastikan bahwa pemanfaatan dana fungsional telah selaras dengan target PNBPNP yang ditetapkan, sekaligus menjadi basis data objektif dalam memitigasi potensi deviasi setoran. Sejalan dengan hal tersebut, aktivitas Penyusunan Target dan Pagu Penggunaan PNBPNP 2027 serta penyusunan draf Proposal Usulan Target dilakukan untuk menjamin keberlanjutan fiskal melalui proyeksi potensi penerimaan yang realistis dan terukur. Sinergi antara pemantauan realisasi terkini dengan perencanaan usulan tahun mendatang ini memastikan bahwa tata kelola PNBPNP KKP berjalan secara akuntabel dan responsif terhadap dinamika sektor kelautan dan perikanan, sehingga setiap rupiah pendapatan yang dihasilkan dapat dialokasikan kembali secara optimal untuk mendukung program prioritas kementerian.

d) Upaya Perbaikan Kinerja yang Akan Datang

Biro Keuangan dan BMN akan melakukan penguatan intensif terhadap efektivitas pemungutan dan penggunaan dana fungsional guna melampaui target indikator Persentase Pengelolaan PNBPNP pada tahun anggaran 2026. Langkah nyata yang segera dilaksanakan mencakup digitalisasi sistem monitoring potensi penerimaan secara real-time untuk memitigasi *lost potential* pada titik-titik layanan, serta mempercepat proses rekonsiliasi data antara laporan realisasi anggaran dengan bukti setoran pada Sistem Informasi PNBPNP Online (SIMPONI). Selain itu, pembinaan teknis kepada satuan kerja penghasil akan dioptimalkan guna memastikan akurasi penyusunan target yang realistis dan mempercepat penyerapan pagu penggunaan dana PNBPNP agar sejalan dengan progres capaian output di lapangan. Komitmen ini akan diwujudkan melalui pengawasan ketat terhadap kepatuhan penyetoran tepat waktu dan validasi dokumen sumber secara berkala, sehingga tata kelola PNBPNP KKP semakin akuntabel, transparan, dan memberikan kontribusi maksimal terhadap ruang fiskal kementerian.

e) Penggunaan Sumber Daya

Dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja Nilai Pengelolaan PNBPNP Sektor Kelautan dan Perikanan, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara senantiasa mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya. Penggunaan anggaran diarahkan secara selektif pada kegiatan prioritas, seperti koordinasi teknis, asistensi pengelolaan PNBPNP, serta pengembangan sistem pemantauan dan pelaporan yang berbasis data. Selain itu, pemanfaatan sumber daya manusia dilakukan secara optimal dengan pembagian peran yang jelas dan berbasis kompetensi, guna memastikan setiap tahapan kegiatan berjalan tepat waktu dan sesuai sasaran. Dengan pendekatan ini, diharapkan pengelolaan PNBPNP dapat dilakukan secara lebih terintegrasi, akuntabel, dan berdampak nyata terhadap peningkatan penerimaan negara dari sektor kelautan dan perikanan.



Sasaran Kinerja kedua merupakan capaian kinerja yang dilaksanakan dari Tim Kerja Dukungan Manajerial Biro Keuangan dan BMN. Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja kedua sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan:

Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik di Lingkungan Biro Keuangan dan BMN

Sasaran Kinerja ini terdiri dari **7 (tujuh)** Indikator Kinerja yang disajikan sebagai berikut:

11. Nilai minimal yang Dipersyaratkan untuk mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Biro Keuangan dan BMN

a) Definisi Indikator Kinerja

Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Sedangkan di Kementerian Kelautan Dan Perikanan diatur berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 26 TAHUN 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Pada Unit Kerja Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan.

Salah satu hal yang juga menjadi penekanan pada Zona Integritas adalah bahwa sangat memungkinkan lahirnya zona-zona baru yang juga ikut menerapkan sistem integritas di dalamnya. Munculnya area baru ini dimungkinkan melalui proses replikasi oleh unit instansi pemerintah lainnya kepada unit instansi pemerintah yang telah menanamkan sistem integritas terlebih dahulu.

Dalam rangka akselerasi pencapaian konsep integritas tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot *project* pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja dalam melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional serta menghapus penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, dan lemahnya pengawasan. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.

b) Analisis Capaian

Indikator kinerja Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) merupakan standar ambang batas penilaian mandiri yang harus dipenuhi oleh suatu unit kerja untuk menunjukkan komitmen dalam reformasi birokrasi. Indikator ini mengukur kemajuan pada enam area perubahan, yang meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Keberhasilan memenuhi nilai minimal ini menjadi prasyarat mutlak bagi unit kerja untuk dapat diusulkan ke tahap evaluasi eksternal, sekaligus menjadi bukti bahwa fondasi integritas dan budaya antikorupsi telah terinternalisasi secara struktural guna menciptakan pelayanan publik yang bersih dan melayani. Berikut adalah tabel capaian Indikator Kinerja di tahun 2025 dan perbandingan ketika penilaian pada tahun 2024:

Tabel 22 Perbandingan Capaian Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Tahun 2025 dengan Capaian Triwulanan Lima Tahun Terakhir dan Renstra Sekretariat Jenderal 2025 - 2029

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulanan (TW IV)					Target 2025	Triwulanan (TW IV)			Renstra Sekretariat Jenderal 2025 - 2029		
	2020	2021	2022	2023	2024		Target	Realisasi	% Capaian	Target 2025	Realisasi	% Capaian
Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	-	-	-	-	88,29	75	75	81,20	108,27	75	81,20	108,27

Capaian indikator kinerja Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Biro Keuangan dan BMN pada tahun 2024 berhasil mencapai nilai 88,29 dari target minimal 75 sehingga memperoleh predikat "Memenuhi Syarat" untuk WBK. Pada tahun 2025, capaian indikator ini mencapai nilai 81,20 atau 108,27% dari target yang ditetapkan sebesar 75. Berdasarkan Nota Dinas Inspektur Jenderal Nomor:1/ITJ/HK.410/I/2026 tanggal 6 Desember 2025 perihal Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi pada Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, Biro Keuangan dan BMN telah memenuhi syarat dan dapat direkomendasikan untuk ditetapkan sebagai unit kerja berpredikat Menuju WBK.

Dalam rangka mendukung tercapainya Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di tahun 2025, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta kemudahan akses informasi publik. Salah satu inovasi unggulan yang dikembangkan adalah pembuatan kanal digital berupa website bernama SiCAKEB (koordinasi Capaian biro Keuangan dan BMN). Website ini menjadi sarana modern yang memfasilitasi pelayanan terkait prosedur pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.



Melalui SiCAKEB, proses administrasi dan komunikasi antar unit menjadi lebih efisien, transparan, dan terdokumentasi dengan baik, sehingga mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih serta memperkuat komitmen Biro Keuangan dan BMN dalam pembangunan zona integritas menuju WBK.

c) Program/Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja

Pelaksanaan Rapat Tindak Lanjut Pemantauan Zona Integritas (ZI) Lingkup Biro Keuangan dan BMN merupakan langkah strategis dalam menjaga konsistensi reformasi birokrasi dan budaya kerja anti-korupsi di lingkungan internal. Berdasarkan Undang-Undang Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor B.2870/SJ.2/TU.330/VIII/2025 serta tindak lanjut melalui Nota Dinas Nomor 2418/SJ.2/TU.140/IX/2025, Biro Keuangan dan BMN telah melakukan pemutakhiran dan pemenuhan data dukung secara komprehensif pada aplikasi E-ZI Inspektorat Jenderal. Kegiatan ini menjadi instrumen validasi penting untuk memastikan bahwa seluruh parameter pada enam area perubahan, mulai dari manajemen perubahan hingga peningkatan kualitas pelayanan publik, telah didokumentasikan secara akuntabel dan selaras dengan standar penilaian APIP. Keberhasilan pengisian data dukung yang tervalidasi dalam aplikasi E-ZI tersebut mencerminkan komitmen Biro Keuangan dan BMN dalam mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) melalui bukti fisik yang nyata dan terukur, sekaligus memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan efektif guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.

d) Upaya Perbaikan Kinerja yang Akan Datang

Biro Keuangan dan BMN akan memperkuat keberlanjutan Zona Integritas melalui internalisasi budaya kerja berintegritas dan digitalisasi layanan yang transparan guna mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Langkah nyata yang segera diimplementasikan mencakup pemutakhiran data dukung secara berkala pada aplikasi E-ZI serta penguatan sistem pengawasan internal melalui optimalisasi saluran pengaduan masyarakat dan pemantauan benturan kepentingan secara rutin. Selain itu, evaluasi mandiri terhadap kualitas pelayanan publik dan efektivitas manajemen perubahan akan diintensifkan untuk memastikan bahwa standar pelayanan prima tetap konsisten dan bebas dari praktik maladministrasi. Komitmen ini akan diwujudkan melalui penguatan peran *Agent of Change* sebagai motor penggerak reformasi birokrasi di setiap level organisasi, sehingga Biro Keuangan dan BMN mampu menjaga kepercayaan publik melalui tata kelola yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

e) Penggunaan Sumber Daya

Selama Tahun 2025, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara mengelola sumber daya secara efisien dan efektif dalam rangka mendukung pencapaian nilai optimal pada indikator kinerja Nilai minimal yang Dipersyaratkan untuk mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Pemanfaatan anggaran difokuskan pada kegiatan yang bersifat strategis dan berdampak langsung terhadap pembangunan Zona Integritas, seperti pelaksanaan rapat koordinasi internal, penyusunan dan penguatan dokumen eviden, serta peningkatan kapasitas pegawai melalui sosialisasi nilai-nilai integritas. Sumber daya manusia dioptimalkan melalui penugasan berbasis kompetensi dan kolaborasi lintas area perubahan agar setiap kegiatan dapat terlaksana secara tepat sasaran. Salah satu tantangan pelaksanaan kegiatan ini adalah adanya arahan efisiensi anggaran dari Presiden Republik Indonesia pada tahun 2025, penyesuaian mendasar sebagai respons atas kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Keterbatasan alokasi dana tersebut mengharuskan dilakukannya optimalisasi belanja melalui pengalihan sebagian besar kegiatan strategis dan koordinasi program kerja ke dalam format daring guna menekan biaya operasional secara signifikan. Meskipun ruang gerak fisik terbatas, intensitas pelaksanaan rapat dan monitoring melalui platform digital menjadi instrumen utama yang memastikan setiap fungsi pengelolaan keuangan dan aset tetap berjalan tanpa hambatan teknis yang berarti. Langkah penghematan ini membuktikan bahwa keterbatasan sumber daya finansial dapat dimitigasi melalui adaptasi teknologi yang tepat, sehingga integritas dan target kinerja organisasi tetap terpenuhi secara akuntabel di tengah semangat efisiensi nasional.

12. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Keuangan dan BMN

a) Definisi Indikator Kinerja

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah kerangka kerja yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk mengukur, melaporkan, dan memantau kinerja mereka. SAKIP mencakup beberapa komponen utama, sebagai berikut:

- 1) Perencanaan Kinerja (30%): Ini melibatkan perencanaan tujuan dan indikator kinerja yang akan dicapai oleh instansi selama periode tertentu.
- 2) Pengukuran Kinerja (30%): Instansi mengumpulkan data dan mengukur pencapaian kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.
- 3) Pelaporan Kinerja (15%): Instansi melaporkan hasil kinerja mereka kepada entitas yang lebih tinggi, seperti kementerian atau lembaga yang mengawasi mereka.
- 4) Evaluasi Kinerja (25%): Instansi melakukan evaluasi mandiri terhadap implementasi SAKIP dan menilai sejauh mana kinerja mereka sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

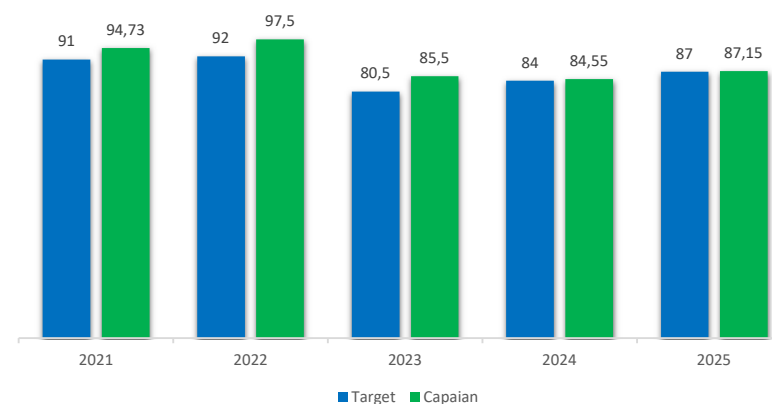
Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan kedua dasar hukum tersebut disebutkan bahwasanya komponen SAKIP terdiri atas Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Kinerja. Sedangkan pada tingkat Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan, penilaian terhadap SAKIP dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Target Indikator nilai SAKIP Biro Keuangan dan BMN pada Tahun 2025 adalah 84 (Kategori A, Memuaskan), adapun nilai dari indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP Biro Keuangan dan BMN dilakukan secara tahunan.

b) Analisis Capaian

Indikator kinerja Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Biro Keuangan dan BMN merupakan parameter komprehensif untuk mengukur efektivitas penerapan manajemen kinerja yang berorientasi pada hasil (*result-oriented government*). Indikator ini mengevaluasi keselarasan antara perencanaan strategis, penganggaran, hingga pelaporan kinerja yang terintegrasi di seluruh lini organisasi. Melalui penilaian mandiri ini, Biro Keuangan dan BMN dapat memetakan sejauh mana setiap program dan kegiatan telah dilaksanakan secara efisien, memberikan dampak nyata bagi pencapaian visi kementerian, serta memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Keberhasilan dalam nilai SAKIP mencerminkan kematangan budaya kerja yang tidak hanya mengutamakan penyerapan anggaran, tetapi juga kualitas keluaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara substansial. Berikut adalah tabel capaian Indikator Kinerja tahun 2025 dan perbandingan tahun sebelumnya:

Tabel 23 Perbandingan Capaian Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Keuangan dan BMN Tahun 2025 dengan Capaian Triwulanan Lima Tahun Terakhir dan Renstra Sekretariat Jenderal 2025 - 2029

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulanan (TW IV)					Target 2025	Triwulanan (TW IV)			Renstra Sekretariat Jenderal 2025 - 2029		
	2020	2021	2022	2023	2024		Target	Realisasi	% Capaian	Target 2025	Realisasi	% Capaian
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Keuangan dan BMN	81,49	94,73	97,50	85,50	84,55	87	87	87,15	100,17	87	87,15	100,17



Gambar 12 Target dan Capaian Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Keuangan dan BMN selama 5 Tahun Terakhir

Capaian indikator kinerja Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Keuangan dan BMN selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, namun secara umum mampu melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2021, target sebesar 91 berhasil dilampaui dengan capaian 94,73. Tren peningkatan berlanjut pada tahun 2022 dengan target 92 dan capaian sebesar 97,5. Meskipun pada tahun 2023 target menurun menjadi 80,5 dengan capaian 85,5 tetapi realisasi tetap berada di atas target. Pada tahun 2024, target kembali meningkat menjadi 84 dengan capaian sebesar 84,55. Berdasarkan Surat dari Sekretaris Jenderal KKP No B. 933/SJ/RC.610/IX/2025 tanggal 16 September 2025 perihal Hasil Penilaian Mandiri AKIP Tahun 2025, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara memperoleh nilai sebesar 87,15 dari nilai maksimum 100 atau mendapat predikat A (Memuaskan). Dengan demikian, nilai tersebut meningkat dibandingkan capaian indikator dari tahun 2024 dan mencerminkan adanya upaya perbaikan yang dilakukan secara konsisten.

c) Program/Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja

Pelaksanaan Rapat Persiapan Penilaian dan Pelaporan Kinerja Tahun 2025 serta Perencanaan Pengelolaan Kinerja Tahun 2026 merupakan langkah strategis untuk mengamankan pencapaian target Nilai Penguatan Manajerial (PM) SAKIP Biro Keuangan dan BMN tahun 2025. Berdasarkan Nota Dinas Kepala Subbagian Tata Usaha Nomor 3341/SJ.2/TU.140/XII/2025, koordinasi intensif yang dilaksanakan pada 18 Desember 2025 bersama Biro Perencanaan ini menjadi instrumen validasi untuk memastikan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja. Keterlibatan aktif masing-masing PIC dalam melengkapi evaluasi rencana aksi beserta data dukung capaian kegiatan secara komprehensif membuktikan berjalannya implementasi manajemen kinerja yang terukur di lingkungan internal. Keberhasilan dalam menyelaraskan data capaian tahun berjalan dengan dokumen perencanaan tahun mendatang ini tidak hanya menjamin kualitas laporan kinerja yang akuntabel, tetapi juga secara langsung memperkuat pilar efektivitas dan efisiensi dalam kerangka evaluasi SAKIP, sehingga target nilai PM SAKIP yang ditetapkan dapat tercapai melalui bukti dukung yang valid, relevan, dan tervalidasi oleh unit pembina.

d) Upaya Perbaikan Kinerja yang Akan Datang

Biro Keuangan dan BMN akan melakukan penguatan implementasi SAKIP secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas perencanaan kinerja yang berorientasi pada hasil dan pengintegrasian data kinerja dengan penyerapan anggaran secara lebih presisi. Langkah nyata yang segera dilaksanakan mencakup bimbingan teknis berkala bagi seluruh PIC untuk mempertajam formulasi indikator kinerja individu agar selaras dengan target organisasi, serta optimalisasi sistem monitoring capaian rencana aksi setiap bulan guna mendeteksi kendala implementasi lebih dini. Selain itu, pemutakhiran data dukung pada aplikasi manajemen kinerja akan dilakukan secara berkala dengan standar validasi yang lebih ketat untuk memastikan seluruh pelaporan memiliki bukti fisik yang autentik dan akuntabel. Komitmen ini akan diwujudkan melalui penguatan fungsi evaluasi internal dan pemberian umpan balik atas capaian kinerja setiap triwulan, sehingga efektivitas manajerial Biro Keuangan dan BMN semakin solid dan mampu menghasilkan peningkatan nilai PM SAKIP yang signifikan pada tahun 2026 sebagai cerminan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kinerja.

e) Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mendukung realisasi kegiatan indikator kinerja Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN), penggunaan sumber daya difokuskan secara efektif dan efisien untuk memastikan tercapainya Output yang maksimal dengan pemanfaatan anggaran dan tenaga yang optimal. Perencanaan kegiatan dilakukan secara cermat dengan mengutamakan program-program yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja, seperti pelaksanaan rapat koordinasi serta penyusunan dokumen pendukung evaluasi SAKIP. Sumber daya manusia dimanfaatkan secara strategis dengan penugasan berbasis kompetensi, serta penerapan sistem kerja yang kolaboratif lintas tim kerja untuk meningkatkan produktivitas dan akurasi pelaksanaan kegiatan. Di tengah upaya tersebut, salah satu tantangan yang dihadapi adalah adanya arahan efisiensi anggaran dari pemerintah pada tahun 2025, yang menuntut setiap unit kerja untuk lebih selektif dalam menyusun prioritas kegiatan. Meski demikian, Biro Keuangan dan BMN tetap berkomitmen menjaga kualitas pelaksanaan kegiatan agar tetap berdampak signifikan terhadap peningkatan nilai SAKIP secara berkelanjutan.

13. Indeks Profesionalitas ASN Biro Keuangan dan BMN

a) Definisi Indikator Kinerja

Indeks Profesionalitas (IP) Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif angka profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna kepentingan pengembangan profesionalitas profesi ASN. Pengukuran IP ASN diatur dalam Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Dalam pelaksanaannya pengukuran dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Nomor 006/B-BM.02.01/SD/C/2023 tanggal 22 Mei 2023 hal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022, terdapat beberapa penyesuaian instrumen pada dimensi IP ASN antara lain:

- 1) Perhitungan bobot pada dimensi kualifikasi mengalami penyesuaian dengan mencantumkan persyaratan Pendidikan minimal dengan jenis jabatan yang diduduki;
- 2) Bagi pejabat administrasi yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional mendapatkan bobot yang sama dengan pejabat fungsional yang telah mengikuti pelatihan fungsional berdasarkan hasil koordinasi Instansi Pengguna dengan Instansi Pembina dan melampirkan bukti berupa surat keterangan/rekomendasi yang selanjutnya dimutakhirkan ke dalam SIASN;
- 3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari 20 JP akan dinilai secara proporsional;
- 4) Riwayat pelatihan teknis dan diklat pendukung/seminar/workshop /sejenisnya dapat melalui jalur pelatihan secara klasikal dan/atau non klasikal;
- 5) Perhitungan bobot dimensi kinerja mengalami penyesuaian menjadi predikat kinerja;
- 6) Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir.

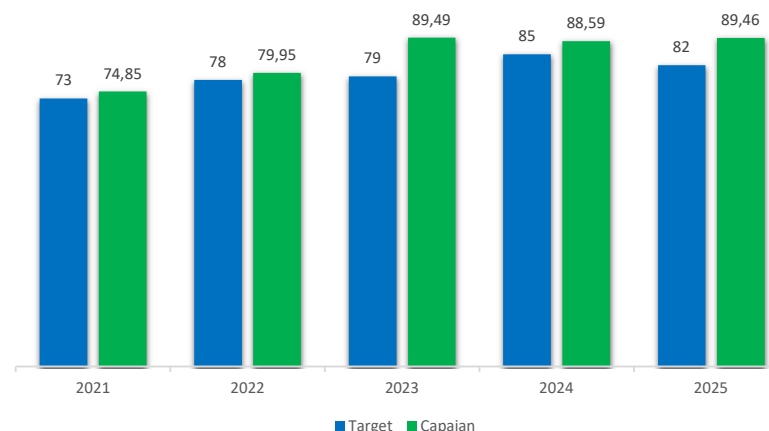
Metode pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) menggunakan 4 (empat) dimensi yaitu Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin

b) Analisis Capaian

Strategi pencapaian target untuk indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Biro Keuangan dan Barang Milik Negara yang akan dinilai pada akhir tahun 2025 difokuskan pada penguatan kompetensi, integritas, dan kinerja aparatur melalui berbagai program pengembangan kapasitas dan tata kelola sumber daya manusia berbasis merit sistem. Biro Keuangan dan BMN mendorong peningkatan kualitas ASN melalui pelatihan teknis dan manajerial yang relevan dengan bidang tugas, optimalisasi sistem penilaian kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi, serta penerapan budaya kerja adaptif dan berorientasi hasil. Selain itu, dilakukan pengawasan dan pembinaan berkelanjutan untuk memastikan ASN mampu melaksanakan tugas secara profesional, akuntabel, dan berintegritas tinggi, sehingga target indeks profesionalitas dapat tercapai secara optimal pada akhir tahun 2025.

Tabel 24 Perbandingan Capaian Indeks Profesionalitas ASN Biro Keuangan dan BMN Tahun 2025 dengan Capaian Triwulanan Lima Tahun Terakhir dan Renstra Sekretariat Jenderal 2025 - 2029

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulanan (TW IV)					Target 2025	Triwulanan (TW IV)			Renstra Sekretariat Jenderal 2025 - 2029		
	2020	2021	2022	2023	2024		Target	Realisasi	% Capaian	Target 2025	Realisasi	% Capaian
Indeks Profesionalitas ASN Biro Keuangan dan BMN	66,80	74,85	79,95	89,49	88,59	82	82	89,46	109,10	82	89,46	109,10



Gambar 13 Target dan Capaian Indeks Profesionalitas ASN Biro Keuangan dan BMN dalam 5 Tahun Terakhir

Capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Biro Keuangan dan BMN menunjukkan tren peningkatan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2021, capaian indikator ini berada di angka 74,85 melampaui target 73. Capaian terus menunjukkan peningkatan pada tahun 2022 dan 2023 dengan menyentuh angka 79,95 dan 89,49 dengan target secara berturut-turut 78 dan 79. Namun, capaian indikator ini mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024 yang menyentuh angka 88,59 dari target 85.

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi Nomor 8/SJ.3/TU.210/I/2026 tanggal 4 Januari 2026 perihal Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) di lingkungan KKP Triwulan IV/Semester II Tahun 2025 dan Target Capaian IP ASN KKP Tahun 2026, capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Biro Keuangan dan BMN tahun 2025 mencapai angka 89,46 dengan berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar 82. Dengan demikian, persentase capaian indikator ini sebesar 109,10%.

Secara keseluruhan, capaian yang melampaui target pada Tahun 2025 serta tren peningkatan dalam lima tahun terakhir mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan dan pengembangan profesionalitas ASN di lingkungan Biro Keuangan dan BMN. Capaian tersebut menunjukkan konsistensi yang tinggi dalam peningkatan profesionalitas ASN serta mencerminkan komitmen berkelanjutan Biro Keuangan dan BMN dalam meningkatkan kualitas dan profesionalitas sumber daya manusia.

c) Program/Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja

Pencapaian Indeks Profesionalitas (IP) ASN Biro Keuangan dan BMN yang menyentuh angka 89,46, melampaui target yang ditetapkan sebesar 82 pada tahun 2025, merupakan hasil dari strategi pengembangan kompetensi dan penataan karier pegawai yang terakselerasi secara sistematis. Analisis terhadap capaian ini menunjukkan bahwa keberhasilan tersebut didorong oleh tingginya kepatuhan pegawai dalam pemutakhiran data mandiri pada Sistem Informasi ASN, serta partisipasi aktif dalam berbagai program pelatihan teknis dan fungsional yang relevan dengan tugas pokok pengelolaan keuangan dan aset negara. Keberhasilan ini juga divalidasi melalui integrasi penilaian kinerja yang objektif dan penegakan disiplin pegawai yang konsisten, sehingga setiap dimensi penilaian mulai dari kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, hingga perilaku yang memberikan kontribusi positif terhadap nilai indeks keseluruhan. Melampauinya target ini membuktikan bahwa Biro Keuangan dan BMN telah berhasil membangun ekosistem kerja yang profesional dan kompetitif, yang secara langsung berdampak pada peningkatan kualitas layanan administrasi keuangan dan efektivitas birokrasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

d) Upaya Perbaikan Kinerja yang Akan Datang

Biro Keuangan dan BMN akan memperkuat konsistensi capaian Indeks Profesionalitas (IP) ASN pada tahun 2026 melalui skema pengembangan kompetensi berkelanjutan yang berbasis pada kebutuhan organisasi dan pemutakhiran data kepegawaian secara real-time. Langkah nyata yang segera dilaksanakan mencakup penyusunan rencana pengembangan kompetensi individu (JP target) bagi seluruh pegawai untuk memastikan pemenuhan standar minimal 20 jam pelajaran per tahun melalui pelatihan teknis, seminar, maupun *e-learning* yang relevan dengan pengelolaan keuangan negara. Selain itu, asistensi berkelanjutan terhadap pengisian riwayat pendidikan dan sertifikasi pada aplikasi SIASN akan diintensifkan guna memastikan validitas data kualifikasi dan kompetensi tetap terjaga pada level optimal. Komitmen ini akan diwujudkan melalui sinkronisasi hasil penilaian kinerja individu dengan disiplin pegawai secara berkala, sehingga profesionalisme ASN tidak hanya tercermin pada angka indeks, tetapi juga pada kualitas output kerja yang semakin akuntabel dan profesional dalam mendukung tugas fungsi Biro Keuangan dan BMN.

e) Penggunaan Sumber Daya

Selama Tahun 2025, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara telah mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN. Penggunaan anggaran difokuskan pada kegiatan prioritas seperti pemetaan kebutuhan pelatihan, penyusunan rencana pengembangan kompetensi, serta penyelenggaraan program peningkatan kapasitas melalui platform pembelajaran digital dan kolaborasi lintas unit. Optimalisasi sumber daya manusia dilakukan melalui penugasan yang terukur dan berbasis keahlian, sementara pemanfaatan teknologi informasi dimaksimalkan untuk mendukung proses administrasi dan pelaporan secara *real-time*. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap alokasi sumber daya memberikan dampak nyata terhadap peningkatan profesionalitas ASN di lingkungan Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.

14. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Keuangan dan BMN

a) Definisi Indikator Kinerja

Indikator kinerja Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Keuangan dan BMN merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menjadi tanggung jawab Biro Keuangan dan Barang Milik Negara. Indikator ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap temuan BPK ditindaklanjuti secara tepat, efektif, dan sesuai rekomendasi guna meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pengelolaan keuangan negara. Nilai indikator ini dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Temuan yang Telah Diselesaikan}}{\text{Jumlah Seluruh Temuan yang Menjadi Tanggung Jawab}} \times 100\%$$

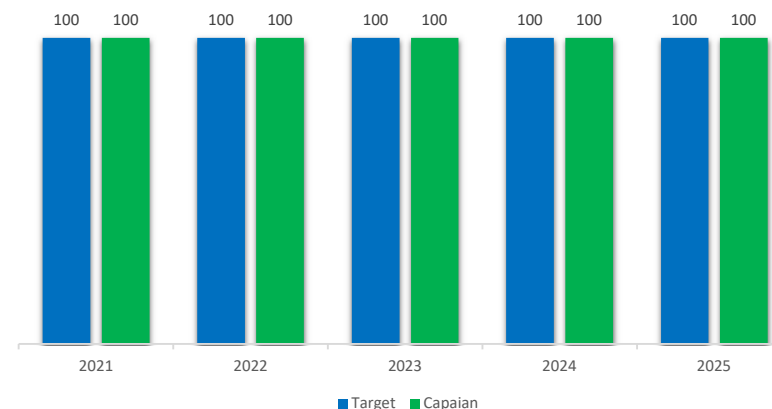
Semakin tinggi persentase yang dicapai, menunjukkan semakin optimalnya penyelesaian temuan pemeriksaan BPK oleh Biro Keuangan dan BMN.

b) Analisis Capaian

Indikator kinerja Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Keuangan dan BMN merupakan parameter krusial dalam menilai efektivitas tindak lanjut atas hasil pemeriksaan eksternal guna menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset negara. Indikator ini mencerminkan komitmen instansi dalam merespons setiap rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), baik yang bersifat administratif maupun finansial, melalui langkah-langkah korektif yang sistematis dan tuntas. Dengan memastikan setiap temuan diselesaikan tepat waktu, Biro Keuangan dan BMN berupaya menghilangkan risiko berulangnya kelemahan dalam sistem pengendalian intern serta menjaga integritas laporan keuangan kementerian agar tetap memenuhi standar tertinggi dalam tata kelola pemerintahan yang bersih. Berikut tabel capaian Indikator Kinerja dan perbandingan capaian tahun sebelumnya:

Tabel 25 Perbandingan Capaian Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Keuangan dan BMN Tahun 2025 dengan Capaian Triwulanan Lima Tahun Terakhir dan Renstra Sekretariat Jenderal 2025 - 2029

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulanan (TW IV)					Target 2025	Triwulanan (TW IV)			Renstra Sekretariat Jenderal 2025 - 2029		
	2020	2021	2022	2023	2024		Target	Realisasi	% Capaian	Target 2025	Realisasi	% Capaian
Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Keuangan dan BMN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



Gambar 14 Target dan Capaian Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Keuangan dan BMN dalam 5 Tahun Terakhir

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor 136/SJ.2/RC.610/I/2026 tentang Capaian IKU Persentase Penyelesaian Temuan BPK Unit Eselon II Lingkup Sekretariat Jenderal. Capaian indikator kinerja Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Keuangan dan BMN pada tahun 2021 hingga tahun 2024 secara konsisten mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Capaian maksimal tersebut kembali dipertahankan pada tahun 2025 dengan realisasi mencapai 100%. Keberhasilan menjaga capaian ini mencerminkan keberlanjutan kinerja pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah terbangun pada tahun-tahun sebelumnya, serta menunjukkan konsistensi dan efektivitas Biro Keuangan dan BMN dalam menindaklanjuti seluruh temuan pemeriksaan secara tepat waktu dan menyeluruh. Kondisi ini sekaligus mencerminkan komitmen organisasi dalam memastikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan mendukung terwujudnya tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.

c) Program/Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja

Pencapaian target 100% pada indikator Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Keuangan dan BMN merupakan hasil dari mekanisme tindak lanjut yang responsif dan terkoordinasi secara intensif sejak awal tahun anggaran. Pelaksanaan Koordinasi Pembahasan Tindak Lanjut (TL) atas Temuan BPK-RI, sebagaimana diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor B.54/SJ/TU.330/I/2026 dan B.86/SJ/TU.330/I/2026, menjadi forum krusial dalam membedah secara komprehensif status setiap rekomendasi hasil pemeriksaan serta memastikan kelengkapan dokumen pendukung yang diperlukan. Melalui pertemuan strategis ini, Biro Keuangan dan BMN berhasil melakukan validasi final terhadap pemenuhan rekomendasi administratif maupun finansial, serta mensinkronkan data tindak lanjut sebelum disampaikan kepada tim pemeriksa. Keberhasilan penyelesaian seluruh temuan ini mencerminkan komitmen kuat organisasi dalam menjaga integritas laporan keuangan dan meminimalisir risiko hukum, yang pada akhirnya memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

d) Upaya Perbaikan Kinerja yang Akan Datang

Biro Keuangan dan BMN akan memperkuat konsistensi penyelesaian temuan BPK-RI pada tahun anggaran 2026 melalui skema mitigasi risiko sejak dini dan percepatan pemenuhan dokumen tindak lanjut secara periodik. Langkah nyata yang segera diimplementasikan mencakup penyelenggaraan rapat koordinasi berkala setiap triwulan untuk memantau progres penyelesaian rekomendasi berjalan serta melakukan verifikasi mandiri terhadap kualitas data dukung sebelum disampaikan kepada tim auditor. Selain itu, fungsi pendampingan kepada unit kerja terkait akan dioptimalkan guna memastikan tidak terjadi pengulangan temuan yang sama (*recurring findings*) melalui sosialisasi kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan dan aset negara secara intensif. Komitmen ini akan diwujudkan melalui penguatan sistem kendali internal dan koordinasi proaktif bersama Inspektorat Jenderal serta BPK-RI, sehingga target penyelesaian 100% dapat terus dipertahankan sebagai manifestasi dari tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari anomali administratif.

e) Penggunaan Sumber Daya

Pada Tahun 2025, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara mengedepankan prinsip penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan kegiatan guna mempertahankan capaian maksimal pada indikator kinerja Persentase Penyelesaian Temuan BPK. Meskipun belum terdapat temuan baru yang harus ditindaklanjuti pada periode ini, Biro Keuangan dan BMN tetap menjalankan langkah-langkah preventif yang mendukung penguatan tata kelola, seperti pemutakhiran data tindak lanjut, penyempurnaan sistem dokumentasi, serta peningkatan kapasitas pegawai melalui kegiatan internalisasi dan sosialisasi terkait pengelolaan temuan audit. Pemanfaatan sumber daya difokuskan pada upaya strategis yang berdampak langsung terhadap kesiapan biro dalam merespons temuan di masa mendatang, sehingga efektivitas pelaksanaan tindak lanjut tetap terjaga tanpa pemborosan anggaran maupun duplikasi upaya.

15. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro Keuangan dan BMN

a) Definisi Indikator Kinerja

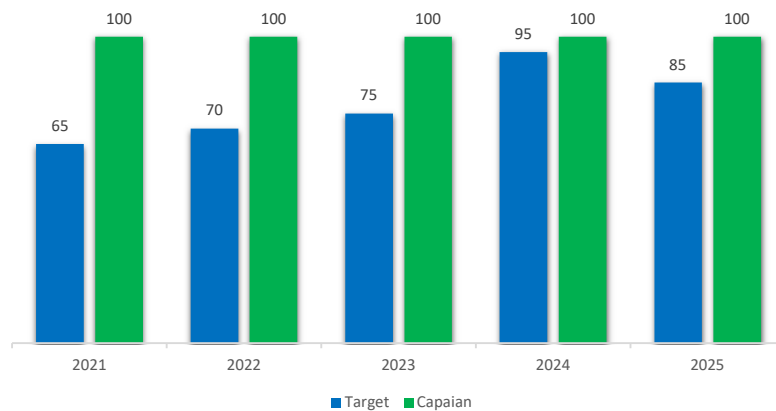
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Biro Keuangan dan BMN merupakan suatu ukuran kuantitatif yang mencerminkan Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Biro Keuangan dan BMN berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang telah ditindaklanjuti (berstatus tuntas) oleh Unit Kerja Eselon II di lingkup Sekretariat Jenderal. Obyek capaian Indikator Kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal adalah rekomendasi yang terbit pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi Inspektorat Jenderal pada periode pengukuran.

b) Analisis Capaian

Indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Keuangan dan BMN merupakan parameter strategis untuk mengukur efektivitas transformasi saran hasil audit menjadi langkah perbaikan nyata dalam organisasi. Indikator ini menilai sejauh mana biro mampu mengonversi temuan pengawasan—baik dari internal maupun eksternal—menjadi perbaikan proses bisnis, penguatan sistem pengendalian intern, serta optimalisasi tata kelola keuangan dan aset. Pemanfaatan rekomendasi secara komprehensif mencerminkan bahwa pengawasan tidak hanya dipandang sebagai beban administratif, melainkan sebagai instrumen pembelajaran organisasi yang krusial untuk menutup celah risiko dan meningkatkan efisiensi operasional demi mendukung pencapaian visi kementerian. Berikut tabel capaian Indikator Kinerja tahun 2025 dengan perbandingan tahun sebelumnya:

Tabel 26 Perbandingan Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro Keuangan dan BMN Tahun 2025 dengan Capaian Triwulanan Lima Tahun Terakhir dan Renstra Sekretariat Jenderal 2025 - 2029

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulanan (TW IV)					Target 2025	Triwulanan (TW IV)			Renstra Sekretariat Jenderal 2025 - 2029		
	2020	2021	2022	2023	2024		Target	Realisasi	% Capaian	Target 2025	Realisasi	% Capaian
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro Keuangan dan BMN	82,35	100	100	100	100	85	85	100	117,65	85	100	117,65



Gambar 15 Target dan Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro Keuangan dan BMN dalam 5 Tahun Terakhir

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara secara konsisten mencatat capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja melampaui target yang telah ditetapkan selama tahun 2021 hingga 2024, dengan menyentuh capaian sebesar 100% pada setiap tahunnya. Capaian positif ini berhasil dipertahankan hingga 2025. Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor 103/SJ.2/RC.610/I/2026 tanggal 9 Januari 2026 perihal Capaian IKU Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal Triwulan IV Tahun 2025, capaian indikator tercatat sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 85%. Dengan demikian, indikator ini memperoleh tingkat capaian sebesar 117,65%, baik terhadap target tahunan maupun target dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh rekomendasi hasil pengawasan telah dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung perbaikan kinerja Biro Keuangan dan BMN. Kondisi ini sekaligus mencerminkan komitmen yang kuat Biro Keuangan dan Barang Milik Negara dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pengawasan secara konstruktif serta menjadikannya sebagai dasar dalam peningkatan tata kelola, efisiensi proses bisnis, dan penguatan pengendalian internal. Secara keseluruhan, hasil yang dicapai menggambarkan tingkat responsivitas dan keseriusan yang tinggi dalam mengintegrasikan rekomendasi pengawasan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari strategi perbaikan berkelanjutan.

c) Program/Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja

Pelaksanaan Rapat *Entry Meeting* Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen Triwulan IV pada 18 Desember 2025 merupakan instrumen kendali mutu strategis dalam memastikan setiap rekomendasi pengawasan memberikan nilai tambah bagi perbaikan kinerja organisasi. Berdasarkan Surat Undangan Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor B.3781/SJ.2/TU.330/XII/2025, kegiatan rekonsiliasi data ini menjadi sarana validasi komprehensif untuk menyelaraskan status penyelesaian temuan internal dengan bukti dukung yang telah diunggah pada sistem pengawasan. Analisis terhadap mekanisme ini menunjukkan bahwa pemanfaatan hasil pengawasan tidak hanya berhenti pada pemenuhan administratif, namun telah bertransformasi menjadi dasar perbaikan proses bisnis dalam pengelolaan keuangan dan BMN di lingkup Sekretariat Jenderal. Keberhasilan dalam menyelaraskan data tindak lanjut secara akurat pada akhir tahun anggaran ini menjadi faktor determinan dalam mencapai target indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja, yang sekaligus memperkuat sistem pengendalian intern dan memitigasi risiko ketidakefisienan operasional di masa mendatang.

d) Upaya Perbaikan Kinerja yang Akan Datang

Biro Keuangan dan BMN akan memperkuat siklus perbaikan tata kelola secara berkelanjutan melalui pengintegrasian rekomendasi hasil pengawasan internal ke dalam kebijakan operasional harian guna mempertahankan capaian indikator tersebut di tahun 2026. Langkah nyata yang segera dilaksanakan mencakup penyelenggaraan forum rekonsiliasi berkala antara pengelola keuangan dengan Inspektorat Jenderal untuk memastikan setiap rekomendasi audit tidak hanya tuntas secara administratif, tetapi juga diimplementasikan sebagai solusi permanen atas kendala sistemik. Selain itu, digitalisasi pemantauan tindak lanjut akan dioptimalkan melalui sistem peringatan dini (*early warning system*) yang mampu mendeteksi batas waktu penyelesaian komitmen perbaikan secara otomatis. Komitmen ini akan diwujudkan melalui penyusunan panduan perbaikan prosedur operasional standar (SOP) berbasis hasil pengawasan, sehingga setiap temuan menjadi pembelajaran organisasi yang nyata dalam meningkatkan efektivitas kinerja dan mencegah terjadinya inefisiensi di lingkungan Biro Keuangan dan BMN.

e) Penggunaan Sumber Daya

Selama pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2025, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara mengedepankan prinsip penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja. Pemanfaatan anggaran difokuskan pada kegiatan yang berdampak langsung terhadap implementasi rekomendasi pengawasan, seperti penyelenggaraan rapat koordinasi bersama unit eselon II lingkup Sekretariat Jenderal, penyusunan tindak lanjut yang terukur, serta penguatan sistem dokumentasi dan pelaporan secara digital. Penyesuaian kegiatan secara daring ini merupakan respons atas kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Keterbatasan alokasi dana tersebut mengharuskan dilakukannya optimalisasi belanja melalui pengalihan sebagian besar kegiatan strategis dan koordinasi program kerja ke dalam format daring guna menekan biaya operasional secara signifikan. Meskipun ruang gerak fisik terbatas, intensitas pelaksanaan rapat dan monitoring melalui platform digital menjadi instrumen utama yang memastikan setiap fungsi pengelolaan keuangan dan aset tetap berjalan tanpa hambatan teknis yang berarti. Langkah penghematan ini membuktikan bahwa keterbatasan sumber daya finansial dapat dimitigasi melalui adaptasi teknologi yang tepat, sehingga integritas dan target kinerja organisasi tetap terpenuhi secara akuntabel di tengah semangat efisiensi nasional.

16. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Bidang Pengelolaan Keuangan dan BMN

a) Definisi Indikator Kinerja

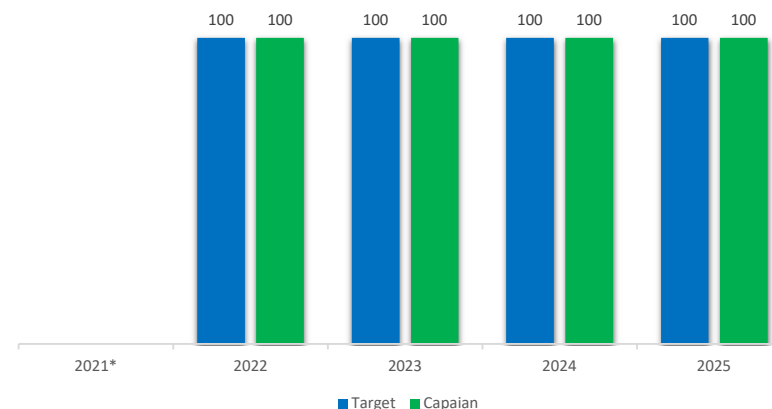
Jumlah Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan dibidang Pengelolaan Keuangan dan BMN yang direncanakan akan diselesaikan pada Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 sebanyak 1 peraturan berupa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyaluran Dana Bergulir Bidang Kelautan dan Perikanan kemudian diubah menjadi usulan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pembina Teknis Badan Layanan Umum (BLU).

b) Analisis Capaian

Indikator kinerja Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Keuangan dan BMN merupakan parameter strategis untuk mengukur efektivitas dan kepatuhan Biro dalam menyediakan payung hukum yang kuat bagi tata kelola keuangan dan aset negara. Indikator ini mencakup seluruh tahapan dalam siklus legislatif internal, mulai dari identifikasi kebutuhan regulasi, penyusunan draf, proses harmonisasi lintas unit, hingga penetapan dan pengundangan aturan. Keberhasilan dalam pemenuhan target ini sangat krusial karena regulasi yang dihasilkan menjadi instrumen formal untuk memberikan kepastian hukum, standarisasi operasional, serta mitigasi risiko administratif dalam pengelolaan fiskal dan kekayaan negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun capaian indikator kinerja tahun 2025 dengan perbandingan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 27 Perbandingan Capaian Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan perundang-undangan Bidang Keuangan dan BMN Tahun 2025 dengan Renstra Sekretariat Jenderal 2025 - 2029

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulanan (TW IV)					Target 2025	Triwulanan (TW IV)			Renstra Sekretariat Jenderal 2025 - 2029		
	2020	2021	2022	2023	2024		Target	Realisasi	% Capaian	Target 2025	Realisasi	% Capaian
Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan perundang-undangan Bidang Keuangan dan BMN	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



Gambar 16 Target dan Capaian Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan perundang-undangan Bidang Keuangan dan BMN dalam 3 Tahun Terakhir

Keterangan: *) Indikator Kinerja Belum Ditetapkan

Capaian indikator kinerja Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Bidang Pengelolaan Keuangan dan BMN secara konsisten menunjukkan hasil yang optimal sejak tahun 2022 hingga 2024, dengan capaian sebesar 100% setiap tahunnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Konsistensi capaian indikator tersebut berhasil dipertahankan hingga tahun 2025. Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Hukum Nomor 50/SJ.4/TU.210/I/2026 tanggal 6 Januari 2026 perihal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester II Tahun 2025, capaian indikator kinerja tahun 2025 tercatat sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 100%, baik terhadap target tahunan maupun target dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025–2029. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh program penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan BMN telah diselesaikan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini mencerminkan komitmen dan konsistensi kinerja Biro Keuangan dan Barang Milik Negara dalam melaksanakan program legislasi secara terencana, akuntabel, serta berkelanjutan.

c) Program/Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja

Pengundangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 86 Tahun 2025 tentang Pembina Teknis Badan Layanan Umum (BLU) pada 23 Desember 2025 merupakan langkah strategis yang memastikan ketercapaian target indikator Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan dan Keputusan Menteri Bidang Pengelolaan Keuangan dan BMN. Perubahan kebijakan ini menunjukkan adanya langkah mitigasi yang responsif, di mana usulan awal berupa Peraturan Menteri tentang Penyaluran Dana Bergulir dialihkan menjadi penetapan Pembina Teknis BLU guna merespons kebutuhan mendesak akan penguatan supervisi dan standarisasi operasional pada unit-unit pelaksana teknis. Perubahan usulan ini tidak hanya menjaga momentum pencapaian target kinerja secara kuantitatif, namun secara substansial memberikan fondasi hukum yang lebih kuat bagi tata kelola fiskal di lingkungan KKP. Dengan tuntasnya pengundangan regulasi ini, Biro Keuangan dan BMN berhasil menunjukkan fleksibilitas manajerial dalam menyelaraskan draf regulasi dengan dinamika kebutuhan organisasi, sehingga setiap produk hukum yang dihasilkan benar-benar memberikan kepastian operasional dalam mendukung kemandirian finansial dan profesionalisme pengelolaan BLU Kelautan dan Perikanan.

d) Upaya Perbaikan Kinerja yang Akan Datang

Biro Keuangan dan BMN akan memastikan ketuntasan penyusunan regulasi di bidang pengelolaan keuangan dan BMN pada tahun anggaran 2026 melalui penguatan koordinasi antar unit organisasi dan percepatan siklus harmonisasi hukum. Langkah nyata yang segera dilaksanakan mencakup penyusunan skala prioritas draf peraturan berdasarkan urgensi kebutuhan organisasi, serta penyelenggaraan konsinyasi teknis secara intensif bersama Biro Hukum guna mempercepat proses *legal drafting* dan finalisasi draf Keputusan maupun Peraturan Menteri. Selain itu, pemantauan progres setiap tahapan penyusunan regulasi akan dilakukan secara berkala melalui sistem kendali mutu dokumen guna memitigasi hambatan administratif sejak tahap pengusulan hingga pengundangan. Komitmen ini akan diwujudkan melalui penguatan peran tim teknis dalam menyinergikan substansi regulasi dengan dinamika kebijakan strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga target persentase penyelesaian program legislasi internal dapat tercapai secara tepat waktu dan memberikan kepastian hukum yang optimal bagi tata kelola keuangan negara.

e) Penggunaan Sumber Daya

Selama Tahun 2025, pencapaian indikator kinerja Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Keuangan dan BMN tetap menunjukkan progres yang positif meskipun menghadapi tantangan efisiensi anggaran. Biro Keuangan dan BMN berhasil mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia secara efisien dan efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan rapat dan koordinasi secara daring, menyusun prioritas kegiatan berdasarkan urgensi dan dampak regulasi yang disusun, serta melakukan pengelolaan waktu dan tenaga kerja secara terukur. Langkah-langkah ini tidak hanya menjaga kesinambungan proses penyusunan regulasi, tetapi juga memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan tetap sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara.

17. Persentase Penyerapan Anggaran Biro Keuangan dan BMN

a) Definisi Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Persentase penyerapan anggaran Biro Keuangan dan BMN merupakan Indikator Kinerja yang baru ditetapkan pada tahun 2022 yang digunakan sebagai monitoring maupun evaluasi terhadap anggaran di lingkup Biro Keuangan dan BMN. Persentase penyerapan anggaran Biro Keuangan dan BMN adalah perhitungan capaian realisasi anggaran Biro Keuangan dan BMN dibandingkan dengan pagu anggaran Biro Keuangan dan BMN. Penarikan data realisasi anggaran dapat dilakukan pada Aplikasi Kemenkeu SAKTI pada Modul Bendahara Cetak Laporan. Untuk menguji kesesuaian data realisasi anggaran biasanya operator Bendahara atau PPK akan mengambil data setiap akhir bulan. Hal ini dikarenakan data tersebut juga sebagai penunjang LPJ Bendahara setiap bulan.

b) Analisis Capaian

Saat ini Biro Keuangan dan BMN memiliki Subbagian Tata Usaha dan 6 Tim Kerja yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Berdasarkan capaian dari aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan, realisasi penyerapan anggaran Biro Keuangan dan BMN per RO di luar Belanja Modal sampai dengan Tahun 2025 ditampilkan pada tabel berikut:

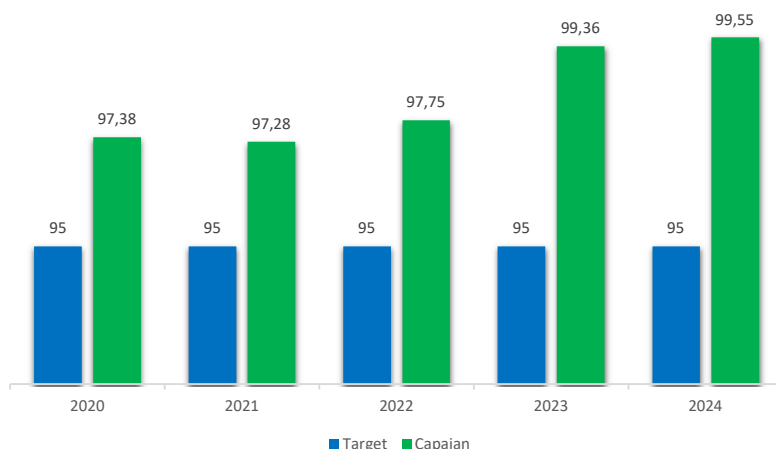
Tabel 28 Realisasi Anggaran Biro Keuangan dan BMN Setelah Efisiensi Anggaran per 31 Desember 2025

NO	KEGIATAN	PAGU AWAL (Rp)	PAGU EFEKTIF SETELAH EFISIENSI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	REALISASI (%)
1.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN	1.390.000.000	142.870.000	142.732.537	137.463	99,97
2.	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik, dan Umum	13.654.620.000	3.482.953.000	3.481.981.024	971.976	99,97
Total Anggaran Biro Keuangan dan BMN Tahun 2025		15.044.620.000	3.625.823.000	3.624.713.561	1.109.439	99,97

Sumber: SAKTI/ Kementerian Keuangan

Tabel 29 Perbandingan Capaian Persentase Penyerapan Anggaran Biro Keuangan dan BMN dengan Renstra Sekretariat Jenderal 2025 - 2029

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulanan (TW IV)					Target 2025	Triwulanan (TW IV)			Renstra Sekretariat Jenderal 2025 - 2029		
	2020	2021	2022	2023	2024		Target	Realisasi	% Capaian	Target 2025	Realisasi	% Capaian
Persentase Penyerapan Anggaran Biro Keuangan dan BMN	97,38	97,28	97,75	99,36	99,55	95	95	99,97	105,23	95	99,97	105,23



Gambar 17 Target dan Capaian Persentase Penyerapan Anggaran Biro Keuangan dan BMN dalam 5 Tahun Terakhir

Berdasarkan data yang ditampilkan pada gambar di atas, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, dari tahun 2020 hingga 2024, Biro Keuangan dan BMN secara konsisten mencatat capaian indikator kinerja Persentase Penyerapan Anggaran yang melampaui target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Pencapaian tersebut mencerminkan perencanaan anggaran yang matang, pelaksanaan kegiatan yang tepat waktu, serta pengelolaan keuangan yang akuntabel dan efisien. Kinerja yang berkesinambungan ini juga menunjukkan komitmen Biro Keuangan dan BMN dalam mendukung efektivitas program kerja melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya anggaran yang tersedia. Sebagai catatan, pada Tahun 2025, realisasi indikator kinerja Persentase Penyerapan Anggaran telah mencapai angka 92,14%, yang menunjukkan tren positif dan menjadi indikator awal yang kuat terhadap potensi tercapainya target tahunan secara keseluruhan. Perlu diketahui bahwa indikator kinerja ini akan dinilai secara resmi pada akhir tahun anggaran 2025.

c) Program/Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja

Selama Tahun 2025, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara telah melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase Penyerapan Anggaran, dengan realisasi anggaran difokuskan pada kebutuhan prioritas operasional dan strategis. Kegiatan tersebut meliputi pemenuhan kebutuhan keperluan kantor guna menunjang kelancaran operasional harian, pembayaran asuransi Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai bentuk perlindungan atas aset negara, serta pelaksanaan berbagai program oleh tim kerja teknis, seperti rapat, koordinasi lintas unit, dan penyusunan dokumen pendukung kegiatan substansi. Efektivitas pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut menjadi faktor penting dalam mendorong penyerapan anggaran yang optimal di awal tahun serta menjaga kesinambungan kinerja Biro Keuangan dan Barang Milik Negara secara menyeluruh.

d) Upaya Perbaikan Kinerja yang Akan Datang

Dalam rangka meningkatkan nilai indikator kinerja Persentase Penyerapan Anggaran yang akan dinilai pada akhir tahun 2025, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara akan melakukan sejumlah upaya perbaikan yang bersifat strategis dan berkelanjutan. Upaya tersebut antara lain mencakup percepatan proses pelaksanaan kegiatan prioritas melalui penjadwalan yang lebih terintegrasi, peningkatan koordinasi dengan unit pelaksana teknis untuk memastikan kesesuaian waktu dan kebutuhan anggaran, serta penguatan monitoring dan evaluasi terhadap progres penyerapan secara berkala. Selain itu, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara juga akan mengoptimalkan penggunaan sistem informasi keuangan untuk mendeteksi potensi deviasi sejak dini dan melakukan penyesuaian secara cepat dan tepat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pelaksanaan anggaran dapat lebih efisien, tepat waktu, dan sesuai dengan rencana kerja, sehingga capaian indikator kinerja pada akhir tahun dapat melebihi target yang telah ditetapkan.

e) Penggunaan Sumber Daya

Selama Tahun 2025, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara mengedepankan prinsip penggunaan sumber daya secara efektif dalam rangka meningkatkan capaian indikator kinerja Persentase Penyerapan Anggaran. Efektivitas tersebut tercermin dari pengalokasian anggaran yang tepat sasaran pada kegiatan prioritas, seperti keperluan operasional perkantoran, pembayaran premi asuransi Barang Milik Negara (BMN), serta pelaksanaan tugas-tugas teknis oleh tim kerja sesuai rencana kerja tahunan. Selain itu, penyesuaian mendasar sebagai respons atas kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Keterbatasan alokasi dana tersebut mengharuskan dilakukannya optimalisasi belanja melalui pengalihan sebagian besar kegiatan strategis dan koordinasi program kerja ke dalam format daring guna menekan biaya operasional secara signifikan. Meskipun ruang gerak fisik terbatas, intensitas pelaksanaan rapat dan monitoring melalui platform digital menjadi instrumen utama yang memastikan setiap fungsi pengelolaan keuangan dan aset tetap berjalan tanpa hambatan teknis yang berarti. Langkah penghematan ini membuktikan bahwa keterbatasan sumber daya finansial dapat dimitigasi melalui adaptasi teknologi yang tepat, sehingga integritas dan target kinerja organisasi tetap terpenuhi secara akuntabel di tengah semangat efisiensi nasional.

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya di dalam Laporan Kinerja

Biro Keuangan dan BMN menunjukkan ketangkasan dalam mengelola sumber daya di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional yang ketat sepanjang tahun anggaran 2025. Dengan adanya keterbatasan alokasi fiskal, organisasi melakukan penyesuaian strategis dengan mengalihkan mayoritas agenda pertemuan, koordinasi, hingga bimbingan teknis ke dalam format daring. Langkah ini diambil bukan hanya untuk memenuhi kewajiban penghematan belanja operasional, seperti biaya perjalanan dinas, sewa ruang pertemuan, dan konsumsi, tetapi juga sebagai momentum percepatan transformasi digital dalam tata kelola birokrasi. Melalui penggunaan platform pertemuan virtual yang intensif, Biro Keuangan dan BMN berhasil menjaga ritme kerja tetap produktif dan memastikan seluruh program strategis tetap berjalan tanpa mengabaikan kualitas luaran yang telah direncanakan sebelumnya.

Penggunaan sumber daya yang efisien ini terbukti mampu menjaga integritas kinerja Biro Keuangan dan BMN meskipun dilaksanakan dengan keterbatasan interaksi fisik. Fokus penggunaan anggaran dialihkan pada penguatan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung keamanan serta kelancaran arus data keuangan dan aset, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak yang tepat sasaran. Selain menghasilkan penghematan biaya operasional yang signifikan, metode kerja daring ini juga mendorong efisiensi waktu bagi para pegawai dalam menyelesaikan tugas-tugas administratif serta pelaporan yang bersifat mendesak. Keberhasilan dalam menyeimbangkan antara keterbatasan anggaran dengan tuntutan pencapaian target kinerja ini menjadi bukti nyata komitmen Biro Keuangan dan BMN dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang ramping, lincah, dan tetap akuntabel bagi kepentingan masyarakat luas.

D. Kinerja dan Prestasi Lainnya

Puncak dari capaian kinerja adalah keberhasilan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keempat kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2021. Prestasi prestisius ini diperkuat oleh pengakuan dari otoritas fiskal nasional melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-32/MK/PB/2025 tanggal 5 Juni 2025, yang memberikan apresiasi tinggi atas ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) serta kontribusi positif terhadap raihan opini Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024. Perolehan ini menegaskan bahwa meskipun dihadapkan pada keterbatasan ruang fiskal dan perubahan pola kerja, Biro Keuangan dan BMN tetap mampu menjaga kualitas pertanggungjawaban keuangan yang handal, tepat waktu, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

BAB IV PENUTUP

2025

**Biro Keuangan dan BMN
Sekretariat Jenderal**

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan Umum

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) merupakan unit kerja setingkat Eselon II di bawah naungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tanggung jawab krusial dalam mengawal akuntabilitas fiskal dan aset negara. Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas mandat yang diemban, Biro Keuangan dan BMN telah merampungkan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 dengan merujuk sepenuhnya pada ketentuan regulasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi. Dokumen ini dirancang sebagai rangkuman kinerja yang menyeluruh namun tetap ringkas, guna memaparkan sejauh mana rencana aksi yang telah disusun sejak awal tahun anggaran mampu diimplementasikan secara nyata dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dari sisi aspek pengelolaan keuangan, Biro Keuangan dan BMN menunjukkan disiplin fiskal yang sangat tinggi dalam pemanfaatan anggaran negara sepanjang tahun 2025. Dari total pagu efektif sebesar Rp3.625.823.000, Biro Keuangan dan BMN berhasil merealisasikan anggaran sebesar Rp3.624.713.561, atau mencapai persentase penyerapan yang sangat optimal yakni sebesar 99,97%. Anggaran tersebut didistribusikan secara proporsional untuk dua program utama, yakni program Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, dan BMN yang terealisasi sebesar Rp142.732.537 dari pagu Rp142.870.000, serta program Layanan Umum yang menyerap dana sebesar Rp3.481.981.024 dari alokasi Rp3.482.953.000. Keseragaman capaian realisasi pada angka 99,97% di seluruh lini program ini mencerminkan ketepatan perencanaan dan efisiensi belanja yang berjalan selaras dengan target operasional yang telah ditetapkan.

Keberhasilan performa anggaran tersebut didukung sepenuhnya oleh dedikasi 58 orang pegawai yang menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi serta akuntabilitas. Dalam upaya memberikan arah kerja yang jelas, organisasi telah menetapkan dua sasaran kegiatan utama yang kemudian dijabarkan secara detail ke dalam 17 indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Hasil evaluasi menunjukkan prestasi yang membanggakan, di mana 16 dari 17 indikator kinerja yang ditetapkan berhasil memenuhi bahkan melampaui target, sehingga menghasilkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) akhir sebesar 106,48 dengan predikat “Baik”. Capaian ini juga diperkuat dengan komitmen pembangunan Zona Integritas serta internalisasi nilai-nilai budaya kerja SAILS (Smart, Akuntabel, Integritas, Loyalitas, Sinergi) sebagai fondasi moral pegawai dalam melayani masyarakat dan negara.

Sebagai langkah ke depan, penyusunan Laporan Kinerja ini tidak hanya berhenti sebagai dokumen administratif semata, namun berfungsi sebagai instrumen evaluasi strategis bagi Biro Keuangan dan BMN untuk terus melakukan pembenahan. Meski secara umum telah meraih nilai kerja yang baik, organisasi tetap berkomitmen untuk mengidentifikasi area perbaikan pada indikator kinerja yang belum maksimal guna meningkatkan nilai capaian pada tahun-tahun mendatang. Melalui penyajian data kinerja yang terukur dan objektif ini, diharapkan para pemangku kepentingan dapat memperoleh gambaran utuh mengenai profesionalisme biro dalam mengelola sumber daya negara. Komitmen ini menjadi jaminan bagi terciptanya tata kelola keuangan dan aset Kementerian Kelautan dan Perikanan yang semakin handal, berkelanjutan, dan memberikan manfaat luas bagi sektor kelautan nasional.

LAMPIRAN

2025

**Biro Keuangan dan BMN
Sekretariat Jenderal**



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAN www.kkp.go.id SUREL setjen@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO KEUANGAN DAN BMN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Setyawati**

Jabatan : Kepala Biro Keuangan dan BMN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Rudy Heriyanto Adi Nugroho**

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi,

Jakarta, 29 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Sekretaris Jenderal

PIHAK PERTAMA
Kepala Biro Keuangan dan BMN


A Rudy Heriyanto Adi Nugroho


Setyawati

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO KEUANGAN DAN BMN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Bidang Pengelolaan Keuangan dan BMN	1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Opini)	WTP (5)
		2	Level Maturitas SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan (Level)	3
		3	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (Nilai)	92
		4	Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Kelautan dan Perikanan (Indeks)	3,36
		5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Sekretariat Jenderal (Nilai)	81,50
		6	Persentase Implementasi Standar Biaya Keluaran KKP (%)	100
		7	Batas Tertinggi Persentase Nilai temuan LHP BPK atas LK Sekretariat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal (%)	≤0,5
		8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal (%)	85
		9	Indeks Pengelolaan BLU Kementerian Kelautan dan Perikanan (Indeks)	3
		10	Persentase Pengelolaan PNPB Sektor Kelautan dan Perikanan (%)	100
2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Keuangan dan BMN	11	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Biro Keuangan dan BMN (Nilai)	75
		12	Nilai PM SAKIP Biro Keuangan dan BMN (Nilai)	87
		13	Indeks Profesionalitas ASN Biro Keuangan dan BMN (Indeks)	87
		14	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Keuangan dan BMN (%)	100
		15	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Biro Keuangan dan BMN (%)	85
		16	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Bidang Pengelolaan Keuangan dan BMN (%)	100
		17	Persentase Penyerapan Anggaran Biro Keuangan dan BMN (%)	95

Data Anggaran :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN	1.390.000.000
2.	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik, dan Umum	13.654.620.000
Total Anggaran Biro Keuangan dan BMN Tahun 2025		15.044.620.000

Jakarta, 21 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Sekretaris Jenderal

PIHAK PERTAMA
Kepala Biro Keuangan dan BMN



Rudy Heriyanto Adi Nugroho



Setyawati



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAM www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO KEUANGAN DAN BMN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sutrisno Subagyo**
Jabatan : Kepala Biro Keuangan dan BMN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Rudy Heriyanto Adi Nugroho**
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 April 2025

PIHAK KEDUA
Sekretaris Jenderal


Rudy Heriyanto Adi Nugroho

PIHAK PERTAMA
Kepala Biro Keuangan dan BMN


@ Sutrisno Subagyo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO KEUANGAN DAN BMN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Bidang Pengelolaan Keuangan dan BMN	1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (opini)	WTP (5)
		2	Level Maturitas SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan (level)	3
		3	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (nilai)	92
		4	Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Kelautan dan Perikanan (indeks)	3,36
		5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Sekretariat Jenderal (nilai)	81,5
		6	Persentase Implementasi Standar Biaya Keluaran KKP (%)	100
		7	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan (LK) Sekretariat Jenderal (%)	≤0,5
		8	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Sekretariat Jenderal (%)	85
		9	Indeks Pengelolaan BLU Kementerian Kelautan dan Perikanan (indeks)	3
		10	Persentase Pengelolaan PNPB Sektor Kelautan dan Perikanan (%)	100
2	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik di Lingkungan Biro Keuangan dan BMN	11	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Biro Keuangan dan BMN (nilai)	75
		12	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP (nilai)	87
		13	Indeks Profesionalitas ASN Biro Keuangan dan BMN (indeks)	87
		14	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Keuangan dan BMN (%)	100
		15	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Biro Keuangan dan BMN (%)	85
		16	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Bidang Pengelolaan Keuangan dan BMN (%)	100
		17	Persentase Penyerapan Anggaran Biro Keuangan dan BMN (%)	95

Data anggaran:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN	1.390.000.000
2	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	13.654.620.000
Total Anggaran Biro Keuangan dan BMN Tahun 2025		15 044 620 000

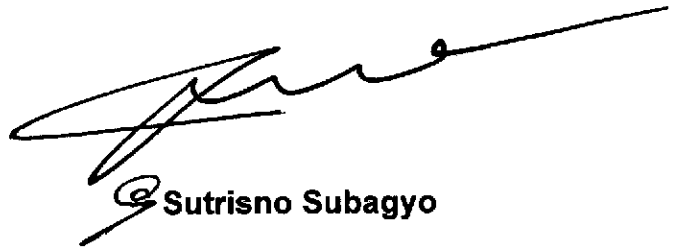
Jakarta, 29 April 2025

PIHAK KEDUA
Sekretaris Jenderal



Rudy Heriyanto Adi Nugroho

PIHAK PERTAMA
Kepala Biro Keuangan dan BMN



Sutrisno Subagyo



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAN www.kkp.go.id SUREL setjen@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO KEUANGAN DAN BMN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Sutrisno Subagyo**

Jabatan : Kepala Biro Keuangan dan BMN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Rudy Heriyanto Adi Nugroho**

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Sekretaris Jenderal

PIHAK PERTAMA
Kepala Biro Keuangan dan BMN



Rudy Heriyanto Adi Nugroho



Sutrisno Subagyo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO KEUANGAN DAN BMN

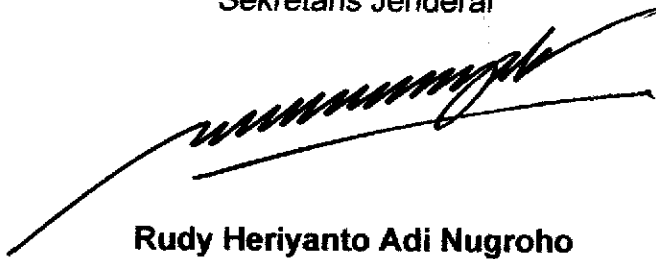
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Bidang Pengelolaan Keuangan dan BMN	1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Opini)	WTP (5)
		2	Level Maturitas SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan (Level)	3
		3	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (Nilai)	92
		4	Indeks Pengelolaan Aset Kementerian Kelautan dan Perikanan (Indeks)	3,36
		5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Sekretariat Jenderal (Nilai)	81,50
		6	Persentase Implementasi Standar Biaya Keluaran KKP (%)	100
		7	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK Sekretariat Jenderal (%)	≤0,5
		8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal (%)	85
		9	Indeks Pengelolaan BLU Kementerian Kelautan dan Perikanan (Indeks)	3
		10	Persentase Pengelolaan PNPB Sektor Kelautan dan Perikanan (%)	100
2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Keuangan dan BMN	11	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Biro Keuangan dan BMN (Nilai)	75
		12	Nilai PM SAKIP Biro Keuangan dan BMN (Nilai)	87
		13	Indeks Profesionalitas ASN Biro Keuangan dan BMN (Indeks)	82
		14	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro Keuangan dan BMN (%)	100
		15	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Biro Keuangan dan BMN (%)	85
		16	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Bidang Pengelolaan Keuangan dan BMN (%)	100
		17	Persentase Penyerapan Anggaran Biro Keuangan dan BMN (%)	95

Data Anggaran :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN	142.870.000
2.	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	3.482.953.000
Total Anggaran Biro Keuangan dan BMN Tahun 2025		3.625.823.000

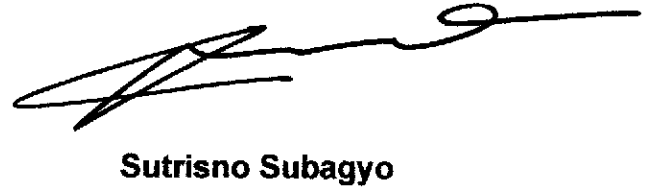
Jakarta, 2 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Sekretaris Jenderal



Rudy Heriyanto Adi Nugroho

PIHAK PERTAMA
Kepala Biro Keuangan dan BMN



Sutrisno Subagyo



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAR www.kkp.go.id SUREL setjen@kkp.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR B.1402/SJ.2/KP.440/IV/2025

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menugaskan pegawai dalam Surat Tugas ini untuk menjadi Ketua dan/atau Anggota Tim Kerja lingkup Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.

Dasar : 1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Berita Acara Hasil Validasi Usulan Tim Kerja Lingkup Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal tanggal 1 April 2024.

Memberi Tugas

Kepada : para pegawai lingkup Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Untuk : 1. menjadi Ketua dan/atau Anggota sesuai susunan keanggotaan Tim Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
2. menjadi Penanggung Jawab dalam pelaksanaan dan operasional *Mini Command Center* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dengan penuh tanggung jawab; dan
3. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Jakarta, 11 April 2025

Kepala Biro Keuangan dan BMN,

Terima kasih untuk tidak memberikan sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN, gratifikasi, dan benturan kepentingan.



Sutrisno Subagyo

Lampiran Surat Tugas I
 Nomor : B.1402/SJ.2/KP.440/IV/2025
 Tanggal : 11 April 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA
 LINGKUP BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA**

No.	Nama/NIP/Pangkat/Golongan/Jabatan	Nama Tim Kerja								Nilai Beban Kerja
		PB	KI	PA	PBMN	APK	TL	BLU-PNBP	Dukman	
1.	Arifin Syam 197503242002121008 Pembina Utama Muda, IV/c APK APBN Ahli Madya					Ketua		Ketua		20
2.	Aris Suyono 197403292003121002 Pembina, IV/a APK APBN Ahli Madya		Ketua				Ketua			20
3.	Nugroho Budiharto 198307272006041003 Penata Tk.I, III/d Analisis Anggaran Ahli Muda			Anggota						5
4.	Martha Lusua Pasaribu 197810222009012002 Pembina, IV/a APK APBN Ahli Muda				Ketua		Anggota			15
5.	Revo Triono Adi S. 197607182005021002 Pembina, IV/a APK APBN Ahli Madya	Ketua								10

No.	Nama/NIP/Pangkat/Golongan/Jabatan	Nama Tim Kerja								Nilai Beban Kerja
		PB	KI	PA	PBMN	APK	TL	BLU-PNBP	Dukman	
6.	Dian Hesty Andayani 197605061999032001 Pembina, IV/a APK APBN Ahli Madya		Anggota					Anggota		10
7.	Meirda Utama 198205242002121003 Penata Tk.I, III/d APK APBN Ahli Muda	Anggota								5
8.	Herlan Suherlan 197504272002121008 Pembina, IV/a APK APBN Ahli Muda	Anggota					Anggota			10
9.	Aries Sariyanto 197304172005021001 Pembina, IV/a APK APBN Ahli Muda					Anggota				5
10.	Moch. Bayu Dipanegara 197804042009011002 Penata Tk.I, III/d Penata Laksana Barang Penyelia				Anggota					5
11.	Brigitta Dhenny Putrianti 198510252009012001 Penata Tk.I, III/d Analisis Anggaran Ahli Muda			Anggota				Anggota		10

No.	Nama/NIP/Pangkat/Golongan/Jabatan	Nama Tim Kerja								Nilai Beban Kerja
		PB	KI	PA	PBMN	APK	TL	BLU-PNBP	Dukman	
12.	Hariato Eka Putra 198511152010011021 Penata Tk.I, III/d Analisis Anggaran Ahli Muda			Ketua			Anggota			15
13.	Wisnu Danang Saputro 198104082015031003 Penata, III/c APK APBN Ahli Muda		Anggota							5
14.	Budiani Ayu Damayanti 198202042009122001 Penata Tk.I, III/d APK APBN Ahli Pertama	Anggota						Anggota		10
15.	Sylvia Ratna Esther Panggabean 197810162011012004 Penata Tk.I, III/d APK APBN Ahli muda					Anggota		Anggota		10
16.	Rahmah Nurhilal 198611202010122002 Penata Tk.I, III/d APK APBN Ahli Muda		Anggota							5
17.	Dicky Asoksan Rachmana 198306222014031001 Penata, III/c APK APBN Ahli Muda					Anggota				5

No.	Nama/NIP/Pangkat/Golongan/Jabatan	Nama Tim Kerja								Nilai Beban Kerja
		PB	KI	PA	PBMN	APK	TL	BLU-PNBP	Dukman	
18.	Kuni Afifah 199404302018012005 Penata Muda Tk.I, III/b APK APBN Ahli Pertama					Anggota				5
19.	Irmala Shitta 199409022018012003 Penata Muda Tk.I, III/b Analisis Anggaran Ahli Pertama			Anggota						5
20.	Adityo Lukie Nugroho 198304062009011003 Penata Tk.I, III/d APK APBN Ahli Muda	Anggota								5
21.	Tut Wuri Handayani 197201101999032001 Penata Tk.I, III/d Penata Laksana Barang Penyelia				Anggota					5
22.	Sundari Ika Binarti 198105292005022001 Penata Tk.I, III/d Penata Laksana Barang Penyelia				Anggota					5
23.	Donna Arwinda 198306012006042002 Penata, III/c Penata Laksana Barang Mahir Penyelia				Anggota					5

No.	Nama/NIP/Pangkat/Golongan/Jabatan	Nama Tim Kerja								Nilai Beban Kerja
		PB	KI	PA	PBMN	APK	TL	BLU-PNBP	Dukman	
24.	Rovvy Mariani Manusiwa 197910252009042006 Penata Tk.I, III/d Penata Laksana Barang Penyelia				Anggota					5
25.	Wuri Samiyoto 198210142009121001 Penata Muda Tk.I, III/b Penata Laksana Barang Mahir					Anggota				5
26.	Agustinus Ari Susilo Wiharnoko 197408282005021001 Penata, III/c PK APBN Penyelia	Anggota								5
27.	Rif'ani Aswab 198412272009121001 Penata Muda Tk.I, III/b PK APBN Mahir								Anggota	5
28.	Irwan 197306052003121003 Penata Muda, III/a PK APBN Terampil		Anggota							5
29.	Gondo Kusumo 198104032012121004 Pengatur, II/c PK APBN Terampil				Anggota					5

[illegible]

No.	Nama/NIP/Pangkat/Golongan/Jabatan	Nama Tim Kerja								Nilai Beban Kerja
		PB	KI	PA	PBMN	APK	TL	BLU-PNBP	Dukman	
36.	Alia Rahmadani 199203102020122004 Penata Muda, III/a APK APBN Ahli Pertama					Anggota				5
37.	Bagus Aji Darmawan 199901232019121001 Pengatur Tk.I, II/d Pengelola Keuangan			Anggota						5
38.	Zasarah Zahwa Tarigan 199802202019122001 Pengatur Tk.I, II/d Pengelola Keuangan								Anggota	5
39.	I Putu Surya Sentana Putra 199902202021011003 Pengatur Tk I, II/d Pengelola Barang Milik Negara				Anggota					5
40.	Paulus Tupado 199909242021011002 Pengatur Tk I, II/d PK APBN Terampil					Anggota				5
41.	Hamzah Nur Iqbal 199909252022011001 Pengatur, II/c Pengelola Keuangan		Anggota							5

No.	Nama/NIP/Pangkat/Golongan/Jabatan	Nama Tim Kerja								Nilai Beban Kerja
		PB	KI	PA	PBMN	APK	TL	BLU-PNBP	Dukman	
42.	Muchamad Ali Akbar 200008072022011003 Pengatur, II/c Pengelola Keuangan				Anggota					5
43.	Dirtan Jansem Manalu 199901312019121001 Pengatur Muda Tk.I, II/b Pengadministrasi Keuangan	Anggota								5
44.	Brythania Ananta Mega Pratiwi 199810182019122002 Pengatur Muda Tk.I, II/b Pengadminitrasi Keuangan								Anggota	5
45.	Dading Surya Al Majid 200105052023021001 Pengatur, II/c Pengolah Data dan Informasi								Anggota	5
46.	Naufal Rifqi Yusnandar 200105012023021002 Pengatur, II/c Pengolah Data dan Informasi								Anggota	5
47.	Muhammad Hadi 200009262023021003 Pengatur, II/c Pengolah Data dan Informasi		Anggota							5

[illegible]

No.	Nama/NIP/Pangkat/Golongan/Jabatan	Nama Tim Kerja								Nilai Beban Kerja
		PB	KI	PA	PBMN	APK	TL	BLU-PNBP	Dukman	
54.	Sholikan - - Pramubakti								Anggota	5
55.	Puput Wahyuni - - Pramubakti								Anggota	5

Keterangan:

1. PB : Perbendaharaan
2. KI : Kepatuhan Internal
3. PA : Pelaksanaan Anggaran
4. PBMN : Pengelolaan Barang Milik Negara
5. APK : Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
6. TL : Tindak Lanjut
7. BLU-PNBP : Badan Layanan Umum-Penerimaan Negara Bukan Pajak
8. Dukman : Dukungan Manajerial



Kepala Biro Keuangan dan BMN,

Sutrisno Subagyo

Lampiran Surat Tugas II
 Nomor : B.1402/SJ.2/KP.440/IV/2025
 Tanggal : 11 April 2025

PENANGGUNG JAWAB
 WEB DAN *MINI COMMAND CENTER*
 LINGKUP BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA

No.	Nama/NIP/Pangkat/Golongan/Jabatan	Tanggung Jawab
1.	Aries Sariyanto 197304172005021001 Pembina/ Iva APK APBN Ahli Muda	Kepala WEB dan <i>Mini Command Center</i>
2.	Moch. Bayu Dipanegara 197804042009011002 Penata Tk.I, III/d Penata Laksana Barang Penyelia	Menganalisis dan mereviu Layanan Barang Milik Negara
3.	Nugroho Budiharto 198307272006041003 Penata Tk.I, III/d Analisis Anggaran Ahli Muda	Menganalisis dan mereviu Anggaran dan Pinjaman Luar Negeri
4.	Sylvia Ratna Esther Panggabean 197810162011012004 Penata Tk.I, III/d APK APBN Ahli muda	Menganalisis dan mereviu Badan Layanan Umum dan Hibah Luar Negeri
5.	Bagus Aji Darmawan 199901232019121001 Pengatur Tk.I, II/d Pengelola Keuangan	<i>Host Data MonSakti</i>

No.	Nama/NIP/Pangkat/Golongan/Jabatan	Tanggung Jawab
6.	Hamzah Nur Iqbal 199909252022011001 Pengatur, II/c Pengelola Keuangan	Host Data MonSakti
7.	Anggi Ferdianza 199602272024211003 - Perencana Ahli Pertama	Host Data MonSakti
8.	Muhammad Oka Munggara - - Analisis Barang Milik Negara	Host Data SIMAN
9.	Muchamad Ali Akbar 200008072022011003 Pengatur, II/c Pengelola Keuangan	Host Data SIMAN
10.	Zasarah Zahwa Tarigan 199802202019122001 Pengatur Tk.I, II/d Pengelola Keuangan	Host Data SIMAN
11.	Alia Rahmadani 199203102020122004 Penata Muda, III/a APK APBN Ahli Pertama	Konsultasi Penyelesaian Tindak Lanjut dan Kerugian Negara



Kepala Biro Keuangan dan BMN,

Sutrisno Subagyo



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAR www.kkp.go.id SUREL setjen@kkp.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR B. 2161/SJ.2/KP.440/VI/2025

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menugaskan pegawai dalam Surat Tugas ini untuk menjadi Ketua dan/atau Anggota Tim Kerja lingkup Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.

Dasar : 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Berita Acara Hasil Validasi Usulan Tim Kerja Lingkup Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal tanggal 21 April 2025.

Memberi Tugas

Kepada : para pegawai lingkup Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Untuk : 1. menjadi Ketua dan/atau Anggota sesuai susunan keanggotaan Tim Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
2. menjadi Penanggung Jawab dalam pelaksanaan dan operasional *Mini Command Center* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dengan penuh tanggung jawab; dan
3. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2025.

Jakarta, 30 Juni 2025

Kepala Biro Keuangan dan BMN,

Terima kasih untuk tidak memberikan sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN, gratifikasi, dan benturan kepentingan.



Sutrisno Subagyo

Lampiran Surat Tugas I
 Nomor : B.2161/SJ.2/KP.440/VI/2025
 Tanggal : 30 Juni 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA LINGKUP BIRO KEUANGAN
 DAN BARANG MILIK NEGARA

No.	Nama/NIP/Pangkat/Golongan/Jabatan	Nama Tim Kerja						Nilai Beban Kerja
		PB	KI	PA	PBMN	APK	TU	
1.	Arifin Syam 197503242002121008 Pembina Utama Muda, IV/c APK APBN Ahli Madya					Ketua		10
2.	Aries Sariyanto 197304172005021001 Pembina, IV/a APK APBN Ahli Muda		Ketua					10
3.	Harianto Eka Putra 198511152010011021 Penata Tk.I, III/d Analisis Anggaran Ahli Muda			Ketua				10
4.	Martha Lusya Pasaribu 197810222009012002 Pembina, IV/a APK APBN Ahli Madya				Ketua			10

No.	Nama/NIP/Pangkat/Golongan/Jabatan	Nama Tim Kerja						Nilai Beban Kerja
		PB	KI	PA	PBMN	APK	TU	
5.	Revo Triono Adi S. 197607182005021002 Pembina, IV/a APK APBN Ahli Madya	Ketua						10
6.	Gianta Dear 197903302009011001 Penata, III/c Kepala Sub Bagian Tata Usaha						Ketua	10
7.	Dian Hesty Andayani 197605061999032001 Pembina, IV/a APK APBN Ahli Madya		Anggota					5
8.	Aris Suyono 197403292003121002 Pembina, IV/a APK APBN Ahli Madya					Anggota		5
9.	Herlan Suherlan 197504272002121008 Pembina, IV/a APK APBN Ahli Muda	Anggota						5
10.	Nugroho Budiharto 198307272006041003 Penata Tk.I, III/d Analisis Anggaran Ahli Muda			Anggota				5

No.	Nama/NIP/Pangkat/Golongan/Jabatan	Nama Tim Kerja						Nilai Beban Kerja
		PB	KI	PA	PBMN	APK	TU	
11.	Brigitta Dhenny Putrianti 198510252009012001 Penata Tk.I, III/d Analisis Anggaran Ahli Muda			Anggota				5
12.	Meirda Utama 198205242002121003 Penata Tk.I, III/d APK APBN Ahli Muda		Anggota					5
13.	Adityo Lukie Nugroho 198304062009011003 Penata Tk.I, III/d APK APBN Ahli Muda		Anggota					5
14.	Rahmah Nurhilal 198611202010122002 Penata Tk.I, III/d APK APBN Ahli Muda		Anggota					5
15.	Wisnu Danang Saputro 198104082015031003 Penata, III/c APK APBN Ahli Muda	Anggota						5
16.	Sylvia Ratna Esther Panggabean 197810162011012004 Penata Tk.I, III/d APK APBN Ahli muda					Anggota		5

No.	Nama/NIP/Pangkat/Golongan/Jabatan	Nama Tim Kerja						Nilai Beban Kerja
		PB	KI	PA	PBMN	APK	TU	
17.	Dicky Asoksan Rachmana 198306222014031001 Penata, III/c APK APBN Ahli Muda					Anggota		5
18.	Wiji Mutia Hardianti 199308302018012001 Penata Muda Tk.I, III/b Analisis SDM Aparatur Ahli Muda						Anggota	5
19.	Amilia 198302102009012005 Penata Tk.I, III/d APK APBN Ahli Pertama					Anggota		5
20.	Budiani Ayu Damayanti 198202042009122001 Penata Tk.I, III/d APK APBN Ahli Pertama	Anggota						5
21.	Irmala Shitta 199409022018012003 Penata Muda Tk.I, III/b Analisis Anggaran Ahli Pertama			Anggota				5
22.	Alia Rahmadani 199203102020122004 Penata Muda, III/a APK APBN Ahli Pertama					Anggota		5

No.	Nama/NIP/Pangkat/Golongan/Jabatan	Nama Tim Kerja						Nilai Beban Kerja
		PB	KI	PA	PBMN	APK	TU	
23.	Moch. Bayu Dipanegara 197804042009011002 Penata Tk.I, III/d Penata Laksana Barang Penyelia				Anggota			5
24.	Tut Wuri Handayani 197201101999032001 Penata Tk.I, III/d Penata Laksana Barang Penyelia				Anggota			5
25.	Sundari Ika Binarti 198105292005022001 Penata Tk.I, III/d Penata Laksana Barang Penyelia				Anggota			5
26.	Donna Arwinda 198306012006042002 Penata, III/c Penata Laksana Barang Penyelia				Anggota			5
27.	Rovvy Mariani Manusiwa 197910252009042006 Penata Tk.I, III/d Penata Laksana Barang Penyelia					Anggota		5
28.	Agustinus Ari Susilo Wiharnoko 197408282005021001 Penata, III/c PK APBN Penyelia	Anggota						5

No.	Nama/NIP/Pangkat/Golongan/Jabatan	Nama Tim Kerja						Nilai Beban Kerja
		PB	KI	PA	PBMN	APK	TU	
29.	Wuri Samiyoto 198210142009121001 Penata Muda Tk.I, III/b Penata Laksana Barang Mahir					Anggota		5
30.	Rifani Aswab 198412272009121001 Penata Muda Tk.I, III/b PK APBN Mahir						Anggota	5
31.	Irwan 197306052003121003 Penata Muda, III/a PK APBN Terampil	Anggota						5
32.	Gondo Kusumo 198104032012121004 Pengatur, II/c PK APBN Terampil			Anggota				5
33.	Paulus Tupado 199909242021011002 Pengatur Tk I, II/d PK APBN Terampil					Anggota		5
34.	Nyimas Halida Safarina Chaerani 197702162003122003 Pembina, IV/a Analisis Keuangan				Anggota			5

No.	Nama/NIP/Pangkat/Golongan/Jabatan	Nama Tim Kerja						Nilai Beban Kerja
		PB	KI	PA	PBMN	APK	TU	
35.	Ika Desmiarti 197912092003122002 Penata Tk.I, III/d Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Anggota					5
36.	Wahyu Widya Nugraheni 198606132009122001 Penata Muda Tk.I, III/b Analisis Keuangan		Anggota					5
37.	Bagus Aji Darmawan 199901232019121001 Pengatur Tk.I, II/d Pengelola Keuangan			Anggota				5
38.	Zasarah Zahwa Tarigan 199802202019122001 Pengatur Tk.I, II/d Pengelola Keuangan						Anggota	5
39.	I Putu Surya Sentana Putra 199902202021011003 Pengatur Tk I, II/d Pengelola Barang Milik Negara				Anggota			5
40.	Hamzah Nur Iqbal 199909252022011001 Pengatur, II/c Pengelola Keuangan		Anggota					5

No.	Nama/NIP/Pangkat/Golongan/Jabatan	Nama Tim Kerja						Nilai Beban Kerja
		PB	KI	PA	PBMN	APK	TU	
41.	Muchamad Ali Akbar 200008072022011003 Pengatur, II/c Pengelola Keuangan				Anggota			5
42.	Dading Surya Al Majid 200105052023021001 Pengatur, II/c Pengolah Data dan Informasi						Anggota	5
43.	Naufal Rifqi Yusnandar 200105012023021002 Pengatur, II/c Pengolah Data dan Informasi						Anggota	5
44.	Muhammad Hadi 200009262023021003 Pengatur, II/c Pengolah Data dan Informasi			Anggota				5
45.	Vini Fitri Aryani 19940520205062001 Pengatur, II/c Pranata Sumber Daya Manusia Terampil						Anggota	5
46.	Dirton Jansem Manalu 199901312019121001 Pengatur Muda Tk.I, II/b Pengadministrasi Keuangan	Anggota						5

No.	Nama/NIP/Pangkat/Golongan/Jabatan	Nama Tim Kerja						Nilai Beban Kerja
		PB	KI	PA	PBMN	APK	TU	
47.	Brythania Ananta Mega Pratiwi 199810182019122002 Pengatur Muda Tk.I, II/b Pengadministrasi Keuangan				Anggota			5
48.	Ranti Hasmiyasari 19851218202312033 - Arsiparis Terampil						Anggota	5
49.	Anggi Ferdianza 199602272024211003 - Perencana Ahli Pertama			Anggota				5
50.	Muhammad Oka Munggara - - Analisis Barang Milik Negara				Anggota			5
51.	Ilham - - Sekretaris						Anggota	5
52.	Sabrian Bassel - - Pengadministrasi Persuratan	Anggota						5

No.	Nama/NIP/Pangkat/Golongan/Jabatan	Nama Tim Kerja						Nilai Beban Kerja
		PB	KI	PA	PBMN	APK	TU	
53.	Hari Aulia Haveirda Putra - - Pengadministrasi Persuratan						Anggota	5
54.	Sholikan - - Pramubakti						Anggota	5
55.	Puput Wahyuni - - Pramubakti						Anggota	5

Keterangan:

- | | |
|---------|------------------------------------|
| 1. PB | : Perbendaharaan |
| 2. KI | : Kepatuhan Internal |
| 3. PA | : Pelaksanaan Anggaran |
| 4. PBMN | : Pengelolaan Barang Milik Negara |
| 5. APK | : Akuntansi dan Pelaporan Keuangan |
| 6. TU | : Tata Usaha |



Kepala Biro Keuangan dan BMN,

Sutrisno Subagyo

Lampiran Surat Tugas II
 Nomor : B.2161/SJ.2/KP.440/VI/2025
 Tanggal : 30 Juni 2025

PENANGGUNG JAWAB
 WEB DAN *MINI COMMAND CENTER*
 LINGKUP BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA

No	Nama/NIP/Pangkat/Golongan/Jabatan	Kedudukan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Sylvia Ratna Esther Panggabean 197810162011012004 Penata Tk.I, III/d APK APBN Ahli muda	Kepala WEB dan <i>Mini Command Center</i>	Penugasan dari Menteri Kelautan dan Perikanan, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan dan Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan pada : 1. Proyek-proyek Prioritas Lingkup Unit Eselon I; 2. Penyediaan atas Manajemen Resiko atas Program Kementerian Kelautan dan Perikanan; 3. Perbaikan Manajemen Data Web. 4. Percepatan Surat Edaran dan Peraturan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
2	Alia Rahmadani 199203102020122004 Penata Muda, III/a APK APBN Ahli Pertama	Anggota	
3	Bagus Aji Darmawan 199901232019121001 Pengatur Tk.I, II/d Pengelola Keuangan	Anggota	
4	Zasarah Zahwa Tarigan 199802202019122001 Pengatur Tk.I, II/d Pengelola Keuangan	Anggota	
5	Hamzah Nur Iqbal 199909252022011001 Pengatur, II/c Pengelola Keuangan	Anggota	
6	Muchamad Ali Akbar 200008072022011003 Pengatur, II/c Pengelola Keuangan	Anggota	

No	Nama/NIP/Pangkat/Golongan/Jabatan	Kedudukan	Tugas dan Tanggung Jawab
7	Muhammad Hadi 200009262023021003 Pengatur, II/c Pengolah Data dan Informasi	Anggota	5. Penuigasan Khusus.
8	Brythania Ananta Mega Pratiwi 199810182019122002 Pengatur Muda Tk.I, II/b Pengadministrasi Keuangan	Anggota	



Kepala Biro Keuangan dan BMN,

Sutrisno Subagyo



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAM www.kkp.go.id SUREL setjen@kkp.go.id

SURAT TUGAS NOMOR B.2997/SJ.2/KP.440/X/2025

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menugaskan pegawai dalam Surat Tugas ini untuk menjadi Ketua dan/atau Anggota Tim Kerja lingkup Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.

Dasar : 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Berita Acara Hasil Validasi Usulan Tim Kerja Lingkup Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal tanggal 30 September 2025.

Memberi Tugas

Kepada : para pegawai lingkup Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Untuk : 1. menjadi Ketua dan/atau Anggota sesuai susunan keanggotaan Tim Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
2. menjadi Penugasan diperbantukan / bawah kendali Operasi Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dengan penuh tanggung jawab; dan
3. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Terima kasih untuk tidak memberikan sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN, gratifikasi, dan benturan kepentingan.

Jakarta, 1 Oktober 2025
Kepala Biro Keuangan dan BMN,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sutrisno Subagyo

Lampiran I

Nomor : B.2997 /SJ.2/KP.440/X/2025

Tanggal : 1 Oktober 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA
LINGKUP BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA

No.	Nama/NIP/Pangkat/Golongan/Jabatan	Nama Tim Kerja							Nilai Beban Kerja
		PB	KI	PA	PBMN	APK	TLDI	TU	
1.	Arifin Syam 197503242002121008 Pembina Utama Muda, IV/c APK APBN Ahli Madya					Ketua			10
2.	Aries Sariyanto 197304172005021001 Pembina, IV/a APK APBN Ahli Muda		Ketua						10
3.	Harianto Eka Putra 198511152010011021 Penata Tk.I, III/d Analisis Anggaran Ahli Muda			Ketua					10
4.	Martha Lusya Pasaribu 197810222009012002 Pembina, IV/a APK APBN Ahli Muda				Ketua				10

[illegible]

No.	Nama/NIP/Pangkat/Golongan/Jabatan	Nama Tim Kerja							Nilai Beban Kerja
		PB	KI	PA	PBMN	APK	TLDI	TU	
11.	Moch. Bayu Dipanegara 197804042009011002 Penata Tk.I, III/d Penata Laksana Barang Penyelia					Anggota			5
12.	Brigitta Dhenny Putrianti 198510252009012001 Penata Tk.I, III/d Analisis Anggaran Ahli Muda			Anggota					5
13.	Nugroho Budiharto 198307272006041003 Penata Tk.I, III/d Analisis Anggaran Ahli Muda			Anggota					5
14.	Meirda Utama 198205242002121003 Penata Tk.I, III/d APK APBN Ahli Muda		Anggota						5
15.	Wisnu Danang Saputro 198104082015031003 Penata, III/c APK APBN Ahli Muda	Anggota							5
16.	Adityo Lukie Nugroho 198304062009011003 Penata Tk.I, III/d APK APBN Ahli Muda		Anggota						5

No.	Nama/NIP/Pangkat/Golongan/Jabatan	Nama Tim Kerja							Nilai Beban Kerja
		PB	KI	PA	PBMN	APK	TLDI	TU	
17.	Rahmah Nurhilal 198611202010122002 Penata Tk.I, III/d APK APBN Ahli Muda		Anggota						5
18.	Dicky Asoksan Rachmana 198306222014031001 Penata, III/c APK APBN Ahli Muda					Anggota			5
19.	Irmala Shitta 199409022018012003 Penata Muda Tk.I, III/b Analisis Anggaran Ahli Pertama			Anggota					5
20.	Budiani Ayu Damayanti 198202042009122001 Penata Tk.I, III/d APK APBN Ahli Pertama	Anggota							5
21.	Amilia 198302102009012005 Penata Tk.I, III/d APK APBN Ahli Pertama					Anggota			5
22.	Tut Wuri Handayani 197201101999032001 Penata Tk.I, III/d Penata Laksana Barang Penyalia						Anggota		5

[illegible]

No.	Nama/NIP/Pangkat/Golongan/Jabatan	Nama Tim Kerja							Nilai Beban Kerja
		PB	KI	PA	PBMN	APK	TLDI	TU	
29.	Irwan 197306052003121003 Penata Muda, III/a PK APBN Terampil	Anggota							5
30.	Gondo Kusumo 198104032012121004 Pengatur, II/c PK APBN Terampil			Anggota					5
31.	Wiji Mutia Hardianti 199308302018012001 Penata Muda Tk.I, III/b Analisis SDM Aparatur Ahli Muda							Anggota	5
32.	Ika Desmiarti 197912092003122002 Penata Tk.I, III/d Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Anggota						5
33.	Nyimas Halida Safarina Chaerani 197702162003122003 Pembina, IV/a Analisis Keuangan				Anggota				5
34.	Wahyu Widya Nugraheni 198606132009122001 Penata Muda Tk.I, III/b Arsiparis Ahli Pertama						Anggota		5

No.	Nama/NIP/Pangkat/Golongan/Jabatan	Nama Tim Kerja							Nilai Beban Kerja
		PB	KI	PA	PBMN	APK	TLDI	TU	
35.	Alia Rahmadani 199203102020122004 Penata Muda, III/a APK APBN Ahli Pertama						Anggota		5
36.	Paulus Tupado 199909242021011002 Pengatur Tk I, II/d PK APBN Terampil					Anggota			5
37.	Bagus Aji Darmawan 199901232019121001 Pengatur Tk.I, II/d Pengelola Keuangan			Anggota					5
38.	Zasarah Zahwa Tarigan 199802202019122001 Pengatur Tk.I, II/d Pengelola Keuangan							Anggota	5
39.	I Putu Surya Sentana Putra 199902202021011003 Pengatur Tk I, II/d Pengelola Barang Milik Negara				Anggota				5
40.	Hamzah Nur Iqbal 199909252022011001 Pengatur, II/c Pengelola Keuangan						Anggota		5

No.	Nama/NIP/Pangkat/Golongan/Jabatan	Nama Tim Kerja							Nilai Beban Kerja
		PB	KI	PA	PBMN	APK	TLDI	TU	
41.	Muchamad Ali Akbar 200008072022011003 Pengatur, II/c Pengelola Keuangan				Anggota				5
42.	Dading Surya Al Majid 200105052023021001 Pengatur, II/c Pengolah Data dan Informasi							Anggota	5
43.	Naufal Rifqi Yusnandar 200105012023021002 Pengatur, II/c Pengolah Data dan Informasi							Anggota	5
44.	Muhammad Hadi 200009262023021003 Pengatur, II/c Pengolah Data dan Informasi						Anggota		5
45.	Vini Fitri Aryani 19940520205062001 Pengatur, II/c Pranata Sumber Daya Manusia Terampil							Anggota	5
46.	Dirton Jansem Manalu 199901312019121001 Pengatur Muda Tk.I, II/b Pengadministrasi Keuangan	Anggota							5

No.	Nama/NIP/Pangkat/Golongan/Jabatan	Nama Tim Kerja							Nilai Beban Kerja
		PB	KI	PA	PBMN	APK	TLDI	TU	
47.	Brythania Ananta Mega Pratiwi 199810182019122002 Pengatur Muda Tk.I, II/b Pengadministrasi Keuangan		Anggota						5
48.	Ranti Hasmiyasari 19851218202312033 - Arsiparis Terampil	Anggota							5
49.	Anggi Ferdianza 199602272024211003 - Perencana Ahli Pertama			Anggota					5
50.	Muhammad Oka Munggara 198210212025211030 - Penata Layanan Operasional				Anggota				5
51.	Ilham 199105152025211057 - Penata Layanan Operasional							Anggota	5
52.	Sabrian Bassel 199012012025211037 - Pengadministrasi Perkantoran						Anggota		5

No.	Nama/NIP/Pangkat/Golongan/Jabatan	Nama Tim Kerja							Nilai Beban Kerja
		PB	KI	PA	PBMN	APK	TLDI	TU	
53.	Hari Aulia Haveirda Putra 198905072025211048 - Pengadministrasi Perkantoran							Anggota	5
54.	Sholikan - - Pramubakti							Anggota	5
55.	Puput Wahyuni - - Pramubakti							Anggota	5

Keterangan:

- | | |
|---------|--|
| 1. PB | : Perbendaharaan |
| 2. KI | : Kepatuhan Internal |
| 3. PA | : Pelaksanaan Anggaran |
| 4. PBMN | : Pengelolaan Barang Milik Negara |
| 5. APK | : Akuntansi dan Pelaporan Keuangan |
| 6. TLDI | : Tindak Lanjut serta Data & Informasi |
| 7. TU | : Tata Usaha |

Kepala Biro Keuangan dan BMN,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Sutrisno Subagyo

Lampiran II

Nomor : B.2997/SJ.2/KP.440/X/2025

Tanggal : 1 Oktober 2025

PENUGASAN
DIPERBANTUKAN / BAWAH KENDALI OPERASI BADAN OTORITA PENGELOLA PANTURA JAWA
LINGKUP BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
Periode 1 Oktober sd 31Desember 2025

No	Nama/NIP/Pangkat/Golongan/Jabatan	Tanggung Jawab
1	Moch. Bayu Dipanegara 197804042009011002 Penata Tk.I, III/d Penata Laksana Barang Penyelia	Menganalisis dan mereviu Keuangan dan Barang Milik Negara pada Badan Otorita Pantura
2	Nugroho Budiharto 198307272006041003 Penata Tk.I, III/d Analisis Anggaran Ahli Muda	Menganalisis dan mereviu Anggaran pada Badan Otorita Pantura

Kepala Biro Keuangan dan BMN,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Sutrisno Subagyo



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAN www.kkp.go.id SUREL setjen@kkp.go.id

BERITA ACARA HASIL VALIDASI USULAN PENGUBAHAN TIM KERJA PADA BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA, SEKRETARIAT JENDERAL

1. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara menyampaikan permohonan validasi terhadap usulan perubahan Tim Kerja pada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara melalui nota dinas Nomor 2194/SJ.2/TU.210/IX/2025, tanggal 2 September 2025, hal Validasi Perubahan Tim Kerja Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.
2. Pada hari Selasa, 30 September 2025, Biro Perencanaan dan Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi bersama Biro Keuangan dan Barang Milik Negara telah melaksanakan validasi terhadap usulan perubahan Tim Kerja di maksud, setelah dilakukan beberapa kali pembahasan untuk penyempurnaan usulan.
3. Berdasarkan Formulir 1 dan Formulir 2 yang telah disempurnakan (terlampir), disepakati Tim Kerja pada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara diubah sebagai berikut:

semula	menjadi
a. Perbendaharaan; b. Pelaksanaan Anggaran; c. Kepatuhan Internal; d. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; e. Pengelolaan Barang Milik Negara; f. Dukungan Manajerial.	a. Perbendaharaan; b. Pelaksanaan Anggaran; c. Kepatuhan Internal; d. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; e. Pengelolaan Barang Milik Negara; f. Tindak Lanjut serta Data dan Informasi; dan g. Subbagian Tata Usaha.

4. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara agar segera menetapkan Surat Tugas sesuai jumlah dan nomenklatur Tim Kerja yang telah disepakati. Surat Tugas tersebut terdiri atas susunan keanggotaan Tim Kerja (Ketua dan Anggota) pada Lampiran I dan pembagian tanggung jawab pencapaian Indikator Kinerja dan Uraian Fungsi masing-masing Tim Kerja pada Lampiran II.
5. Salinan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas agar disampaikan kepada Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi sebagai bahan pemantauan dan evaluasi.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 September 2025

Yang Menetapkan:

Biro Perencanaan

Ali Rahmat Iman Santoso
NIP. 197809012001121001

Biro Keuangan dan Barang
Milik Negara

Gianta Dear
NIP. 197903302009011001

Biro SDM Aparatur dan
Organisasi

Alfin Masruri
NIP. 198305252009011007

FORMULIR 1: PERHITUNGAN MANDIRI INDIKATOR KINERJA UNIT ORGANISASI

UNIT ORGANISASI ESELON I : SEKRETARIAT JENDERAL

UNIT ORGANISASI ESELON II : BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA

NO.	INDIKATOR KINERJA	TINGKAT VALIDITAS	NILAI	NAMA TIM KERJA
A. CORE BUSINESS				
1	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran KKP	Outcome	5	Perbendaharaan
2	Level Maturitas SPIP KKP	Outcome	5	Kepatuhan Internal
3	Nilai Kinerja Anggaran Setjen	Output Kendali Rendah	3	Pelaksanaan Anggaran
4	Implementasi Standar Biaya Keluaran KKP	Output Kendali Rendah	3	
5	Nilai pengelolaan PNPB Sektor Kelautan dan Perikanan	Output Kendali Rendah	3	
6	Indeks Pengelolaan Aset KKP	Outcome	5	Pengelolaan Barang Milik Negara
7	Opini BPK atas Laporan Keuangan KKP	Outcome	5	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
8	Indeks Pengelolaan Badan Layanan Umum KKP	Output Kendali Rendah	3	
9	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK Setjen dibandingkan Realisasi Anggaran Setjen TA. 2024	Output Kendali Rendah	3	Tindak Lanjut Serta Data dan Informasi
10	Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Setjen	Output Kendali Rendah	3	
	Total Nilai Indikator Kinerja Core Business		38	
	Jumlah Tim Kerja Core Business		6	
B. DUKUNGAN MANAJERIAL				
1	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Mendapatkan Predikat Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi	Output Kendali Tinggi	2	Subbagian Tata Usaha

NO.	INDIKATOR KINERJA	TINGKAT VALIDITAS	NILAI	NAMA TIM KERJA
2	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Keuangan dan BMN	Output Kendali Tinggi	2	
3	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara di Lingkup Biro Keuangan dan BMN	Output Kendali Tinggi	2	
4	Persentase Penyelesaian Temuan Badan Pemeriksa Keuangan di Lingkup Biro Keuangan dan BMN	Output Kendali Tinggi	2	
5	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Keuangan dan BMN	Output Kendali Tinggi	2	
6	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkup Biro Keuangan dan BMN	Output Kendali Tinggi	2	
7	Persentase Penyerapan Anggaran Biro Keuangan dan BMN	Output Kendali Tinggi	2	
	Total Nilai Indikator Kinerja Dukungan Manajerial		14	
	Jumlah Tim Kerja Dukungan Manajerial		1	
	Jumlah Tim Kerja		7	
	Jumlah Tim Kerja saat ini		6	
	Selisih (Jumlah Tim Kerja - Jumlah Tim Kerja saat ini)		1	

FORMULIR 2: REKAPITULASI PERHITUNGAN USULAN JUMLAH TIM KERJA BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA

No.	Unit Organisasi	Jumlah Tim Kerja saat ini	Hasil Perhitungan Indikator Kinerja	Jumlah Tim Kerja Hasil Perhitungan Indikator Kinerja	Selisih	Jumlah Usulan Tim Kerja	Usulan Nama Tim Kerja	Tanggung Jawab Indikator Kinerja	Uraian Fungsi
A.	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	6	core: 38 dukman: 14	7	1	7	1. Perbendaharaan	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran KKP (5)	1) pembinaan, penetapan, dan penyusunan data base pejabat dan kepatuhan perbendaharaan di lingkungan KKP; 2) pelaksanaan upaya peningkatan capaian IKPA sesuai target di lingkungan KKP; 3) pelaksanaan evaluasi hasil capaian IKPA di lingkungan KKP; 4) penyusunan laporan kinerja pelaksanaan IKPA per triwulan di lingkungan KKP; 5) pemantauan pengelolaan laporan rekening satker per triwulan di lingkungan KKP; 6) penatausahaan utang dan piutang di lingkungan KKP; 7) pembinaan tata laksana dan transformasi keuangan; 8) Pembinaan Jabatan Fungsional (JF) Analis Pengelolaan Keuangan dan Pranata Keuangan APBN di lingkungan KKP.
							2. Kepatuhan Internal	a. Level Maturitas SPIP KKP (5)	1) penyusunan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) lingkup Setjen dan di lingkungan KKP;

No.	Unit Organisasi	Jumlah Tim Kerja saat ini	Hasil Perhitungan Indikator Kinerja	Jumlah Tim Kerja Hasil Perhitungan Indikator Kinerja	Selisih	Jumlah Usulan Tim Kerja	Usulan Nama Tim Kerja	Tanggung Jawab Indikator Kinerja	Uraian Fungsi
									2) penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP lingkup Setjen dan di lingkungan KKP;
									3) fasilitasi penjaminan kualitas atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan KKP;
									4) pendampingan evaluasi BPKP atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan KKP;
									5) penguatan implementasi SPIP di lingkungan KKP;
									6) penguatan efektivitas manajemen risiko di lingkungan KKP;
									7) pembinaan dan pemantauan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko di lingkungan KKP;
									8) fasilitasi penyelesaian Kerugian Negara oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) Satker lingkup Setjen dan di lingkungan KKP;
									9) penyelesaian Kerugian Negara oleh Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara lingkup Setjen dan di lingkungan KKP.
							3. Pelaksanaan Anggaran	a. Nilai Kinerja Anggaran Setjen (3)	1) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) per triwulan di lingkungan KKP;

No.	Unit Organisasi	Jumlah Tim Kerja saat ini	Hasil Perhitungan Indikator Kinerja	Jumlah Tim Kerja Hasil Perhitungan Indikator Kinerja	Selisih	Jumlah Usulan Tim Kerja	Usulan Nama Tim Kerja	Tanggung Jawab Indikator Kinerja	Uraian Fungsi
									2) pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja di lingkungan KKP; 3) penyiapan bahan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) dengan Kementerian Keuangan per triwulan di lingkungan KKP; 4) pendampingan perbaikan informasi kinerja anggaran di lingkungan KKP; 5) penyusunan kegiatan dan rencana kerja anggaran lingkungan Sekretariat Jenderal;
								b. Implementasi Standar Biaya Keluaran KKP (3)	6) identifikasi standar biaya keluaran pada rencana kerja anggaran unit eselon I KKP; 7) penyusunan usulan standar biaya keluaran KKP; 8) pemantauan dan evaluasi implementasi standar biaya keluaran KKP; 9) pendampingan penelaahan dan penelitian Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (RKA-KL/DIPA) KKP;
								c. Nilai pengelolaan PNBPN Sektor Kelautan dan Perikanan (3)	10) penyusunan kebijakan pengelolaan PNBPN di lingkungan KKP; 11) penyusunan target dan penggunaan PNBPN di lingkungan KKP; 12) pemantuan dan evaluasi pengelolaan PNBPN di lingkungan KKP; 13) pembinaan Jabatan Fungsional (JF) Analis Anggaran.

No.	Unit Organisasi	Jumlah Tim Kerja saat ini	Hasil Perhitungan Indikator Kinerja	Jumlah Tim Kerja Hasil Perhitungan Indikator Kinerja	Selisih	Jumlah Usulan Tim Kerja	Usulan Nama Tim Kerja	Tanggung Jawab Indikator Kinerja	Uraian Fungsi
							4. Pengelolaan Barang Milik Negara	Indeks Pengelolaan Aset KKP (5)	1) penyusunan Standar Barang dan Standar Kebutuhan; 2) penyusunan Rencana Kebutuhan BMN lingkup Setjen dan di lingkungan KKP; 3) pelayanan pengelolaan BMN berupa penggunaan, pengamanan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan lingkup Setjen dan di lingkungan KKP; 4) pengusulan asuransi BMN; 5) pemantauan dan evaluasi sinkronisasi data dan <i>updating database</i> pengelolaan BMN di lingkungan KKP pada aplikasi SIMAN perbulan; 6) pembinaan terhadap realisasi PNBPN berdasarkan objek pemanfaatan BMN di lingkungan KKP; 7) pemantauan dan evaluasi data sertifikasi tanah pada aplikasi MONSERAH; 8) pengawasan dan pengendalian BMN lingkup Setjen dan di lingkungan KKP; 9) rekonsiliasi laporan BMN lingkup Setjen dan di lingkungan KKP semesteran dan tahunan <i>unaudited</i>; 10) penyusunan laporan BMN lingkup Setjen dan di lingkungan KKP semesteran dan tahunan <i>unaudited dan audited</i>;

No.	Unit Organisasi	Jumlah Tim Kerja saat ini	Hasil Perhitungan Indikator Kinerja	Jumlah Tim Kerja Hasil Perhitungan Indikator Kinerja	Selisih	Jumlah Usulan Tim Kerja	Usulan Nama Tim Kerja	Tanggung Jawab Indikator Kinerja	Uraian Fungsi
									11) penyelesaian tindak lanjut temuan terkait BMN pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan APIP lingkup Setjen dan di lingkungan KKP.
									12) Pembinaan Jabatan Fungsional (JF) Penata Laksana Barang.
							5. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	a. Opini BPK atas Laporan Keuangan KKP (5)	1) pembinaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (UAPA-UAPPAEs1 dan UAPPA-W);
									2) penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan;
									3) koordinasi atas pengungkapan lainnya yang menjadi permasalahan di lingkungan KKP;
									4) pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran berdasarkan Pencatatan Akuntansi dan Kontraktual di lingkungan KKP;
									5) pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan anggaran dalam rangka pelaporan keuangan di lingkungan KKP;
									6) rekonsiliasi dan penyusunan LBMN setjen dan KKP.
								b. Indeks Pengelolaan Badan Layanan Umum KKP (3)	7) pendampingan, pengusulan, dan pemantauan capaian IKU BLU di lingkungan KKP;
									8) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana bisnis anggaran dan rencana strategis bisnis BLU di lingkungan KKP;

No.	Unit Organisasi	Jumlah Tim Kerja saat ini	Hasil Perhitungan Indikator Kinerja	Jumlah Tim Kerja Hasil Perhitungan Indikator Kinerja	Selisih	Jumlah Usulan Tim Kerja	Usulan Nama Tim Kerja	Tanggung Jawab Indikator Kinerja	Uraian Fungsi
									9) pemantauan dan evaluasi realisasi pendapatan BLU di lingkungan KKP;
									10) pemantauan dan evaluasi pengelolaan BLU di lingkungan KKP.
							6. Tindak Lanjut Serta Data dan Informasi	a. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Setjen dibandingkan Realisasi Anggaran Setjen TA. 2024 (3)	1) penyusunan database konsep temuan pemeriksaan BPK;
									2) analisis konsep temuan pemeriksaan BPK sebagai bahan koreksi atas Laporan Keuangan Unit Eselon I Sekretariat Jenderal dan KKP;
									3) penyusunan rencana aksi tindak lanjut atas konsep hasil pemeriksaan BPK;
									4) penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK berupa Instruksi Menteri;
									5) pendampingan penyelesaian tindak lanjut atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK lingkup Sekretariat Jenderal dan di lingkungan KKP;
									6) rekonsiliasi data penyelesaian tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan BPK lingkup Sekretariat Jenderal;
									7) pemantauan dan evaluasi penyelesaian tindak lanjut atas temuan Hasil Pemeriksaan BPK lingkup Sekretariat Jenderal;
								b. Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan	8) analisis temuan laporan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal lingkup Sekretariat Jenderal;

No.	Unit Organisasi	Jumlah Tim Kerja saat ini	Hasil Perhitungan Indikator Kinerja	Jumlah Tim Kerja Hasil Perhitungan Indikator Kinerja	Selisih	Jumlah Usulan Tim Kerja	Usulan Nama Tim Kerja	Tanggung Jawab Indikator Kinerja	Uraian Fungsi
								untuk perbaikan kinerja lingkup Setjen (3)	9) pendampingan penyelesaian tindak lanjut atas temuan laporan hasil pengawasan di lingkungan KKP; 10) rekonsiliasi data penyelesaian tindak lanjut atas temuan laporan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal lingkup Sekretariat Jenderal; 11) pemantauan dan evaluasi penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal lingkup Sekretariat Jenderal; 12) Penyediaan data dan informasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara lingkup KKP 13) Penyediaan data dan informasi realisasi belanja KKP secara real time 14) Penyediaan data dan informasi pengelolaan Badan Layanan Umum lingkup KKP 15) Penyediaan data dan informasi pengelolaan Pinjaman Hibah Luar Negeri lingkup KKP 13) Monitoring dan Evaluasi atas Pengelolaan Data Keuangan dan Barang Milik Negara 14) penyediaan informasi terkait Data Agenda dan Informasi Kegiatan Biro Keuangan dan BMN

No.	Unit Organisasi	Jumlah Tim Kerja saat ini	Hasil Perhitungan Indikator Kinerja	Jumlah Tim Kerja Hasil Perhitungan Indikator Kinerja	Selisih	Jumlah Usulan Tim Kerja	Usulan Nama Tim Kerja	Tanggung Jawab Indikator Kinerja	Uraian Fungsi
							7. Subbagian Tata Usaha	a. Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Mendapatkan Predikat Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi; (2) b. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Keuangan dan BMN; (2) c. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Biro Keuangan & BMN(2) d. Persentase Penyelesaian Temuan Badan Pemeriksa Keuangan di Lingkungan Biro Keuangan & BMN(2) e. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Keuangan & BMN(2)	1) penyusunan rencana, program, dan anggaran biro; 2) pengelolaan kinerja biro; 3) pengelolaan keuangan biro; 4) pengelolaan barang milik negara biro; 5) pengelolaan sumber daya manusia aparatur biro; 6) pengelolaan organisasi dan tata laksana biro; 7) pengelolaan persuratan dan kearsipan biro; 8) pengelolaan kerumahtanggaan biro; 9) evaluasi dan pelaporan biro; 10) penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan biro.

No.	Unit Organisasi	Jumlah Tim Kerja saat ini	Hasil Perhitungan Indikator Kinerja	Jumlah Tim Kerja Hasil Perhitungan Indikator Kinerja	Selisih	Jumlah Usulan Tim Kerja	Usulan Nama Tim Kerja	Tanggung Jawab Indikator Kinerja	Uraian Fungsi
								f. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Biro Keuangan; (2)	
								g. Persentase Unit Kerja Biro Keuangan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar; (2) dan	
								h. Persentase Penyerapan Anggaran Biro Keuangan & BMN(2).	

No.	Indikator. Kinerja / Uraian Fungsi	Output	Rencana Kerja	Periode	Estimasi Waktu (Per Siklus/Dokumen) (A)	Total waktu per hari (jam)	Total waktu per bulan (jam)	Keterampilan Utama yang Dibutuhkan	Kapasitas Kerja Per Orang per hari (jam)	Kapasitas Kerja Per Orang per bulan (jam)	Kebutuhan Personil
I. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK Setjen dibandingkan Realisasi Anggaran Setjen TA 2025											
1	Penyusunan database konsep temuan pemeriksaan BPK	Database Konsep Temuan Pemeriksaaan BPK (Real Time)	a. Penyusunan Database konsep temuan pemeriksaan BPK b. Mengadakan Rapat	2 kali setahun (Interim dan Tahunan)	50 jam	5 jam	50	memahami laporan keuangan, dapat menjalankan aplikasi excel	6	126	0,40
2	Analisis konsep temuan BPK (Koreksi LK Eselon I & KKP)	a. Analisis konsep temuan BPK b. Database koreksi atas Laporan Keuangan KKP dan Per Eselon I c. Laporan Koreksi atas LK KKP	a. Menganalisis konsep temuan BPK b. Memastikan akun pada Laporan Keuangan sudah dikoreksi. c. Mengadakan Rapat	Tahunan	50 jam	5 jam	50	memahami laporan keuangan, dapat menjalankan aplikasi excel, kemampuan menganalisa	6	126	0,40
3	Penyusunan rencana aksi tindak lanjut atas konsep hasil pemeriksaan BPK	Rencana aksi tindak lanjut atas konsep hasil pemeriksaan BPK	a. menyusun rencana aksi tindak lanjut atas konsep hasil pemeriksaan BPK b. mengadakan rapat c. melakukan koordinasi dengan BPK d. melakukan koordinasi dengan pihak terkait	2 kali setahun (Interim dan Tahunan)	50 jam	5 jam	50	memahami laporan keuangan, dapat menjalankan aplikasi excel	6	126	0,40
4	Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi LHP BPK (Instruksi Menteri)	a. Instruksi Menteri b. Instruksi Sekjen (turunan)	a. Menyiapkan Instruksi Menteri b. Menyiapkan Instruksi Sekjen, sebagai turunan c. Koordinasi untuk penandatanganan d. Rapat	4 kali setahun (pemeriksaan)	30 jam	5 jam	120	memahami laporan keuangan, dapat menjalankan aplikasi excel	6	126	0,95
5	Pendampingan penyelesaian tindak lanjut Temuan BPK (Sekjen & KKP)	a. Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK atas KKP b. Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK atas Setjen	a. Pendampingan Tindak Lanjut Temuan BPK di lingkup KKP b. Pendampingan Tindak Lanjut Temuan BPK atas Setjen c. Koordinasi dengan pihak terkait d. Monitoring atas dokumen bukti tindak lanjut e. Rapat	Bulanan dan sesuai kebutuhan	60 jam	5 jam	60	memahami laporan keuangan, dapat menjalankan aplikasi excel	6	126	0,48
6	Rekonsiliasi data penyelesaian TL BPK (Sekjen)	Data Rekonsiliasi Penyelesaian TL BPK (Setjen)	Rekonsiliasi Penyelesaian TL BPK dengan BPK	Bulanan dan sesuai kebutuhan	20 jam	5 jam	20	memahami laporan keuangan, dapat menjalankan aplikasi excel	6	126	0,16
7	Pemantauan dan evaluasi penyelesaian TL BPK (Sekjen)	a. Database Penyelesaian TL BPK (Update) b. Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelesaian TL BPK c. Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelesaian TL BPK (Sekjen) - semesteran	a. Updating database penyelesaian TL BPK b. Percepatan atas penyelesaian TL BPK (jka diperlukan) c. Rapat khusus	Bulanan dan sesuai kebutuhan	4 jam x 21 hari	2 jam	84	memahami laporan keuangan, dapat menjalankan aplikasi excel	6	126	0,67
II. Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Setjen											3,44
8	Analisis temuan laporan hasil pengawasan Itjen (Sekjen)	Analisis temuan laporan hasil pengawasan Itjen (Setjen)	a. Analisis temuan laporan hasil pengawasan itjen b. Rapat	Triwulan dan sesuai kebutuhan	40 jam	5 jam	40	memahami laporan keuangan, dapat menjalankan aplikasi excel	6	126	0,32
9	Pendampingan penyelesaian TL Temuan Itjen (KKP)	Rekap Penyelesaian TL Temuan Itjen (KKP)	a. Pengumpulan dokumen TL (jika diperlukan) b. Koordinasi dengan Itjen dan Eselon I c. Rapat	Bulanan dan sesuai kebutuhan	40 jam	5 jam	40	memahami laporan keuangan, dapat menjalankan aplikasi excel	6	126	0,32
10	Rekonsiliasi data penyelesaian TL Itjen (Sekjen)	Laporan Rekon Data Penyelesaian TL Itjen	Rekonsiliasi Data	triwulanan dan sesuai kebutuhan	40 jam	5 jam	40	memahami laporan keuangan, dapat menjalankan aplikasi excel	6	126	0,32
11	Pemantauan dan evaluasi penyelesaian TL Itjen (Sekjen)	a. Database Penyelesaian TL Itjen (Update) b. Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelesaian TL Itjen	a. Updating database penyelesaian TL BPK b. Percepatan atas penyelesaian TL Itjen (jka diperlukan) c. Rapat khusus	triwulanan dan sesuai kebutuhan	40 jam	5 jam	40	memahami laporan keuangan, dapat menjalankan aplikasi excel	6	126	0,32

III Data dan Informasi Keuangan dan BMN											1,27
12	Penyediaan data dan informasi pengelolaan keuangan dan BMN lingkup KKP	Datin Keuangan dan BMN Real-Time: a. Keuangan dan BMN KKP b. Keuangan dan BMN Per Eselon I	a. Tarik data monsakti b. Tarik data interkoneksi c. Tarik data SIMAN d. Pengolahan data Keuangan dan BMN e. Input data ke webrokeu (updating data) f. Rapat	Harian (pagi dan sore) (kecuali data SIMAN bulanan atau bergantung kebutuhan)	Tanpa aplikasi: a. 4 jam x 21 hari (1,5 jam pagi, 1,5 jam sore) Dengan Aplikasi a. 3 Jam x 21 hari (1 jam pagi, 1 jam sore)	4	84	Dapat menyusun data, menjalankan aplikasi excell, paham aplikasi ppt, Paham Monsakti, Paham SIMAN	6	126	0,67
13	Penyediaan data dan informasi realisasi belanja KKP secara real time	Datin Penerimaan dan Belanja Real-Time a. pagu dan realisasi belanja dan penerimaan KKP, b. pagu dan realisasi belanja dan penerimaan per eselon I, c. pagu dan realisasi belanja per Jenis Belanja, d. pagu dan realisasi Pendapatan dan per Jenis Pendapatan, dan e. pagu dan realisasi belanja Project Prioritas KKP	a. Tarik data OMSpan b. Tarik data interkoneksi c. Pengolahan data pagu dan realisasi belanja dan pendapatan d. Input data ke webrokeu (updating data) e. Rapat	Harian (pagi dan sore)	Tanpa aplikasi: a. 5 jam x 21 hari (2 jam pagi, 2 jam sore) Dengan Aplikasi a. 3 Jam x 21 hari (1 jam pagi, 1 jam sore)	5	105	Dapat menyusun data, menjalankan aplikasi excell, paham aplikasi ppt, Paham Monsakti, Paham SIMAN	6	126	0,83
14	Penyediaan data dan informasi pengelolaan BLU lingkup KKP	Datin Pengelolaan BLU lingkup KKP a. Pagu dan Realisasi Pendapatan BLU b. Pagu dan Realisasi Belanja BLU c. Neraca BLU d. Ikhtisar BLU e. Data Keuangan dan BMN BLU sesuai kebutuhan	a. Tarik data OMSpan b. Tarik data interkoneksi c. Pengolahan data BLU d. Mengumpulkan data dukung (jika diperlukan) e. Input data ke webrokeu (updating data) f. Rapat	Harian (pagi dan sore) (Neraca dan Ikhtisar periode bulanan)	Tanpa aplikasi: a. 4 jam x 21 hari (1,5 jam pagi, 1,5 jam sore) Dengan Aplikasi a. 3 Jam x 21 hari (1 jam pagi, 1 jam sore)	4	84	Dapat menyusun data, menjalankan aplikasi excell, paham aplikasi ppt, Paham Monsakti, Paham SIMAN	6	126	0,67
15	Penyediaan data dan informasi pengelolaan PHLN lingkup KKP	Datin Pengelolaan PHLN lingkup KKP a. Pagu dan Realisasi Belanja PHLN b. Ikhtisar PHLN	a. Tarik data OMSpan b. Tarik data interkoneksi c. Pengolahan data PHLN d. Mengumpulkan data dukung (jika diperlukan) e. Input data ke webrokeu (updating data) f. Rapat	Harian (pagi dan sore) (Ikhtisar periode bulanan)	Tanpa aplikasi: a. 4 jam x 21 hari (1,5 jam pagi, 1,5 jam sore) Dengan Aplikasi a. 3 Jam x 21 hari (1 jam pagi, 1 jam sore)	4	84	Dapat menyusun data, menjalankan aplikasi excell, paham aplikasi ppt, Paham Monsakti, Paham SIMAN	6	126	0,67
16	Monitoring dan Evaluasi atas Pengelolaan Data Keuangan dan BMN	Data untuk monitoring dan evaluasi a. analisa datin BLU lingkup KKP b. analisa datin PHLN lingkup KKP c. analisa datin BMN lingkup KKP	a. analisa datin BLU lingkup KKP b. analisa datin PHLN lingkup KKP c. analisa datin BMN lingkup KKP d. Rapat	Bulanan dan sesuai kebutuhan	20 jam (5 jam setiap analisa)	5	20	Dapat melakukan analisa data (menarasikan angka)	6	126	0,16
17	Penyediaan informasi terkait Data Agenda dan Informasi Kegiatan Biro Keuangan dan BMN	Datin terkait Agenda dan Kegiatan Biro Keuangan dan BMN a. Publikasi Agenda dan Kegiatan Biro Keuangan dan BMN (Instagram) b. Tayangan Videotron c. Tayangan utk publikasi lainnya	a. Mengumpulkan dokumentasi kegiatan b. Desain konten aplikasi media sosia c. Desain konten aplikasi webrokeul d. Create KKP News e. Pembuatan Video Tayang	Harian	4 jam x 21 hari	4	84	Dapat menjalankan aplikasi edit photo dan video (contoh ppt, canva, photoshop, capcut)	6	126	0,67

[illegible]

Surat Tugas per 1 Juli 2025	Deskripsi per 1 Juli	Sesuai Formulir 2. Usulan Jumlah Tim Kerja BKBMN dengan Uraian Fungsi
Penugasan dari Menteri Kelautan dan Perikanan, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan dan Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Proyek-proyek Prioritas Lingkup Unit Eselon I Penyediaan atas Manajemen Resiko atas Program Kementerian Kelautan dan Perikanan Perbaikan Manajemen Data Web Percepatan Surat Edaran dan Peraturan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Penugasan Khusus	BLU & PHLN Data Perintah MKP, Wamen, Sekjen Percepatan SE & Peraturan Pendampingan Jamuan Tamu Penugasan Khusus	1) penyusunan database konsep temuan pemeriksaan BPK; 2) analisis konsep temuan pemeriksaan BPK sebagai bahan koreksi atas Laporan Keuangan Unit Eselon I Sekretariat Jenderal dan KKP; 3) penyusunan rencana aksi tindak lanjut atas konsep hasil pemeriksaan BPK; 4) penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK berupa Instruksi Menteri; 5) pendampingan penyelesaian tindak lanjut atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK lingkup Sekretariat Jenderal dan di lingkungan KKP; 6) rekonsiliasi data penyelesaian tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan BPK lingkup Sekretariat Jenderal; 7) pemantauan dan evaluasi penyelesaian tindak lanjut atas temuan Hasil Pemeriksaan BPK lingkup Sekretariat Jenderal; 8) analisis temuan laporan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal lingkup Sekretariat Jenderal; 9) pendampingan penyelesaian tindak lanjut atas temuan laporan hasil pengawasan di lingkungan KKP; 10) rekonsiliasi data penyelesaian tindak lanjut atas temuan laporan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal lingkup Sekretariat Jenderal; 11) pemantauan dan evaluasi penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal lingkup Sekretariat Jenderal; 12) Penyediaan data dan informasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara lingkup KKP 13) Penyediaan data dan informasi realisasi belanja KKP secara real time 14) Penyediaan data dan informasi pengelolaan Badan Layanan Umum lingkup KKP 15) Penyediaan data dan informasi pengelolaan Pinjaman Hibah Luar Negeri lingkup KKP 13) Monitoring dan Evaluasi atas Pengelolaan Data Keuangan dan Barang Milik Negara 14) penyediaan informasi terkait Data Agenda dan Informasi Kegiatan Biro Keuangan dan BMN



Nomor : S-32/MK/PB/2025
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Apresiasi atas Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Raihan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024

5 Juni 2025

Yth. Para Menteri/Pimpinan Lembaga terlampir

Sehubungan dengan telah diselesaikannya penyusunan dan pemeriksaan LKKL, LKBUN, dan LKPP Tahun 2024, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan jadwal pemeriksaan LKKL, LKBUN, dan LKPP Tahun 2024 yang telah disepakati oleh Pemerintah dan BPK RI, batas akhir penyampaian asersi final LKKL adalah tanggal 9 Mei 2025. Kami menyampaikan apresiasi atas komitmen dan upaya Saudara/i dalam mengawal proses penyusunan dan penyampaian LKKL sehingga seluruh LKKL Tahun 2024 *Audited* telah disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
2. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2024 Nomor 33.c/LHP/XV/05/2025 tanggal 19 Mei 2025, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang merupakan konsolidasian LKKL dan LKBUN berhasil mempertahankan opini terbaik yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-9 kali secara berturut-turut. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Saudara/i yang telah menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui penyusunan laporan keuangan yang andal dan berkualitas.
3. Kami juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya, khususnya kepada K/L pengampu yang terus berkomitmen untuk menyusun dan menjaga kualitas laporan keuangan untuk K/L yang mengalami pemisahan sebagai tindak lanjut pembentukan Kabinet Merah Putih.
4. Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Aset pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga, K/L yang mengalami pemisahan dan penggabungan dapat mengalami likuidasi. Untuk itu, kami juga mohon dukungan K/L pengampu dan K/L hasil pemisahan/penggabungan untuk mempercepat penyelesaian likuidasi sampai dengan seluruh aset dan kewajiban entitas yang dilikuidasi menjadi nihil.
5. Kementerian Keuangan akan terus bersinergi dengan K/L dan berkomitmen untuk menjaga kualitas LK sehingga diharapkan seluruh LKKL dapat memperoleh opini terbaik pada pemeriksaan LK tahun 2025.



Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara/i kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal Perbendaharaan



Ditandatangani secara elektronik
Astera Primanto Bhakti

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan
2. Menteri Koordinator Bidang Pangan
3. Menteri Koordinator Bidang Pemasarakatan
4. Menteri Hak Asasi Manusia
5. Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan
6. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
7. Menteri Kebudayaan
8. Kepala Badan Penyelenggara Haji
9. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
10. Menteri Lingkungan Hidup/ KepalaBadan Pengendalian Lingkungan Hidup
11. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
12. Menteri Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Ekonomi Kreatif
13. Menteri Koperasi
14. Menteri Transmigrasi
15. Direktur Jenderal Kekayaan Negara

GEDUNG DJUANDA I LANTAI 3, JALAN DR. WAHIDIN RAYA NOMOR 1 JAKARTA 10710, KOTAK POS 21
TELEPON (021) 3449230, FAKSIMILE (021) 3453710, LAMAN www.kemenkeu.go.id



LAMPIRAN
Surat Menteri Keuangan RI
Nomor : S-32/MK/PB/2025
Tanggal : 5 Juni 2025

DAFTAR TUJUAN SURAT

No.	Kementerian/Lembaga
1	Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
2	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
3	Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
4	Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI
5	Ketua Mahkamah Agung RI
6	Ketua Mahkamah Konstitusi RI
7	Ketua Komisi Yudisial RI
8	Jaksa Agung RI
9	Menteri Sekretariat Negara RI
10	Menteri Dalam Negeri RI
11	Menteri Luar Negeri RI
12	Menteri Pertahanan RI
13	Menteri Hukum RI (sebagai K/L pengampu Kementerian Hukum dan HAM RI BA 013)
14	Menteri Keuangan RI
15	Menteri Pertanian RI
16	Menteri Perindustrian RI
17	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI
18	Menteri Perhubungan RI
19	Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI (sebagai K/L pengampu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI BA 023)
20	Menteri Kesehatan RI
21	Menteri Agama RI
22	Menteri Ketenagakerjaan RI
23	Menteri Sosial RI
24	Menteri Kehutanan RI (sebagai K/L pengampu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI BA 029)
25	Menteri Kelautan dan Perikanan RI

No.	Kementerian/Lembaga
26	Menteri Pekerjaan Umum RI (sebagai K/L pengampu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI BA 033)
27	Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI (sebagai K/L pengampu Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI BA 034)
28	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI
29	Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI
30	Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI (sebagai K/L pengampu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI BA 120)
31	Menteri Pariwisata RI (sebagai K/L pengampu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI BA 040)
32	Menteri Badan Usaha Milik Negara RI
33	Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional RI
34	Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah RI (sebagai K/L pengampu Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI BA 044)
35	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
36	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
37	Kepala Badan Intelijen Negara RI
38	Kepala Badan Siber dan Sandi Negara RI
39	Ketua Dewan Ketahanan Nasional RI
40	Kepala Badan Pusat Statistik RI
41	Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI
42	Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN RI
43	Kepala Perpustakaan Nasional RI
44	Menteri Komunikasi dan Digital RI (sebelumnya menggunakan nomenklatur Kementerian Komunikasi dan Informatika RI BA 059)
45	Kepala Kepolisian Negara RI
46	Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
47	Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional RI
48	Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal RI (sebelumnya menggunakan nomenklatur Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal RI BA 065)
49	Kepala Badan Narkotika Nasional RI

No.	Kementerian/Lembaga
50	Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI (sebagai K/L pengampu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI BA 067)
51	Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional RI (sebelumnya menggunakan nomenklatur Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional RI BA 068)
52	Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI
53	Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika RI
54	Ketua Komisi Pemilihan Umum RI
55	Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan RI
56	Kepala Badan Informasi Geospasial RI
57	Kepala Badan Standardisasi Nasional RI
58	Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir RI
59	Kepala Lembaga Administrasi Negara RI
60	Kepala Arsip Nasional RI
61	Kepala Badan Kepegawaian Negara RI
62	Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI
63	Menteri Perdagangan RI
64	Menteri Pemuda dan Olahraga RI
65	Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI
66	Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI
67	Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia RI (sebelumnya menggunakan nomenklatur Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia RI BA 104)
68	Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI
69	Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan RI
70	Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI
71	Ketua Ombudsman RI
72	Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI
73	Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam RI

No.	Kementerian/Lembaga
74	Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme RI
75	Sekretaris Kabinet RI
76	Ketua Badan Pengawas Pemilu RI
77	Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RI
78	Direktur Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia RI
79	Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang RI
80	Kepala Badan Keamanan Laut RI
81	Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila RI
82	Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI
83	Kepala Badan Pangan Nasional RI
84	Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara RI
85	Kepala Badan Karantina Indonesia RI
86	Kepala Badan Gizi Nasional RI

a.n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal Perbendaharaan



Ditandatangani secara elektronik
Astera Primanto Bhakti



SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



BPK Beri Opini WTP atas LKPP Tahun 2024 dan Kawal Belanja Negara yang Berdampak Langsung pada Rakyat

Jakarta, Selasa (27 Mei 2025) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024. Opini WTP ini didasarkan pada opini WTP atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2024. Meskipun dua LKKL, yakni Badan Pangan Nasional dan Badan Karantina Indonesia, memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), hal ini tidak berdampak material terhadap kewajaran LKPP Tahun 2024 secara keseluruhan.

BPK menilai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN Tahun 2024 dalam bentuk LKPP Tahun 2024 secara material telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, diungkapkan secara memadai, sesuai ketentuan perundang-undangan, dan didasarkan pada efektivitas sistem pengendalian intern.

“Salah satu area yang menjadi perhatian utama adalah pelaporan kinerja yang terintegrasi ke dalam Catatan atas LKPP (CaLK) Tahun 2024 yang masih memerlukan penguatan dari segi sumber daya, metodologi, dan pedoman penyusunan,” jelas Ketua BPK, **Isma Yatun** pada acara penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPP Tahun 2024 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2024 kepada Pimpinan DPR di Jakarta hari ini (27/5).

Ketua BPK juga menyampaikan bahwa di tengah tekanan fiskal yang dihadapi, menjadi krusial untuk mengawal alokasi belanja negara agar memberi dampak langsung pada rakyat.

“Kami berharap, DPR dapat terus mendorong pengalihan belanja yang kurang produktif menjadi belanja prioritas yang berdampak nyata, sejalan dengan upaya yang telah diinisiasi Pemerintah. Visi Asta Cita yang memandu kebijakan nasional kini telah diformulasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 di mana peran DPR sangatlah sentral dalam mengawal implementasi program-program strategis seperti Makan Bergizi Gratis dan Swasembada Pangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak dasar rakyat terpenuhi dan setiap program mencapai sasaran yang tepat,” jelas Ketua BPK.

Dalam meningkatkan tata kelola dan memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat, BPK melihat pengembangan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai fondasi penting. DPR menjadi katalisator untuk terus mengawal dan mendukung inisiatif strategi seperti DTSEN demi tercapainya akuntabilitas dan efektivitas program secara maksimal.

Pada kesempatan ini, BPK juga menyampaikan IHPS II Tahun 2024 yang merupakan ringkasan atas 511 LHP dan terdiri atas 16 LHP Keuangan, 227 LHP Kinerja, serta 268 LHP Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Selama semester II 2024, BPK telah berhasil menyelamatkan keuangan negara dari kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebesar Rp43,43 triliun serta mendorong penghematan pengeluaran negara melalui koreksi subsidi/*Public Service Obligation* (PSO)/Kompensasi Tahun 2023 sebesar Rp1,09 triliun.

Selain menyelamatkan keuangan negara, BPK turut berperan dalam perbaikan tata kelola keuangan negara melalui dukungan pemberantasan korupsi, di antaranya melalui Pemeriksaan Investigatif dengan nilai indikasi kerugian negara sebesar Rp2,21 triliun, Penghitungan Kerugian Negara dengan nilai kerugian negara sebesar Rp2,83 triliun, dan pemberian rekomendasi bersifat strategis.

“Rekomendasi ini di antaranya mencakup penetapan tata cara pengisian kuota jamaah haji, verifikasi dan validasi data penerima dan penyaluran bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah, serta kajian komprehensif evaluasi kebijakan dalam rangka pencapaian target pembangunan Energi Baru Terbarukan (EBT),” pungkas Ketua BPK.

Biro Humas dan Kerja Sama Internasional



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**



RINGKASAN EKSEKUTIF

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2024

DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA II





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

RINGKASAN EKSEKUTIF

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2024**

DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA II





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

RINGKASAN EKSEKUTIF

**HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2024**

	1.	Dasar Hukum, Lingkup dan Tanggung Jawab, Tujuan, dan Standar Pemeriksaan
<i>Dasar Hukum Pemeriksaan</i>	1.1.	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
<i>Lingkup dan Tanggung Jawab</i>	1.2.	Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPP Tahun 2024 meliputi Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. LKPP adalah tanggung jawab Pemerintah. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.
<i>Tujuan Pemeriksaan</i>	1.3.	Tujuan pemeriksaan BPK adalah memberikan opini atas kewajaran penyajian LKPP. Opini diberikan dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
<i>Standar Pemeriksaan</i>	1.4.	Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.
<i>Pelaporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2024</i>	2.	Sistematika Pelaporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2024 terdiri dari: a. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2024 yang memuat opini; b. LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

- c. Laporan Tambahan: Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal.

*Opini BPK atas
LKPP Tahun 2024*

3. Opini BPK atas LKPP Tahun 2024

BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2024.

*Hasil Pemeriksaan
SPI dan Kepatuhan
Terhadap Ketentuan
Peraturan
Perundang-
undangan*

4. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan 14 permasalahan terkait kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut.

- a. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat Tahun 2024 Sebagai Bagian dari Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2024 Belum Didukung dengan Sumber Daya, Metodologi Penyusunan, serta Pengaturan atas Periode Waktu dan Pedoman Penyusunan yang Memadai;
- b. Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak Tidak Dapat Mendeteksi Secara Langsung Perbedaan Data Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan dengan Data Pelaporan Wajib Pajak dan Wajib Pungut;
- c. Pengendalian atas Sisa Dana Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Belum Sepenuhnya Memadai;
- d. Kebijakan Revisi Anggaran Setelah Tahun Anggaran Berkenaan Berpotensi Menimbulkan Ketidaktertiban Penyelesaian Revisi Anggaran pada Tahun Berkenaan;
- e. Pengendalian atas Penganggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Belum Sepenuhnya Memadai;
- f. Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Insentif Perpajakan berupa Pajak Ditanggung Pemerintah Belum Didukung dengan Penganggaran Secara Memadai;
- g. Formula Harga Jual Eceran Dalam Perhitungan Dana Kompensasi Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) Belum Menjamin Efisiensi Belanja Pemerintah Pusat;
- h. Kebijakan Pemerintah untuk Tidak Memberlakukan Penyesuaian Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite dan Tarif Tenaga Listrik

WY R F

Nonsubsidi Tidak Didukung dengan Pengendalian terhadap Anggaran, Volume, dan Penyalurannya;

- i. Pengendalian atas Pemanfaatan Sisa Dana Transfer ke Daerah yang Ditentukan Penggunaannya Belum Sepenuhnya Memadai;
- j. Mekanisme Pemindahbukuan Dana atas Transaksi Penyertaan Modal Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2024 Melalui Rekening Pengeluaran Lainnya Belum Memadai;
- k. Kementerian Keuangan Belum Tertib Melakukan Tindakan Penagihan Aktif serta Penatausahaan Barang Sitaan dan Agunan Piutang Perpajakan;
- l. Penyajian Belanja Dibayar Dimuka Belum Sepenuhnya Sesuai Dengan Karakteristik Aset Lancar dan Penyelesaian Pertanggungjawaban atas Belanja Dibayar Dimuka Serta Penyerahan Persediaan untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah Berlarut-larut;
- m. Penetapan Pemerintah terkait Pembayaran atas Penambahan Biaya Pekerjaan Proyek LRT Jabodebek Melalui PT KAI (Persero) Belum Ditindaklanjuti dengan Penentuan Skema Pendanaannya; dan
- n. Aset Tetap Tanah Belum Sepenuhnya Didukung Dokumen Kepemilikan Berupa Sertifikat Tanah Sesuai Ketentuan.

*Rekomendasi pada
LHP atas SPI dan
Kepatuhan*

5. Rekomendasi BPK

Berkaitan dengan permasalahan kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah antara lain agar:

a. berkoordinasi dengan:

- 1) Menteri PANRB dan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk mengevaluasi dan menyempurnakan kerangka regulasi pelaporan kinerja pemerintah, antara lain mengenai Kementerian/Lembaga sebagai penyusun Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP), bentuk pelaporan kinerja Bendahara Umum Negara (BUN), dan mekanisme penjaminan mutu laporan kinerja;
- 2) Menteri ESDM untuk:
 - a) mengevaluasi secara komprehensif formula Harga Jual Eceran (HJE) JBKP secara periodik dengan memperhatikan efisiensi komponen pembentuk biaya, antara lain komponen biaya distribusi;

ny f

- b) mengkaji secara komprehensif dampak tidak diberlakukannya penyesuaian harga jual eceran JBKP Peralite dan tarif tenaga listrik nonsubsidi terhadap peningkatan beban fiskal Pemerintah, beserta langkah pengendalian terhadap anggaran, volume, serta penyalurannya, dengan mengarusutamakan ketepatan sasaran;
 - 3) Menteri Dalam Negeri untuk mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), sesuai dengan kebutuhan pelaporan penyerapan dan sisa dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang ditentukan penggunaannya dalam rangka proses pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah;
 - 4) Menteri BUMN bersama dengan Direktur Utama PT KAI (Persero) untuk menyusun strategi pemenuhan pendanaan pembayaran tambahan pekerjaan proyek LRT Jabodebek dan mitigasi risikonya secara memadai. Selanjutnya, Menteri Keuangan agar menetapkan bentuk dukungan pemerintah atas pilihan strategi pemenuhan pendanaan PT KAI (Persero) tersebut;
- b. Memerintahkan:
- 1) Direktur Jenderal Pajak untuk:
 - a) melakukan evaluasi dan perbaikan pengelolaan sistem pengendalian supaya sistem informasi di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat mendeteksi dan menindaklanjuti perbedaan data penyetoran PPN dan PPh dengan data pelaporan WP dan Wajib Pungut;
 - b) menginstruksikan Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan DJP supaya merencanakan dan menganggarkan seluruh estimasi kebutuhan belanja subsidi Pajak DTP pada T-1 sesuai siklus perencanaan APBN;
 - c) menginstruksikan Direktur Penegakan Hukum DJP supaya berkoordinasi dengan Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP untuk mengembangkan sistem di DJP dalam rangka perbaikan penyajian penatausahaan barang sitaan untuk mendukung Tindakan Penagihan Aktif sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 2) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BA BUN 999.02 dan KPA BA BUN 999.00 lebih proaktif berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu dalam pemantauan atas pertanggungjawaban sisa dana hibah sebesar Rp2,04 Triliun;

- 3) Direktur Jenderal Kekayaan Negara selaku Kuasa Pengelola Barang supaya meningkatkan kegiatan monitoring dan pemetaan (*mapping*) berdasarkan skala prioritas, termasuk mengidentifikasi kendala dan solusi penyelesaiannya, baik melalui pensertifikasian aset tetap tanah yang belum berstatus *clean and clear* maupun terobosan pengamanan fisik aset yang bermasalah tersebut.
- c. mengevaluasi dan menyempurnakan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 107 Tahun 2024 mengenai:
 - 1) kewajiban penyelesaian revisi anggaran tidak melewati batas akhir tahun berkenaan;
 - 2) perubahan mekanisme pelaksanaan anggaran Belanja Pegawai menjadi pagu tertutup;
- d. menyempurnakan pengaturan terkait mekanisme otorisasi dan batasan kriteria transaksi yang dapat dilakukan pemindahbukuan dana menggunakan Surat Perintah Transfer (SPT) atau Perintah Kuasa BUN Pusat dengan mendahului terbitnya SPM/SP2D; dan
- e. mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan akuntansi BDDM pada PMK Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 57 Tahun 2023 agar sesuai dengan karakteristik Aset Lancar.

Penjelasan lebih terperinci atas hasil pemeriksaan dan Rekomendasi

Penjelasan lebih terperinci atas hasil pemeriksaan BPK dan rekomendasinya dapat dilihat pada LHP atas SPI dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Perkembangan Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2020 – 2024

6.

Perkembangan Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2020 s.d. 2024

Entitas Pemeriksaan pada Tahun 2024 mencakup 86 K/L dan satu BUN. Perkembangan opini LKKL dan LKBUN Tahun 2020 s.d. 2024 sebagai berikut.

Opini	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	85	84	82	81	85
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	2	4	1	4	2
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	-	-	-	-	-
Tidak Wajar (TW)	-	-	-	-	-
Jumlah Entitas Pelaporan	87	88	83	85	87

Perincian opini LKKL dan LKBUN sebagaimana **Lampiran 1**.

Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal

BPK telah melakukan reviu pelaksanaan transparansi fiskal Tahun 2024 atas 47 kriteria dari 48 kriteria yang diklasifikasikan dalam empat pilar. Berdasarkan hasil reviu, pemerintah telah mencapai level *advanced* pada 26 kriteria, level *good* pada 13 kriteria, dan masih berada pada level *basic* pada 8 kriteria, dengan perincian sebagai berikut.

- a. Dari 12 kriteria pada Pilar Pelaporan Fiskal, pemerintah telah mencapai level *advanced* pada 8 kriteria dan level *good* pada 4 kriteria;
- b. Dari 12 kriteria pada Pilar Prakiraan Fiskal dan Penganggaran, pemerintah telah mencapai level *advanced* pada 9 kriteria dan level *good* pada 3 kriteria;
- c. Dari 12 kriteria pada Pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal, pemerintah telah mencapai level *advanced* pada 8 kriteria, level *good* pada 3 kriteria, dan masih terdapat 1 kriteria pada level *basic*; dan
- d. Dari 11 kriteria pada Pilar Manajemen Pendapatan Sumber Daya, pemerintah telah mencapai level *advanced* pada 1 kriteria, level *good* pada 3 kriteria, dan masih terdapat 7 kriteria pada level *basic*.

Hasil reviu tahun 2024 menunjukkan terdapat kenaikan capaian pemerintah pada satu kriteria dibandingkan dengan capaian tahun 2023, yaitu pada pilar Prakiraan Fiskal dan Penganggaran atas kriteria Tujuan Kebijakan Fiskal. Capaian pemerintah atas kriteria tersebut meningkat dari level *good* menjadi *advanced* karena pemerintah telah menjaga konsistensi pelaporan tujuan kebijakan fiskal dalam hal keberhasilan mengendalikan defisit APBN selama Tahun 2022 s.d. 2024 pada level di bawah 3% serta rasio utang terhadap PDB pada level di bawah 60%.

Penilaian atas pemenuhan kriteria pada keempat pilar transparansi fiskal tersebut didasarkan pada praktik-praktik yang telah dilakukan oleh Pemerintah pada tahun 2024.

Perincian hasil reviu sebagaimana **Lampiran 2**.

Jakarta, 19 Mei 2025

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,



Dr. Isma Yatun, CSFA., CFA., CFP.



Perincian Opini atas LKKL dan LKBUN

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL dan LKBUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	002	Dewan Perwakilan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	004	Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	005	Mahkamah Agung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5.	006	Kejaksaan RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6.	007	Kementerian Sekretariat Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7.	010	Kementerian Dalam Negeri	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8.	011	Kementerian Luar Negeri	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9.	012	Kementerian Pertahanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10.	013	Kementerian Hukum dan HAM	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
11.	015	Kementerian Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12.	018	Kementerian Pertanian	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP
13.	019	Kementerian Perindustrian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14.	020	Kementerian ESDM	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP
15.	022	Kementerian Perhubungan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16.	023	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ²⁾	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
17.	024	Kementerian Kesehatan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
18.	025	Kementerian Agama	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
19.	026	Kementerian Ketenagakerjaan	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
20.	027	Kementerian Sosial	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
21.	029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
22.	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
23.	033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
24.	034	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
25.	035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
26.	036	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
27.	040	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
28.	041	Kementerian BUMN	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
29.	042	Badan Riset dan Inovasi Nasional ³⁾	WTP	WDP	³⁾	³⁾	³⁾
30.	044	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
31.	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
32.	048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
33.	050	Badan Intelijen Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
34.	051	Badan Siber dan Sandi Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
35.	052	Dewan Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
36.	054	Badan Pusat Statistik	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
37.	055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP



No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL dan LKBUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
38.	056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
39.	057	Perpustakaan Nasional RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
40.	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	WTP	WTP	WDP	WDP	WTP
41.	060	Kepolisian Negara RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
42.	063	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
43.	064	Lembaga Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
44.	065	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal ²⁾	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
45.	066	Badan Narkotika Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
46.	067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
47.	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
48.	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
49.	075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
50.	076	Komisi Pemilihan Umum	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
51.	077	Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
52.	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
53.	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ³⁾	WTP	WDP	³⁾	³⁾	³⁾
54.	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional ³⁾	WTP	WTP	³⁾	³⁾	³⁾
55.	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ³⁾	WTP	WTP	³⁾	³⁾	³⁾
56.	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional ³⁾	WTP	WTP	³⁾	³⁾	³⁾
57.	083	Badan Informasi Geospasial	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
58.	084	Badan Standarisasi Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
59.	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
60.	086	Lembaga Administrasi Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
61.	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
62.	088	Badan Kepegawaian Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
63.	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
64.	090	Kementerian Perdagangan	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
65.	092	Kementerian Pemuda dan Olahraga	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
66.	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
67.	095	Dewan Perwakilan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
68.	100	Komisi Yudisial	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
69.	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
70.	104	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) ²⁾	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
71.	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
72.	107	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
73.	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
74.	109	Badan Pelaksana - Badan Pengembangan Wilayah Suramadu ³⁾	WTP	WTP	³⁾	³⁾	³⁾
75.	110	Ombudsman RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
76.	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
77.	112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
78.	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP



No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL dan LKBUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
79.	114	Sekretariat Kabinet	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
80.	115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
81.	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
82.	117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
83.	118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
84.	119	Badan Keamanan Laut	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
85.	120	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
86.	122	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
87.	123	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ¹⁾	¹⁾	WTP	WTP	WTP	WTP
88.	124	Badan Riset dan Inovasi Nasional ⁴⁾	⁴⁾	⁴⁾	WTP	WTP	WTP
89.	125	Badan Pangan Nasional ⁵⁾	⁵⁾	⁵⁾	⁵⁾	WDP	WDP
90.	126	Otorita Ibu Kota Nusantara ⁵⁾	⁵⁾	⁵⁾	⁵⁾	WTP	WTP
91.	127	Badan Karantina Indonesia ⁶⁾	⁶⁾	⁶⁾	⁶⁾	⁶⁾	WDP
92.	128	Badan Gizi Nasional ⁶⁾	⁶⁾	⁶⁾	⁶⁾	⁶⁾	WTP
93.	999	Bendahara Umum Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Keterangan:

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
WDP : Wajar Dengan Pengecualian
TMP : Tidak Menyatakan Pendapat

- 1) : Penambahan Kementerian/Lembaga baru mulai tahun 2021
- 2) : Nomenklatur Kementerian/Lembaga baru mulai tahun 2021
- 3) : Kementerian/Lembaga sudah tidak menyusun LK sejak tahun 2022 karena telah dilikuidasi
- 4) : Nomenklatur Kementerian/Lembaga baru mulai tahun 2022 yang merupakan gabungan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (BA 079), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BA 080), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BA 081), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (BA 082), dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BA 042)
- 5) : Penambahan Kementerian/Lembaga baru mulai tahun 2023
- 6) : Penambahan Kementerian/Lembaga baru mulai tahun 2024

W4 P 2

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 3447/SJ.2/TU.210/XII/2025

Yth. : 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal
3. Para Sekretaris Badan
4. Para Kepala Biro
5. Para Kepala Pusat lingkup Sekretariat Jenderal
6. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

Dari : Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Lampiran : Satu berkas

Hal : Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Tahun 2025 Tingkat Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan

Tanggal : 30 Desember 2025

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 oleh Inspektorat Jenderal, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP digunakan sebagai pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tingkat Unit Organisasi Eselon I yang bersumber dari nilai komponen Struktur dan Proses (Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi (T1) dan telah dilakukan penjaminan kualitas oleh Inspektorat Mitra.
- Hasil Penilaian Mandiri Maturitas atas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Komponen Struktur dan Proses memperoleh Nilai **3,703**, dengan rincian per Eselon I adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA ESELON I	NILAI	LAMPIRAN
1.	Sekretariat Jenderal	3,674	Lampiran 1
2.	Inspektorat Jenderal	3,674	Lampiran 2
3.	Ditjen Perikanan Tangkap	3,737	Lampiran 3
4.	Ditjen Perikanan Budi Daya	3,718	Lampiran 4
5.	<i>Ditjen PSDKP (terbaik)</i>	3,908*	<i>Lampiran 5*</i>

NO.	NAMA ESELON I	NILAI	LAMPIRAN
6.	Ditjen PDSPKP	3,684	Lampiran 6
7.	Ditjen PK	3,706	Lampiran 7
8.	Ditjen PRL	3,683	Lampiran 8
9.	BPPSDMKP	3,668	Lampiran 9
10.	BPPMHKP	3,747	Lampiran 10

3. Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP pada komponen Struktur dan Proses (Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi (T1) sebagaimana terlampir merupakan dokumen pendukung capaian IKU Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP pada masing-masing Eselon I.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Sutrisno Subagyo

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal

Lampiran I

Nomor : 3447/SJ.2/TU.210/XII/2025

Tanggal : 30 Desember 2025

**HASIL PENJAMINAN KUALITAS
 ATAS PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SPIP TAHUN 2025
 KOMPONEN STRUKTUR DAN PROSES
 (EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENCAPAIAN TUJUAN ORGANISASI (T1)
 SEKRETARIAT JENDERAL**

KODE	URAIAN PARAMETER	KESIMPULAN AKHIR (HASIL PK)	BOBOT	NILAI
1.1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	4,438	0,038	0,166
	Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi	4,500		
1.2	Komitmen terhadap Kompetensi	4,000	0,038	0,150
	Tugas dan jabatan dalam organisasi dilaksanakan dan diisi oleh SDM yang kompeten	4,000		
1.3	Kepemimpinan yang Kondusif	3,938	0,038	0,148
	Pimpinan organisasi menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk pencapaian tujuan organisasi.	4,000		
	Pimpinan Instansi Pemerintah mengalokasikan sumber daya untuk penerapan manajemen risiko.	4,000		
	Pimpinan Instansi Pemerintah menggunakan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan	4,000		
	Pimpinan Instansi Pemerintah mendorong penerapan manajemen risiko, melalui Penggunaan kinerja penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja	3,750		
1.4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	4,500	0,038	0,169
	Struktur organisasi dibentuk dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.	4,500		
1.5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	3,750	0,038	0,141

KODE	URAIAN PARAMETER	KESIMPULAN AKHIR (HASIL PK)	BOBOT	NILAI
	Wewenang dan tanggung jawab diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai tingkatannya untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dalam rangka percepatan pencapaian tujuan organisasi. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab memperhatikan benturan kepentingan	3,750		
1.6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	3,417	0,038	0,128
	Penerapan kebijakan manajemen dan praktik pembinaan SDM sehingga dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi	4,000		
	Pegawai telah mendapatkan fasilitas untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko	3,250		
	Pegawai memiliki kesadaran terkait manajemen risiko	3,000		
1.7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	3,000	0,038	0,113
	Pengawasan APIP telah dapat memberikan nilai tambah pada perbaikan pengendalian organisasi	3,000		
1.8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	3,625	0,038	0,136
	Pimpinan organisasi menjalin hubungan kerja yang baik (kemitraan) dengan instansi lain terkait dengan upaya pencapaian tujuan organisasi.	4,000		
	Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang baik, instansi Pemerintah telah mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko (termasuk implikasi dari transfer risiko) terkait kemitraan	3,250		
2.1	Identifikasi Risiko	3,750	0,100	0,375
	Pemerintah Daerah telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko.	3,750		
	Risiko telah teridentifikasi dan dituangkan dalam register risiko	3,750		

KODE	URAIAN PARAMETER	KESIMPULAN AKHIR (HASIL PK)	BOBOT	NILAI
	Proses manajemen risiko telah melekat pada proses bisnis Instansi Pemerintah	3,750		
2.2	Analisis Risiko	3,550	0,100	0,355
	Seluruh risiko telah dianalisis dampak dan tingkat keterjadiannya	3,750		
	Instansi pemerintah telah menentukan prioritas risiko	3,750		
	Instansi Pemerintah telah menentukan rencana tindak pengendalian	3,750		
	Tindak pengendalian telah diimplementasikan	3,250		
	Tindak pengendalian efektif menurunkan risiko	3,250		
3.1	Reviu atas Kinerja	3,750	0,023	0,085
	Pimpinan organisasi membandingkan tolok ukur kinerja dengan capaian kinerja secara berkala untuk mengatasi hambatan kinerja, menetapkan strategi perbaikan, dan menilai kinerja suatu unit sampai dengan periode tertentu dalam rangka mengawal pencapaian tujuan organisasi.	3,750		
3.2	Pembinaan SDM	3,250	0,023	0,074
	Pembinaan SDM dilakukan sehingga setiap pegawai dapat memberikan manfaat optimal dalam pencapaian tujuan organisasi	3,250		
3.3	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	3,500	0,023	0,080
	Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dilakukan untuk memastikan sistem informasi dapat menyajikan data yang akurat dan tepat waktu untuk digunakan oleh pengguna.	3,500		
3.4	Pengendalian Fisik atas Aset	3,500	0,023	0,080

KODE	URAIAN PARAMETER	KESIMPULAN AKHIR (HASIL PK)	BOBOT	NILAI
	Pengelolaan BMN/D dilakukan untuk menjamin aset tersedia dan dapat digunakan dengan baik oleh pengguna dalam rangka mendukung kinerja organisasi.	3,500		
3.5	Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja	3,750	0,023	0,085
	Kegiatan pengendalian atas penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja dilakukan untuk menjamin keandalan ukuran dan ketepatan penetapan indikator masing-masing unit secara berjenjang dibandingkan dengan IKU organisasi.	3,750		
3.6	Pemisahan Fungsi	3,000	0,023	0,068
	Terdapat pemisahan fungsi sehingga seluruh aspek utama transaksi dan kejadian tidak dikendalikan hanya oleh satu orang	3,000		
3.6	Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting	3,000	0,023	0,068
	Terdapat proses untuk memastikan transaksi dan kejadian penting hanya dapat diotorisasi ketika memenuhi persyaratan dan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan	3,000		
3.6	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian	3,750	0,023	0,085
	Terdapat proses untuk memastikan transaksi telah diklasifikasikan dengan layak dan dikelompokkan dengan benar serta dicatat dengan segera sehingga relevan, bernilai, dan berguna bagi manajemen	3,750		
3.6	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya	3,500	0,023	0,080
	Terdapat pembatasan atas kesempatan dan hak untuk menggunakan, atau memperoleh sumber daya dan mengakses pencatatannya	3,500		

KODE	URAIAN PARAMETER	KESIMPULAN AKHIR (HASIL PK)	BOBOT	NILAI
3.6	Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya	3,500	0,023	0,080
	Terdapat pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi dalam mengelola sumber daya yang diberikan/dikuasakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi	3,500		
3.6	Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting	3,500	0,023	0,080
	Terdapat pengelolaan, pemeliharaan, dan pendokumentasian secara berkala yang mencakup seluruh SPI serta transaksi dan kejadian penting yang dilaksanakan secara lengkap dan akurat untuk memfasilitasi penelusuran transaksi, kejadian, dan informasi terkait	3,500		
4.1	Informasi yang Relevan	3,863	0,050	0,193
	Tersedianya informasi yang relevan untuk kebutuhan internal dan eksternal.	3,250		
	Pimpinan Instansi Pemerintah membangun sistem pengaduan	4,250		
	Strategi dan kebijakan manajemen risiko telah dikomunikasikan.	4,500		
	Register risiko dan rencana tindak pengendalian telah dikomunikasikan ke pihak terkait	3,500		
4.2	Komunikasi yang Efektif	3,500	0,050	0,175
	Terlaksananya komunikasi yang efektif dengan internal dan eksternal	3,500		
5.1	Pemantauan Berkelanjutan	3,500	0,075	0,263
	Pimpinan organisasi/penanggungjawab program dan kegiatan/penanggungjawab operasional mengevaluasi secara berkala pengendalian intern yang telah dilakukan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.	3,750		

KODE	URAIAN PARAMETER	KESIMPULAN AKHIR (HASIL PK)	BOBOT	NILAI
	Proses manajemen risiko telah direviu	3,500		
	Pemantauan/monitoring terhadap risiko telah dilakukan	3,250		
5.2	Evaluasi Terpisah	4,000	0,075	0,300
	Evaluasi terpisah dilakukan oleh pegawai dengan keahlian tertentu yang disyaratkan dan dapat melibatkan APIP atau auditor eksternal untuk menilai kinerja sistem pengendalian intern, mengidentifikasi kelemahan pengendalian, menentukan penyebab dari kegagalan aktivitas pengendalian, serta pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan instansi.	4,000		
	Terdapat reviu independen terhadap proses manajemen risiko	4,000		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES SEKRETARIAT JENDERAL				3,674



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sutrisno Subagyo

Lampiran II

Nomor : 3447/SJ.2/TU.210/XII/2025

Tanggal : 30 Desember 2025

**HASIL PENJAMINAN KUALITAS
 ATAS PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SPIP TAHUN 2025
 KOMPONEN STRUKTUR DAN PROSES
 (EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENCAPAIAN TUJUAN ORGANISASI (T1)
 INSPEKTORAT JENDERAL**

KODE	URAIAN PARAMETER	KESIMPULAN AKHIR (HASIL PK)	BOBOT	NILAI
1.1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	4,438	0,038	0,166
	Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi	4,500		
1.2	Komitmen terhadap Kompetensi	3,750	0,038	0,141
	Tugas dan jabatan dalam organisasi dilaksanakan dan diisi oleh SDM yang kompeten	3,750		
1.3	Kepemimpinan yang Kondusif	3,750	0,038	0,141
	Pimpinan organisasi menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk pencapaian tujuan organisasi.	3,750		
	Pimpinan Instansi Pemerintah mengalokasikan sumber daya untuk penerapan manajemen risiko.	3,750		
	Pimpinan Instansi Pemerintah menggunakan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan	3,750		
	Pimpinan Instansi Pemerintah mendorong penerapan manajemen risiko, melalui Penggunaan kinerja penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja	3,750		
1.4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	4,250	0,038	0,159

KODE	URAIAN PARAMETER	KESIMPULAN AKHIR (HASIL PK)	BOBOT	NILAI
	Struktur organisasi dibentuk dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.	4,250		0,000
1.5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	3,750	0,038	0,141
	Wewenang dan tanggung jawab diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai tingkatannya untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dalam rangka percepatan pencapaian tujuan organisasi.	3,750		
1.6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	3,333	0,038	0,125
	Penerapan kebijakan manajemen dan praktik pembinaan SDM sehingga dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi	3,750		
	Pegawai telah mendapatkan fasilitas untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko	3,250		
	Pegawai memiliki kesadaran terkait manajemen risiko	3,000		
1.7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	3,000	0,038	0,113
	Pengawasan APIP telah dapat memberikan nilai tambah pada perbaikan pengendalian organisasi	3,000		0,000
1.8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	3,500	0,038	0,131
	Pimpinan organisasi menjalin hubungan kerja yang baik (kemitraan) dengan instansi lain terkait dengan upaya pencapaian tujuan organisasi.	3,750		
	Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang baik, instansi Pemerintah telah mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko (termasuk implikasi dari transfer risiko) terkait kemitraan	3,250		
2.1	Identifikasi Risiko	3,583	0,100	0,358

KODE	URAIAN PARAMETER	KESIMPULAN AKHIR (HASIL PK)	BOBOT	NILAI
	Pemerintah Daerah telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko.	3,250		
	Risiko telah teridentifikasi dan dituangkan dalam register risiko	3,750		
	Proses manajemen risiko telah melekat pada proses bisnis Instansi Pemerintah	3,750		
2.2	Analisis Risiko	3,600	0,100	0,360
	Seluruh risiko telah dianalisis dampak dan tingkat keterjadiannya	3,750		
	Instansi pemerintah telah menentukan prioritas risiko	3,750		
	Instansi Pemerintah telah menentukan rencana tindak pengendalian	3,750		
	Tindak pengendalian telah diimplementasikan	3,500		
	Tindak pengendalian efektif menurunkan risiko	3,250		
3.1	Reviu atas Kinerja	3,750	0,023	0,085
	Pimpinan organisasi membandingkan tolok ukur kinerja dengan capaian kinerja secara berkala untuk mengatasi hambatan kinerja, menetapkan strategi perbaikan, dan menilai kinerja suatu unit sampai dengan periode tertentu dalam rangka mengawal pencapaian tujuan organisasi.	3,750		0,000
3.2	Pembinaan SDM	3,250	0,023	0,074
	Pembinaan SDM dilakukan sehingga setiap pegawai dapat memberikan manfaat optimal dalam pencapaian tujuan organisasi	3,250		
3.3	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	3,750	0,023	0,085
	Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dilakukan untuk memastikan sistem informasi dapat menyajikan data yang akurat dan tepat waktu untuk digunakan oleh pengguna.	3,750		

KODE	URAIAN PARAMETER	KESIMPULAN AKHIR (HASIL PK)	BOBOT	NILAI
3.4	Pengendalian Fisik atas Aset	3,500	0,023	0,080
	Pengelolaan BMN/D dilakukan untuk menjamin aset tersedia dan dapat digunakan dengan baik oleh pengguna dalam rangka mendukung kinerja organisasi.	3,500		0,000
3.5	Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja	3,750	0,023	0,085
	Kegiatan pengendalian atas penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja dilakukan untuk menjamin keandalan ukuran dan ketepatan penetapan indikator masing-masing unit secara berjenjang dibandingkan dengan IKU organisasi.	3,750		0,000
3.6	Pemisahan Fungsi	3,250	0,023	0,074
	Terdapat pemisahan fungsi sehingga seluruh aspek utama transaksi dan kejadian tidak dikendalikan hanya oleh satu orang	3,250		
3.6	Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting	3,500	0,023	0,080
	Terdapat proses untuk memastikan transaksi dan kejadian penting hanya dapat diotorisasi ketika memenuhi persyaratan dan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan	3,500		
3.6	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian	3,750	0,023	0,085
	Terdapat proses untuk memastikan transaksi telah diklasifikasikan dengan layak dan dikelompokkan dengan benar serta dicatat dengan segera sehingga relevan, bernilai, dan berguna bagi manajemen	3,750		
3.6	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya	3,250	0,023	0,074
	Terdapat pembatasan atas kesempatan dan hak untuk menggunakan, atau	3,250		

KODE	URAIAN PARAMETER	KESIMPULAN AKHIR (HASIL PK)	BOBOT	NILAI
	memperoleh sumber daya dan mengakses pencatatannya			
3.6	Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya	3,500	0,023	0,080
	Terdapat pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi dalam mengelola sumber daya yang diberikan/dikuasakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi	3,500		0,000
3.6	Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting	3,750	0,023	0,085
	Terdapat pengelolaan, pemeliharaan, dan pendokumentasian secara berkala yang mencakup seluruh SPI serta transaksi dan kejadian penting yang dilaksanakan secara lengkap dan akurat untuk memfasilitasi penelusuran transaksi, kejadian, dan informasi terkait	3,750		
4.1	Informasi yang Relevan	3,863	0,050	0,193
	Tersedianya informasi yang relevan untuk kebutuhan internal dan eksternal.	3,500		
	Pimpinan Instansi Pemerintah membangun sistem pengaduan	4,250		
	Strategi dan kebijakan manajemen risiko telah dikomunikasikan.	4,500		
	Register risiko dan rencana tindak pengendalian telah dikomunikasikan ke pihak terkait	3,250		
4.2	Komunikasi yang Efektif	3,500	0,050	0,175
	Terlaksananya komunikasi yang efektif dengan internal dan eksternal	3,500		
5.1	Pemantauan Berkelanjutan	3,667	0,075	0,275
	Pimpinan organisasi/penanggungjawab program dan kegiatan/penanggungjawab operasional mengevaluasi secara berkala pengendalian intern yang telah dilakukan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.	3,750		

KODE	URAIAN PARAMETER	KESIMPULAN AKHIR (HASIL PK)	BOBOT	NILAI
	Proses manajemen risiko telah direviu	3,750		
	Pemantauan/monitoring terhadap risiko telah dilakukan	3,500		
5.2	Evaluasi Terpisah	4,125	0,075	0,309
	Evaluasi terpisah dilakukan oleh pegawai dengan keahlian tertentu yang disyaratkan dan dapat melibatkan APIP atau auditor eksternal untuk menilai kinerja sistem pengendalian intern, mengidentifikasi kelemahan pengendalian, menentukan penyebab dari kegagalan aktivitas pengendalian, serta pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan instansi.	3,750		
	Terdapat reviu independen terhadap proses manajemen risiko	4,500		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES INSPEKTORAT JENDERAL				3,674



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sutrisno Subagyo

Lampiran III

Nomor : 3447/SJ.2/TU.210/XII/2025

Tanggal : 30 Desember 2025

**HASIL PENJAMINAN KUALITAS
 ATAS PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SPIP TAHUN 2025
 KOMPONEN STRUKTUR DAN PROSES
 (EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENCAPAIAN TUJUAN ORGANISASI (T1))**

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

KODE	URAIAN PARAMETER	KESIMPULAN AKHIR (HASIL PK)	BOBOT	NILAI
1.1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	4,438	0,038	0,166
	Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi	4,500		0,000
1.2	Komitmen terhadap Kompetensi	4,250	0,038	0,159
	Tugas dan jabatan dalam organisasi dilaksanakan dan diisi oleh SDM yang kompeten	4,250		0,000
1.3	Kepemimpinan yang Kondusif	4,063	0,038	0,152
	Pimpinan organisasi menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk pencapaian tujuan organisasi.	4,250		0,000
	Pimpinan Instansi Pemerintah mengalokasikan sumber daya untuk penerapan manajemen risiko.	4,000		0,000
	Pimpinan Instansi Pemerintah menggunakan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan	4,000		0,000
	Pimpinan Instansi Pemerintah mendorong penerapan manajemen risiko, melalui Penggunaan kinerja penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja	4,000		0,000
1.4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	4,750	0,038	0,178

KODE	URAIAN PARAMETER	KESIMPULAN AKHIR (HASIL PK)	BOBOT	NILAI
	Struktur organisasi dibentuk dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi. Struktur organisasi dibentuk dalam rangka mendukung pencapaian keandalan laporan keuangan Struktur organisasi dibentuk dalam rangka mendukung pencapaian keamanan aset Dalam Struktur organisasi terdapat unit yang melaksanakan fungsi kepatuhan internal.	4,750		0,000
1.5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	4,250	0,038	0,159
	Wewenang dan tanggung jawab diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai tingkatannya untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dalam rangka percepatan pencapaian tujuan organisasi. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab memperhatikan benturan kepentingan	4,250		0,000
1.6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	3,583	0,038	0,134
	Penerapan kebijakan manajemen dan praktik pembinaan SDM sehingga dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi	4,000		0,000
	Pegawai telah mendapatkan fasilitas untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko	3,500		0,000
	Pegawai memiliki kesadaran terkait manajemen risiko	3,250		0,000
1.7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	3,000	0,038	0,113
	Pengawasan APIP telah dapat memberikan nilai tambah pada perbaikan pengendalian organisasi	3,000		0,000

KODE	URAIAN PARAMETER	KESIMPULAN AKHIR (HASIL PK)	BOBOT	NILAI
1.8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	3,625	0,038	0,136
	Pimpinan organisasi menjalin hubungan kerja yang baik (kemitraan) dengan instansi lain terkait dengan upaya pencapaian tujuan organisasi.	4,000		0,000
	Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang baik, instansi Pemerintah telah mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko (termasuk implikasi dari transfer risiko) terkait kemitraan	3,250		0,000
2.1	Identifikasi Risiko	3,833	0,100	0,383
	Pemerintah Daerah telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko.	3,500		0,000
	Risiko telah teridentifikasi dan dituangkan dalam register risiko	4,000		0,000
	Proses manajemen risiko telah melekat pada proses bisnis Instansi Pemerintah	4,000		0,000
2.2	Analisis Risiko	3,600	0,100	0,360
	Seluruh risiko telah dianalisis dampak dan tingkat keterjadiannya	3,750		0,000
	Instansi pemerintah telah menentukan prioritas risiko	3,750		0,000
	Instansi Pemerintah telah menentukan rencana tindak pengendalian	4,000		0,000
	Tindak pengendalian telah diimplementasikan	3,250		0,000
	Tindak pengendalian efektif menurunkan risiko	3,250		0,000
3.1	Reviu atas Kinerja	3,500	0,023	0,080
	Pimpinan organisasi membandingkan tolok ukur kinerja dengan capaian kinerja secara berkala untuk mengatasi hambatan kinerja, menetapkan strategi perbaikan, dan menilai kinerja suatu unit sampai dengan periode tertentu dalam rangka	3,500		0,000

KODE	URAIAN PARAMETER	KESIMPULAN AKHIR (HASIL PK)	BOBOT	NILAI
	mengawal pencapaian tujuan organisasi.			
3.2	Pembinaan SDM	3,250	0,023	0,074
	Pembinaan SDM dilakukan sehingga setiap pegawai dapat memberikan manfaat optimal dalam pencapaian tujuan organisasi	3,250		0,000
3.3	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	3,750	0,023	0,085
	Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dilakukan untuk memastikan sistem informasi dapat menyajikan data yang akurat dan tepat waktu untuk digunakan oleh pengguna.	3,750		0,000
3.4	Pengendalian Fisik atas Aset	3,500	0,023	0,080
	Pengelolaan BMN/D dilakukan untuk menjamin aset tersedia dan dapat digunakan dengan baik oleh pengguna dalam rangka mendukung kinerja organisasi.	3,500		0,000
3.5	Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja	3,250	0,023	0,074
	Kegiatan pengendalian atas penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja dilakukan untuk menjamin keandalan ukuran dan ketepatan penetapan indikator masing-masing unit secara berjenjang dibandingkan dengan IKU organisasi.	3,250		0,000
3.6	Pemisahan Fungsi	3,500	0,023	0,080

KODE	URAIAN PARAMETER	KESIMPULAN AKHIR (HASIL PK)	BOBOT	NILAI
	Terdapat pemisahan fungsi sehingga seluruh aspek utama transaksi dan kejadian tidak dikendalikan hanya oleh satu orang	3,500		0,000
3.6	Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting	3,500	0,023	0,080
	Terdapat proses untuk memastikan transaksi dan kejadian penting hanya dapat diotorisasi ketika memenuhi persyaratan dan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan	3,500		0,000
3.6	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian	3,500	0,023	0,080
	Terdapat proses untuk memastikan transaksi telah diklasifikasikan dengan layak dan dikelompokkan dengan benar serta dicatat dengan segera sehingga relevan, bernilai, dan berguna bagi manajemen	3,500		0,000
3.6	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya	3,250	0,023	0,074
	Terdapat pembatasan atas kesempatan dan hak untuk menggunakan, atau memperoleh sumber daya dan mengakses pencatatannya	3,250		0,000
3.6	Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya	3,250	0,023	0,074
	Terdapat pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi dalam mengelola sumber daya yang diberikan/dikuasakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi	3,250		0,000
3.6	Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting	3,500	0,023	0,080

KODE	URAIAN PARAMETER	KESIMPULAN AKHIR (HASIL PK)	BOBOT	NILAI
	Terdapat pengelolaan, pemeliharaan, dan pendokumentasian secara berkala yang mencakup seluruh SPI serta transaksi dan kejadian penting yang dilaksanakan secara lengkap dan akurat untuk memfasilitasi penelusuran transaksi, kejadian, dan informasi terkait	3,500		0,000
4.1	Informasi yang Relevan	3,863	0,050	0,193
	Tersedianya informasi yang relevan untuk kebutuhan internal dan eksternal.	3,500		0,000
	Pimpinan Instansi Pemerintah membangun sistem pengaduan	4,250		0,000
	Strategi dan kebijakan manajemen risiko telah dikomunikasikan.	4,500		0,000
	Register risiko dan rencana tindak pengendalian telah dikomunikasikan ke pihak terkait	3,250		0,000
4.2	Komunikasi yang Efektif	3,500	0,050	0,175
	Terlaksananya komunikasi yang efektif dengan internal dan eksternal	3,500		0,000
5.1	Pemantauan Berkelanjutan	3,583	0,075	0,269
	Pimpinan organisasi/penanggungjawab program dan kegiatan/penanggungjawab operasional mengevaluasi secara berkala pengendalian intern yang telah dilakukan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.	3,500		0,000
	Proses manajemen risiko telah direviu	3,750		0,000
	Pemantauan/monitoring terhadap risiko telah dilakukan	3,500		0,000
5.2	Evaluasi Terpisah	4,000	0,075	0,300

KODE	URAIAN PARAMETER	KESIMPULAN AKHIR (HASIL PK)	BOBOT	NILAI
	Evaluasi terpisah dilakukan oleh pegawai dengan keahlian tertentu yang disyaratkan dan dapat melibatkan APIP atau auditor eksternal untuk menilai kinerja sistem pengendalian intern, mengidentifikasi kelemahan pengendalian, menentukan penyebab dari kegagalan aktivitas pengendalian, serta pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan instansi.	3,750		0,000
	Terdapat reviu independen terhadap proses manajemen risiko	4,250		0,000
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP				3,737



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sutrisno Subagyo

Lampiran IV

Nomor : 3447/SJ.2/TU.210/XII/2025

Tanggal : 30 Desember 2025

**HASIL PENJAMINAN KUALITAS
 ATAS PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SPIP TAHUN 2025
 KOMPONEN STRUKTUR DAN PROSES
 (EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENCAPAIAN TUJUAN ORGANISASI (T1))**

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA

Kode	Uraian Parameter	KESIMPULAN AKHIR (HASIL PK)	BOBOT	NILAI
1.1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	4,188	0,038	0,157
	Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi			
	Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam pengelolaan keuangan	4,250		0,000
	Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam pengelolaan aset			
	Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam pelaksanaan tugasnya sesuai peraturan yang berlaku			
1.2	Komitmen terhadap Kompetensi	3,750	0,038	0,141
	Tugas dan jabatan dalam organisasi dilaksanakan dan diisi oleh SDM yang kompeten	3,750		0,000
1.3	Kepemimpinan yang Kondusif	3,938	0,038	0,148
	Pimpinan organisasi menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk pencapaian tujuan organisasi.	4,000		0,000
	Pimpinan Instansi Pemerintah mengalokasikan sumber daya untuk penerapan manajemen risiko.	4,000		0,000

Kode	Uraian Parameter	KESIMPULAN AKHIR (HASIL PK)	BOBOT	NILAI
	Pimpinan Instansi Pemerintah menggunakan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan	4,000		0,000
	Pimpinan Instansi Pemerintah mendorong penerapan manajemen risiko, melalui Penggunaan kinerja penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja	3,750		0,000
1.4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	4,500	0,038	0,169
	Struktur organisasi dibentuk dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi. Struktur organisasi dibentuk dalam rangka mendukung pencapaian keandalan laporan keuangan Struktur organisasi dibentuk dalam rangka mendukung pencapaian keamanan aset Dalam Struktur organisasi terdapat unit yang melaksanakan fungsi kepatuhan internal.	4,500		0,000
1.5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	3,750	0,038	0,141
	Wewenang dan tanggung jawab diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai tingkatannya untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dalam rangka percepatan pencapaian tujuan organisasi. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab memperhatikan benturan kepentingan	3,750		0,000
1.6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	3,500	0,038	0,131
	Penerapan kebijakan manajemen dan praktik pembinaan SDM sehingga dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi	4,000		0,000

Kode	Uraian Parameter	KESIMPULAN AKHIR (HASIL PK)	BOBOT	NILAI
	Pegawai telah mendapatkan fasilitas untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko	3,500		0,000
	Pegawai memiliki kesadaran terkait manajemen risiko	3,000		0,000
1.7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	3,000	0,038	0,113
	Pengawasan APIP telah dapat memberikan nilai tambah pada perbaikan pengendalian organisasi	3,000		0,000
1.8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	3,750	0,038	0,141
	Pimpinan organisasi menjalin hubungan kerja yang baik (kemitraan) dengan instansi lain terkait dengan upaya pencapaian tujuan organisasi.	4,000		0,000
	Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang baik, instansi Pemerintah telah mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko (termasuk implikasi dari transfer risiko) terkait kemitraan	3,500		0,000
2.1	Identifikasi Risiko	3,917	0,100	0,392
	Pemerintah Daerah telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko.	3,750		0,000
	Risiko telah teridentifikasi dan dituangkan dalam register risiko	4,000		0,000
	Proses manajemen risiko telah melekat pada proses bisnis Instansi Pemerintah	4,000		0,000
2.2	Analisis Risiko	3,950	0,100	0,395
	Seluruh risiko telah dianalisis dampak dan tingkat keterjadiannya	4,000		0,000
	Instansi pemerintah telah menentukan prioritas risiko	4,250		0,000
	Instansi Pemerintah telah menentukan rencana tindak pengendalian	4,250		0,000
	Tindak pengendalian telah diimplementasikan	3,500		0,000
	Tindak pengendalian efektif menurunkan risiko	3,750		0,000

Kode	Uraian Parameter	KESIMPULAN AKHIR (HASIL PK)	BOBOT	NILAI
3.1	Reviu atas Kinerja	3,500	0,023	0,080
	Pimpinan organisasi membandingkan tolok ukur kinerja dengan capaian kinerja secara berkala untuk mengatasi hambatan kinerja, menetapkan strategi perbaikan, dan menilai kinerja suatu unit sampai dengan periode tertentu dalam rangka mengawal pencapaian tujuan organisasi.	3,500		0,000
3.2	Pembinaan SDM	3,250	0,023	0,074
	Pembinaan SDM dilakukan sehingga setiap pegawai dapat memberikan manfaat optimal dalam pencapaian tujuan organisasi	3,250		0,000
3.3	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	3,500	0,023	0,080
	Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dilakukan untuk memastikan sistem informasi dapat menyajikan data yang akurat dan tepat waktu untuk digunakan oleh pengguna.	3,500		0,000
3.4	Pengendalian Fisik atas Aset	3,500	0,023	0,080
	Pengelolaan BMN/D dilakukan untuk menjamin aset tersedia dan dapat digunakan dengan baik oleh pengguna dalam rangka mendukung kinerja organisasi.	3,500		0,000
3.5	Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja	3,750	0,023	0,085
	Kegiatan pengendalian atas penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja dilakukan untuk menjamin keandalan ukuran dan ketepatan penetapan indikator masing-masing unit secara berjenjang dibandingkan dengan IKU organisasi.	3,750		0,000

Kode	Uraian Parameter	KESIMPULAN AKHIR (HASIL PK)	BOBOT	NILAI
3.6	Pemisahan Fungsi	3,250	0,023	0,074
	Terdapat pemisahan fungsi sehingga seluruh aspek utama transaksi dan kejadian tidak dikendalikan hanya oleh satu orang	3,250		0,000
3.6	Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting	3,250	0,023	0,074
	Terdapat proses untuk memastikan transaksi dan kejadian penting hanya dapat diotorisasi ketika memenuhi persyaratan dan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan	3,250		0,000
3.6	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian	3,500	0,023	0,080
	Terdapat proses untuk memastikan transaksi telah diklasifikasikan dengan layak dan dikelompokkan dengan benar serta dicatat dengan segera sehingga relevan, bernilai, dan berguna bagi manajemen	3,500		0,000
3.6	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya	3,250	0,023	0,074
	Terdapat pembatasan atas kesempatan dan hak untuk menggunakan, atau memperoleh sumber daya dan mengakses pencatatannya	3,250		0,000
3.6	Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya	3,250	0,023	0,074
	Terdapat pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi dalam mengelola sumber daya yang diberikan/dikuasakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi	3,250		0,000
3.6	Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting	3,500	0,023	0,080

Kode	Uraian Parameter	KESIMPULAN AKHIR (HASIL PK)	BOBOT	NILAI
	Terdapat pengelolaan, pemeliharaan, dan pendokumentasian secara berkala yang mencakup seluruh SPI serta transaksi dan kejadian penting yang dilaksanakan secara lengkap dan akurat untuk memfasilitasi penelusuran transaksi, kejadian, dan informasi terkait	3,500		0,000
4.1	Informasi yang Relevan	3,925	0,050	0,196
	Tersedianya informasi yang relevan untuk kebutuhan internal dan eksternal.	3,500		0,000
	Pimpinan Instansi Pemerintah membangun sistem pengaduan	4,250		0,000
	Strategi dan kebijakan manajemen risiko telah dikomunikasikan.	4,500		0,000
	Register risiko dan rencana tindak pengendalian telah dikomunikasikan ke pihak terkait	3,500		0,000
4.2	Komunikasi yang Efektif	3,500	0,050	0,175
	Terlaksananya komunikasi yang efektif dengan internal dan eksternal	3,500		0,000
5.1	Pemantauan Berkelanjutan	3,583	0,075	0,269
	Pimpinan organisasi/penanggungjawab program dan kegiatan/penanggungjawab operasional mengevaluasi secara berkala pengendalian intern yang telah dilakukan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.	3,500		0,000
	Proses manajemen risiko telah direviu	3,750		0,000
	Pemantauan/monitoring terhadap risiko telah dilakukan	3,500		0,000
5.2	Evaluasi Terpisah	4,000	0,075	0,300

Kode	Uraian Parameter	KESIMPULAN AKHIR (HASIL PK)	BOBOT	NILAI
	Evaluasi terpisah dilakukan oleh pegawai dengan keahlian tertentu yang disyaratkan dan dapat melibatkan APIP atau auditor eksternal untuk menilai kinerja sistem pengendalian intern, mengidentifikasi kelemahan pengendalian, menentukan penyebab dari kegagalan aktivitas pengendalian, serta pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan instansi.	3,750		0,000
	Terdapat reviu independen terhadap proses manajemen risiko	4,250		0,000
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA				3,718



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sutrisno Subagyo

Lampiran V

Nomor : 3447/SJ.2/TU.210/XII/2025

Tanggal : 30 Desember 2025

**HASIL PENJAMINAN KUALITAS
 ATAS PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SPIP TAHUN 2025
 KOMPONEN STRUKTUR DAN PROSES
 (EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENCAPAIAN TUJUAN ORGANISASI (T1))**

**DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
 SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

KODE	URAIAN PARAMETER	KESIMPULAN AKHIR (HASIL PK)	BOBOT	NILAI
1.1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	4,688	0,038	0,176
	Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi	4,750		
1.2	Komitmen terhadap Kompetensi	4,000	0,038	0,150
	Tugas dan jabatan dalam organisasi dilaksanakan dan diisi oleh SDM yang kompeten	4,000		
1.3	Kepemimpinan yang Kondusif	4,250	0,038	0,159
	Pimpinan organisasi menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk pencapaian tujuan organisasi.	4,250		
	Pimpinan Instansi Pemerintah mengalokasikan sumber daya untuk penerapan manajemen risiko.	4,250		
	Pimpinan Instansi Pemerintah menggunakan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan	4,250		
	Pimpinan Instansi Pemerintah mendorong penerapan manajemen risiko, melalui Penggunaan kinerja penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja	4,250		

KODE	URAIAN PARAMETER	KESIMPULAN AKHIR (HASIL PK)	BOBOT	NILAI
1.4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	4,500	0,038	0,169
	Struktur organisasi dibentuk dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.	4,500		
1.5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	4,000	0,038	0,150
	Wewenang dan tanggung jawab diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai tingkatannya untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dalam rangka percepatan pencapaian tujuan organisasi.	4,000		
1.6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	3,667	0,038	0,138
	Penerapan kebijakan manajemen dan praktik pembinaan SDM sehingga dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi	4,250		
	Pegawai telah mendapatkan fasilitas untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko	3,500		
	Pegawai memiliki kesadaran terkait manajemen risiko	3,250		
1.7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	3,000	0,038	0,113
	Pengawasan APIP telah dapat memberikan nilai tambah pada perbaikan pengendalian organisasi	3,000		
1.8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	3,750	0,038	0,141
	Pimpinan organisasi menjalin hubungan kerja yang baik (kemitraan) dengan instansi lain terkait dengan upaya pencapaian tujuan organisasi.	4,000		
	Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang baik, instansi Pemerintah telah mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko (termasuk implikasi dari transfer risiko) terkait kemitraan	3,500		

KODE	URAIAN PARAMETER	KESIMPULAN AKHIR (HASIL PK)	BOBOT	NILAI
2.1	Identifikasi Risiko	4,083	0,100	0,408
	Pemerintah Daerah telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko.	3,750		
	Risiko telah teridentifikasi dan dituangkan dalam register risiko	4,250		
	Proses manajemen risiko telah melekat pada proses bisnis Instansi Pemerintah	4,250		
2.2	Analisis Risiko	4,050	0,100	0,405
	Seluruh risiko telah dianalisis dampak dan tingkat keterjadiannya	4,250		
	Instansi pemerintah telah menentukan prioritas risiko	4,250		
	Instansi Pemerintah telah menentukan rencana tindak pengendalian	4,250		
	Tindak pengendalian telah diimplementasikan	3,750		
	Tindak pengendalian efektif menurunkan risiko	3,750		
3.1	Reviu atas Kinerja	3,750	0,023	0,085
	Pimpinan organisasi membandingkan tolok ukur kinerja dengan capaian kinerja secara berkala untuk mengatasi hambatan kinerja, menetapkan strategi perbaikan, dan menilai kinerja suatu unit sampai dengan periode tertentu dalam rangka mengawal pencapaian tujuan organisasi.	3,750		
3.2	Pembinaan SDM	3,250	0,023	0,074
	Pembinaan SDM dilakukan sehingga setiap pegawai dapat memberikan manfaat optimal dalam pencapaian tujuan organisasi	3,250		
3.3	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	3,750	0,023	0,085

KODE	URAIAN PARAMETER	KESIMPULAN AKHIR (HASIL PK)	BOBOT	NILAI
	Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dilakukan untuk memastikan sistem informasi dapat menyajikan data yang akurat dan tepat waktu untuk digunakan oleh pengguna.	3,750		
3.4	Pengendalian Fisik atas Aset	3,500	0,023	0,080
	Pengelolaan BMN/D dilakukan untuk menjamin aset tersedia dan dapat digunakan dengan baik oleh pengguna dalam rangka mendukung kinerja organisasi.	3,500		
3.5	Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja	3,750	0,023	0,085
	Kegiatan pengendalian atas penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja dilakukan untuk menjamin keandalan ukuran dan ketepatan penetapan indikator masing-masing unit secara berjenjang dibandingkan dengan IKU organisasi.	3,750		
3.6	Pemisahan Fungsi	3,500	0,023	0,080
	Terdapat pemisahan fungsi sehingga seluruh aspek utama transaksi dan kejadian tidak dikendalikan hanya oleh satu orang	3,500		
3.6	Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting	3,500	0,023	0,080
	Terdapat proses untuk memastikan transaksi dan kejadian penting hanya dapat diotorisasi ketika memenuhi persyaratan dan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan	3,500		
3.6	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian	3,750	0,023	0,085

KODE	URAIAN PARAMETER	KESIMPULAN AKHIR (HASIL PK)	BOBOT	NILAI
	Terdapat proses untuk memastikan transaksi telah diklasifikasikan dengan layak dan dikelompokkan dengan benar serta dicatat dengan segera sehingga relevan, bernilai, dan berguna bagi manajemen	3,750		
3.6	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya	3,500	0,023	0,080
	Terdapat pembatasan atas kesempatan dan hak untuk menggunakan, atau memperoleh sumber daya dan mengakses pencatatannya	3,500		
3.6	Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya	3,500	0,023	0,080
	Terdapat pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi dalam mengelola sumber daya yang diberikan/dikuasakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi	3,500		
3.6	Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting	3,750	0,023	0,085
	Terdapat pengelolaan, pemeliharaan, dan pendokumentasian secara berkala yang mencakup seluruh SPI serta transaksi dan kejadian penting yang dilaksanakan secara lengkap dan akurat untuk memfasilitasi penelusuran transaksi, kejadian, dan informasi terkait	3,750		
4.1	Informasi yang Relevan	4,175	0,050	0,209
	Tersedianya informasi yang relevan untuk kebutuhan internal dan eksternal.	3,750		
	Pimpinan Instansi Pemerintah membangun sistem pengaduan	4,500		
	Strategi dan kebijakan manajemen risiko telah dikomunikasikan.	4,750		
	Register risiko dan rencana tindak pengendalian telah dikomunikasikan ke pihak terkait	3,750		

KODE	URAIAN PARAMETER	KESIMPULAN AKHIR (HASIL PK)	BOBOT	NILAI
4.2	Komunikasi yang Efektif	3,750	0,050	0,188
	Terlaksananya komunikasi yang efektif dengan internal dan eksternal	3,750		
5.1	Pemantauan Berkelanjutan	3,833	0,075	0,288
	Pimpinan organisasi/penanggungjawab program dan kegiatan/penanggungjawab operasional mengevaluasi secara berkala pengendalian intern yang telah dilakukan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.	3,750		
	Proses manajemen risiko telah direviu	4,000		
	Pemantauan/monitoring terhadap risiko telah dilakukan	3,750		
5.2	Evaluasi Terpisah	4,250	0,075	0,319
	Evaluasi terpisah dilakukan oleh pegawai dengan keahlian tertentu yang disyaratkan dan dapat melibatkan APIP atau auditor eksternal untuk menilai kinerja sistem pengendalian intern, mengidentifikasi kelemahan pengendalian, menentukan penyebab dari kegagalan aktivitas pengendalian, serta pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan instansi.	4,000		
	Terdapat reviu independen terhadap proses manajemen risiko	4,500		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				3,908



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sutrisno Subagyo

Lampiran VI

Nomor : 3447/SJ.2/TU.210/XII/2025

Tanggal : 30 Desember 2025

**HASIL PENJAMINAN KUALITAS
 ATAS PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SPIP TAHUN 2025
 KOMPONEN STRUKTUR DAN PROSES
 (EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENCAPAIAN TUJUAN ORGANISASI (T1))**

**DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
 KELAUTAN DAN PERIKANAN**

KODE	URAIAN PARAMETER	KESIMPULAN AKHIR (HASIL PK)	BOBOT	NILAI
1.1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	4,438	0,038	0,166
	Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi	4,500		
1.2	Komitmen terhadap Kompetensi	3,750	0,038	0,141
	Tugas dan jabatan dalam organisasi dilaksanakan dan diisi oleh SDM yang kompeten	3,750		
1.3	Kepemimpinan yang Kondusif	3,938	0,038	0,148
	Pimpinan organisasi menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk pencapaian tujuan organisasi.	4,000		
	Pimpinan Instansi Pemerintah mengalokasikan sumber daya untuk penerapan manajemen risiko.	4,000		
	Pimpinan Instansi Pemerintah menggunakan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan	3,750		
	Pimpinan Instansi Pemerintah mendorong penerapan manajemen risiko, melalui Penggunaan kinerja penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja	4,000		
1.4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	4,500	0,038	0,169

KODE	URAIAN PARAMETER	KESIMPULAN AKHIR (HASIL PK)	BOBOT	NILAI
	Struktur organisasi dibentuk dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.	4,500		
1.5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	4,000	0,038	0,150
	Wewenang dan tanggung jawab diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai tingkatannya untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dalam rangka percepatan pencapaian tujuan organisasi. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab memperhatikan benturan kepentingan	4,000		
1.6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	3,583	0,038	0,134
	Penerapan kebijakan manajemen dan praktik pembinaan SDM sehingga dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi	4,000		
	Pegawai telah mendapatkan fasilitas untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko	3,500		
	Pegawai memiliki kesadaran terkait manajemen risiko	3,250		
1.7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	3,000	0,038	0,113
	Pengawasan APIP telah dapat memberikan nilai tambah pada perbaikan pengendalian organisasi	3,000		
1.8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	3,500	0,038	0,131
	Pimpinan organisasi menjalin hubungan kerja yang baik (kemitraan) dengan instansi lain terkait dengan upaya pencapaian tujuan organisasi.	3,750		
	Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang baik, instansi Pemerintah telah mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko (termasuk implikasi dari transfer risiko) terkait kemitraan	3,250		

KODE	URAIAN PARAMETER	KESIMPULAN AKHIR (HASIL PK)	BOBOT	NILAI
2.1	Identifikasi Risiko	3,750	0,100	0,375
	Pemerintah Daerah telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko.	3,500		
	Risiko telah teridentifikasi dan dituangkan dalam register risiko	4,000		
	Proses manajemen risiko telah melekat pada proses bisnis Instansi Pemerintah	3,750		
2.2	Analisis Risiko	3,750	0,100	0,375
	Seluruh risiko telah dianalisis dampak dan tingkat keterjadiannya	4,000		
	Instansi pemerintah telah menentukan prioritas risiko	4,000		
	Instansi Pemerintah telah menentukan rencana tindak pengendalian	4,000		
	Tindak pengendalian telah diimplementasikan	3,500		
	Tindak pengendalian efektif menurunkan risiko	3,250		
3.1	Reviu atas Kinerja	3,500	0,023	0,080
	Pimpinan organisasi membandingkan tolok ukur kinerja dengan capaian kinerja secara berkala untuk mengatasi hambatan kinerja, menetapkan strategi perbaikan, dan menilai kinerja suatu unit sampai dengan periode tertentu dalam rangka mengawal pencapaian tujuan organisasi.	3,500		
3.2	Pembinaan SDM	3,250	0,023	0,074
	Pembinaan SDM dilakukan sehingga setiap pegawai dapat memberikan manfaat optimal dalam pencapaian tujuan organisasi	3,250		
3.3	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	3,500	0,023	0,080

KODE	URAIAN PARAMETER	KESIMPULAN AKHIR (HASIL PK)	BOBOT	NILAI
	Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dilakukan untuk memastikan sistem informasi dapat menyajikan data yang akurat dan tepat waktu untuk digunakan oleh pengguna.	3,500		
3.4	Pengendalian Fisik atas Aset	3,500	0,023	0,080
	Pengelolaan BMN/D dilakukan untuk menjamin aset tersedia dan dapat digunakan dengan baik oleh pengguna dalam rangka mendukung kinerja organisasi.	3,500		
3.5	Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja	3,500	0,023	0,080
	Kegiatan pengendalian atas penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja dilakukan untuk menjamin keandalan ukuran dan ketepatan penetapan indikator masing-masing unit secara berjenjang dibandingkan dengan IKU organisasi.	3,500		
3.6	Pemisahan Fungsi	3,250	0,023	0,074
	Terdapat pemisahan fungsi sehingga seluruh aspek utama transaksi dan kejadian tidak dikendalikan hanya oleh satu orang	3,250		
3.6	Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting	3,250	0,023	0,074
	Terdapat proses untuk memastikan transaksi dan kejadian penting hanya dapat diotorisasi ketika memenuhi persyaratan dan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan	3,250		
3.6	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian	3,750	0,023	0,085

KODE	URAIAN PARAMETER	KESIMPULAN AKHIR (HASIL PK)	BOBOT	NILAI
	Terdapat proses untuk memastikan transaksi telah diklasifikasikan dengan layak dan dikelompokkan dengan benar serta dicatat dengan segera sehingga relevan, bernilai, dan berguna bagi manajemen	3,750		
3.6	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya	3,250	0,023	0,074
	Terdapat pembatasan atas kesempatan dan hak untuk menggunakan, atau memperoleh sumber daya dan mengakses pencatatannya	3,250		
3.6	Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya	3,250	0,023	0,074
	Terdapat pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi dalam mengelola sumber daya yang diberikan/dikuasakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi	3,250		
3.6	Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting	3,500	0,023	0,080
	Terdapat pengelolaan, pemeliharaan, dan pendokumentasian secara berkala yang mencakup seluruh SPI serta transaksi dan kejadian penting yang dilaksanakan secara lengkap dan akurat untuk memfasilitasi penelusuran transaksi, kejadian, dan informasi terkait	3,500		
4.1	Informasi yang Relevan	3,863	0,050	0,193
	Tersedianya informasi yang relevan untuk kebutuhan internal dan eksternal.	3,500		
	Pimpinan Instansi Pemerintah membangun sistem pengaduan	4,250		
	Strategi dan kebijakan manajemen risiko telah dikomunikasikan.	4,500		
	Register risiko dan rencana tindak pengendalian telah dikomunikasikan ke pihak terkait	3,250		

KODE	URAIAN PARAMETER	KESIMPULAN AKHIR (HASIL PK)	BOBOT	NILAI
4.2	Komunikasi yang Efektif	3,500	0,050	0,175
	Terlaksananya komunikasi yang efektif dengan internal dan eksternal	3,500		
5.1	Pemantauan Berkelanjutan	3,500	0,075	0,263
	Pimpinan organisasi/penanggungjawab program dan kegiatan/penanggungjawab operasional mengevaluasi secara berkala pengendalian intern yang telah dilakukan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.	3,500		
	Proses manajemen risiko telah direviu	3,750		
	Pemantauan/monitoring terhadap risiko telah dilakukan	3,250		
5.2	Evaluasi Terpisah	4,000	0,075	0,300
	Evaluasi terpisah dilakukan oleh pegawai dengan keahlian tertentu yang disyaratkan dan dapat melibatkan APIP atau auditor eksternal untuk menilai kinerja sistem pengendalian intern, mengidentifikasi kelemahan pengendalian, menentukan penyebab dari kegagalan aktivitas pengendalian, serta pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan instansi.	3,750		
	Terdapat reviu independen terhadap proses manajemen risiko	4,250		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN				3,684



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sutrisno Subagyo

Lampiran VII

Nomor : 3447/SJ.2/TU.210/XII/2025

Tanggal : 30 Desember 2025

**HASIL PENJAMINAN KUALITAS
 ATAS PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SPIP TAHUN 2025
 KOMPONEN STRUKTUR DAN PROSES
 (EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENCAPAIAN TUJUAN ORGANISASI (T1))**

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

KODE	URAIAN PARAMETER	KESIMPULAN AKHIR (HASIL PK)	BOBOT	NILAI
1.1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	4,688	0,038	0,176
	Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi	4,750		
1.2	Komitmen terhadap Kompetensi	4,000	0,038	0,150
	Tugas dan jabatan dalam organisasi dilaksanakan dan diisi oleh SDM yang kompeten	4,000		
1.3	Kepemimpinan yang Kondusif	4,000	0,038	0,150
	Pimpinan organisasi menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk pencapaian tujuan organisasi.	4,000		
	Pimpinan Instansi Pemerintah mengalokasikan sumber daya untuk penerapan manajemen risiko.	4,000		
	Pimpinan Instansi Pemerintah menggunakan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan	4,000		
	Pimpinan Instansi Pemerintah mendorong penerapan manajemen risiko, melalui Penggunaan kinerja penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja	4,000		
1.4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	4,500	0,038	0,169

KODE	URAIAN PARAMETER	KESIMPULAN AKHIR (HASIL PK)	BOBOT	NILAI
	Struktur organisasi dibentuk dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi. Struktur organisasi dibentuk dalam rangka mendukung pencapaian keandalan laporan keuangan Struktur organisasi dibentuk dalam rangka mendukung pencapaian keamanan aset Dalam Struktur organisasi terdapat unit yang melaksanakan fungsi kepatuhan internal.	4,500		0,000
1.5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	3,750	0,038	0,141
	Wewenang dan tanggung jawab diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai tingkatannya untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dalam rangka percepatan pencapaian tujuan organisasi. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab memperhatikan benturan kepentingan	3,750		
1.6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	3,333	0,038	0,125
	Penerapan kebijakan manajemen dan praktik pembinaan SDM sehingga dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi	3,750		
	Pegawai telah mendapatkan fasilitas untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko	3,250		
	Pegawai memiliki kesadaran terkait manajemen risiko	3,000		
1.7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	3,000	0,038	0,113
	Pengawasan APIP telah dapat memberikan nilai tambah pada perbaikan pengendalian organisasi	3,000		0,000
1.8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	3,750	0,038	0,141

KODE	URAIAN PARAMETER	KESIMPULAN AKHIR (HASIL PK)	BOBOT	NILAI
	Pimpinan organisasi menjalin hubungan kerja yang baik (kemitraan) dengan instansi lain terkait dengan upaya pencapaian tujuan organisasi.	4,000		
	Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang baik, instansi Pemerintah telah mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko (termasuk implikasi dari transfer risiko) terkait kemitraan	3,500		
2.1	Identifikasi Risiko	3,917	0,100	0,392
	Pemerintah Daerah telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko.	3,750		
	Risiko telah teridentifikasi dan dituangkan dalam register risiko	4,000		
	Proses manajemen risiko telah melekat pada proses bisnis Instansi Pemerintah	4,000		
2.2	Analisis Risiko	3,700	0,100	0,370
	Seluruh risiko telah dianalisis dampak dan tingkat keterjadiannya	4,000		
	Instansi pemerintah telah menentukan prioritas risiko	4,000		
	Instansi Pemerintah telah menentukan rencana tindak pengendalian	4,000		
	Tindak pengendalian telah diimplementasikan	3,250		
	Tindak pengendalian efektif menurunkan risiko	3,250		
3.1	Reviu atas Kinerja	3,500	0,023	0,080
	Pimpinan organisasi membandingkan tolok ukur kinerja dengan capaian kinerja secara berkala untuk mengatasi hambatan kinerja, menetapkan strategi perbaikan, dan menilai kinerja suatu unit sampai dengan periode tertentu dalam rangka mengawal pencapaian tujuan organisasi.	3,500		0,000
3.2	Pembinaan SDM	3,250	0,023	0,074
	Pembinaan SDM dilakukan sehingga setiap pegawai dapat memberikan manfaat optimal dalam pencapaian tujuan organisasi	3,250		

KODE	URAIAN PARAMETER	KESIMPULAN AKHIR (HASIL PK)	BOBOT	NILAI
3.3	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	3,250	0,023	0,074
	Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dilakukan untuk memastikan sistem informasi dapat menyajikan data yang akurat dan tepat waktu untuk digunakan oleh pengguna.	3,250		
3.4	Pengendalian Fisik atas Aset	3,500	0,023	0,080
	Pengelolaan BMN/D dilakukan untuk menjamin aset tersedia dan dapat digunakan dengan baik oleh pengguna dalam rangka mendukung kinerja organisasi.	3,500		0,000
3.5	Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja	3,500	0,023	0,080
	Kegiatan pengendalian atas penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja dilakukan untuk menjamin keandalan ukuran dan ketepatan penetapan indikator masing-masing unit secara berjenjang dibandingkan dengan IKU organisasi.	3,500		0,000
3.6	Pemisahan Fungsi	3,250	0,023	0,074
	Terdapat pemisahan fungsi sehingga seluruh aspek utama transaksi dan kejadian tidak dikendalikan hanya oleh satu orang	3,250		
3.6	Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting	3,250	0,023	0,074
	Terdapat proses untuk memastikan transaksi dan kejadian penting hanya dapat diotorisasi ketika memenuhi persyaratan dan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan	3,250		
3.6	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian	3,500	0,023	0,080
	Terdapat proses untuk memastikan transaksi telah diklasifikasikan dengan layak dan dikelompokkan dengan benar serta dicatat dengan segera sehingga relevan, bernilai, dan berguna bagi manajemen	3,500		

KODE	URAIAN PARAMETER	KESIMPULAN AKHIR (HASIL PK)	BOBOT	NILAI
3.6	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya	3,250	0,023	0,074
	Terdapat pembatasan atas kesempatan dan hak untuk menggunakan, atau memperoleh sumber daya dan mengakses pencatatannya	3,250		
3.6	Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya	3,250	0,023	0,074
	Terdapat pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi dalam mengelola sumber daya yang diberikan/dikuasakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi	3,250		0,000
3.6	Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting	3,500	0,023	0,080
	Terdapat pengelolaan, pemeliharaan, dan pendokumentasian secara berkala yang mencakup seluruh SPI serta transaksi dan kejadian penting yang dilaksanakan secara lengkap dan akurat untuk memfasilitasi penelusuran transaksi, kejadian, dan informasi terkait	3,500		
4.1	Informasi yang Relevan	3,925	0,050	0,196
	Tersedianya informasi yang relevan untuk kebutuhan internal dan eksternal.	3,500		
	Pimpinan Instansi Pemerintah membangun sistem pengaduan	4,250		
	Strategi dan kebijakan manajemen risiko telah dikomunikasikan.	4,500		
	Register risiko dan rencana tindak pengendalian telah dikomunikasikan ke pihak terkait	3,500		
4.2	Komunikasi yang Efektif	3,500	0,050	0,175
	Terlaksananya komunikasi yang efektif dengan internal dan eksternal	3,500		
5.1	Pemantauan Berkelanjutan	3,583	0,075	0,269
	Pimpinan organisasi/penanggungjawab program dan kegiatan/penanggungjawab operasional mengevaluasi secara berkala	3,500		

KODE	URAIAN PARAMETER	KESIMPULAN AKHIR (HASIL PK)	BOBOT	NILAI
	pengendalian intern yang telah dilakukan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.			
	Proses manajemen risiko telah direviu	3,750		
	Pemantauan/monitoring terhadap risiko telah dilakukan	3,500		
5.2	Evaluasi Terpisah	4,000	0,075	0,300
	Evaluasi terpisah dilakukan oleh pegawai dengan keahlian tertentu yang disyaratkan dan dapat melibatkan APIP atau auditor eksternal untuk menilai kinerja sistem pengendalian intern, mengidentifikasi kelemahan pengendalian, menentukan penyebab dari kegagalan aktivitas pengendalian, serta pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan instansi.	3,750		
	Terdapat reviu independen terhadap proses manajemen risiko	4,250		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN				3,706



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sutrisno Subagyo

**HASIL PENJAMINAN KUALITAS
 ATAS PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SPIP TAHUN 2025
 KOMPONEN STRUKTUR DAN PROSES
 (EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENCAPAIAN TUJUAN ORGANISASI (T1))**

DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT

KODE	URAIAN PARAMETER	KESIMPULAN AKHIR (HASIL PK)	BOBOT	NILAI
1.1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	4,438	0,038	0,166
	Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi	4,500		
1.2	Komitmen terhadap Kompetensi	4,000	0,038	0,150
	Tugas dan jabatan dalam organisasi dilaksanakan dan diisi oleh SDM yang kompeten	4,000		
1.3	Kepemimpinan yang Kondusif	4,000	0,038	0,150
	Pimpinan organisasi menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk pencapaian tujuan organisasi.	4,000		
	Pimpinan Instansi Pemerintah mengalokasikan sumber daya untuk penerapan manajemen risiko.	4,000		
	Pimpinan Instansi Pemerintah menggunakan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan	4,000		
	Pimpinan Instansi Pemerintah mendorong penerapan manajemen risiko, melalui Penggunaan kinerja penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja	4,000		
1.4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	4,250	0,038	0,159
	Struktur organisasi dibentuk dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.	4,250		0,000

KODE	URAIAN PARAMETER	KESIMPULAN AKHIR (HASIL PK)	BOBOT	NILAI
	Struktur organisasi dibentuk dalam rangka mendukung pencapaian keandalan laporan keuangan Struktur organisasi dibentuk dalam rangka mendukung pencapaian keamanan aset Dalam Struktur organisasi terdapat unit yang melaksanakan fungsi kepatuhan internal.			
1.5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	3,750	0,038	0,141
	Wewenang dan tanggung jawab diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai tingkatannya untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dalam rangka percepatan pencapaian tujuan organisasi. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab memperhatikan benturan kepentingan	3,750		
1.6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	3,583	0,038	0,134
	Penerapan kebijakan manajemen dan praktik pembinaan SDM sehingga dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi	4,000		
	Pegawai telah mendapatkan fasilitas untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko	3,500		
	Pegawai memiliki kesadaran terkait manajemen risiko	3,250		
1.7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	3,000	0,038	0,113
	Pengawasan APIP telah dapat memberikan nilai tambah pada perbaikan pengendalian organisasi	3,000		0,000
1.8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	3,625	0,038	0,136

KODE	URAIAN PARAMETER	KESIMPULAN AKHIR (HASIL PK)	BOBOT	NILAI
	Pimpinan organisasi menjalin hubungan kerja yang baik (kemitraan) dengan instansi lain terkait dengan upaya pencapaian tujuan organisasi.	3,750		
	Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang baik, instansi Pemerintah telah mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko (termasuk implikasi dari transfer risiko) terkait kemitraan	3,500		
2.1	Identifikasi Risiko	3,833	0,100	0,383
	Pemerintah Daerah telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko.	3,500		
	Risiko telah teridentifikasi dan dituangkan dalam register risiko	4,000		
	Proses manajemen risiko telah melekat pada proses bisnis Instansi Pemerintah	4,000		
2.2	Analisis Risiko	3,700	0,100	0,370
	Seluruh risiko telah dianalisis dampak dan tingkat keterjadiannya	4,000		
	Instansi pemerintah telah menentukan prioritas risiko	4,000		
	Instansi Pemerintah telah menentukan rencana tindak pengendalian	4,000		
	Tindak pengendalian telah diimplementasikan	3,250		
	Tindak pengendalian efektif menurunkan risiko	3,250		
3.1	Reviu atas Kinerja	3,500	0,023	0,080
	Pimpinan organisasi membandingkan tolok ukur kinerja dengan capaian kinerja secara berkala untuk mengatasi hambatan kinerja, menetapkan strategi perbaikan, dan menilai kinerja suatu unit sampai dengan periode tertentu dalam rangka mengawal pencapaian tujuan organisasi.	3,500		0,000
3.2	Pembinaan SDM	3,250	0,023	0,074
	Pembinaan SDM dilakukan sehingga setiap pegawai dapat memberikan manfaat optimal dalam pencapaian tujuan organisasi	3,250		

KODE	URAIAN PARAMETER	KESIMPULAN AKHIR (HASIL PK)	BOBOT	NILAI
3.3	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	3,500	0,023	0,080
	Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dilakukan untuk memastikan sistem informasi dapat menyajikan data yang akurat dan tepat waktu untuk digunakan oleh pengguna.	3,500		
3.4	Pengendalian Fisik atas Aset	3,250	0,023	0,074
	Pengelolaan BMN/D dilakukan untuk menjamin aset tersedia dan dapat digunakan dengan baik oleh pengguna dalam rangka mendukung kinerja organisasi.	3,250		0,000
3.5	Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja	3,500	0,023	0,080
	Kegiatan pengendalian atas penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja dilakukan untuk menjamin keandalan ukuran dan ketepatan penetapan indikator masing-masing unit secara berjenjang dibandingkan dengan IKU organisasi.	3,500		0,000
3.6	Pemisahan Fungsi	3,250	0,023	0,074
	Terdapat pemisahan fungsi sehingga seluruh aspek utama transaksi dan kejadian tidak dikendalikan hanya oleh satu orang	3,250		
3.6	Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting	3,250	0,023	0,074
	Terdapat proses untuk memastikan transaksi dan kejadian penting hanya dapat diotorisasi ketika memenuhi persyaratan dan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan	3,250		
3.6	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian	3,500	0,023	0,080
	Terdapat proses untuk memastikan transaksi telah diklasifikasikan dengan layak dan dikelompokkan dengan benar serta dicatat dengan segera sehingga relevan, bernilai, dan berguna bagi manajemen	3,500		

KODE	URAIAN PARAMETER	KESIMPULAN AKHIR (HASIL PK)	BOBOT	NILAI
3.6	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya	3,250	0,023	0,074
	Terdapat pembatasan atas kesempatan dan hak untuk menggunakan, atau memperoleh sumber daya dan mengakses pencatatannya	3,250		
3.6	Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya	3,250	0,023	0,074
	Terdapat pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi dalam mengelola sumber daya yang diberikan/dikuasakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi	3,250		0,000
3.6	Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting	3,500	0,023	0,080
	Terdapat pengelolaan, pemeliharaan, dan pendokumentasian secara berkala yang mencakup seluruh SPI serta transaksi dan kejadian penting yang dilaksanakan secara lengkap dan akurat untuk memfasilitasi penelusuran transaksi, kejadian, dan informasi terkait	3,500		
4.1	Informasi yang Relevan	3,925	0,050	0,196
	Tersedianya informasi yang relevan untuk kebutuhan internal dan eksternal.	3,500		
	Pimpinan Instansi Pemerintah membangun sistem pengaduan	4,250		
	Strategi dan kebijakan manajemen risiko telah dikomunikasikan.	4,500		
	Register risiko dan rencana tindak pengendalian telah dikomunikasikan ke pihak terkait	3,500		
4.2	Komunikasi yang Efektif	3,500	0,050	0,175
	Terlaksananya komunikasi yang efektif dengan internal dan eksternal	3,500		
5.1	Pemantauan Berkelanjutan	3,583	0,075	0,269

KODE	URAIAN PARAMETER	KESIMPULAN AKHIR (HASIL PK)	BOBOT	NILAI
	Pimpinan organisasi/penanggungjawab program dan kegiatan/penanggungjawab operasional mengevaluasi secara berkala pengendalian intern yang telah dilakukan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.	3,500		
	Proses manajemen risiko telah direviu	3,750		
	Pemantauan/monitoring terhadap risiko telah dilakukan	3,500		
5.2	Evaluasi Terpisah	4,000	0,075	0,300
	Evaluasi terpisah dilakukan oleh pegawai dengan keahlian tertentu yang disyaratkan dan dapat melibatkan APIP atau auditor eksternal untuk menilai kinerja sistem pengendalian intern, mengidentifikasi kelemahan pengendalian, menentukan penyebab dari kegagalan aktivitas pengendalian, serta pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan instansi.	3,750		
	Terdapat reviu independen terhadap proses manajemen risiko	4,250		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT				3,683



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sutrisno Subagyo

**HASIL PENJAMINAN KUALITAS
 ATAS PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SPIP TAHUN 2025
 KOMPONEN STRUKTUR DAN PROSES
 (EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENCAPAIAN TUJUAN ORGANISASI (T1))**

**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 KELAUTAN DAN PERIKANAN**

KODE	URAIAN PARAMETER	KESIMPULAN AKHIR (HASIL PK)	BOBOT	NILAI
1.1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	4,188	0,038	0,157
	Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi	4,250		
1.2	Komitmen terhadap Kompetensi	4,000	0,038	0,150
	Tugas dan jabatan dalam organisasi dilaksanakan dan diisi oleh SDM yang kompeten	4,000		
1.3	Kepemimpinan yang Kondusif	3,875	0,038	0,145
	Pimpinan organisasi menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk pencapaian tujuan organisasi.	3,750		
	Pimpinan Instansi Pemerintah mengalokasikan sumber daya untuk penerapan manajemen risiko.	3,750		
	Pimpinan Instansi Pemerintah menggunakan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan	4,000		
	Pimpinan Instansi Pemerintah mendorong penerapan manajemen risiko, melalui Penggunaan kinerja penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja	4,000		
1.4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	4,250	0,038	0,159

KODE	URAIAN PARAMETER	KESIMPULAN AKHIR (HASIL PK)	BOBOT	NILAI
	Struktur organisasi dibentuk dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi. Struktur organisasi dibentuk dalam rangka mendukung pencapaian keandalan laporan keuangan Struktur organisasi dibentuk dalam rangka mendukung pencapaian keamanan aset Dalam Struktur organisasi terdapat unit yang melaksanakan fungsi kepatuhan internal.	4,250		0,000
1.5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	3,750	0,038	0,141
	Wewenang dan tanggung jawab diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai tingkatannya untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dalam rangka percepatan pencapaian tujuan organisasi. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab memperhatikan benturan kepentingan	3,750		
1.6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	3,417	0,038	0,128
	Penerapan kebijakan manajemen dan praktik pembinaan SDM sehingga dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi	3,750		
	Pegawai telah mendapatkan fasilitas untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko	3,500		
	Pegawai memiliki kesadaran terkait manajemen risiko	3,000		
1.7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	3,000	0,038	0,113
	Pengawasan APIP telah dapat memberikan nilai tambah pada perbaikan pengendalian organisasi	3,000		0,000
1.8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	3,750	0,038	0,141

KODE	URAIAN PARAMETER	KESIMPULAN AKHIR (HASIL PK)	BOBOT	NILAI
	Pimpinan organisasi menjalin hubungan kerja yang baik (kemitraan) dengan instansi lain terkait dengan upaya pencapaian tujuan organisasi.	4,000		
	Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang baik, instansi Pemerintah telah mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko (termasuk implikasi dari transfer risiko) terkait kemitraan	3,500		
2.1	Identifikasi Risiko	3,750	0,100	0,375
	Pemerintah Daerah telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko.	3,250		
	Risiko telah teridentifikasi dan dituangkan dalam register risiko	4,000		
	Proses manajemen risiko telah melekat pada proses bisnis Instansi Pemerintah	4,000		
2.2	Analisis Risiko	3,550	0,100	0,355
	Seluruh risiko telah dianalisis dampak dan tingkat keterjadiannya	3,750		
	Instansi pemerintah telah menentukan prioritas risiko	3,750		
	Instansi Pemerintah telah menentukan rencana tindak pengendalian	3,750		
	Tindak pengendalian telah diimplementasikan	3,250		
	Tindak pengendalian efektif menurunkan risiko	3,250		
3.1	Reviu atas Kinerja	3,500	0,023	0,080
	Pimpinan organisasi membandingkan tolok ukur kinerja dengan capaian kinerja secara berkala untuk mengatasi hambatan kinerja, menetapkan strategi perbaikan, dan menilai kinerja suatu unit sampai dengan periode tertentu dalam rangka mengawal pencapaian tujuan organisasi.	3,500		0,000
3.2	Pembinaan SDM	3,250	0,023	0,074
	Pembinaan SDM dilakukan sehingga setiap pegawai dapat memberikan manfaat optimal dalam pencapaian tujuan organisasi	3,250		
3.3	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	3,500	0,023	0,080

KODE	URAIAN PARAMETER	KESIMPULAN AKHIR (HASIL PK)	BOBOT	NILAI
	Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dilakukan untuk memastikan sistem informasi dapat menyajikan data yang akurat dan tepat waktu untuk digunakan oleh pengguna.	3,500		
3.4	Pengendalian Fisik atas Aset	3,500	0,023	0,080
	Pengelolaan BMN/D dilakukan untuk menjamin aset tersedia dan dapat digunakan dengan baik oleh pengguna dalam rangka mendukung kinerja organisasi.	3,500		0,000
3.5	Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja	3,250	0,023	0,074
	Kegiatan pengendalian atas penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja dilakukan untuk menjamin keandalan ukuran dan ketepatan penetapan indikator masing-masing unit secara berjenjang dibandingkan dengan IKU organisasi.	3,250		0,000
3.6	Pemisahan Fungsi	3,250	0,023	0,074
	Terdapat pemisahan fungsi sehingga seluruh aspek utama transaksi dan kejadian tidak dikendalikan hanya oleh satu orang	3,250		
3.6	Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting	3,500	0,023	0,080
	Terdapat proses untuk memastikan transaksi dan kejadian penting hanya dapat diotorisasi ketika memenuhi persyaratan dan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan	3,500		
3.6	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian	3,500	0,023	0,080
	Terdapat proses untuk memastikan transaksi telah diklasifikasikan dengan layak dan dikelompokkan dengan benar serta dicatat dengan segera sehingga relevan, bernilai, dan berguna bagi manajemen	3,500		
3.6	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya	3,250	0,023	0,074

KODE	URAIAN PARAMETER	KESIMPULAN AKHIR (HASIL PK)	BOBOT	NILAI
	Terdapat pembatasan atas kesempatan dan hak untuk menggunakan, atau memperoleh sumber daya dan mengakses pencatatannya	3,250		
3.6	Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya	3,500	0,023	0,080
	Terdapat pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi dalam mengelola sumber daya yang diberikan/dikuasakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi	3,500		0,000
3.6	Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting	3,750	0,023	0,085
	Terdapat pengelolaan, pemeliharaan, dan pendokumentasian secara berkala yang mencakup seluruh SPI serta transaksi dan kejadian penting yang dilaksanakan secara lengkap dan akurat untuk memfasilitasi penelusuran transaksi, kejadian, dan informasi terkait	3,750		
4.1	Informasi yang Relevan	3,925	0,050	0,196
	Tersedianya informasi yang relevan untuk kebutuhan internal dan eksternal.	3,500		
	Pimpinan Instansi Pemerintah membangun sistem pengaduan	4,250		
	Strategi dan kebijakan manajemen risiko telah dikomunikasikan.	4,500		
	Register risiko dan rencana tindak pengendalian telah dikomunikasikan ke pihak terkait	3,500		
4.2	Komunikasi yang Efektif	3,500	0,050	0,175
	Terlaksananya komunikasi yang efektif dengan internal dan eksternal	3,500		
5.1	Pemantauan Berkelanjutan	3,667	0,075	0,275
	Pimpinan organisasi/penanggungjawab program dan kegiatan/penanggungjawab operasional mengevaluasi secara berkala pengendalian intern yang telah	3,500		

KODE	URAIAN PARAMETER	KESIMPULAN AKHIR (HASIL PK)	BOBOT	NILAI
	dilakukan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.			
	Proses manajemen risiko telah direviu	3,750		
	Pemantauan/monitoring terhadap risiko telah dilakukan	3,750		
5.2	Evaluasi Terpisah	4,000	0,075	0,300
	Evaluasi terpisah dilakukan oleh pegawai dengan keahlian tertentu yang disyaratkan dan dapat melibatkan APIP atau auditor eksternal untuk menilai kinerja sistem pengendalian intern, mengidentifikasi kelemahan pengendalian, menentukan penyebab dari kegagalan aktivitas pengendalian, serta pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan instansi.	3,750		
	Terdapat reviu independen terhadap proses manajemen risiko	4,250		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN				3,668



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sutrisno Subagyo

Lampiran X

Nomor : 3447/SJ.2/TU.210/XII/2025

Tanggal : 30 Desember 2025

**HASIL PENJAMINAN KUALITAS
 ATAS PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SPIP TAHUN 2025
 KOMPONEN STRUKTUR DAN PROSES
 (EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENCAPAIAN TUJUAN ORGANISASI (T1))**

**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
 HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

KODE	URAIAN PARAMETER	KESIMPULAN AKHIR (HASIL PK)	BOBOT	NILAI
1.1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	4,438	0,038	0,166
	Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi	4,500		
1.2	Komitmen terhadap Kompetensi	4,000	0,038	0,150
	Tugas dan jabatan dalam organisasi dilaksanakan dan diisi oleh SDM yang kompeten	4,000		
1.3	Kepemimpinan yang Kondusif	4,063	0,038	0,152
	Pimpinan organisasi menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk pencapaian tujuan organisasi.	4,250		
	Pimpinan Instansi Pemerintah mengalokasikan sumber daya untuk penerapan manajemen risiko.	4,000		
	Pimpinan Instansi Pemerintah menggunakan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan	4,000		
	Pimpinan Instansi Pemerintah mendorong penerapan manajemen risiko, melalui Penggunaan kinerja penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja	4,000		
1.4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	4,500	0,038	0,169

KODE	URAIAN PARAMETER	KESIMPULAN AKHIR (HASIL PK)	BOBOT	NILAI
	Struktur organisasi dibentuk dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi. Struktur organisasi dibentuk dalam rangka mendukung pencapaian keandalan laporan keuangan Struktur organisasi dibentuk dalam rangka mendukung pencapaian keamanan aset Dalam Struktur organisasi terdapat unit yang melaksanakan fungsi kepatuhan internal.	4,500		0,000
1.5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	4,000	0,038	0,150
	Wewenang dan tanggung jawab diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai tingkatannya untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dalam rangka percepatan pencapaian tujuan organisasi. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab memperhatikan benturan kepentingan	4,000		
1.6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	3,583	0,038	0,134
	Penerapan kebijakan manajemen dan praktik pembinaan SDM sehingga dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi	4,000		
	Pegawai telah mendapatkan fasilitas untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko	3,500		
	Pegawai memiliki kesadaran terkait manajemen risiko	3,250		
1.7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	3,000	0,038	0,113
	Pengawasan APIP telah dapat memberikan nilai tambah pada perbaikan pengendalian organisasi	3,000		0,000
1.8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	3,875	0,038	0,145

KODE	URAIAN PARAMETER	KESIMPULAN AKHIR (HASIL PK)	BOBOT	NILAI
	Pimpinan organisasi menjalin hubungan kerja yang baik (kemitraan) dengan instansi lain terkait dengan upaya pencapaian tujuan organisasi.	4,250		
	Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang baik, instansi Pemerintah telah mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko (termasuk implikasi dari transfer risiko) terkait kemitraan	3,500		
2.1	Identifikasi Risiko	3,917	0,100	0,392
	Pemerintah Daerah telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko.	3,750		
	Risiko telah teridentifikasi dan dituangkan dalam register risiko	4,000		
	Proses manajemen risiko telah melekat pada proses bisnis Instansi Pemerintah	4,000		
2.2	Analisis Risiko	3,800	0,100	0,380
	Seluruh risiko telah dianalisis dampak dan tingkat keterjadiannya	4,000		
	Instansi pemerintah telah menentukan prioritas risiko	4,000		
	Instansi Pemerintah telah menentukan rencana tindak pengendalian	4,000		
	Tindak pengendalian telah diimplementasikan	3,500		
	Tindak pengendalian efektif menurunkan risiko	3,500		
3.1	Reviu atas Kinerja	3,500	0,023	0,080
	Pimpinan organisasi membandingkan tolok ukur kinerja dengan capaian kinerja secara berkala untuk mengatasi hambatan kinerja, menetapkan strategi perbaikan, dan menilai kinerja suatu unit sampai dengan periode tertentu dalam rangka mengawal pencapaian tujuan organisasi.	3,500		0,000
3.2	Pembinaan SDM	3,250	0,023	0,074
	Pembinaan SDM dilakukan sehingga setiap pegawai dapat memberikan manfaat optimal dalam pencapaian tujuan organisasi	3,250		

KODE	URAIAN PARAMETER	KESIMPULAN AKHIR (HASIL PK)	BOBOT	NILAI
3.3	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	3,500	0,023	0,080
	Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dilakukan untuk memastikan sistem informasi dapat menyajikan data yang akurat dan tepat waktu untuk digunakan oleh pengguna.	3,500		
3.4	Pengendalian Fisik atas Aset	3,500	0,023	0,080
	Pengelolaan BMN/D dilakukan untuk menjamin aset tersedia dan dapat digunakan dengan baik oleh pengguna dalam rangka mendukung kinerja organisasi.	3,500		0,000
3.5	Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja	3,500	0,023	0,080
	Kegiatan pengendalian atas penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja dilakukan untuk menjamin keandalan ukuran dan ketepatan penetapan indikator masing-masing unit secara berjenjang dibandingkan dengan IKU organisasi.	3,500		0,000
3.6	Pemisahan Fungsi	3,250	0,023	0,074
	Terdapat pemisahan fungsi sehingga seluruh aspek utama transaksi dan kejadian tidak dikendalikan hanya oleh satu orang	3,250		
3.6	Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting	3,250	0,023	0,074
	Terdapat proses untuk memastikan transaksi dan kejadian penting hanya dapat diotorisasi ketika memenuhi persyaratan dan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan	3,250		
3.6	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian	3,500	0,023	0,080
	Terdapat proses untuk memastikan transaksi telah diklasifikasikan dengan layak dan dikelompokkan dengan benar serta dicatat dengan segera sehingga relevan, bernilai, dan berguna bagi manajemen	3,500		

KODE	URAIAN PARAMETER	KESIMPULAN AKHIR (HASIL PK)	BOBOT	NILAI
3.6	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya	3,250	0,023	0,074
	Terdapat pembatasan atas kesempatan dan hak untuk menggunakan, atau memperoleh sumber daya dan mengakses pencatatannya	3,250		
3.6	Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya	3,250	0,023	0,074
	Terdapat pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi dalam mengelola sumber daya yang diberikan/dikuasakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi	3,250		0,000
3.6	Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting	3,500	0,023	0,080
	Terdapat pengelolaan, pemeliharaan, dan pendokumentasian secara berkala yang mencakup seluruh SPI serta transaksi dan kejadian penting yang dilaksanakan secara lengkap dan akurat untuk memfasilitasi penelusuran transaksi, kejadian, dan informasi terkait	3,500		
4.1	Informasi yang Relevan	3,988	0,050	0,199
	Tersedianya informasi yang relevan untuk kebutuhan internal dan eksternal.	3,500		
	Pimpinan Instansi Pemerintah membangun sistem pengaduan	4,500		
	Strategi dan kebijakan manajemen risiko telah dikomunikasikan.	4,500		
	Register risiko dan rencana tindak pengendalian telah dikomunikasikan ke pihak terkait	3,500		
4.2	Komunikasi yang Efektif	3,500	0,050	0,175
	Terlaksananya komunikasi yang efektif dengan internal dan eksternal	3,500		
5.1	Pemantauan Berkelanjutan	3,667	0,075	0,275
	Pimpinan organisasi/penanggungjawab program dan kegiatan/penanggungjawab operasional mengevaluasi secara berkala pengendalian intern yang telah dilakukan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.	3,500		
	Proses manajemen risiko telah direviu	3,750		

KODE	URAIAN PARAMETER	KESIMPULAN AKHIR (HASIL PK)	BOBOT	NILAI
	Pemantauan/monitoring terhadap risiko telah dilakukan	3,750		
5.2	Evaluasi Terpisah	4,000	0,075	0,300
	Evaluasi terpisah dilakukan oleh pegawai dengan keahlian tertentu yang disyaratkan dan dapat melibatkan APIP atau auditor eksternal untuk menilai kinerja sistem pengendalian intern, mengidentifikasi kelemahan pengendalian, menentukan penyebab dari kegagalan aktivitas pengendalian, serta pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan instansi.	3,750		
	Terdapat revidi independen terhadap proses manajemen risiko	4,250		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN				3,747



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sutrisno Subagyo

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 111/SJ.2/RC.610/II/2026

Yth. : 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal
3. Para Plt. Sekretaris Badan
4. Kepala Biro Perencanaan
5. Kepala Biro Umum
6. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
7. Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Dari : Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Lampiran : Satu berkas

Hal : Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester II Tahun 2025

Tanggal : 10 Januari 2026

Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor 3953/SJ.1/RC.610/XII/2025 hal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Mandatory Tahun 2025, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penarikan data capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Semester II tahun 2025 berdasarkan aplikasi OMSPAN yang dilakukan pada tanggal 10 Januari 2025 pukul 11.30 WIB.
2. Capaian IKU IKPA KKP Semester II tahun 2025 sebesar 90,31 dari target nilai 92.
3. Terlampir kami sampaikan data capaian IKU IKPA level 0 (KKP), level 1 (Unit Eselon I) dan level 2 (Satker). Data tersebut dapat digunakan sebagai penetapan capaian nilai IKU IKPA Semester II tahun 2025 pada Unit Eselon I dan Satker di lingkungan KKP.

Mengingat pentingnya Nota Dinas ini, kami mohon bantuan Saudara untuk dapat menyampaikan Nota Dinas capaian IKPA ini kepada seluruh Satker lingkup Unit Kerja masing-masing.

Dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, Biro Keuangan dan BMN berkomitmen menjaga profesionalitas dan memberi pelayanan secara **Smart**, **Akuntabel**, **Integritas**, **Loyalitas**, dan **Sinergi** (SAILS).

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sutrisno Subagyo

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Para Inspektur Jenderal



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	012	032	109131	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	70.00	70%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
2	123	032	238741	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
3	034	032	427670	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
4	023	032	403830	BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00	80%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
5	039	032	249169	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00	80%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

6	132	032	633693	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.84	100.00	99.98	100%	0.00	99.98
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.98	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.96				100.00				
7	132	032	403827	BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	99.67	100.00	79.97	80%	0.00	99.96
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	9.97	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.83				100.00				
8	030	032	403834	LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	98.67	100.00	79.87	80%	0.00	99.83
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	9.87	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.33				100.00				
9	014	032	403823	BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.18	100.00	99.72	100%	0.00	99.72
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.72	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.29				100.00				
10	039	032	649551	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KUPANG	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	97.68	100.00	79.77	80%	0.00	99.71
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	9.77	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.84				100.00				
11	100	032	238762	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	96.95	100.00	99.69	100%	0.00	99.69
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.69	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.24				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

12	175	032	403822	BALAI RISET PERIKANAN LAUT	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	96.51	100.00	99.65	100%	0.00	99.65
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.65	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.13				100.00				
13	021	032	403832	BALAI RISET PEMULIAAN IKAN	Nilai	100.00	100.00	98.88	0.00	0.00	98.18	100.00	79.59	80%	0.00	99.49
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.78	0.00	0.00	9.82	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.53				100.00				
14	175	032	403836	BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	100.00	98.93	100.00	100.00	95.65	100.00	99.35	100%	0.00	99.35
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.79	10.00	10.00	9.57	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.65				100.00				
15	136	032	567680	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR	Nilai	100.00	94.20	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	89.13	90%	0.00	99.03
					Bobot	10	15	20	0	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.13	20.00	0.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	97.10		100.00				100.00				
16	001	032	649589	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ACEH	Nilai	100.00	94.66	100.00	0.00	0.00	99.94	100.00	79.19	80%	0.00	98.99
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.20	20.00	0.00	0.00	9.99	25.00				
					Nilai Aspek	97.33		99.97				100.00				
17	094	032	239235	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	Nilai	100.00	92.84	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.93	100%	0.00	98.93
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.93	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.42		100.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

18	180	032	403833	LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	91.43	100.00	79.14	80%	0.00	98.93
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	9.14	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		95.72				100.00				
19	106	032	560401	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	Nilai	100.00	92.71	99.61	100.00	100.00	100.00	100.00	98.83	100%	0.00	98.83
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.91	19.92	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.36		99.90				100.00				
20	055	032	403839	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE	Nilai	100.00	91.98	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.80	100%	0.00	98.80
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.80	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	95.99		100.00				100.00				
21	062	032	427661	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	Nilai	100.00	91.88	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.78	100%	0.00	98.78
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.78	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	95.94		100.00				100.00				
22	050	032	310719	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG	Nilai	100.00	94.07	100.00	100.00	100.00	96.42	100.00	98.75	100%	0.00	98.75
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.11	20.00	10.00	10.00	9.64	25.00				
					Nilai Aspek	97.04		99.10				100.00				
23	015	032	239214	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT	Nilai	100.00	100.00	100.00	93.33	100.00	94.16	100.00	98.75	100%	0.00	98.75
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	9.33	10.00	9.42	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		96.87				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

24	062	032	649767	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TERNATE	Nilai	100.00	94.55	99.03	0.00	0.00	98.88	100.00	78.88	80%	0.00	98.60
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.18	19.81	0.00	0.00	9.89	25.00				
					Nilai Aspek	97.28		98.96				100.00				
25	008	032	477456	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	Nilai	100.00	100.00	100.00	86.00	100.00	100.00	100.00	98.60	100%	0.00	98.60
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	8.60	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		96.50				100.00				
26	175	032	403835	BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	94.39	100.00	100.00	100.00	94.07	100.00	98.57	100%	0.00	98.57
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.16	20.00	10.00	10.00	9.41	25.00				
					Nilai Aspek	97.20		98.52				100.00				
27	072	032	239171	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	Nilai	100.00	91.12	100.00	100.00	100.00	98.22	100.00	98.49	100%	0.00	98.49
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.67	20.00	10.00	10.00	9.82	25.00				
					Nilai Aspek	95.56		99.55				100.00				
28	136	032	403828	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN	Nilai	100.00	91.48	100.00	100.00	100.00	97.43	100.00	98.46	100%	0.00	98.46
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.72	20.00	10.00	10.00	9.74	25.00				
					Nilai Aspek	95.74		99.36				100.00				
29	045	032	649593	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANJARMASIN	Nilai	100.00	92.75	97.28	100.00	100.00	99.88	100.00	98.36	100%	0.00	98.36
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.91	19.46	10.00	10.00	9.99	25.00				
					Nilai Aspek	96.38		99.29				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

30	134	032	649661	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEMARANG	Nilai	100.00	92.85	99.20	100.00	100.00	95.64	100.00	98.33	100%	0.00	98.33
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.93	19.84	10.00	10.00	9.56	25.00				
					Nilai Aspek	96.43		98.71				100.00				
31	012	032	649636	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAMBI	Nilai	100.00	92.54	100.00	93.33	100.00	99.38	100.00	98.15	100%	0.00	98.15
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.88	20.00	9.33	10.00	9.94	25.00				
					Nilai Aspek	96.27		98.18				100.00				
32	010	032	499346	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	Nilai	100.00	92.84	100.00	100.00	100.00	92.12	100.00	98.14	100%	0.00	98.14
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.93	20.00	10.00	10.00	9.21	25.00				
					Nilai Aspek	96.42		98.03				100.00				
33	045	032	567584	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN	Nilai	100.00	88.86	99.05	100.00	100.00	100.00	100.00	98.14	100%	0.00	98.14
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.33	19.81	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	94.43		99.76				100.00				
34	021	032	403824	BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN	Nilai	100.00	88.59	99.36	100.00	100.00	99.69	100.00	98.13	100%	0.00	98.13
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.29	19.87	10.00	10.00	9.97	25.00				
					Nilai Aspek	94.30		99.76				100.00				
35	025	032	403879	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN (POLTEK KP PANGANDARAN)	Nilai	100.00	89.74	100.00	100.00	100.00	96.63	100.00	98.12	100%	0.00	98.12
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.46	20.00	10.00	10.00	9.66	25.00				
					Nilai Aspek	94.87		99.16				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

36	137	032	567474	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM	Nilai	100.00	91.73	100.00	100.00	100.00	93.55	100.00	98.11	100%	0.00	98.11
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.76	20.00	10.00	10.00	9.36	25.00				
					Nilai Aspek	95.87		98.39				100.00				
37	123	032	427655	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	Nilai	100.00	87.68	100.00	100.00	100.00	99.56	100.00	98.11	100%	0.00	98.11
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.15	20.00	10.00	10.00	9.96	25.00				
					Nilai Aspek	93.84		99.89				100.00				
38	023	032	403829	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	Nilai	100.00	87.28	100.00	100.00	100.00	99.98	100.00	98.09	100%	0.00	98.09
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.09	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	93.64		99.99				100.00				
39	132	032	632004	BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	93.02	95.51	100.00	100.00	99.78	100.00	98.03	100%	0.00	98.03
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.95	19.10	10.00	10.00	9.98	25.00				
					Nilai Aspek	96.51		98.82				100.00				
40	061	032	622461	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	Nilai	100.00	91.78	99.87	100.00	100.00	92.64	100.00	98.01	100%	0.00	98.01
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.77	19.97	10.00	10.00	9.26	25.00				
					Nilai Aspek	95.89		98.13				100.00				
41	020	032	567800	BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG	Nilai	100.00	87.92	100.00	100.00	100.00	98.09	100.00	98.00	100%	0.00	98.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.19	20.00	10.00	10.00	9.81	25.00				
					Nilai Aspek	93.96		99.52				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

42	001	032	567385	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE	Nilai	100.00	88.38	100.00	0.00	100.00	99.14	100.00	88.17	90%	0.00	97.97
					Bobot	10	15	20	0	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.26	20.00	0.00	10.00	9.91	25.00				
					Nilai Aspek	94.19		99.71				100.00				
43	118	032	237373	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL	Nilai	100.00	86.28	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.94	100%	0.00	97.94
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.94	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	93.14		100.00				100.00				
44	154	032	445394	BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM	Nilai	100.00	86.14	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.92	100%	0.00	97.92
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.92	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	93.07		100.00				100.00				
45	179	032	238010	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	Nilai	100.00	88.24	99.27	100.00	100.00	98.11	100.00	97.90	100%	0.00	97.90
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.24	19.85	10.00	10.00	9.81	25.00				
					Nilai Aspek	94.12		99.35				100.00				
46	061	032	238755	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON	Nilai	100.00	94.96	100.00	100.00	100.00	85.62	100.00	97.81	100%	0.00	97.81
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.24	20.00	10.00	10.00	8.56	25.00				
					Nilai Aspek	97.48		96.40				100.00				
47	130	032	031665	STASIUN PSDKP CILACAP	Nilai	100.00	89.27	99.00	100.00	100.00	96.08	100.00	97.80	100%	0.00	97.80
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.39	19.80	10.00	10.00	9.61	25.00				
					Nilai Aspek	94.64		98.77				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

48	129	032	239192	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA	Nilai	100.00	91.04	98.68	0.00	100.00	100.00	100.00	58.66	60%	0.00	97.76
					Bobot	10	15	0	0	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.66	0.00	0.00	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	95.52		100.00				100.00				
49	179	032	538911	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU	Nilai	100.00	89.26	98.38	100.00	100.00	96.88	100.00	97.75	100%	0.00	97.75
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.39	19.68	10.00	10.00	9.69	25.00				
					Nilai Aspek	94.63		98.81				100.00				
50	021	032	653526	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SUKAMANDI	Nilai	100.00	84.78	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.72	100%	0.00	97.72
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.72	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	92.39		100.00				100.00				
51	120	032	403875	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI (POLTEK KP DUMAI)	Nilai	100.00	91.62	98.54	0.00	0.00	97.12	100.00	78.16	80%	0.00	97.70
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.74	19.71	0.00	0.00	9.71	25.00				
					Nilai Aspek	95.81		97.83				100.00				
52	017	032	652009	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH KOTA AGUNG LAMPUNG	Nilai	100.00	84.86	100.00	100.00	100.00	99.59	100.00	97.69	100%	0.00	97.69
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.73	20.00	10.00	10.00	9.96	25.00				
					Nilai Aspek	92.43		99.90				100.00				
53	038	032	567758	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MATARAM	Nilai	100.00	89.05	98.73	0.00	0.00	99.83	100.00	78.09	80%	0.00	97.61
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.36	19.75	0.00	0.00	9.98	25.00				
					Nilai Aspek	94.53		99.28				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

54	179	032	239260	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG	Nilai	100.00	87.71	100.00	0.00	0.00	99.26	100.00	78.08	80%	0.00	97.60
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.16	20.00	0.00	0.00	9.93	25.00				
					Nilai Aspek	93.86		99.63				100.00				
55	017	032	427706	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	Nilai	100.00	84.74	99.24	100.00	100.00	100.00	100.00	97.56	100%	0.00	97.56
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.71	19.85	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	92.37		99.81				100.00				
56	086	032	445393	BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPB) KARAWANG	Nilai	100.00	88.30	99.97	100.00	100.00	100.00	100.00	68.25	70%	0.00	97.49
					Bobot	10	15	0	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.25	0.00	10.00	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	94.15		100.00				100.00				
57	175	032	537611	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	Nilai	100.00	87.95	100.00	100.00	100.00	92.56	100.00	97.45	100%	0.00	97.45
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.19	20.00	10.00	10.00	9.26	25.00				
					Nilai Aspek	93.98		98.14				100.00				
58	179	032	440822	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG	Nilai	100.00	90.81	96.25	100.00	100.00	95.31	100.00	97.40	100%	0.00	97.40
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.62	19.25	10.00	10.00	9.53	25.00				
					Nilai Aspek	95.41		97.89				100.00				
59	103	032	352595	AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)	Nilai	100.00	86.78	98.46	100.00	100.00	97.36	99.45	97.31	100%	0.00	97.31
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.02	19.69	10.00	10.00	9.74	24.86				
					Nilai Aspek	93.39		98.96				99.45				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

60	175	032	622131	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	83.45	98.66	100.00	100.00	100.00	100.00	97.25	100%	0.00	97.25
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.52	19.73	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	91.73		99.67				100.00				
61	042	032	567538	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PONTIANAK	Nilai	100.00	87.84	98.92	0.00	0.00	97.84	100.00	77.74	80%	0.00	97.18
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.18	19.78	0.00	0.00	9.78	25.00				
					Nilai Aspek	93.92		98.38				100.00				
62	123	032	427567	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN I	Nilai	100.00	85.21	99.71	0.00	0.00	99.65	100.00	77.69	80%	0.00	97.11
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.78	19.94	0.00	0.00	9.96	25.00				
					Nilai Aspek	92.61		99.68				100.00				
63	061	032	567720	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	Nilai	100.00	85.87	99.59	100.00	100.00	91.92	100.00	96.99	100%	0.00	96.99
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.88	19.92	10.00	10.00	9.19	25.00				
					Nilai Aspek	92.94		97.88				100.00				
64	165	032	622035	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO	Nilai	100.00	85.34	97.45	100.00	100.00	0.00	100.00	67.80	70%	0.00	96.86
					Bobot	10	15	0	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.80	0.00	10.00	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	92.67		100.00				100.00				
65	132	032	440013	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA (POLTEK KP JEMBRANA)	Nilai	100.00	81.38	97.81	100.00	100.00	99.92	100.00	96.76	100%	0.00	96.76
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.21	19.56	10.00	10.00	9.99	25.00				
					Nilai Aspek	90.69		99.43				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

66	051	032	649601	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALU	Nilai	100.00	84.44	95.79	100.00	100.00	98.41	100.00	96.66	100%	0.00	96.66
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.67	19.16	10.00	10.00	9.84	25.00				
					Nilai Aspek	92.22		98.55				100.00				
67	014	032	567481	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALEMBANG	Nilai	100.00	81.84	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	77.28	80%	0.00	96.60
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.28	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	90.92		100.00				100.00				
68	137	032	427649	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BATAM	Nilai	100.00	87.66	98.00	0.00	0.00	100.00	97.96	77.24	80%	0.00	96.55
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.15	19.60	0.00	0.00	10.00	24.49				
					Nilai Aspek	93.83		99.00				97.96				
69	020	032	290145	LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG	Nilai	100.00	88.99	99.30	93.33	100.00	99.78	100.00	97.52	100%	1.00	96.52
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.35	19.86	9.33	10.00	9.98	25.00				
					Nilai Aspek	94.50		98.10				100.00				
70	015	032	649699	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PANGKAL PINANG	Nilai	100.00	77.98	100.00	100.00	100.00	98.18	100.00	96.52	100%	0.00	96.52
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.70	20.00	10.00	10.00	9.82	25.00				
					Nilai Aspek	88.99		99.55				100.00				
71	175	032	440816	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP JAKARTA	Nilai	100.00	81.35	98.40	100.00	100.00	96.14	100.00	96.50	100%	0.00	96.50
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.20	19.68	10.00	10.00	9.61	25.00				
					Nilai Aspek	90.68		98.64				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

72	103	032	403820	LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN	Nilai	100.00	77.28	99.49	100.00	100.00	100.00	100.00	96.49	100%	0.00	96.49
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.59	19.90	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	88.64		99.87				100.00				
73	061	032	649750	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON	Nilai	100.00	82.79	100.00	0.00	0.00	97.46	100.00	77.16	80%	0.00	96.46
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.42	20.00	0.00	0.00	9.75	25.00				
					Nilai Aspek	91.40		98.73				100.00				
74	038	032	567762	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	Nilai	100.00	81.48	98.61	100.00	100.00	95.15	100.00	96.46	100%	0.00	96.46
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.22	19.72	10.00	10.00	9.51	25.00				
					Nilai Aspek	90.74		98.44				100.00				
75	039	032	403838	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	Nilai	100.00	86.23	100.00	100.00	100.00	84.63	100.00	96.40	100%	0.00	96.40
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.93	20.00	10.00	10.00	8.46	25.00				
					Nilai Aspek	93.12		96.16				100.00				
76	010	032	531488	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	Nilai	100.00	93.49	100.00	82.00	100.00	91.70	100.00	96.39	100%	0.00	96.39
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.02	20.00	8.20	10.00	9.17	25.00				
					Nilai Aspek	96.75		93.43				100.00				
77	039	032	245160	STASIUN PSDKP KUPANG	Nilai	100.00	81.96	95.38	100.00	100.00	100.00	100.00	96.37	100%	0.00	96.37
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.29	19.08	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	90.98		98.85				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

78	093	032	239991	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	Nilai	100.00	87.56	100.00	88.00	100.00	93.71	100.00	96.31	100%	0.00	96.31
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.13	20.00	8.80	10.00	9.37	25.00				
					Nilai Aspek	93.78		95.43				100.00				
79	134	032	239150	BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN	Nilai	100.00	94.57	99.23	80.00	100.00	92.22	100.00	96.25	100%	0.00	96.25
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.19	19.85	8.00	10.00	9.22	25.00				
					Nilai Aspek	97.29		92.86				100.00				
80	048	032	649572	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN	Nilai	100.00	81.11	99.02	0.00	100.00	96.40	100.00	86.61	90%	0.00	96.23
					Bobot	10	15	20	0	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.17	19.80	0.00	10.00	9.64	25.00				
					Nilai Aspek	90.56		98.47				100.00				
81	037	032	225135	PANGKALAN PSDKP BENOA	Nilai	100.00	85.02	95.40	96.00	100.00	96.11	100.00	96.04	100%	0.00	96.04
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.75	19.08	9.60	10.00	9.61	25.00				
					Nilai Aspek	92.51		96.88				100.00				
82	010	032	567432	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PADANG	Nilai	100.00	78.62	98.69	0.00	100.00	97.45	100.00	86.28	90%	0.00	95.86
					Bobot	10	15	20	0	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.79	19.74	0.00	10.00	9.75	25.00				
					Nilai Aspek	89.31		98.71				100.00				
83	010	032	403817	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR	Nilai	100.00	82.52	97.22	100.00	100.00	90.29	100.00	95.85	100%	0.00	95.85
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.38	19.44	10.00	10.00	9.03	25.00				
					Nilai Aspek	91.26		96.88				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

84	042	032	477425	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	Nilai	100.00	82.26	100.00	93.33	100.00	91.14	100.00	95.79	100%	0.00	95.79
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.34	20.00	9.33	10.00	9.11	25.00				
					Nilai Aspek	91.13		96.12				100.00				
85	175	032	403821	PUSAT PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	93.07	84.98	100.00	100.00	97.78	100.00	95.73	100%	0.00	95.73
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.96	17.00	10.00	10.00	9.78	25.00				
					Nilai Aspek	96.54		95.69				100.00				
86	175	032	622081	BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA	Nilai	100.00	70.60	100.00	100.00	100.00	99.36	100.00	95.53	100%	0.00	95.53
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.59	20.00	10.00	10.00	9.94	25.00				
					Nilai Aspek	85.30		99.84				100.00				
87	073	032	427692	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	Nilai	100.00	69.39	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	95.41	100%	0.00	95.41
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.41	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	84.70		100.00				100.00				
88	083	032	170445	STASIUN PSDKP TAHUNA	Nilai	100.00	83.62	94.46	100.00	100.00	100.00	95.88	95.41	100%	0.00	95.41
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.54	18.89	10.00	10.00	10.00	23.97				
					Nilai Aspek	91.81		98.62				95.88				
89	061	032	427618	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAEHERU	Nilai	100.00	85.28	98.92	0.00	0.00	87.24	100.00	76.30	80%	0.00	95.38
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.79	19.78	0.00	0.00	8.72	25.00				
					Nilai Aspek	92.64		93.08				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

90	064	032	250263	STASIUN PSDKP BIAK	Nilai	100.00	78.93	92.78	100.00	100.00	99.56	100.00	95.35	100%	0.00	95.35
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.84	18.56	10.00	10.00	9.96	25.00				
					Nilai Aspek	89.47		98.08				100.00				
91	175	032	427511	POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN (POLTEK AUP) JAKARTA	Nilai	100.00	78.79	100.00	100.00	100.00	83.49	100.00	95.17	100%	0.00	95.17
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.82	20.00	10.00	10.00	8.35	25.00				
					Nilai Aspek	89.40		95.87				100.00				
92	061	032	215141	STASIUN PSDKP AMBON	Nilai	100.00	75.52	95.35	100.00	100.00	97.76	100.00	95.17	100%	0.00	95.17
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.33	19.07	10.00	10.00	9.78	25.00				
					Nilai Aspek	87.76		98.28				100.00				
93	012	032	237657	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM	Nilai	100.00	73.49	100.00	100.00	100.00	91.28	99.69	95.07	100%	0.00	95.07
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.02	20.00	10.00	10.00	9.13	24.92				
					Nilai Aspek	86.75		97.82				99.69				
94	165	032	427542	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA I	Nilai	100.00	100.00	100.00	50.00	100.00	99.17	100.00	94.92	100%	0.00	94.92
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	5.00	10.00	9.92	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		87.29				100.00				
95	042	032	440847	STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK	Nilai	100.00	78.97	93.88	100.00	100.00	89.61	100.00	94.58	100%	0.00	94.58
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.85	18.78	10.00	10.00	8.96	25.00				
					Nilai Aspek	89.49		95.87				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

96	136	032	427598	BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR	Nilai	100.00	77.86	99.48	80.00	100.00	100.00	100.00	94.58	100%	0.00	94.58
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.68	19.90	8.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	88.93		94.87				100.00				
97	030	032	049097	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA	Nilai	100.00	74.55	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	66.18	70%	0.00	94.55
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.18	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	87.28		100.00				100.00				
98	128	032	560393	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHAN RATU	Nilai	100.00	71.32	100.00	88.00	100.00	100.00	100.00	94.50	100%	0.00	94.50
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.70	20.00	8.80	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	85.66		97.00				100.00				
99	048	032	355105	STASIUN PSDKP TARAKAN	Nilai	100.00	79.65	99.91	100.00	100.00	98.23	90.67	94.42	100%	0.00	94.42
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.95	19.98	10.00	10.00	9.82	22.67				
					Nilai Aspek	89.83		99.54				90.67				
100	001	032	065135	PANGKALAN PSDKP LAMPULO	Nilai	100.00	80.39	91.65	100.00	100.00	88.38	100.00	94.23	100%	0.00	94.23
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.06	18.33	10.00	10.00	8.84	25.00				
					Nilai Aspek	90.20		95.01				100.00				
101	020	032	239146	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	Nilai	100.00	74.41	99.89	100.00	100.00	80.82	100.00	94.22	100%	0.00	94.22
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.16	19.98	10.00	10.00	8.08	25.00				
					Nilai Aspek	87.21		95.18				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

102	178	032	645691	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAMUJU	Nilai	100.00	71.92	100.00	0.00	0.00	95.78	100.00	75.37	80%	0.00	94.21
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.79	20.00	0.00	0.00	9.58	25.00				
					Nilai Aspek	85.96		97.89				100.00				
103	178	032	340150	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULAWESI BARAT	Nilai	100.00	72.73	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	65.91	70%	0.00	94.16
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.91	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	86.37		100.00				100.00				
104	137	032	325156	PANGKALAN PSDKP BATAM	Nilai	100.00	88.89	95.03	80.00	100.00	88.24	100.00	94.16	100%	0.00	94.16
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.33	19.01	8.00	10.00	8.82	25.00				
					Nilai Aspek	94.45		90.82				100.00				
105	037	032	477419	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	Nilai	100.00	85.45	86.22	93.33	100.00	97.18	100.00	94.11	100%	0.00	94.11
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.82	17.24	9.33	10.00	9.72	25.00				
					Nilai Aspek	92.73		94.18				100.00				
106	037	032	427624	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN DENPASAR	Nilai	100.00	74.12	98.73	93.33	92.31	95.95	100.00	94.02	100%	0.00	94.02
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.12	19.75	9.33	9.23	9.60	25.00				
					Nilai Aspek	87.06		95.08				100.00				
107	175	032	622098	INSPEKTORAT JENDERAL	Nilai	100.00	87.86	100.00	60.00	100.00	97.94	100.00	93.97	100%	0.00	93.97
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.18	20.00	6.00	10.00	9.79	25.00				
					Nilai Aspek	93.93		89.49				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

108	024	032	649732	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN CIREBON	Nilai	100.00	92.77	100.00	50.00	100.00	99.43	100.00	93.86	100%	0.00	93.86
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.92	20.00	5.00	10.00	9.94	25.00				
					Nilai Aspek	96.39		87.36				100.00				
109	001	032	427551	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG	Nilai	100.00	79.43	100.00	0.00	0.00	81.61	100.00	75.08	80%	0.00	93.84
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.91	20.00	0.00	0.00	8.16	25.00				
					Nilai Aspek	89.72		90.81				100.00				
110	068	032	649704	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAUKE	Nilai	100.00	79.44	100.00	0.00	0.00	80.22	100.00	74.94	80%	0.00	93.67
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.92	20.00	0.00	0.00	8.02	25.00				
					Nilai Aspek	89.72		90.11				100.00				
111	123	032	440831	STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN	Nilai	100.00	76.73	92.89	93.33	100.00	92.43	100.00	93.66	100%	0.00	93.66
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.51	18.58	9.33	10.00	9.24	25.00				
					Nilai Aspek	88.37		94.66				100.00				
112	084	032	440853	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL	Nilai	100.00	86.36	96.77	100.00	100.00	84.16	90.67	93.39	100%	0.00	93.39
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.95	19.35	10.00	10.00	8.42	22.67				
					Nilai Aspek	93.18		95.23				90.67				
113	030	032	649725	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YOGYAKARTA	Nilai	100.00	90.30	100.00	50.00	100.00	94.27	100.00	92.97	100%	0.00	92.97
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.55	20.00	5.00	10.00	9.43	25.00				
					Nilai Aspek	95.15		86.07				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

114	035	032	567350	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO	Nilai	100.00	100.00	99.67	50.00	100.00	96.54	100.00	65.00	70%	0.00	92.86
					Bobot	10	15	0	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	0.00	5.00	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
115	128	032	238734	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI	Nilai	100.00	56.25	100.00	100.00	100.00	92.58	100.00	92.70	100%	0.00	92.70
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.44	20.00	10.00	10.00	9.26	25.00				
					Nilai Aspek	78.13		98.15				100.00				
116	039	032	499352	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (BKKPN) KUPANG	Nilai	100.00	92.90	70.90	100.00	100.00	95.15	100.00	92.63	100%	0.00	92.63
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.94	14.18	10.00	10.00	9.52	25.00				
					Nilai Aspek	96.45		91.51				100.00				
117	037	032	403826	LOKA RISET PERIKANAN TUNA	Nilai	100.00	88.01	90.64	60.00	100.00	98.71	100.00	92.20	100%	0.00	92.20
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.20	18.13	6.00	10.00	9.87	25.00				
					Nilai Aspek	94.01		87.34				100.00				
118	175	032	427686	BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (BBP3KP)	Nilai	100.00	80.59	95.11	66.67	100.00	93.94	100.00	92.17	100%	0.00	92.17
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.09	19.02	6.67	10.00	9.39	25.00				
					Nilai Aspek	90.30		88.93				100.00				
119	118	032	239188	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL	Nilai	100.00	63.30	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	64.50	70%	0.00	92.14
					Bobot	10	15	0	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.50	0.00	10.00	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	81.65		100.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

120	043	032	649657	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALANGKARAYA	Nilai	100.00	84.20	97.42	50.00	100.00	100.00	100.00	92.11	100%	0.00	92.11
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.63	19.48	5.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	92.10		86.86				100.00				
121	010	032	427573	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN	Nilai	100.00	85.79	100.00	50.00	100.00	91.30	100.00	92.00	100%	0.00	92.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.87	20.00	5.00	10.00	9.13	25.00				
					Nilai Aspek	92.90		85.33				100.00				
122	175	032	662897	BALAI UJI STANDAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN	Nilai	100.00	75.67	99.61	50.00	100.00	100.00	100.00	91.27	100%	0.00	91.27
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.35	19.92	5.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	87.84		87.40				100.00				
123	050	032	649678	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN GORONTALO	Nilai	100.00	75.84	99.54	50.00	100.00	97.36	100.00	91.02	100%	0.00	91.02
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.38	19.91	5.00	10.00	9.74	25.00				
					Nilai Aspek	87.92		86.73				100.00				
124	175	032	449520	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	81.28	78.39	100.00	98.30	95.44	94.75	90.93	100%	0.00	90.93
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.19	15.68	10.00	9.83	9.54	23.69				
					Nilai Aspek	90.64		93.03				94.75				
125	017	032	649615	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG	Nilai	100.00	85.65	100.00	50.00	100.00	99.60	92.22	90.86	100%	0.00	90.86
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.85	20.00	5.00	10.00	9.96	23.06				
					Nilai Aspek	92.83		87.40				92.22				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

126	047	032	567610	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN	Nilai	100.00	87.54	100.00	50.00	100.00	77.19	100.00	90.85	100%	0.00	90.85
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.13	20.00	5.00	10.00	7.72	25.00				
					Nilai Aspek	93.77		81.80				100.00				
127	016	032	649622	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BENGKULU	Nilai	100.00	73.17	100.00	50.00	100.00	94.79	100.00	90.45	100%	0.00	90.45
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.98	20.00	5.00	10.00	9.48	25.00				
					Nilai Aspek	86.59		86.20				100.00				
128	020	032	649688	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAK	Nilai	100.00	81.45	98.15	50.00	100.00	94.29	100.00	91.28	100%	1.00	90.28
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.22	19.63	5.00	10.00	9.43	25.00				
					Nilai Aspek	90.73		85.61				100.00				
129	008	032	099325	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	Nilai	100.00	54.55	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	63.18	70%	0.00	90.26
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.18	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	77.28		100.00				100.00				
130	175	032	626402	SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	62.64	82.57	100.00	100.00	93.17	100.00	90.23	100%	0.00	90.23
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.40	16.51	10.00	10.00	9.32	25.00				
					Nilai Aspek	81.32		93.94				100.00				
131	175	032	649682	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II	Nilai	100.00	79.26	100.00	50.00	100.00	81.86	100.00	90.08	100%	0.00	90.08
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.89	20.00	5.00	10.00	8.19	25.00				
					Nilai Aspek	89.63		82.97				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

132	066	032	634146	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	Nilai	100.00	74.46	96.46	50.00	100.00	93.02	100.00	89.76	100%	0.00	89.76
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.17	19.29	5.00	10.00	9.30	25.00				
					Nilai Aspek	87.23		84.87				100.00				
133	136	032	477431	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR	Nilai	100.00	83.18	65.99	93.33	100.00	97.26	100.00	89.73	100%	0.00	89.73
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.48	13.20	9.33	10.00	9.73	25.00				
					Nilai Aspek	91.59		89.14				100.00				
134	175	032	440807	SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	78.64	86.67	82.00	98.08	74.10	100.00	89.55	100%	0.00	89.55
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.80	17.33	8.20	9.81	7.41	25.00				
					Nilai Aspek	89.32		85.21				100.00				
135	175	032	660056	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	76.50	95.75	0.00	0.00	0.00	93.00	44.73	50%	0.00	89.45
					Bobot	10	15	0	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	23.25				
					Nilai Aspek	88.25		95.75				93.00				
136	008	032	567453	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PEKANBARU	Nilai	100.00	66.20	99.37	50.00	100.00	95.96	100.00	89.40	100%	0.00	89.40
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.93	19.87	5.00	10.00	9.60	25.00				
					Nilai Aspek	83.10		86.33				100.00				
137	066	032	649711	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SORONG	Nilai	100.00	70.29	100.00	50.00	100.00	86.84	100.00	89.23	100%	0.00	89.23
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.54	20.00	5.00	10.00	8.68	25.00				
					Nilai Aspek	85.15		84.21				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

138	175	032	691629	PUSAT STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	78.53	61.97	100.00	100.00	100.00	100.00	89.17	100%	0.00	89.17
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.78	12.39	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	89.27			90.49			100.00				
139	060	032	567694	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KENDARI	Nilai	100.00	70.52	99.38	60.00	100.00	94.48	93.00	89.15	100%	0.00	89.15
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.58	19.88	6.00	10.00	9.45	23.25				
					Nilai Aspek	85.26			88.47			93.00				
140	107	032	239221	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	Nilai	100.00	65.67	100.00	50.00	100.00	92.57	100.00	89.11	100%	0.00	89.11
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.85	20.00	5.00	10.00	9.26	25.00				
					Nilai Aspek	82.84			85.64			100.00				
141	086	032	403837	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG	Nilai	100.00	70.82	72.20	100.00	100.00	98.89	100.00	89.95	100%	1.00	88.95
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.62	14.44	10.00	10.00	9.89	25.00				
					Nilai Aspek	85.41			92.77			100.00				
142	063	032	567812	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAYAPURA	Nilai	100.00	73.29	96.94	50.00	100.00	84.86	100.00	88.87	100%	0.00	88.87
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.99	19.39	5.00	10.00	8.49	25.00				
					Nilai Aspek	86.65			82.95			100.00				
143	049	032	567631	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MANADO	Nilai	100.00	93.04	99.66	0.00	0.00	99.28	68.89	71.04	80%	0.00	88.80
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.96	19.93	0.00	0.00	9.93	17.22				
					Nilai Aspek	96.52			99.47			68.89				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

144	130	032	518117	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	Nilai	100.00	100.00	35.27	87.00	100.00	99.28	100.00	85.68	100%	0.00	85.68
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	7.05	8.70	10.00	9.93	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		80.39				100.00				
145	049	032	179113	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI SULAWESI UTARA	Nilai	100.00	30.86	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	59.63	70%	0.00	85.18
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.63	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	65.43		100.00				100.00				
146	084	032	622475	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL	Nilai	100.00	71.73	99.96	93.33	100.00	81.07	67.70	85.12	100%	0.00	85.12
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.76	19.99	9.33	10.00	8.11	16.92				
					Nilai Aspek	85.87		93.59				67.70				
147	179	032	633707	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	Nilai	100.00	94.26	38.97	90.00	100.00	91.67	100.00	85.10	100%	0.00	85.10
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.14	7.79	9.00	10.00	9.17	25.00				
					Nilai Aspek	97.13		80.16				100.00				
148	060	032	537695	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	Nilai	100.00	76.64	54.66	86.00	100.00	88.68	100.00	84.90	100%	0.00	84.90
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.50	10.93	8.60	10.00	8.87	25.00				
					Nilai Aspek	88.32		82.33				100.00				
149	060	032	209117	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGERA	Nilai	100.00	28.92	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	59.34	70%	0.00	84.77
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.34	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	64.46		100.00				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

150	009	032	329087	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Nilai	100.00	28.84	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	59.33	70%	0.00	84.75
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.33	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	64.42		100.00				100.00				
151	136	032	199137	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	Nilai	100.00	28.36	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	59.25	70%	0.00	84.65
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.25	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	64.18		100.00				100.00				
152	020	032	299391	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	Nilai	100.00	27.89	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	59.18	70%	0.00	84.55
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.18	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	63.95		100.00				100.00				
153	024	032	622482	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	Nilai	100.00	76.37	41.75	100.00	100.00	97.01	100.00	84.51	100%	0.00	84.51
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.46	8.35	10.00	10.00	9.70	25.00				
					Nilai Aspek	88.19		84.69				100.00				
154	175	032	632462	SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai	80.00	55.39	78.45	88.80	100.00	85.54	100.00	84.43	100%	0.00	84.43
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	8.00	8.31	15.69	8.88	10.00	8.55	25.00				
					Nilai Aspek	67.70		88.20				100.00				
155	038	032	239138	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	Nilai	100.00	27.27	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	59.09	70%	0.00	84.42
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.09	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	63.64		100.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

156	061	032	219098	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU	Nilai	100.00	27.27	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	59.09	70%	0.00	84.42
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.09	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	63.64		100.00				100.00				
157	042	032	427582	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PONTIANAK	Nilai	100.00	62.21	64.61	60.00	100.00	99.81	100.00	83.23	100%	0.00	83.23
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.33	12.92	6.00	10.00	9.98	25.00				
					Nilai Aspek	81.11		81.10				100.00				
158	175	032	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	Nilai	80.00	55.08	64.34	84.00	100.00	93.28	100.00	81.86	100%	0.00	81.86
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	8.00	8.26	12.87	8.40	10.00	9.33	25.00				
					Nilai Aspek	67.54		85.40				100.00				
159	066	032	427630	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH SORONG	Nilai	100.00	54.47	57.19	50.00	100.00	100.00	100.00	79.61	100%	0.00	79.61
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.17	11.44	5.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	77.24		76.80				100.00				
160	175	032	238720	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	Nilai	100.00	53.74	71.34	93.33	99.64	97.24	68.07	78.37	100%	0.00	78.37
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.06	14.27	9.33	9.96	9.72	17.02				
					Nilai Aspek	76.87		90.39				68.07				
161	043	032	149124	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Nilai	100.00	30.96	75.00	0.00	0.00	0.00	100.00	54.64	70%	0.00	78.06
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.64	15.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	65.48		75.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

162	066	032	477440	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	Nilai	100.00	62.43	54.97	63.33	100.00	63.47	100.00	78.04	100%	0.00	78.04
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.36	10.99	6.33	10.00	6.35	25.00				
					Nilai Aspek	81.22		70.44				100.00				
163	014	032	119114	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	Nilai	100.00	28.14	75.00	0.00	0.00	0.00	100.00	54.22	70%	0.00	77.46
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.22	15.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	64.07		75.00				100.00				
164	095	032	029172	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT	Nilai	100.00	27.67	75.00	0.00	0.00	0.00	100.00	54.15	70%	0.00	77.36
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.15	15.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	63.84		75.00				100.00				
165	042	032	139138	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Nilai	100.00	29.59	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	49.44	70%	0.00	70.63
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.44	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	64.80		50.00				100.00				
166	134	032	039163	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai	100.00	75.95	100.00	0.00	0.00	0.00	30.00	48.89	70%	0.00	69.85
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.39	20.00	0.00	0.00	0.00	7.50				
					Nilai Aspek	87.98		100.00				30.00				
167	175	032	019062	DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	Nilai	100.00	27.27	100.00	0.00	0.00	0.00	30.00	41.59	70%	0.00	59.42
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.09	20.00	0.00	0.00	0.00	7.50				
					Nilai Aspek	63.64		100.00				30.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

168	037	032	229110	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	Nilai	100.00	75.72	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.36	70%	0.00	59.08
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.36	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	87.86		100.00				0.00				
169	051	032	189143	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	Nilai	100.00	47.81	75.00	0.00	0.00	0.00	30.00	39.67	70%	0.00	56.67
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.17	15.00	0.00	0.00	0.00	7.50				
					Nilai Aspek	73.91		75.00				30.00				
170	010	032	089143	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Nilai	100.00	28.98	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.35	70%	0.00	49.07
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.35	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	64.49		100.00				0.00				
171	017	032	129123	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	Nilai	100.00	28.33	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.25	70%	0.00	48.93
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.25	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	64.17		100.00				0.00				
172	015	032	309170	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Nilai	100.00	27.27	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.09	70%	0.00	48.70
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.09	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	63.64		100.00				0.00				
173	135	032	059190	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	Nilai	100.00	27.27	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.09	70%	0.00	48.70
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.09	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	63.64		100.00				0.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

174	123	032	079136	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	Nilai	100.00	36.36	25.00	0.00	0.00	0.00	30.00	27.95	70%	0.00	39.93
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.45	5.00	0.00	0.00	0.00	7.50				
					Nilai Aspek	68.18		25.00				30.00				



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode ES1	Nama ES1	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	03206	DITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	85.91	97.29	100.00	100.00	99.60	100.00	97.30	100%	0.00	97.30
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	12.89	19.46	10.00	10.00	9.96	25.00				
			Nilai Aspek	92.96		99.22				100.00				
2	03212	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	88.95	95.26	100.00	100.00	96.30	100.00	97.02	100%	0.50	96.52
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	13.34	19.05	10.00	10.00	9.63	25.00				
			Nilai Aspek	94.48		97.89				100.00				
3	03201	SEKRETARIAT JENDERAL	Nilai	100.00	70.82	100.00	100.00	100.00	99.57	100.00	95.58	100%	0.00	95.58
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	10.62	20.00	10.00	10.00	9.96	25.00				
			Nilai Aspek	85.41		99.89				100.00				
4	03213	BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	84.35	98.96	82.80	98.98	95.15	100.00	95.14	100%	0.50	94.64
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	12.65	19.79	8.28	9.90	9.51	25.00				
			Nilai Aspek	92.18		93.97				100.00				
5	03202	INSPEKTORAT JENDERAL	Nilai	100.00	87.86	98.04	60.00	100.00	97.94	100.00	93.58	100%	0.00	93.58
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	13.18	19.61	6.00	10.00	9.79	25.00				
			Nilai Aspek	93.93		89.00				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

6	03205	DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	85.36	82.22	97.48	99.62	94.93	100.00	93.45	100%	0.00	93.45
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	12.80	16.44	9.75	9.96	9.49	25.00				
			Nilai Aspek	92.68		93.56				100.00				
7	03204	DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai	98.46	60.52	85.06	88.13	100.00	98.21	100.00	89.57	100%	0.00	89.57
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	9.85	9.08	17.01	8.81	10.00	9.82	25.00				
			Nilai Aspek	79.49		92.85				100.00				
8	03203	DITJEN PERIKANAN TANGKAP	Nilai	100.00	63.26	72.22	90.48	99.96	98.06	90.87	85.50	100%	0.00	85.50
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	9.49	14.44	9.05	10.00	9.81	22.72				
			Nilai Aspek	81.63		90.18				90.87				
9	03207	DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	Nilai	97.78	61.16	65.41	85.50	100.00	93.50	100.00	84.93	100%	0.75	84.18
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	9.78	9.17	13.08	8.55	10.00	9.35	25.00				
			Nilai Aspek	79.47		86.10				100.00				



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KL	Nama KL	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	99.76	70.61	82.69	90.82	99.89	96.56	99.91	90.81	100%	0.50	90.31
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	9.98	10.59	16.54	9.08	9.99	9.66	24.98				
			Nilai Aspek	85.19		92.49				99.91				

Kertas Kerja Perhitungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA)

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Periode 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024

No	Parameter/Subparameter	Data		Nilai Parameter/ Subparameter*	Penyesuaian Kelompok	Bobot	Indeks Akhir setelah Penyesuaian*	Indeks
1	2	3	4	5=3/4	6	7	8=5x6	9=7x8
1. Pengelolaan BMN yang Akuntabel dan Produktif								
1.1	Tindak Lanjut Temuan pada LHP BPK atas LKPP terkait BMN	Ditindaklanjuti	Jumlah Temuan s.d T-1			Bobot	Indeks Sebelum Bobot	0,60
		5	6	100%	-	15%	4	
1.2	Realisasi PNPB di Bidang Pengelolaan Aset					Bobot		0,35
						10%		
1.2.1	Realisasi PNPB dari Pengelolaan BMN	PNBP dari Pengelolaan BMN	estimasi/target pendapatan			Bobot	Indeks Sebelum Bobot	2,00
		Rp17.441.589.963	Rp7.936.819.000	220%	-	50%	4	
1.2.2	Realisasi PNPB dari pemanfaatan BMN berdasarkan persetujuan Pengelola Barang	Pendapatan Berdasarkan Persetujuan	Total Nilai Pendapatan Pemanfaatan (MAK 42513)			Bobot	Indeks Sebelum Bobot	1,50
		Rp7.156.594.805	Rp10.680.767.230	67%	-	50%	3	
2. Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundang-undangan								
2.1	Ketepatan Waktu dan Kelengkapan Dokumen dalam Penyampaian Laporan dan usulan RKBMN					Bobot		0,35
						10%		
2.1.1	Ketepatan waktu penyampaian RKBMN	Tanggal Terima	Batas Penyampaian			Bobot	Indeks sebelum bobot	1,20
		18 November 2024	29 November 2024	4	-	30%	4	
2.1.2	Ketepatan waktu penyampaian LBP	Tanggal Agenda	Batas Penyampaian			Bobot	Indeks sebelum bobot	1,00
		28 Februari 2024	29 Februari 2024	3		30%	3,3	
		10 Mei 2024	13 Mei 2024	4	-			
		31 Juli 2024	31 Juli 2024	3				
2.1.3	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian laporan wasdal	Tanggal Agenda	Batas Penyampaian		Lengkap/Tidak Lengkap	Bobot	Indeks sebelum bobot	1,30
		6 Februari 2024	15 Februari 2024	4	1	40%	3,3	
		15 Juli 2024	19 Juli 2024	4	4			
2.2	Asuransi BMN	Progres		Indeks		Bobot	Indeks sebelum bobot	0,40
		Penyerahan Polis Asuransi BMN		4	-	10%	4	
3. Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif								
3.1	Tindak lanjut Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN	Persetujuan Ditindaklanjuti	Jumlah Persetujuan			Bobot	Indeks sebelum bobot	0,60
		39	40	97,50%	115%	15%	4	
3.2	Tindak lanjut BMN Rusak Berat		Saldo Periode Akhir			Bobot	Indeks sebelum bobot	0,30
			8.357	Masih terdapat saldo	-	10%	3	
4. Administrasi BMN yang Andal								
4.1	BMN memiliki dokumen kepemilikan					Bobot		0,60
						15%		
4.1.1	BMN bersertipikat sesuai ketentuan	Luas Tanah Bersertipikat (m2)	Total Luas Tanah (m2)			Bobot	Indeks sebelum bobot	3,00
		23.033.554	29.787.517	77%	115%	75%	4	
4.1.2	Penuntasan Target Sertipikasi BMN	Target Sertipikasi yang diselesaikan t-0	Target Keseluruhan Sertipikasi t-0			Bobot	Indeks sebelum bobot	1,00
		40	33	121%	115%	25%	4	
4.2	Penggunaan BMN sesuai ketentuan					Bobot		0,60
						15%		
4.2.1	Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	Rerata Hasil Pengukuran SBSK s.d t-0				Bobot	Indeks sebelum bobot	2,80
		81%		81%	115%	70%	4	
4.2.2	BMN yang Sudah Diletakkan Status Penggunaan	BMN Tanah dan/atau Bangunan PSP t-0	Total BMN T/B t-0			Bobot	Indeks sebelum bobot	1,20
		9.568	10.822	88%	115%	30%	4	
*menyesuaikan parameter								
Nilai IPA								3,80

Penyesuaian Kelompok	Kelompok (Satker)
100%	1 s.d. 10
105%	11 s.d. 100
110%	101 s.d. 500
115%	>500

Indeks 4
Indeks 3
Indeks 2
Indeks 1
Belum ada data



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

GEDUNG SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA II LANTAI 7 UTARA (APT) JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4,
JAKARTA 10710; CALL CENTER 150-991; SITUS WWW.DJKN.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-9/KN/KN.2/2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Penyampaian Hasil Sementara Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Tahun 2024 dan Mekanisme Sanggah

20 Januari 2025

Yth. 1. Para Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Kementerian/Lembaga
2. Asisten Logistik Kapolri
3. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
4. Direktur Utama LPP TVRI dan RRI
selaku pelaksana Pengguna Barang pada Kementerian/Lembaga

Sehubungan dengan pengukuran Indikator Kinerja Pengelolaan BMN/Indeks Pengelolaan Aset (IPA) pada Kementerian/Lembaga Tahun 2024, dengan ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Indikator Kinerja Pengelolaan BMN Tahun 2024 (KMK 112/2024), bahwa perhitungan IPA dapat dilaksanakan oleh Pengelola Barang dan/atau secara mandiri oleh Pengguna Barang.
2. Berkaitan formula dan sumber data pengukuran IPA Tahun 2024 sebagaimana lampiran KMK 112/2024, terdapat penyesuaian formula pada parameter 6 Tindak Lanjut BMN Rusak Berat menjadi :
 - a. Masih terdapat saldo akhir = Indeks 3; dan
 - b. Saldo Akhir 0/Nihil = Indeks 4
3. Merujuk pada penyesuaian formula dimaksud, bersama ini disampaikan nilai evaluasi sementara IPA Tahun 2024 lingkup Kementerian/Lembaga. Sebagaimana Keputusan Menteri PANRB Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi dan Reformasi Birokrasi Tahun 2024, terdapat mekanisme sanggah atas hasil evaluasi sementara tersebut setelah nilai evaluasi sementara dirilis pada Portal RB Nasional.
4. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pengguna Barang dapat mempersiapkan permohonan dan data parameter yang akan dilakukan sanggah dengan mengunggah pada tautan masing-masing Kementerian/Lembaga sebagaimana terlampir pada folder "*IPA 2024>nama parameter*". Permohonan dan data dimaksud agar dapat disampaikan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara paling lambat satu minggu setelah tanggal rilis hasil evaluasi sementara.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
Direktur Perumusan Kebijakan
Kekayaan Negara



Ditandatangani secara elektronik
Encep Sudarwan



Tembusan:

1. Kepala Subdirektorat Perumusan Kebijakan Barang Milik Negara I
2. Kepala Subdirektorat Perumusan Kebijakan Barang Milik Negara II
3. Kepala Subdirektorat Perumusan Kebijakan Barang Milik Negara III

Lampiran I
Surat Dirjen Kekayaan Negara
Nomor :
Tanggal :

**DAFTAR SEKRETARIS JENDERAL/SEKRETARIS UTAMA/SEKRETARIS/
KEPALA/WAKIL KEPALA/DIREKTUR KEUANGAN/DEPUTI KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA/JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN**

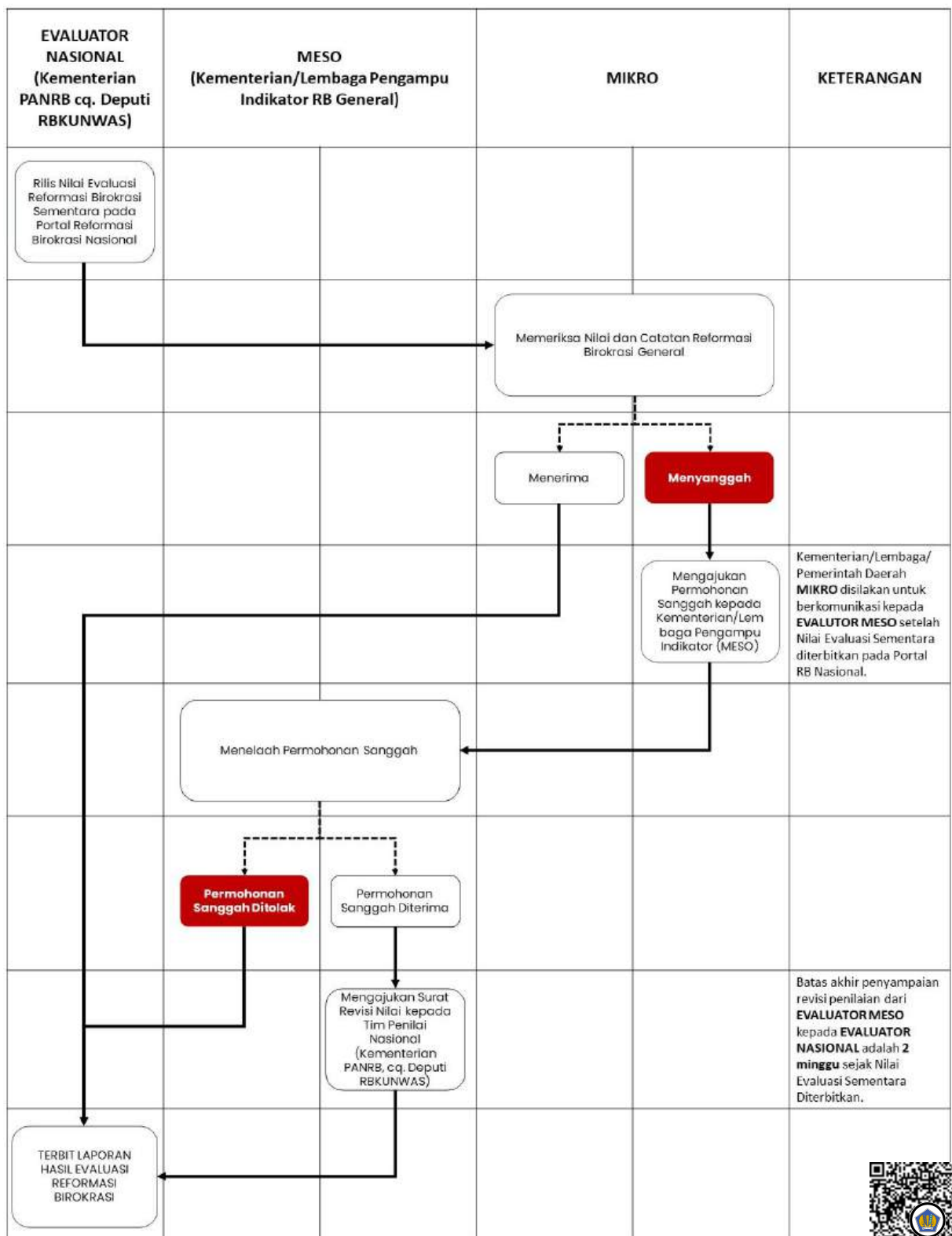
No.	Kementerian Negara/Lembaga
1	Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
2	Dewan Perwakilan Rakyat RI
3	Dewan Perwakilan Daerah RI
4	Badan Pemeriksa Keuangan RI
5	Mahkamah Agung RI
6	Mahkamah Konstitusi RI
7	Komisi Yudisial RI
8	Kejaksaan Agung RI
9	Kementerian Sekretariat Negara RI
10	Kementerian Dalam Negeri RI
11	Kementerian Luar Negeri RI
12	Kementerian Pertahanan RI
13	Kementerian Hukum (sebagai K/L pengampu Kementerian Hukum dan HAM BA 013)
14	Kementerian Keuangan RI
15	Kementerian Pertanian RI
16	Kementerian Perindustrian RI
17	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI
18	Kementerian Perhubungan RI
19	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (sebagai K/L pengampu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI BA 023)
20	Kementerian Kesehatan RI
21	Kementerian Agama RI
22	Kementerian Ketenagakerjaan RI
23	Kementerian Sosial RI
24	Kementerian Kehutanan (sebagai K/L pengampu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI BA 029)
25	Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
26	Kementerian Pekerjaan Umum (sebagai K/L pengampu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI BA 033)
27	Kementerian Koordinator Bidang Politik Keamanan (sebagai K/L pengampu Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI BA 034)
28	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI
29	Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
30	Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (sebagai K/L pengampu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI BA 120)



31	Kementerian Pariwisata (sebagai K/L pengampu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif BA 040)
32	Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI
33	Badan Riset dan Inovasi Nasional
34	Kementerian Koperasi (sebagai K/L pengampu Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI BA 044)
35	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
36	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
37	Badan Intelijen Negara
38	Badan Siber dan Sandi Negara
39	Dewan Ketahanan Nasional
40	Badan Pusat Statistik
41	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
42	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
43	Perpustakaan Nasional
44	Kementerian Komunikasi dan Digital RI (sebelumnya menggunakan nomenklatur Kementerian Komunikasi dan Informatika RI BA 059)
45	Kepolisian Negara RI
46	Badan Pengawas Obat dan Makanan
47	Lembaga Ketahanan Nasional
48	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (sebelumnya menggunakan nomenklatur Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal BA 065)
49	Badan Narkotika Nasional
50	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (sebagai K/L pengampu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI BA 067)
51	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (sebelumnya menggunakan nomenklatur Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BA 068)
52	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
53	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
54	Komisi Pemilihan Umum
55	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
56	Badan Informasi Geospasial
57	Badan Standardisasi Nasional
58	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
59	Lembaga Administrasi Negara
60	Arsip Nasional RI
61	Badan Kepegawaian Negara
62	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
63	Kementerian Perdagangan RI
64	Kementerian Pemuda dan Olahraga RI
65	Komisi Pemberantasan Korupsi

66	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
67	Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (sebelumnya menggunakan nomenklatur Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BA 104)
68	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
69	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
70	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
71	Ombudsman RI
72	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
73	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
74	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
75	Sekretariat Kabinet
76	Badan Pengawas Pemilu
77	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
78	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
79	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
80	Badan Keamanan Laut
81	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
82	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
83	Badan Pangan Nasional
84	Otorita Ibu Kota Nusantara
85	Badan Karantina Indonesia

MEKANISME SANGGAH HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI GENERAL



No	Kode BA	Kementerian/ Lembaga	Link Folder KL
1	001	MPR	https://bit.ly/IPA_BA001
2	002	DPR	https://bit.ly/IPA_BA002
3	004	BPK	https://bit.ly/IPA_BA004
4	005	MA	https://bit.ly/IPA_BA005
5	006	Kejaksaan Agung	https://bit.ly/IPA_BA006
6	007	Kementerian Sekretariat Negara	https://bit.ly/IPA_BA007
7	010	Kementerian Dalam Negeri	https://bit.ly/IPA_BA010
8	011	Kementerian Luar Negeri	https://bit.ly/IPA_BA011
9	012	Kementerian Pertahanan	https://bit.ly/IPA_BA012
10	013	Kementerian Hukum dan HAM	https://bit.ly/IPA_BA013
11	015	Kementerian Keuangan	https://bit.ly/IPA_BA015
12	018	Kementerian Pertanian	https://bit.ly/IPA_BA018
13	019	Kementerian Perindustrian	https://bit.ly/IPA_BA019
14	020	Kementerian ESDM	https://bit.ly/IPA_BA020
15	022	Kementerian Perhubungan	https://bit.ly/IPA_BA022
16	023	Kementerian Pendidikan & Kebudayaan	https://bit.ly/IPA_BA023
17	024	Kementerian Kesehatan	https://bit.ly/IPA_BA024
18	025	Kementerian Agama	https://bit.ly/IPA_BA025
19	026	Kementerian Ketenagakerjaan	https://bit.ly/IPA_BA026
20	027	Kementerian Sosial	https://bit.ly/IPA_BA027
21	029	Kementerian LHK	https://bit.ly/IPA_BA029
22	032	KKP	https://bit.ly/IPA_BA032
23	033	Kementerian PUPR	https://bit.ly/IPA_BA033
24	034	Kemenko Polhukam	https://bit.ly/IPA_BA034
25	035	Kemenko Perekomian	https://bit.ly/IPA_BA035
26	036	Kemenko PMK	https://bit.ly/IPA_BA036
27	040	Kementerian Pariwisata	https://bit.ly/IPA_BA040
28	041	Kementerian BUMN	https://bit.ly/IPA_BA041
29	044	Kementerian Kop UKM	https://bit.ly/IPA_BA044
30	047	Kementerian PPPA	https://bit.ly/IPA_BA047
31	048	Kementerian PANRB	https://bit.ly/IPA_BA048
32	050	BIN	https://bit.ly/IPA_BA050
33	051	BSSN	https://bit.ly/IPA_BA051
34	052	Wantanas	https://bit.ly/IPA_BA052
35	054	BPS	https://bit.ly/IPA_BA054
36	055	Kementerian PPN/Bappenas	https://bit.ly/IPA_BA055
37	056	Kementerian ATR/BPN	https://bit.ly/IPA_BA056
38	057	Perpustakaan Nasional	https://bit.ly/IPA_BA057
39	059	Kementerian Komunikasi & Informatika	https://bit.ly/IPA_BA059
40	060	POLRI	https://bit.ly/IPA_BA060
41	063	BPOM	https://bit.ly/IPA_BA063
42	064	Lemhanas	https://bit.ly/IPA_BA064
43	065	BKPM	https://bit.ly/IPA_BA065
44	066	BNN	https://bit.ly/IPA_BA066
45	067	Kementerian Desa PDTT	https://bit.ly/IPA_BA067
46	068	BKKBN	https://bit.ly/IPA_BA068
47	074	Komnas HAM	https://bit.ly/IPA_BA074
48	075	BMKG	https://bit.ly/IPA_BA075
49	076	KPU	https://s.id/IPA_BA076
50	077	MK	https://s.id/IPA_BA077



No	Kode BA	Kementerian/ Lembaga	Link Folder KL
51	078	PPATK	https://s.id/IPA_BA078
52	083	BIG	https://s.id/IPA_BA083
53	084	BSN	https://s.id/IPA_BA084
54	085	Bapeten	https://s.id/IPA_BA085
55	086	LAN	https://s.id/IPA_BA086
56	087	ANRI	https://s.id/IPA_BA087
57	088	BKN	https://s.id/IPA_BA088
58	089	BPKP	https://s.id/IPA_BA089
59	090	Kementerian Perdagangan	https://s.id/IPA_BA090
60	092	Kementerian Pemuda & Olahraga	https://s.id/IPA_BA092
61	093	KPK	https://s.id/IPA_BA093
62	095	DPD	https://s.id/IPA_BA095
63	100	KY	https://s.id/IPA_BA100
64	103	BNPB	https://s.id/IPA_BA103
65	104	BNP2TKI	https://s.id/IPA_BA104
66	106	LKPP	https://s.id/IPA_BA106
67	107	Basarnas	https://s.id/IPA_BA107
68	108	KPPU	https://s.id/IPA_BA108
69	110	Ombudsman	https://s.id/IPA_BA110
70	111	BNPP	https://s.id/IPA_BA111
71	112	BP Batam	https://s.id/IPA_BA112
72	113	BNPT	https://s.id/IPA_BA113
73	114	Sekretariat Kabinet	https://s.id/IPA_BA114
74	115	Bawaslu	https://s.id/IPA_BA115
75	116	LPP RRI	https://s.id/IPA_BA116
76	117	LPP TVRI	https://s.id/IPA_BA117
77	118	BPK Sabang	https://s.id/IPA_BA118
78	119	Bakamla	https://s.id/IPA_BA119
79	120	Kemenko Maritim & Investasi	https://s.id/IPA_BA120
80	122	BPIP	https://s.id/IPA_BA122
81	123	LPSK	https://s.id/IPA_BA123
82	124	BRIN	https://s.id/IPA_BA124
83	125	Badan Pangan Nasional	https://s.id/IPA_BA125
84	126	Otorita Ibu Kota Nusantara	https://s.id/IPA_BA126
85	127	Badan Karantina Indonesia	https://s.id/IPA_BA127

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 138/SJ.2/RC.610/II/2026

Yth. : 1. Kepala Biro Perencanaan
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal
3. Para Sekretaris Direktorat Jenderal
4. Para Plt. Sekretaris Badan
5. Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
6. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

Dari : Kepala Biro Keuangan dan BMN

Lampiran : Satu berkas

Hal : Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Level Unit Eselon I dan Level Satker di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

Tanggal : 13 Januari 2026

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bersama ini kami sampaikan capaian IK Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Capaian seluruh Unit Eselon I sudah mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 81,5 dan Capaian seluruh Satuan Kerja (Satker) sudah mencapai target sebesar 71,5 sebagaimana data terlampir.
2. Capaian IK NKPA level 1 (Unit Eselon I) dan level 2 (Satker). Data tersebut dapat digunakan sebagai penetapan capaian nilai IK NKPA Tahun 2025 pada Unit Eselon I dan Satker di lingkungan KKP (terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami mengucapkan terima kasih.

Tembusan:
Sekretaris Jenderal



**Ditandatangani
Secara Elektronik**
Sutrisno Subagyo

No. ↑↓	Kode UEI ↑↓	UEI ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	Efektivitas		Efisiensi	
				IKP ↑↓	CRO ↑↓	Penggunaan SBK ↑↓	Efisiensi SBK ↑↓
1	01	Sekretariat Jenderal	91.50	100.00	96.65	84.62	63.65
2	02	Inspektorat Jenderal	85.00	50.00	100.00	100.00	100.00
3	03	Ditjen Perikanan Tangkap	85.83	79.78	96.66	91.01	62.00
4	04	Ditjen Perikanan Budidaya	87.52	77.75	99.55	79.10	76.60
5	05	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	85.31	85.71	99.45	85.64	41.90
6	06	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	88.53	75.96	100.00	100.00	71.60
7	07	Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	87.09	61.53	100.00	93.42	95.25
8	12	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	98.53	100.00	99.99	98.13	91.45
9	13	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	89.11	75.00	98.48	89.71	88.85

Menampilkan 1 sampai 9 dari 9 entri

NK Perencanaan Satuan Kerja

Monitoring / NK Perencanaan Satker

Download Excel

Tampilkan

All

 entri

Cari:

No. ↑↓	Kode Satuan Kerja ↑↓	Satuan Kerja ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO ↑↓	Penggunaan SBK ↑↓	Efisiensi SBK ↑↓
1	032.01.622081	BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA	95,63	100,00	77,78	85,70
2	032.01.632004	BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	75,00	100,00	0,00	0,00
3	032.01.660056	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	79,70	87,93	100,00	25,00
4	032.01.690925	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	032.01.690926	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
6	032.01.690927	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
7	032.01.690928	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00
8	032.01.690929	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00
9	032.01.690930	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	0,00	0,00	0,00	0,00
10	032.01.690931	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
11	032.01.690932	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
12	032.01.690933	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	0,00	0,00	0,00	0,00
13	032.01.690934	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	0,00	0,00	0,00	0,00
14	032.01.690935	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
15	032.01.690936	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
16	032.01.690937	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
17	032.01.690938	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
18	032.01.690939	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
19	032.01.690940	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00
20	032.01.690941	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
21	032.01.690942	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
22	032.01.690943	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
23	032.01.690944	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	0,00	0,00	0,00	0,00
24	032.01.690945	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU	0,00	0,00	0,00	0,00
25	032.01.690946	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	0,00	0,00	0,00	0,00
26	032.01.690947	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
27	032.01.690948	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00
28	032.01.690949	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	0,00	0,00	0,00	0,00
29	032.01.690950	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	0,00	0,00	0,00	0,00
30	032.01.690951	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
31	032.01.690952	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
32	032.01.690953	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
33	032.01.690954	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	0,00	0,00	0,00	0,00
34	032.01.690955	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	0,00	0,00	0,00	0,00
35	032.01.690956	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
36	032.01.690957	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
37	032.01.690958	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
38	032.01.690959	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PAPUA BARAT DAYA	0,00	0,00	0,00	0,00
39	032.01.690960	DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN PAPUA PEGUMUNGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
40	032.01.690961	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
41	032.01.690962	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Menampilkan 1 sampai 41 dari 41 entri

Sebelumnya

1

 Selanjutnya

NK Perencanaan Satuan Kerja

Monitoring / NK Perencanaan Satker

Download Excel

Tampilkan 10 entri

Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	032.02.622098	INSPEKTORAT JENDERAL	100,00	100,00	100,00	100,00

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

NK Perencanaan Satuan Kerja

Monitoring / NK Perencanaan Satker

[Download Excel](#)

Tampilkan All entri

Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	032.01.010003	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DKI JAKARTA	100,00	100,00	100,00	100,00
2	032.01.020172	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT	100,00	100,00	100,00	100,00
3	032.01.030163	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
4	032.01.040007	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA	100,00	100,00	100,00	100,00
5	032.01.050150	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	100,00	100,00	100,00	100,00
6	032.01.060145	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	0,00	0,00	0,00	0,00
7	032.01.070126	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
8	032.01.080143	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
9	032.01.090125	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI BALI	100,00	100,00	100,00	100,00
10	032.01.100151	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	100,00	100,00	100,00	100,00
11	032.01.110114	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	100,00	100,00	100,00	100,00
12	032.01.120123	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	100,00	100,00	100,00	100,00
13	032.01.130128	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	100,00	100,00	100,00	100,00
14	032.01.140114	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	100,00	100,00	100,00	100,00
15	032.01.150112	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
16	032.01.160124	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00
17	032.01.170113	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	100,00	100,00	100,00	100,00
18	032.01.180143	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
19	032.01.190137	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	100,00	100,00	100,00	100,00
20	032.01.200117	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	100,00	100,00	100,00	100,00
21	032.01.210096	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU	100,00	100,00	100,00	100,00
22	032.01.220110	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SRI LINGGA	100,00	100,00	100,00	100,00
23	032.01.230120	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	81,52	91,13	95,24	24,30
24	032.01.230120	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	100,00	100,00	100,00	100,00
25	032.01.230146	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGKUTU	97,00	100,00	100,00	80,00
26	032.01.230150	HALAI BESAR PEMANGKAPAN IKAN	97,00	100,00	100,00	80,00
27	032.01.230171	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	94,25	100,00	80,00	75,00
28	032.01.230114	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIT	97,00	100,00	100,00	80,00
29	032.01.230221	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	97,00	100,00	100,00	80,00
30	032.01.230235	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	94,25	100,00	80,00	75,00
31	032.01.230401	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	94,53	100,00	100,00	63,55
32	032.01.240160	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	100,00	100,00	100,00	100,00
33	032.01.250107	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	0,00	0,00	0,00	0,00
34	032.01.260120	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	0,00	0,00	0,00	0,00
35	032.01.260112	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
36	032.01.280201	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SANTEN	100,00	100,00	100,00	100,00
37	032.01.300170	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
38	032.01.310712	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWAIBANG	95,25	100,00	100,00	75,00
39	032.01.310096	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI GORONTALO	0,00	0,00	0,00	0,00
40	032.01.320007	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	100,00	100,00	100,00	100,00
41	032.01.330096	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
42	032.01.340150	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULAWESI BARAT	100,00	100,00	100,00	100,00
43	032.01.420223	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	92,92	100,00	100,00	52,80
44	032.01.430161	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERATE	88,14	100,00	50,00	54,25
45	032.01.430770	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	94,93	100,00	100,00	66,20
46	032.01.430792	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	90,50	100,00	80,00	50,00
47	032.01.510117	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	93,57	100,00	100,00	57,15
48	032.01.530188	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	95,00	100,00	100,00	66,65
49	032.01.530751	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA HIZAM ZACHMAN	100,00	100,00	100,00	100,00
50	032.01.530705	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	93,57	100,00	100,00	57,15
51	032.01.560203	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHAN RAYU	97,00	100,00	100,00	80,00
52	032.01.560401	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIROLGA	94,25	100,00	80,00	75,00
53	032.01.630461	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	96,67	100,00	66,67	100,00
54	032.01.630470	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL	86,57	92,31	83,33	60,00
55	032.01.630482	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	97,00	100,00	100,00	80,00
56	032.01.630725	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
57	032.01.630603	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBANGAN	91,41	100,00	100,00	42,70
58	032.01.630707	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	90,50	100,00	80,00	50,00



NK Perencanaan Satuan Kerja

Monitoring / NK Perencanaan Satker

[Download Excel](#)

Tampilkan All 54 entri

Cari:

No. ^{↑↓}	Kode Satuan Kerja ^{↑↓}	Satuan Kerja ^{↑↓}	NK Perencanaan Anggaran ^{↑↓}	Efektivitas		Efisiensi	
				Capaian RO ^{↑↓}	Penggunaan SBK ^{↑↓}	Efisiensi SBK ^{↑↓}	
1	032.04.018063	DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAH PROVINSI DKI JAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	032.04.028173	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	032.04.038184	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	032.04.048098	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	032.04.058181	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	032.04.068146	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KANGGADE ACEH DARUSSALAM	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	032.04.078327	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTABA	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	032.04.088144	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	032.04.098826	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	032.04.108132	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	032.04.118142	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	032.04.128134	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	032.04.138139	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALAMANTAN BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	032.04.148123	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALAMANTAN TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	032.04.158133	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALAMANTAN SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	032.04.168138	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALAMANTAN TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	032.04.178134	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPSINI SULAWESI UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	032.04.188144	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPSINI SULAWESI TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	032.04.198138	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	032.04.208138	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	032.04.218099	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	032.04.228131	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	032.04.237557	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI SELAM	91,76	96,93	83,33	71,50	
24	032.04.238754	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI	95,33	100,00	83,33	80,00	
25	032.04.238138	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	032.04.239282	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA	95,00	100,00	50,00	100,00	
27	032.04.248170	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	032.04.258108	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	032.04.268122	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	032.04.268133	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	032.04.268096	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI BANTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	032.04.268171	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	032.04.278099	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI GORONTALO	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	032.04.288088	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI KEPULAUAN RIAU	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	032.04.298097	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI PAPUA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	032.04.348153	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULAWESI BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	032.04.417704	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	94,00	100,00	100,00	60,00	
38	032.04.448333	BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPS) KARAWANG	95,33	100,00	83,33	80,00	
39	032.04.468394	BALAI PRODUKSI INDUK UDANG JINGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM	96,92	100,00	100,00	79,45	
40	032.04.538811	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU	97,50	100,00	75,00	100,00	
41	032.04.567350	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO	97,50	100,00	75,00	100,00	
42	032.04.567385	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE	95,00	100,00	50,00	100,00	
43	032.04.567478	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM	96,56	100,00	100,00	77,05	
44	032.04.567584	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIRAJAR	94,25	100,00	80,00	75,00	
45	032.04.567680	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR	74,99	99,98	0,00	0,00	
46	032.04.567728	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	91,84	98,56	66,67	75,00	
47	032.04.567762	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	97,00	100,00	100,00	80,00	
48	032.04.567800	BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SEBANG	72,50	96,67	0,00	0,00	
49	032.04.613462	SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	90,91	100,00	75,00	56,05	
50	032.04.680966	DINAS PERTANIAH, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PAPUA BARAT DAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	
51	032.04.690967	DINAS PERTANIAH, PANGAN, DAN PERIKANAN PAPUA PEGUNUNGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	032.04.690968	DINAS PANGAN, PERTANIAH, KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI PAPUA TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	032.04.690969	DINAS PANGAN, PERTANIAH, KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI PAPUA SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	032.04.691347	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI KALAMANTAN UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00	

Menampilkan 1 sampai 54 dari 54 entri

[Sebelumnya](#) [1](#) [Selanjutnya](#)



NK Perencanaan Satuan Kerja

Monitoring / NK Perencanaan Satker

[Download Excel](#)

Tampilkan All entri

Cari:

No. ↑	Kode Satuan Kerja ↑	Satuan Kerja ↑	NK Perencanaan Anggaran ↑	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO ↑	Penggunaan SBK ↑	Efisiensi SBK ↑
1	032.01.01000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
2	032.01.02100	STASIUN PSDKP CILACAP	90,09	100,00	90,91	40,00
3	032.01.03001	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00
4	032.01.04003	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	032.01.06010	PANGKALAN PSDKP LAMPULO	88,76	100,00	72,73	43,25
6	032.01.08004	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
7	032.01.11008	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
8	032.01.12004	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
9	032.01.15007	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
10	032.01.16004	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00
11	032.01.17040	STASIUN PSDKP TAHUNA	84,16	94,12	84,62	34,05
12	032.01.18006	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
13	032.01.18005	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
14	032.01.16003	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	0,00	0,00	0,00	0,00
15	032.01.21014	STASIUN PSDKP AMBON	89,50	100,00	100,00	30,00
16	032.01.31008	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU	0,00	0,00	0,00	0,00
17	032.01.32010	PANGKALAN PSDKP BENGKA	89,77	100,00	72,73	50,00
18	032.01.33007	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
19	032.01.34010	STASIUN PSDKP KUPANG	89,62	100,00	91,67	36,35
20	032.01.34006	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00
21	032.01.35003	STASIUN PSDKP BIAK	89,77	100,00	72,73	50,00
22	032.01.36008	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	0,00	0,00	0,00	0,00
23	032.01.36010	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
24	032.01.36009	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
25	032.01.31003	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI GORONTALO	0,00	0,00	0,00	0,00
26	032.01.32016	PANGKALAN PSDKP BATAM	88,26	98,19	91,67	36,35
27	032.01.32011	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BIAU	0,00	0,00	0,00	0,00
28	032.01.33004	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
29	032.01.33010	STASIUN PSDKP TANAKAN	89,66	100,00	91,67	36,60
30	032.01.44003	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP JAKARTA	92,62	99,81	100,00	51,75
31	032.01.44002	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP SITUNG	88,78	99,37	75,00	45,00
32	032.01.44003	STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN	90,83	100,00	83,33	50,00
33	032.01.44004	STASIUN PENGAWASAN SDKP PORTHARAN	89,41	100,00	80,00	42,70
34	032.01.44003	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL	91,36	100,00	100,00	42,40
35	032.01.44002	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	89,58	100,00	80,95	43,25
36	032.01.60070	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTAMAHAN PROVINSI DKI JAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00
37	032.01.60071	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
38	032.01.60072	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
39	032.01.60073	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00
40	032.01.60074	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00
41	032.01.60075	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM	0,00	0,00	0,00	0,00
42	032.01.60076	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
43	032.01.60077	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
44	032.01.60078	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BIAU	0,00	0,00	0,00	0,00
45	032.01.60079	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	0,00	0,00	0,00	0,00
46	032.01.60080	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
47	032.01.60081	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
48	032.01.60082	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
49	032.01.60083	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
50	032.01.60084	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
51	032.01.60085	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00
52	032.01.60086	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
53	032.01.60087	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
54	032.01.60088	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
55	032.01.60089	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	0,00	0,00	0,00	0,00
56	032.01.60090	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU	0,00	0,00	0,00	0,00
57	032.01.60091	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	0,00	0,00	0,00	0,00
58	032.01.60092	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
59	032.01.60093	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00
60	032.01.60094	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

61	022.01.690095	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	0,00	0,00	0,00	0,00
62	022.01.690096	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
63	022.01.690097	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SAMPUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
64	022.01.690098	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
65	022.01.690099	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	0,00	0,00	0,00	0,00
66	022.01.691000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA	0,00	0,00	0,00	0,00
67	022.01.691001	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
68	022.01.691002	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
69	022.01.691003	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00

Menampilkan 1 sampai 69 dari 69 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

NK Perencanaan Satuan Kerja

Monitoring / NK Perencanaan Satker

Download Excel

Tampilkan All 1 entri

Cari:

No. ↑	Kode Satuan Kerja ↑	Satuan Kerja ↑	NK Perencanaan Anggaran ↑	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO ↑	Penggunaan SBK ↑	Efisiensi SBK ↑
1	032.06.437666	BALAI BESAR PENGURAN PENERAPAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (BBPKP)	100,00	100,00	100,00	100,00
2	022.06.621131	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	94,23	100,00	100,00	61,55
3	032.06.691008	DINAS RETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00
4	032.06.691008	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
5	032.06.691010	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
6	032.06.691011	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00
7	032.06.691012	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00
8	032.06.691013	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM	0,00	0,00	0,00	0,00
9	032.06.691014	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
10	032.06.691015	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
11	032.06.691016	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BUAH	0,00	0,00	0,00	0,00
12	032.06.691017	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	0,00	0,00	0,00	0,00
13	032.06.691018	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
14	032.06.691019	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
15	032.06.691020	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
16	032.06.691021	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
17	032.06.691022	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
18	032.06.691023	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00
19	032.06.691024	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	032.06.691025	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
21	032.06.691026	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
22	032.06.691027	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	0,00	0,00	0,00	0,00
23	032.06.691028	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU	0,00	0,00	0,00	0,00
24	032.06.691029	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	0,00	0,00	0,00	0,00
25	032.06.691030	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
26	032.06.691031	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00
27	032.06.691032	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAH PROVINSI PAPUA	0,00	0,00	0,00	0,00
28	032.06.691033	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	0,00	0,00	0,00	0,00
29	032.06.691034	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
30	032.06.691035	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
31	032.06.691036	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
32	032.06.691037	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	0,00	0,00	0,00	0,00
33	032.06.691038	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	0,00	0,00	0,00	0,00
34	032.06.691039	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
35	032.06.691040	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
36	032.06.691041	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00

Menampilkan 1 sampai 36 dari 36 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya



NK Perencanaan Satuan Kerja

Monitoring / NK Perencanaan Satker

[Download Excel](#)

Tampilkan All entri

Cari:

No. ↑	Kode Satuan Kerja ↑	Satuan Kerja ↑	NK Perencanaan Anggaran ↑	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO ↑	Penggunaan SBK ↑	Efisiensi SBK ↑
1	032.01.360146	LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG	98,33	100,00	83,33	100,00
2	032.01.479418	SALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SEMPAKAS	97,86	100,00	100,00	85,70
3	032.01.479428	SALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PORTIARAK	98,57	100,00	85,71	100,00
4	032.01.479431	SALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR	100,00	100,00	100,00	100,00
5	032.01.479440	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	98,57	100,00	85,71	100,00
6	032.01.479456	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PERANBARU	99,24	100,00	100,00	94,95
7	032.01.486346	SALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BSPPL) PADANG	97,14	100,00	71,43	100,00
8	032.01.486352	SALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (BKKN) KUPANG	100,00	100,00	100,00	100,00
9	032.01.612146	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	98,68	100,00	100,00	91,20
10	032.01.681046	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00
11	032.01.681047	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
12	032.01.681048	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
13	032.01.681049	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00
14	032.01.681050	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00
15	032.01.681051	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSALAM	0,00	0,00	0,00	0,00
16	032.01.681052	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
17	032.01.681053	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
18	032.01.681054	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	0,00	0,00	0,00	0,00
19	032.01.681055	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	0,00	0,00	0,00	0,00
20	032.01.681056	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
21	032.01.681057	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
22	032.01.681058	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
23	032.01.681059	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
24	032.01.681060	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
25	032.01.681061	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00
26	032.01.681062	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
27	032.01.681063	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
28	032.01.681064	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
29	032.01.681065	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	0,00	0,00	0,00	0,00
30	032.01.681066	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU	0,00	0,00	0,00	0,00
31	032.01.681067	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	0,00	0,00	0,00	0,00
32	032.01.681068	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
33	032.01.681069	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00
34	032.01.681070	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	0,00	0,00	0,00	0,00
35	032.01.681071	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	0,00	0,00	0,00	0,00
36	032.01.681072	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
37	032.01.681073	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
38	032.01.681074	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
39	032.01.681075	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	0,00	0,00	0,00	0,00
40	032.01.681076	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	0,00	0,00	0,00	0,00
41	032.01.681077	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
42	032.01.681078	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
43	032.01.681079	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00

Menampilkan 1 sampai 43 dari 43 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya



NK Perencanaan Satuan Kerja

Monitoring / NK Perencanaan Satker

[Download Excel](#)

Tampilkan All entri

Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	032.11.317373	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL	92,50	100,00	100,00	50,00
2	032.11.338018	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	100,00	100,00	100,00	100,00
3	032.11.338743	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN	100,00	100,00	100,00	100,00
4	032.11.338755	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON	100,00	100,00	100,00	100,00
5	032.11.338763	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI	100,00	100,00	100,00	100,00
6	032.11.339188	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL	100,00	100,00	100,00	100,00
7	032.11.339280	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG	100,00	100,00	100,00	100,00
8	032.11.363096	AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBİ (AK KP WAKATOBİ)	84,42	99,22	100,00	0,00
9	032.11.403817	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR	100,00	100,00	100,00	100,00
10	032.11.403818	LOKA PERKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN	100,00	100,00	100,00	100,00
11	032.11.403821	PUSAT PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	100,00	100,00	100,00	100,00
12	032.11.403823	BALAI RISET PERIKANAN LAUT	100,00	100,00	100,00	100,00
13	032.11.403823	BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN	100,00	100,00	100,00	100,00
14	032.11.403824	BALAI RISET PENULIHAN SUMBER DAYA IKAN	100,00	100,00	100,00	100,00
15	032.11.403826	LOKA RISET PERIKANAN TUNA	100,00	100,00	100,00	100,00
16	032.11.403827	BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN	100,00	100,00	100,00	100,00
17	032.11.403828	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN	100,00	100,00	100,00	100,00
18	032.11.403829	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	100,00	100,00	100,00	100,00
19	032.11.403830	BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HAS	100,00	100,00	100,00	100,00
20	032.11.403832	BALAI RISET PENULIHAN IKAN	100,00	100,00	100,00	100,00
21	032.11.403833	LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT	100,00	100,00	100,00	100,00
22	032.11.403834	LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	100,00	100,00	100,00	100,00
23	032.11.403835	BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KELAUTAN DAN PERIKANAN	100,00	100,00	100,00	100,00
24	032.11.403836	BALAI BESAR RISET SOSIAL EKOWISNI KELAUTAN DAN PERIKANAN	100,00	100,00	100,00	100,00
25	032.11.403837	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG	92,50	100,00	100,00	50,00
26	032.11.403838	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	100,00	100,00	100,00	100,00
27	032.11.403839	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE	100,00	100,00	100,00	100,00
28	032.11.403875	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI (POLTEK KP DUMAI)	90,00	100,00	100,00	33,35
29	032.11.403878	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGKADJARAN (POLTEK KP PANGKADJARAN)	75,00	100,00	0,00	0,00
30	032.11.437311	POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN (POLTEK AUP) JAKARTA	92,50	100,00	100,00	50,00
31	032.11.437351	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADANG	100,00	100,00	100,00	100,00
32	032.11.437373	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN	100,00	100,00	100,00	100,00
33	032.11.437382	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PORTIRAJA	75,00	100,00	0,00	0,00
34	032.11.437618	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WATHEHU	92,50	100,00	100,00	50,00
35	032.11.437638	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH SOBONG	100,00	100,00	100,00	100,00
36	032.11.440613	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBERANA (POLTEK KP JEMBERANA)	100,00	100,00	100,00	100,00
37	032.11.622038	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO	100,00	100,00	100,00	100,00
38	032.11.636403	SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	94,48	100,00	87,50	71,50
39	032.11.6364146	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SOBONG	75,00	100,00	0,00	0,00
40	032.11.652008	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH KOTA AGUNG LAMPUNG	75,00	100,00	0,00	0,00
41	032.11.653538	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUS SUKAMANDI	100,00	100,00	100,00	100,00
42	032.11.693528	PUSAT STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	100,00	100,00	100,00	100,00

Menampilkan 1 sampai 42 dari 42 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya



NK Perencanaan Satuan Kerja

Monitoring / NK Perencanaan Satker

[Download Excel](#)Tampilkan: entriCari:

No. ↑	Kode Satuan Kerja ↑	Satuan Kerja ↑	NK Perencanaan Anggaran ↑	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO ↑	Penggunaan SBK ↑	Efisiensi SBK ↑
1	032.11.417943	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA	95,00	100,00	50,00	100,00
2	032.11.417967	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN NEDARA	92,50	100,00	100,00	50,00
3	032.11.417998	BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR	100,00	100,00	100,00	100,00
4	032.11.417624	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN DENPASAR	100,00	100,00	100,00	100,00
5	032.11.417640	STASUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BATAM	97,23	96,30	100,00	100,00
6	032.11.440607	SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	94,47	100,00	87,50	71,45
7	032.11.567432	STASUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PADANG	96,67	100,00	66,67	100,00
8	032.11.567453	STASUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PEKANBARU	100,00	100,00	100,00	100,00
9	032.11.567481	STASUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALU	100,00	100,00	100,00	100,00
10	032.11.567530	STASUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PONTIANAR	75,00	100,00	0,00	0,00
11	032.11.567610	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN	75,00	100,00	0,00	0,00
12	032.11.567631	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MANADO	99,83	99,77	100,00	100,00
13	032.11.567694	STASUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KENDARI	87,50	90,00	50,00	100,00
14	032.11.567758	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MATARAM	100,00	100,00	100,00	100,00
15	032.11.567812	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAYAPURA	100,00	100,00	100,00	100,00
16	032.11.640603	STASUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAMUJU	100,00	100,00	100,00	100,00
17	032.11.640601	STASUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KUPANG	95,00	100,00	100,00	66,65
18	032.11.640672	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN	100,00	100,00	100,00	100,00
19	032.11.640580	STASUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ACEH	100,00	100,00	100,00	100,00
20	032.11.640600	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANJARMASIN	100,00	100,00	100,00	100,00
21	032.11.640601	STASUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALU	100,00	100,00	100,00	100,00
22	032.11.640613	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG	67,48	69,03	66,67	60,25
23	032.11.640612	STASUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BENGKULU	92,50	100,00	100,00	50,00
24	032.11.640636	STASUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAMBI	100,00	100,00	100,00	100,00
25	032.11.640627	STASUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALANGKARAYA	100,00	100,00	100,00	100,00
26	032.11.640601	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEMARANG	100,00	100,00	100,00	100,00
27	032.11.640670	STASUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN GORONTALO	100,00	100,00	100,00	100,00
28	032.11.640602	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA B	92,51	96,68	50,00	100,00
29	032.11.640608	STASUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAK	95,00	100,00	50,00	100,00
30	032.11.640609	STASUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PANGKAL PINANG	100,00	100,00	100,00	100,00
31	032.11.640704	STASUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAUKE	100,00	100,00	100,00	100,00
32	032.11.640711	STASUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SORONG	93,18	90,91	100,00	100,00
33	032.11.640720	STASUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YOGYAKARTA	100,00	100,00	100,00	100,00
34	032.11.640732	STASUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN CIREBON	92,50	100,00	100,00	50,00
35	032.11.640750	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON	100,00	100,00	100,00	100,00
36	032.11.640767	STASUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TERENATE	100,00	100,00	100,00	100,00
37	032.11.602097	BALAI UJI STANDAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN	75,00	100,00	0,00	0,00

Menampilkan 1 sampai 37 dari 37 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 158/SJ.2/RC.610/I/2026

Yth. : Kepala Biro Keuangan dan BMN
Dari : Ketua Tim Kerja Pelaksanaan Anggaran
Hal : Capaian IKU Persentase Implementasi Standar Biaya Keluaran KKP Tahun 2025
Tanggal : 14 Januari 2026

Bersama ini kami sampaikan capaian IKU Persentase Implementasi Standar Biaya Keluaran Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 yang menjadi tanggung jawab Tim Pelaksanaan Anggaran adalah 100. Capaian kinerja Triwulan IV TA 2025 dengan rincian sebagai berikut dengan penjelasan sebagaimana terlampir.

No	Uraian	Target 2025	Realisasi Tahun 2025	Bobot Nilai
1	Identifikasi Standar Biaya Keluaran pada Rencana Kerja Anggaran Unit Eselon I KKP	1	1	20%
2	Penyusunan Usulan Standar Biaya Keluaran KKP	5	5	50%
3	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Standar Biaya Keluaran KKP	1	1	30%
TOTAL		100	100	100

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Brigitta Dhenny Putrianti

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 82/ITJ/RC.610/X/2025

Yth. : 1. Sekretaris Jenderal KKP
2. Para Dirjen lingkup KKP
3. Para Kepala Badan lingkup KKP
Dari : Inspektur Jenderal
Lampiran : Satu Halaman
Hal : Capaian IKU Batas Tertinggi Nilai Temuan BPK RI atas Laporan Keuangan KKP
Tanggal : 07 Oktober 2025

Bersama ini disampaikan capaian IKU "Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan" lingkup KKP sebagai berikut :

1. Realisasi capaian IKU "Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP" diperoleh dari jumlah nilai temuan BPK pada Laporan Keuangan KKP Tahun 2024 yang dibandingkan dengan jumlah realisasi anggaran KKP Tahun 2024.
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian IKU "Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP" sebesar 0,074%, realisasi tersebut lebih rendah dari target yang ditetapkan $\leq 0,5\%$. Adapun rincian capaian dari masing-masing Eselon I lingkup KKP disampaikan pada lampiran I.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ade Tajudin Sutiawarman

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan
2. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan

Lampiran
 Nomor : 82/ITJ/RC.610/X/2025
 Tanggal : 07 Oktober 2025

**Rincian Realisasi IKU Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK
 atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2024**

No.	Unit Kerja	Nilai Temuan Keuangan (Rp)	Nilai Realisasi Anggaran (Rp)	% (c/d)
a	b	c	d	e
1	Setjen	1.885.275.241,00	822.863.865.685,00	0,229
2	Ditjen PKRL	357.650.852,00	471.154.781.232,00	0,076
3	Ditjen PT	35.794.407,00	860.627.463.236,00	0,004
4	Ditjen PSDKP	50.381.000,00	995.498.070.995,00	0,005
5	Ditjen PB	368.007.712,00	992.008.206.671,00	0,037
6	BPPSDMKP	792.998.330,00	1.423.646.688.907,00	0,056
7	Ditjen PDSPKP	1.160.724.332,00	324.896.904.773,00	0,357
8	BPPMHKP	-	324.873.963.088,00	-
9	Itjen	-	84.427.641.894,00	-
	TOTAL	4.650.831.874,00	6.299.997.586.481,00	0,074



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ade Tajudin Sutiawarman

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 60/ITJ.0/RC.610/I/2026

Yth. : 1. Para Kepala Biro Lingkup Sekretariat Jenderal KKP
2. Para Sekretaris Ditjen Lingkup KKP
3. Para Sekretaris Badan lingkup KKP
Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal KKP
Lampiran : Satu Lembar
Hal : Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP" Tahun 2025
Tanggal : 8 Januari 2026

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2025, bersama ini disampaikan capaian Indikator Kinerja "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP Tahun 2025" dengan uraian sebagai berikut:

1. Capaian Indikator Kinerja diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2024 s.d. 30 September 2025 (Triwulan IV Tahun 2024 s.d Triwulan III Tahun 2025) dan telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon I sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 (Triwulan IV Tahun 2025).
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup KKP yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode Tahun 2025 sebesar 93,24% (tuntas 2042 dari 2190 rekomendasi).
3. Rincian capaian tindak lanjut hasil pengawasan Itjen dari masing-masing unit eselon I lingkup KKP sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Lina Herlina

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Para Direktur Jenderal lingkup KKP
4. Para Kepala Badan lingkup KKP

Lampiran

Nomor : 60/ITJ.0/RC.610/I/2026

Tanggal : 8 Januari 2026

Data Rekapitulasi Capaian IKU
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk
Perbaikan Kinerja Lingkup KKP Tahun 2025

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	% Tuntas	Sisa Rekomendasi	(%) Sisa Rekomendasi
1	Setjen	89	89	100,00%	0	0,00%
2	Ditjen PK	246	211	85,77%	35	14,23%
3	Ditjen PRL	61	59	96,72%	2	3,28%
3	Ditjen Perikanan Tangkap	279	245	87,81%	34	12,19%
4	Ditjen PSDKP	250	250	100,00%	0	0,00%
5	Ditjen Perikanan Budi Daya	408	401	98,28%	7	1,72%
6	BPPSDMKP	357	328	91,88%	29	8,12%
7	Ditjen PDSPKP	227	224	98,68%	3	1,32%
8	BPPMHKP	232	198	85,34%	34	14,66%
9	Itjen	41	37	90,24%	4	9,76%
TOTAL		2190	2042	93,24%	148	6,76%



Ditandatangani
Secara Elektronik

Lina Herlina

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 112/SJ.2/RC.610/I/2026

Yth. : Kepala Biro Keuangan dan BMN
Dari : Ketua Tim Kerja Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Hal : Capaian IKU Indeks Pengelolaan BLU Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025
Tanggal : 10 Januari 2026

Dalam rangka pengukuran capaian indikator kinerja lingkup Biro Keuangan dan BMN, berikut kami sampaikan capaian indikator kinerja utama Indeks Pengelolaan BLU Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut.

No	Parameter	Bobot	Target Capaian	Capaian	Konversi Capaian Parameter ke dalam Indeks	Capaian x Bobot
1	Realisasi Capaian Kinerja BLU berdasarkan Kontrak Kinerja dengan Kementerian Keuangan	60%	75%	90,40%	4	2,4
2	Kepatuhan Penyampaian Dokumen yang diunggah ke aplikasi BIOS oleh BLU	40%	75%	100%	4	1,6
Nilai Akumulasi Capaian Periodik		100%				4

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Arifin Syam

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

MEMORANDUM
NOMOR 159/SJ.2/RC.610/I/2026

Yth. : Kepala Biro Keuangan
Dari : Ketua Tim Kerja Pelaksanaan Anggaran
Hal : Capaian IKU Nilai Pengelolaan PNBPN Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2025
Tanggal : 14 Januari 2026

Bersama ini kami sampaikan capaian IKU Nilai Pengelolaan PNBPN Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 yang menjadi tanggung jawab Tim Pelaksanaan Anggaran adalah 100. Capaian kinerja Triwulan IV TA 2025 dengan rincian sebagai berikut dengan penjelasan sebagaimana terlampir.

No	Uraian	Target		Realisasi	
		Skor	%	Skor	%
1	Penyusunan Usulan dan Penetapan Rencana PNBPN di lingkungan KKP TA 2026	1	30	1	30
2	Pengusulan perubahan perundang-undangan pengelolaan PNBPN di lingkungan KKP	1	25	1	25
3	Monitoring pelaksanaan PNBPN di lingkungan KKP	12	20	12	20
4	Penyusunan laporan pelaksanaan PNBPN dan disampaikan ke Menteri Keuangan	2	20	2	20
5	Pengusulan persetujuan penggunaan dana PNBPN di lingkungan KKP	1	5	1	5
TOTAL			100		100

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Brigitta Dhenny Putrianti

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

NOTA DINAS

Nomor:1/ITJ/HK.410/I/2026

Yth. : Menteri Kelautan dan Perikanan
Dari : Inspektur Jenderal
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi pada Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025
Tanggal : 6 Desember 2025

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025, tanggal 6 Maret 2025 tentang Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Tim Penilai Internal (TPI) telah melaksanakan tugas dimaksud terhadap 7 (tujuh) Unit Kerja yang diusulkan untuk dilakukan evaluasi secara mandiri serta di supervisi oleh Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) serta 5 (lima) Unit Kerja yang dievaluasi oleh TPI. Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari Minggu Ke-1 Mei s.d. Minggu Ke-1 Desember 2025.

Evaluasi dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Instansi Pemerintah serta Keputusan Inspektur Jenderal KKP Nomor 54 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM pada Unit Kerja di Lingkungan KKP, dengan hasil sebagai berikut:

1. Terdapat 9 (sembilan) unit kerja telah memenuhi syarat dan dapat direkomendasikan untuk ditetapkan sebagai Unit Kerja berpredikat Menuju WBK;
 2. Terdapat 1 (satu) Unit Kerja tidak lulus persyaratan pada tahapan analisis dokumen, disebabkan terdapat area yang tidak memenuhi syarat ambang batas nilai komponen pengungkit minimal 60;
 3. Terdapat 2 (dua) Unit Kerja tidak lulus persyaratan pada tahapan wawancara.
- Adapun rekapitulasi hasil pleno terlampir.

Menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut, dimohonkan kepada Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan untuk berkenan menetapkan 9 (sembilan) Unit Kerja yang telah memenuhi persyaratan sebagai Unit Kerja berpredikat Menuju WBK di Lingkungan KKP Tahun 2025 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan untuk mendapat arahan lebih lanjut. Atas arahan dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Ade Tajudin Sutiawarman

Tembusan:

1. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan
2. Sekretaris Jenderal KKP

Lampiran
Nomor : 1/ITJ/HK.410/I/2026
Tanggal : 6 Desember 2025

**REKAPITULASI HASIL PLENO PENILAIAN PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK
LINGKUP KKP TAHUN 2025**

No	Nama Satker	Status	Keterangan
1	Biro Hukum	WBK TPI	Lulus
2	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)	WBK TPI	Lulus
3	Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan	WBK TPI	Lulus
4	Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu	WBK TPI	Lulus
5	Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan	WBK TPI	Lulus
6	Direktorat Pemantauan Operasi Armada (POA)	WBK TPN	Lulus
7	Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Bitung	WBK TPN	Lulus
8	Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar	WBK TPN	Lulus
9	Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (LPSPL) Serang	WBK TPN	Lulus
10	Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam	-	Tidak Lulus
11	Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tanjung Pandan	-	Tidak Lulus
12	Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo	-	Tidak Lulus

- Tidak lulus karena tidak memenuhi persyaratan ambang batas minimal 60 dan tahapan wawancara

DRAFT

KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Bab I Evaluasi Pembangunan Zona Integritas oleh Tim Penilai Internal Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, perlu menetapkan dan memberikan penghargaan kepada unit kerja yang memenuhi kriteria sebagai Unit Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 194 Tahun 2025 tentang Instansi Pemerintah Pelaksana Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi secara Mandiri Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Tahun 2025 sebagaimana dimaksud diktum KESATU berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Penilai Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap pemenuhan lembar kerja evaluasi pada komponen pengungkit dan hasil, wawancara dengan pegawai dan pengguna layanan, serta pengujian implementasi pembangunan Zona Integritas periode 2024 s.d. Oktober 2025.

- KETIGA : Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud diktum KESATU akan dievaluasi oleh Tim Penilai Internal dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Penetapan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dapat dicabut apabila ternyata setelah penetapannya terdapat kejadian/peristiwa yang mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya lagi indikator bebas dari korupsi.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025

DAFTAR UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2025

NO.	UNIT KERJA
1.	Direktorat Pemantauan Operasi Armada (POA)
2.	Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar
3.	Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (LPSPL) Serang
4.	Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Bitung
5.	Biro Hukum
6.	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)
7.	Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan
8.	Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu
9.	Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16

JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041

TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351

LAMAN www.kkp.go.id SUREL setjen@kkp.go.id

Nomor : B. 933/SJ/RC.610/IX/2025
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Hasil Penilaian Mandiri AKIP Tahun 2025

16 September 2025

Yth. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
di Jakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri KP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan KKP serta hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Sekretariat Jenderal sebagaimana surat Inspektur Jenderal Nomor T. 248/ITJ.1/HP.440/VII/2025 tanggal 22 Juli 2025, bersama ini disampaikan Hasil Evaluasi Implementasi AKIP Tahun 2025 pada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN), sebagaimana uraian berikut:

1. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi AKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong unit organisasi untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja yang telah direncanakan melalui implementasi AKIP.
2. Evaluasi dilakukan melalui penilaian terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
3. Berdasarkan hasil evaluasi, AKIP Biro Keuangan dan BMN Tahun 2025 memperoleh nilai sebesar 87,15 dari nilai maksimum 100 atau mendapat predikat A (Memuaskan). Nilai tersebut meningkat dibandingkan Tahun 2024 yang mendapatkan nilai sebesar 84,55. Rincian hasil evaluasi AKIP sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai		
			2023	2024	2025
1.	Perencanaan Kinerja	30	27,00	26,10	27,00
2.	Pengukuran Kinerja	30	24,00	26,10	24,60
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,00	12,60	13,05
4.	Evaluasi Internal	25	22,50	19,75	22,50
	Nilai Hasil Evaluasi	100	85,50	84,55	87,15
	Predikat Penilaian		A (Memuaskan)	A (Memuaskan)	A (Memuaskan)

Keterangan :

- a. Tahun 2023 berdasarkan Memorandum Kepala Biro Perencanaan Nomor. 1097/SJ.1/HP.440/XII/2023 Tanggal 14 Desember 2023 hal Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Level II Lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2023
- b. Tahun 2024 berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Nomor B.1245/SJ/RC.610/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024 hal Hasil Penilaian Mandiri AKIP Tahun 2024 pada Biro Keuangan dan BMN
- c. Tahun 2025 berdasarkan Penilaian Mandiri AKIP Level II Lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2025 melalui aplikasi kinerjaaku

Hasil penilaian terhadap komponen kinerja sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

- 1) Dokumen Perencanaan Kinerja berupa Rancangan Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Rencana Kerja Anggaran, Matrik Peran Hasil dan Sasaran Kinerja Pegawai seluruhnya telah tersedia dan disahkan oleh pejabat yang berwenang melalui aplikasi portal. Indikator kinerja yang ditetapkan telah dilakukan proses *cascading* dari level atas sampai dengan level di bawahnya.
- 2) Indikator Kinerja telah memenuhi kriteria SMART, kualitas rumusan hasil (tujuan/sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai (*achievable*), dan realistis.
- 3) Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, terlihat pada rencana aksi yang akan dilaksanakan dalam mendukung kinerja. Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena selalu dipantau dan dievaluasi secara berkala.
- 4) Upaya yang bisa dihargai dalam pemenuhan kriteria perencanaan kinerja yaitu melakukan validasi perencanaan kinerja untuk memastikan indikator kinerja memenuhi kriteria SMART sebelum Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh pimpinan unit kerja.

b. Pengukuran Kinerja

- 1) Pengukuran kinerja dilakukan setiap triwulan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja (*kinerjaku.kkp.go.id*), sesuai manual indikator kinerja dan dilengkapi dengan data dukung yang valid.
- 2) Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2024 sebesar 105,13 yang dihitung dari pencapaian 21 indikator kinerja. Pada Triwulan I Tahun 2025 NKO sebesar 116,22 yang dihitung dari pencapaian 2 indikator kinerja yang dapat diukur pada Triwulan I.

c. Pelaporan Kinerja

- 1) Laporan Kinerja telah disusun setiap triwulan dan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal dengan tepat waktu.
- 2) Substansi Laporan Kinerja telah sesuai standar, yaitu mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja dan menginformasikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Perbandingan realisasi kinerja, analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan, jangka menengah, dan tahun-tahun sebelumnya.
 - b) Kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatan.
 - c) Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.

d. Evaluasi Internal

- 1) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilakukan melalui kegiatan penilaian mandiri sesuai Pedoman Penilaian Mandiri Lingkup Sekretariat Jenderal, menggunakan aplikasi *kinerjaku* dan dilakukan oleh sumber daya manusia yang memadai.
- 2) Telah terjadi peningkatan implementasi AKIP dengan melaksanakan seluruh

tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal Tahun 2024.

- 3) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
4. Catatan hasil penilaian mandiri atas evaluasi AKIP Tahun 2024 telah ditindaklanjuti melalui Memorandum Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor 2030/SJ.2/TU.210/VIII/2025 hal Penyampaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi/Catatan Penilaian Mandiri atas Implemetasi AKIP Biro Keuangan dan BMN Tahun 2024 tanggal 13 Agustus 2025.
5. Inovasi yang mendukung perbaikan capaian kinerja organisasi Biro Keuangan dan BMN melalui *dashboard* <https://sites.google.com/view/sicakeb>.
6. Dalam rangka meningkatkan AKIP di Biro Keuangan dan BMN, direkomendasikan kepada Saudara agar melakukan upaya antara lain:
 - a. Meningkatkan capaian kinerja Tahun 2025 lebih baik dari Tahun 2024.
 - b. Melaksanakan pemantauan, pelaporan dan evaluasi capaian kinerja organisasi secara berkala dan terukur.
 - c. Mengembangkan inovasi yang relevan dan mendukung perbaikan capaian kinerja.
 - d. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara berkala terhadap rekomendasi di atas.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Jenderal



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rudy Heriyanto Adi Nugroho

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal
2. Inspektur I

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 8/SJ.3/TU.210/I/2026

Yth. : 1. Kepala Biro dan Pusat lingkup Sekretariat Jenderal
2. Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan
Dari : Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur
Sipil Negara (IP ASN) di lingkungan KKP Triwulan IV/Semester II
Tahun 2025 dan Target Capaian IP ASN KKP Tahun 2026
Tanggal : 04 Januari 2026

Menindaklanjuti Peraturan Menteri PAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029, bersama ini kami sampaikan hasil pengukuran dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin pada Dashboard IP ASN KKP di Portal Pegawai yang berbasis data Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN)/MyASN tanggal 31 Desember 2025, sebagai berikut:

1. **Capaian IKU IP ASN** di lingkungan **KKP** Triwulan IV/Semester II Tahun 2025, sebesar **86,03** (kategori **Tinggi**) terdiri dari kualifikasi 22,63, kompetensi 32,88, kinerja 25,53, dan disiplin 4,99. Target sebesar **82** (kategori **Tinggi**), sehingga prosentase capaian sebesar **104,91%** (melebihi target), terlampir nilai detail pada lampiran;
2. **Capaian IKU IP ASN** di lingkup **Sekretariat Jenderal** Triwulan IV/Semester II Tahun 2025, sebesar **88,37** (kategori **Tinggi**) terdiri dari kualifikasi 22,71, kompetensi 34,47, kinerja 26,18; dan disiplin 5. Target sebesar **82** (kategori **Tinggi**), sehingga prosentase capaian sebesar **107,7%** (melebihi target), terlampir nilai detail pada lampiran;
3. Analisis dan Rekomendasi atas Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan KKP Tahun 2025 yaitu sebagai berikut:
 - a. Surat Sekretaris Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN, Badan Kepegawaian Negara Nomor 15014/B-BM.02.01/SD/C.VII/2025 tanggal 24 Oktober 2025 perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, sehingga **BKN sudah tidak**

melaksanakan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, dikarenakan penerapan **Manajemen Talenta** dimana adanya penggabungan IP ASN dalam penyelenggaraan Manajemen ASN. Hal ini menjadikan IKU IP ASN di Lingkungan KKP tidak dapat menjadi Output Kendali Rendah karena penilaian IP ASN secara mandiri di KKP, tetapi sumber database pengukuran IP ASN KKP tetap dari database Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) dan MyASN;

- b. IP ASN memiliki 4 (empat) dimensi pengukuran yaitu Kualifikasi (bobot 25), Kompetensi (bobot 40), Kinerja (bobot 30), dan Disiplin (bobot 5), dari ke empat dimensi terdapat unsur yang sangat memegang peran penting yaitu Penilaian Kinerja/SKP, karena **predikat SKP** akhir periode (tahun sebelumnya) **dihitung 2 (dua)** kali, pada dimensi Kinerja (bobot 30) dan pada dimensi Kompetensi, predikat SKP mendapatkan bobot 25, sehingga apabila seorang ASN mendapatkan predikat SKP Sangat Baik, IP ASN sudah mendapatkan nilai 55. Hal ini menjadi rekomendasi agar para pengelola SKP, pengelola data pegawai atau IP ASN, sebagai berikut:
 - 1) selalu monitoring nilai predikat SKP seluruh pegawainya, apakah **predikat SKP** di aplikasi eKinerja BKN sudah **sinkronisasi** ke aplikasi **SIASN** BKN;
 - 2) input data **riwayat kinerja** di aplikasi SIASN apabila terdapat pegawai **pindahan** dari luar KKP yang belum menggunakan aplikasi eKinerja BKN;
 - 3) bagi pegawai yang tidak menyusun perencanaan SKP, tidak mengisi rencana aksi, mengisi bukti dukung, mengisi realisasi dan dinilai SKP nya oleh Pimpinan Organisasi **wajib** di monitoring dan dilakukan penilaian SKP untuk menghindari adanya disparitas data kinerja pada aplikasi SIASN.
- c. Dimensi Kualifikasi memiliki bobot 25 dengan melihat level jabatan (struktural, Fungsional Ahli dan Terampil, dan pelaksana) yang memiliki nilai yang berbeda-beda, sehingga perlu adanya monitoring dari pengelola data SIASN untuk verifikasi data jabatan terakhir dan data riwayat pendidikan, saat ini seluruh ASN di lingkungan KKP dapat melihat kondisi data profile pribadi dan data riwayat pribadinya serta kelengkapan data dokumen elektroniknya pada **Portal Pegawai** di aplikasi Portal KKP

4. Upaya Optimalisasi dan menghindari *trafik* sinkronisasi data di akhir penutupan pada tanggal 31 Desember 2026, Saudara dapat menugaskan pengelola data kepegawaian, sebagai berikut:
- monitoring dan mengingatkan seluruh pegawai di unit organisasinya pada **awal triwulan IV 2026** untuk mengupdate data pendidikan dan pelatihan pimpinan bagi pejabat struktural Eselon I, Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV, diklat Fungsional bagi pejabat fungsional ahli dan terampil serta diklat teknis dan diklat 20 JP bagi PNS dan diklat 24 JP bagi PPPK,
 - melakukan updating data penjatuhan hukuman disiplin pada **aplikasi i-dis** BKN di lingkungan KKP;
 - melakukan **pendataan** dan melaporkan ke kami, siapa saja ASN yang **tidak memiliki predikat SKP** tahun 2025;
 - updating data **pencantuman gelar** bagi ASN yang sudah memiliki ijazah pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada aplikasi SIASN.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Dida Daniarsyah

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

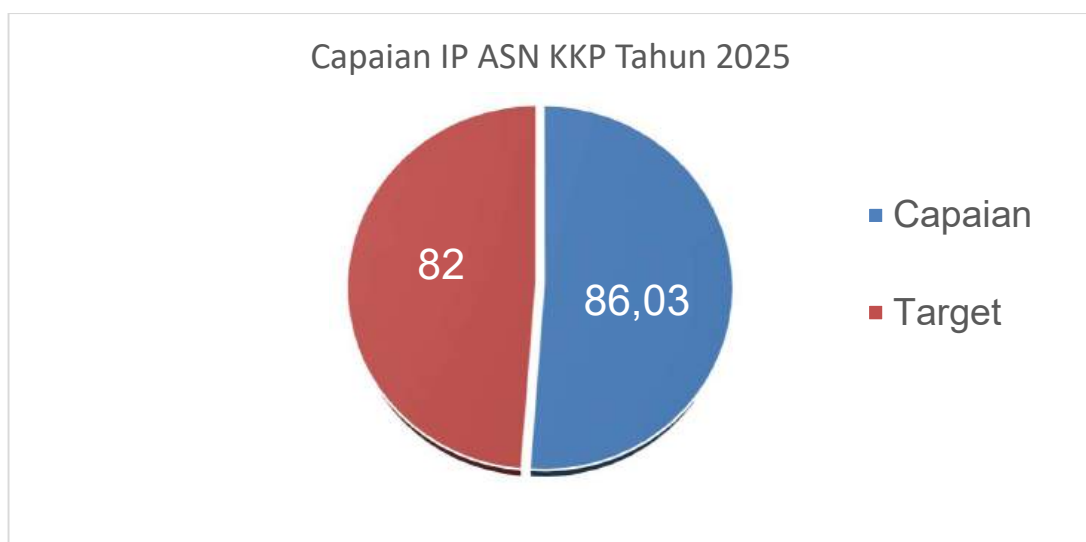
Lampiran

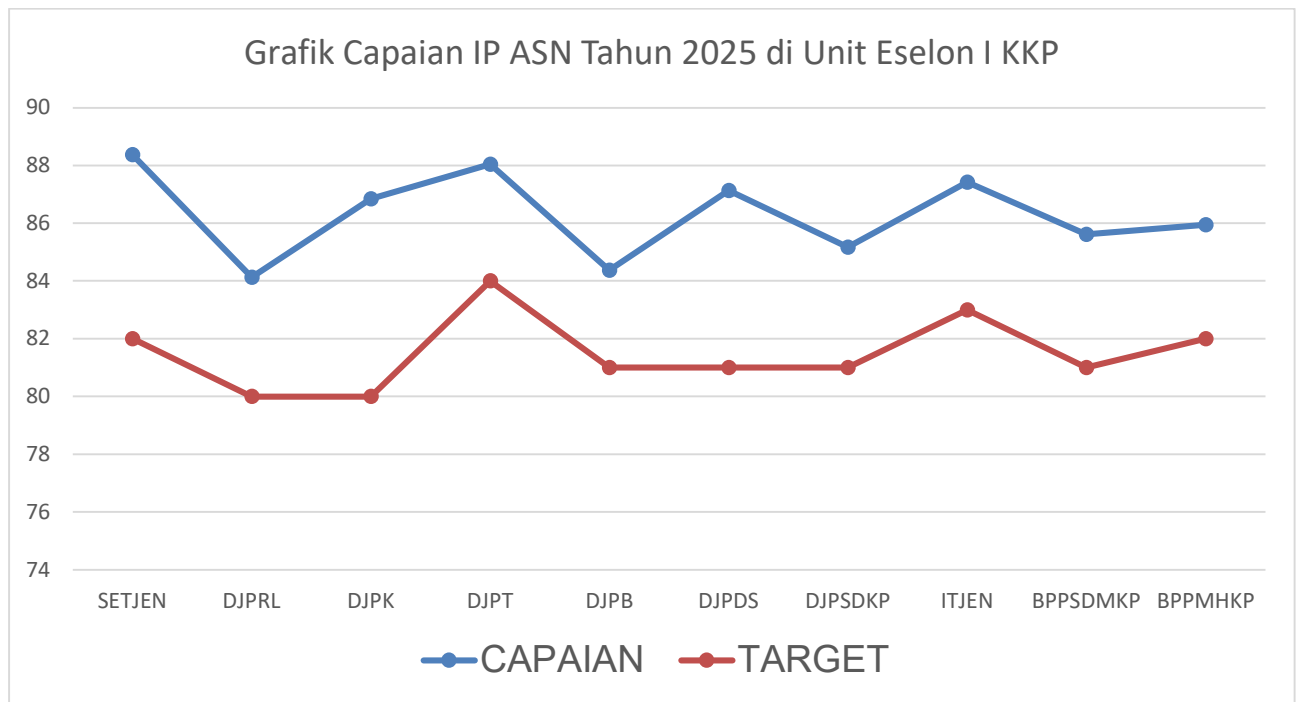
Nomor : 8/SJ.3/TU.140/I/2026

Tanggal : 04 Januari 2026

1. Rekapitulasi Nilai IP ASN di lingkungan KKP Semester II Tahun 2025 berdasarkan Unit Kerja Eselon I dan Dimensi Pengukuran

No.	Unit	Tahun 2025			Target 2026		
		Capaian	Target	Prosentase (%)	Periode Pengukuran	Semester I	Semester II/ Akhir Tahun
1	Setjen	88,37	82	107,76	Semesteran	75	82,5
2	Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	84,13	80	105,16	Semesteran	77	81
3	Ditjen Pengelolaan Kelautan	86,84	80	108,55	Semesteran	77	81
4	Ditjen Perikanan Tangkap	88,04	84	104,80	Semesteran	77	84,5
5	Ditjen Perikanan Budi Daya	84,37	81	104,16	Semesteran	74	81,5
6	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP	87,13	81	107,56	Semesteran	74	81,5
7	Ditjen PSDKP	85,17	81	105,14	Semesteran	74	81,5
8	Inspektorat Jenderal	87,42	83	105,32	Semesteran	76	83,5
9	BPPSDMKP	85,61	81	105,69	Semesteran	74	81,5
10	BPPMHKP	85,94	82	104,74	Semesteran	75	82,5
	IPASN KKP	86,03 (Tinggi)	82 (Tinggi)	104,91	Semesteran	75,3 (Sedang)	82,5 (Tinggi)





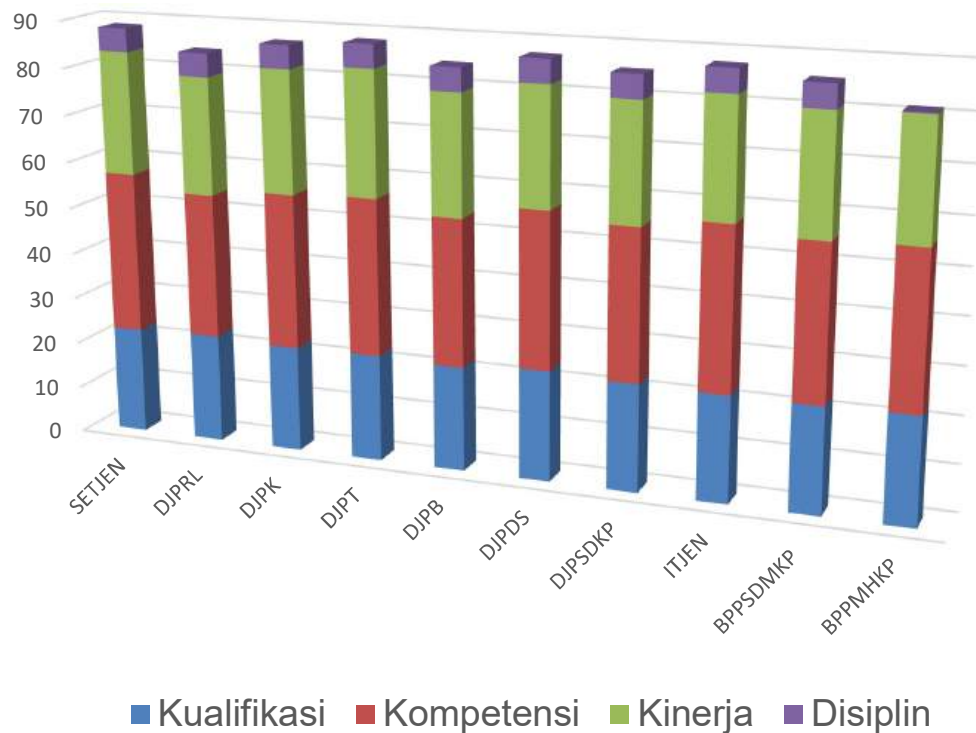
2. Rekapitulasi Nilai IP ASN di lingkungan KKP Semester II Tahun 2025 berdasarkan Unit Kerja Eselon I dan Dimensi Pengukuran

No	Unit Kerja	Komponen IP ASN				Total
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
1	Sekretariat Jenderal	22,71	34,47	26,18	5	88,27
2	Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	23,1	31	25,04	5	84,13
3	Ditjen Pengelolaan Kelautan	22,49	33,16	26,2	4,99	86,84
4	Ditjen Perikanan Tangkap	22,7	33,59	26,76	4,99	88,04
5	Ditjen Perikanan Budi Daya	22,18	31,52	25,68	5	84,37
6	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP	23,45	33,46	25,22	5	87,13
7	Ditjen PSDKP	22,84	32,24	25,1	4,99	85,17
8	Inspektorat Jenderal	22,59	34,68	25,15	5	87,42
9	BPPSDMKP	22,54	32,87	25,2	4,99	85,61
10	BPPMHKP	22,85	33,01	25,1	4,98	85,94
	Total	22,63	32,88	25,53	4,99	86,04 (Tinggi)

Keterangan:

Jumlah ASN yang dihitung sesuai ketentuan sebesar 11.887 ASN KKP, tanpa data BP Batam dan CPNS serta PPPK 2025. Data terakhir diambil pada tanggal 31 Desember 2025. Dashboard Pengukuran IP ASN dapat dilihat pada laman aplikasi Portal Pegawai menu Portal Pegawai.

Grafik IP ASN KKP Tahun 2025 berdasarkan
Dimensi Pengukuran

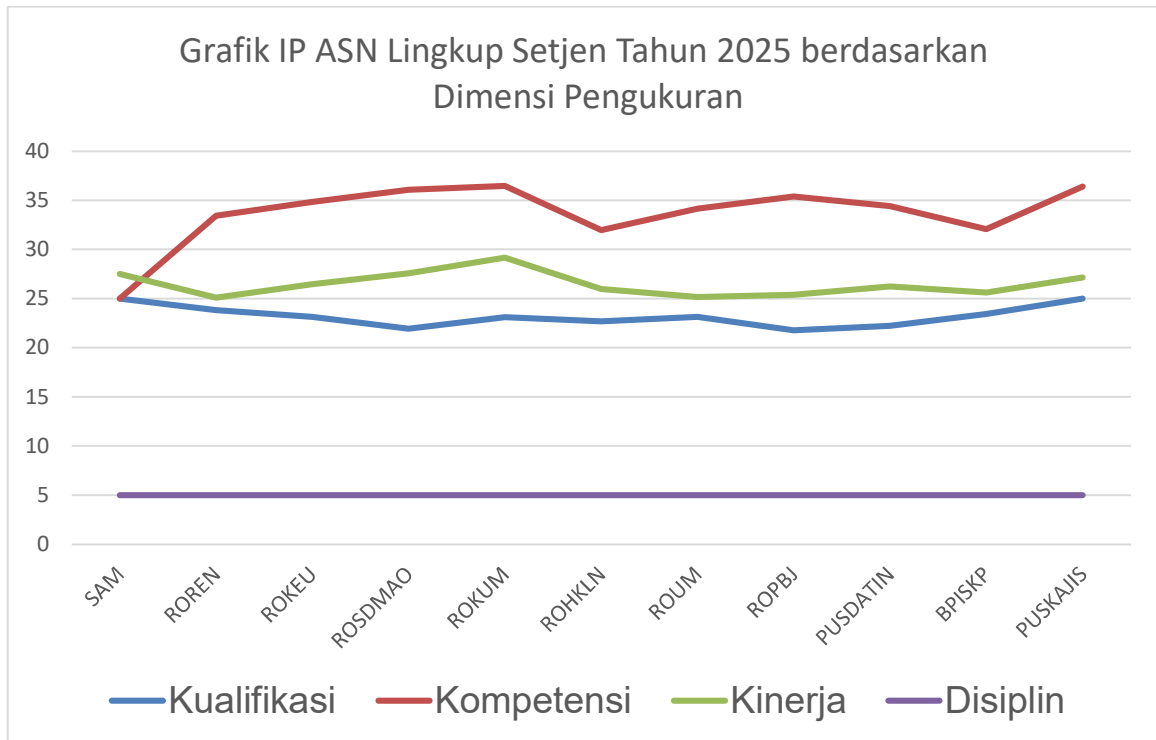


3. Rekapitulasi Nilai IP ASN di lingkup Setjen Semester II Tahun 2025 berdasarkan Unit Kerja Eselon II dan Dimensi Pengukuran

No	Unit Kerja	Komponen IP ASN				Total
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
1	Staf Ahli Menteri	25	25	27,5	5	82,5
2	Biro Perencanaan	23,82	33,44	25,1	5	87,36
3	Biro Keuangan	23,14	34,85	26,47	5	89,46
4	Biro SDMAO	21,93	36,08	27,57	5	90,58
5	Biro Hukum	23,11	36,49	29,19	5	93,78
6	Biro HKLN	22,68	31,98	25,98	5	85,64
7	Biro Umum	23,15	34,15	25,15	5	87,45
8	Biro PBJ	21,78	35,39	25,39	5	87,56
9	Pusdatin	22,22	34,4	26,23	5	87,85
10	BPISKP	23,44	32,06	25,62	5	86,12
11	Puskajis	25	36,39	27,14	5	93,54
	Total	21,71	34,47	26,18	5	88,37 (Tinggi)

Keterangan:

Jumlah Database sebesar 547 ASN lingkup Setjen, tanpa data BP Batam dan CPNS serta PPPK 2025. Data terakhir diambil pada tanggal 31 Desember 2025. Dashboard Pengukuran IP ASN dapat dilihat pada laman aplikasi Portal Pegawai menu Portal Pegawai.



4. Metode Pengukuran IP ASN (PIP ASN) Tahun 2025
Terdapat 4 (empat) komponen dalam Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (PIP ASN) yaitu:

a) Kualifikasi bobot nilai 25

Dimensi	Jabatan	Jenjang Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal diangkat kedalam jabatan	Pendidikan yang diperoleh Pegawai (Bobot)					
				S3	S2	SI/DIV	DIII	DII/DI/SLTA/Sederajat	Dibawah SLTA
Kualifikasi	Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI/ DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Administrator	SI/ DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
	Non Manajerial	Jabatan Fungsional (Keterampilan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
			DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (Keahlian)	SI/ DIV	25	25	20	10	10	10
			S2	25	20	10	10	10	10
		Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10

b) Kompetensi bobot nilai 40

No	Nama Kompetensi	Nilai Kompetensi		
I	Nilai Kinerja			
	Sangat Baik	25		
	Baik	20		
	Butuh Perbaikan	15		
	Kurang	10		
	Sangat Kurang	5		
II	Diklat Struktural	Struktural	Fungsional	Pelaksana
	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	10	-	-
	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-
III	Diklat Fungsional			
	Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	10	-
	Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	0	-
IV	Diklat Teknis			
	Pernah Ikut Diklat Teknis	-	-	10
	Tidak Pernah Ikut Diklat Teknis	-	-	0
III	Diklat 20 JP Tahun berjalan			
	Pernah Ikut Diklat Teknis/Umum total 20 JP	5	5	5
	Tidak Pernah atau tidak cukup total 20 JP Diklat Teknis/Umum	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

c) Kinerja (Nilai SKP Tahun 2024) bobot nilai 30

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

d) Disiplin (riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir), bobot nilai 5

No	Nama Hukuman Disiplin	Nilai
1	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	5
2	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	3
3	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	2
4	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	1

e) Capaian dan Indeks Profesionalitas ASN

No	Kategori	Nilai
1	Sangat Tinggi	91-100
2	Tinggi	81-90
3	Sedang	71-80
4	Rendah	61-70
5	Sangat Rendah	0-60

Rumusan IP ASN KKP sesuai Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

$W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j

$W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k

$W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l

$W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m



Ditandatangani
Secara Elektronik

Dida Daniarsyah

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS

NOMOR 136/SJ.2/RC.610/II/2026

Yth. : 1. Para Kepala Biro
2. Para Kepala Pusat
3. Direktur Lembaga Pengelolaan Modal Usaha KP
4. Kepala BPISDKP

Dari : Kepala Biro Keuangan dan BMN

Hal : Capaian IKU Persentase Penyelesaian Temuan BPK Unit Eselon II
Lingkup Sekretariat Jenderal

Lampiran : Satu Berkas

Tanggal : 12 Januari 2026

Dalam rangka Pengelolaan Kinerja Organisasi berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bersama ini disampaikan Capaian IKU Persentase Penyelesaian Temuan BPK Unit Eselon II Lingkup Sekretariat Jenderal pada Lampiran Nota Dinas.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Sutrisno Subagyo

Lampiran Nota Dinas
Nomor : 136/SJ.2/RC.610/I/2026
Tanggal : 12 Januari 2026

**Persentase Penyelesaian Temuan BPK Unit Eselon II Lingkup
Sekretariat Jenderal**

No	Unit Kerja	Nilai Temuan (Rp)	Nilai Tindak Lanjut Temuan (Rp)	Sisa (Rp)	Persentase Penyelesaian Nilai Temuan (%)
1	Biro Perencanaan	-	-	-	100
2	Biro SDMAO	54.779.662	54.779.662	0	100
3	Biro Hukum	8.262.281	8.262.281	0	100
4	Biro Keuangan dan BMN	-	-	-	100
5	Biro Umum dan PBJ	1.790.413.665	1.790.413.665	0	100
6	Biro HKLN	-	-	-	100
7	Pusdatin	-	-	-	100
8	LPMUKP	31.819.633	31.819.633	0	100
9	BPISDKP	-	-	-	100
10	TP	-	-	-	100
Total		1.885.275.241	1.885.275.241	0	100


Ditandatangani
Secara Elektronik
Sutrisno Subagyo

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS

NOMOR 103/SJ.2/RC.610/I/2026

Yth. : 1. Para Kepala Biro
2. Para Kepala Pusat
3. Direktur Lembaga Pengelolaan Modal Usaha KP
4. Kepala BPISDKP

Dari : Kepala Biro Keuangan dan BMN

Hal : Capaian IKU Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan
Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal Triwulan IV
Tahun 2025

Tanggal : 9 Januari 2025

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2025, bersama ini disampaikan Capaian IKU “Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon II Lingkup Sekretariat Jenderal” Triwulan IV Tahun 2025 sebagai berikut.

1. Realisasi capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal” periode Triwulan IV Tahun 2025 diperoleh sebesar 100% yaitu dari 89 rekomendasi telah ditindaklanjuti secara tuntas sebanyak 89 rekomendasi.
2. Pencapaian ini diperoleh berdasarkan Surat Dinas Inspektur Jenderal Nomor B.272/ITJ/HP.550/XII/2025 Tanggal 23 Desember 2025 Hal Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Periode s.d. Triwulan IV TA 2025 Lingkup Sekretariat Jenderal KKP sebagaimana Surat Dinas Nomor B.272/ITJ/HP.550/XII/2025 Tanggal 23 Desember 2025 dan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 60/ITJ.0/RC.610/I/2026 Hal Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP” Tahun 2025.
3. Capaian IKU dari masing-masing unit Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal Periode Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana tersaji dalam Lampiran.

4. Untuk pelaporan melalui aplikasi Kinerjaku maupun dokumen Laporan Kinerja (LKJ), apabila tidak ada rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti maka capaian Indikator dilaporkan sesuai target yaitu 100%.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

 **Ditandatangani
Secara Elektronik**
Sutrisno Subagyo

Lampiran Nota Dinas
Nomor : 103/SJ.2/RC.610/I/2026
Tanggal : 9 Januari 2025

Data Rekapitulasi Capaian IKU
“Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan
Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal” Triwulan IV Tahun 2025

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
1	Biro Perencanaan	31	31	100%	0	0%
2	Biro SDMAO	12	12	100%	0	0%
3	Biro Hukum	3	3	100%	0	0%
4	Biro Keuangan dan BMN	20	20	100%	0	0%
5	Biro Umum dan PBJ	8	8	100%	0	0%
6	Biro HKLN	0	0	100%	0	0%
7	Pusdatin	7	7	100%	0	0%
8	LPMUKP	3	3	100%	0	0%
9	BPISDKP	5	5	100%	0	0%
Total		89	89	100%	0	0



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Sutrisno Subagyo

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 50/SJ.4/TU.210/I/2026

Yth. : 1. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat Lingkup Sekretariat Jenderal
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan
3. Sekretaris Inspektorat Jenderal

Lampiran : -

Dari : Kepala Biro Hukum

Hal : Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Program
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan Semester II Tahun 2025

Tanggal : 6 Januari 2026

Sehubungan dengan penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan semester II tahun 2025 (Juni sampai dengan Desember), bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025;
- capaian indikator kinerja persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan diperoleh dari perhitungan jumlah peraturan perundang-undangan yang diselesaikan (penyampaian permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Kementerian Hukum atau penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan), dibandingkan dengan jumlah peraturan perundang-undangan yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2024 jo. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2025;
- capaian target program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Tahun 2025 sesuai dengan target kinerja dihitung sebagai berikut:

RANCANGAN PERMEN-KP			RANCANGAN KEPMEN-KP		
No.	Tahapan	Capaian (%)	No	Tahapan	Capaian (%)
1.	Penyampaian rancangan ke Biro Hukum	20	1.	Penyampaian rancangan ke Biro Hukum	20
2.	Analisis sistematika dan materi muatan oleh Biro Hukum	35	2.	Analisis sistematika dan materi muatan oleh Biro Hukum	35
3.	Permohonan masukan/tanggapan	50	3.	Permohonan masukan/tanggapan kepada unit organisasi terkait	50

	kepada unit organisasi terkait				
4.	Pembahasan rancangan	75	4.	Pembahasan rancangan	70
5.	Permohonan harmonisasi rancangan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	100	5.	Permohonan paraf persetujuan pimpinan unit organisasi terkait	85
			6.	Penetapan Menteri	100

4. berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2024 jo. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2025 terdapat 30 (tiga puluh) rancangan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:
- 18 (delapan belas) rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan; dan
 - 12 (duabelas) rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan,
- dimana sampai dengan semester II seluruh rancangan peraturan perundang-undangan telah selesai sebesar **100% (seratus persen)**, dengan **realisasi** sebagai berikut:

Unit Kerja	PERMEN-KP		KEPMEN-KP	
	DIUSULKAN	SELESAI	DIUSULKAN	SELESAI
DITJEN PK	2	2	2	2
DITJEN PT	1	1	2	2
DITJEN PB	2	2	-	-
DITJEN PDSPKP	2	2	-	-
DITJEN PSDKP	-	-	1	1
ITJEN	-	-	-	-
BPPSDMKP	3	3	1	1
BPPMHKP	3	3	-	-
ROREN	2	2	2	2
ROKEU-BMN	-	-	1	1
ROSDMAO	2	2	-	-
ROKUM	-	-	1	1
ROHKLN	-	-	1	1
ROUM-PBJ	1	1	-	-
PUSDATIN	-	-	1	1
TOTAL	18	18	12	12
SUBTOTAL	Dari 30 Usulan Rancangan, 30 Rancangan Telah Selesai			

5. adapun rincian penilaian hasil capaian indikator kinerja persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sampai dengan semester II tahun 2025, sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Target Semester II		Capaian Semester II	
		Per/Kep	Persentase	Per/Kep	Persentase
1.	DITJEN PK	4	100%	4	100%
2.	DITJEN PT	3	100%	3	100%
3.	DITJEN PB	2	100%	2	100%
4.	DITJEN PDSPKP	2	100%	2	100%
5.	DITJEN PSDKP	1	100%	1	100%
6.	ITJEN	-	-	-	-
7.	BPPSDMKP	4	100%	4	100%
8.	BPPMHKP	3	100%	3	100%
9.	ROREN	2	100%	2	100%
10.	ROKEU-BMN	1	100%	1	100%
11.	ROSDMAO	2	100%	2	100%
12.	ROKUM	1	100%	1	100%
13.	ROHKLN	1	100%	1	100%
14.	ROUM-PBJ	1	100%	1	100%
15.	PUSDATIN	1	100%	1	100%

Dalam rangka mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, **Biro Hukum** berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan memberikan pelayanan dengan semangat **#BerbahagiaMelayani** dan **#BerkinerjaSepenuhHati**.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Mahfudiyah

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 65/SJ.6/KU.130/I/2026

Yth. : Para Kepala Biro/Pusat Lingkup Sekretariat Jenderal
Dari : Kepala Biro Umum
Hal : Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2025 Lingkup Satuan Kerja Biro
Umum dan Pengadaan Barang/Jasa
Tanggal : 9 Januari 2026

Sehubungan dengan telah berakhirnya tahun anggaran 2025 serta dalam rangka pelaporan capaian kinerja lingkup Sekretariat Jenderal, bersama ini kami sampaikan realisasi anggaran lingkup Satuan Kerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana terlampir. Sebagai informasi, data realisasi anggaran dimaksud berdasarkan aplikasi Sakti Kementerian Keuangan sampai dengan hari Jumat, 9 Januari 2026 pukul 15.00 WIB.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sofiyanto

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

Lampiran
 Nomor : 65/SJ.6/KU.130/I/2026
 Tanggal : 9 Januari 2026

REALISASI ANGGARAN LINGKUP SATUAN KERJA BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA TA. 2025

UNIT ESELON II	PAGU	BLOKIR	PAGU EFEKTIF	SP2D		
				REALISASI	SISA DANA	%
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d = b - c</i>	<i>e</i>	<i>f = d - e</i>	<i>g</i>
BIRO PERENCANAAN	62.494.539.000	762.845.000	61.731.694.000	60.407.471.363	1.324.222.637	97,85%
BIRO KEUANGAN DAN BMN	3.625.823.000	-	3.625.823.000	3.624.713.561	1.109.439	99,97%
BIRO SDMAO	2.097.327.000	-	2.097.327.000	2.096.849.639	477.361	99,98%
BIRO HUKUM	2.073.387.000	-	2.073.387.000	2.071.670.301	1.716.699	99,92%
BIRO HUMAS DAN KLN	11.711.588.000	4.701.857.000	7.009.731.000	6.920.130.894	89.600.106	98,72%
BIRO UMUM	316.512.546.000	24.121.096.000	292.391.450.000	292.069.260.879	322.189.121	99,89%
BIRO PBJ	1.171.936.000	-	1.171.936.000	1.161.605.466	10.330.534	99,12%
BADAN OTORITA PPJ	16.893.018.000	15.650.066.000	1.242.952.000	791.959.438	450.992.562	63,72%
PUSDATIN	156.037.602.000	10.000.000.000	146.037.602.000	145.939.649.180	97.952.820	99,93%
TOTAL	572.617.766.000	55.235.864.000	517.381.902.000	515.083.310.721	2.298.591.279	99,56%

Catatan:

1. Data berdasarkan aplikasi Sakti Kementerian Keuangan per hari Jumat, 9 Januari 2026 pukul 15.00 WIB
2. Alokasi anggaran Pusat Kebijakan Strategis masih menjadi satu kesatuan dengan Biro Perencanaan
3. Realisasi berdasarkan Pagu Efektif

Kepala Biro Umum,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sofiyanto